

# GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA

---



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA





# GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA



# **GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA**

---

## **PENGARAH**

Hilmar Farid  
(Direktur Jenderal Kebudayaan)

Triana Wulandari  
(Direktur Sejarah)

## **NARASUMBER**

Suharja, Mohammad Iskandar, Mirwan Andan

## **EDITOR**

Mukhlis PaEni, Kasijanto Sastrodinomo

## **PEMBACA UTAMA**

Anhar Gonggong, Susanto Zuhdi, Triana Wulandari

## **PENULIS**

Andi Lili Evita, Helen, Hendi Johari,  
I Gusti Agung Ayu Ratih  
Linda Sunarti, Martin Sitompul,  
Raisa Kamila, Taufik Ahmad

## **SEKRETARIAT DAN PRODUKSI**

Tirmizi, Isak Purba, Bariyo, Haryanto  
Maemunah, Dwi Artiningsih  
Budi Harjo Sayoga, Esti Warastika, Martina Safitry,  
Dirga Fawakih

## **TATA LETAK DAN GRAFIS**

Rawan Kurniawan, M Abduh Husain

## **PENERBIT:**

Direktorat Sejarah  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan  
Jakarta 10270  
Tlp/Fax: 021-572504  
2017

ISBN: 978-602-1289-72-3

# SAMBUTAN

---

## Direktur Sejarah

Dalam sejarah perjalanan bangsa, Indonesia telah melahirkan banyak tokoh yang kiprah dan pemikirannya tetap hidup, menginspirasi dan relevan hingga kini. Mereka adalah para tokoh yang dengan gigih berjuang menegakkan kedaulatan bangsa. Kisah perjuangan mereka penting untuk dicatat dan diabadikan sebagai bahan inspirasi generasi bangsa kini, dan akan datang, agar generasi bangsa yang tumbuh kelak tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter. Oleh karena itu, dalam upaya mengabadikan nilai-nilai inspiratif para tokoh pahlawan tersebut Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan penulisan sejarah pahlawan nasional.

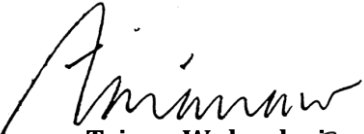
Kisah pahlawan nasional secara umum telah banyak ditulis. Namun penulisan kisah pahlawan nasional kali ini akan menekankan peranan tokoh gubernur pertama Republik Indonesia yang menjabat pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para tokoh tersebut adalah Teuku Mohammad Hasan (Sumatra), Soetardjo Kartohadikoesoemo (Jawa Barat), R. Pandji Soeroso (Jawa Tengah), R. M. Soerjo (Jawa Timur), Ir. Pangeran M. Noor (Kalimantan), I Gusti Ketut Pudja (Sunda Kecil), G.S.S.J. Ratulangi (Sulawesi) dan Johannes Latuharhary (Maluku).

Sebagai gubernur pertama pascaproklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, mereka dihadapkan pada tantangan dan berbagai persoalan besar, baik lokal maupun nasional. Bayangan kembalinya kolonialisme, kondisi politik nasional dan lokal yang belum stabil, sistem hukum dan ketatanegaraan yang belum kuat, menjadi tantangan besar bagi mereka dalam memerintah negara yang baru terbentuk. Oleh karena itu, menarik untuk diungkap bagaimana para tokoh merespon tantangan, menjawab berbagai persoalan dan menghadapi krisis tersebut. Selain peranan mereka

dalam kancah politik lokal dan nasional, buku ini menjelaskan sisi humanis tokoh yang penting sebagai inspirasi.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat dalam proses penyusunan buku ini. Kepada para penulis yang dengan gigih dan tidak kenal lelah mendulang sumber untuk menghasilkan historiografi yang tidak hanya kuat fakta, namun juga menarik untuk dibaca. Kepada para editor yang tidak bosan memberikan masukan dan arahan, serta mencermati kata demi kata guna tercapainya kedekatan buku ini dengan kesempurnaan. Kami berharap buku ini bermanfaat sebagai teladan bagi generasi muda dan pemimpin bangsa.

**Direktur Sejarah**



**Triana Wulandari<sup>2</sup>**

# SAMBUTAN

---

## Direktur Jenderal Kebudayaan

Periode 1945-1949 adalah tahun-tahun yang sangat menentukan dalam sejarah Indonesia. Dalam periode itulah berbagai unsur yang membentuk imajinasi kebangsaan tampil ke permukaan. Sebagai negara-bangsa yang baru dibentuk lewat api revolusi kemerdekaan, Indonesia mesti berhadapan dengan berbagai usaha kontra-revolusi yang datang dalam wujud serbuan tentara NICA dalam dua gelombang besar agresi militer Belanda. Situasi yang dihadapi kekuatan pro-Republik sungguh pelik.

Namun gejala revolusi itu justru menempa pemimpin-pemimpin handal, berdedikasi tinggi yang siap berkorban demi bangsa dan negara. Buku ini beranjak dari suatu gagasan untuk melihat kiprah para Gubernur sebagai pemimpin daerah di tengah kecamuk revolusi yang hendak meletakkan dasar yang sehat bagi negara Indonesia merdeka. Para Gubernur ini menghadapi beragam persoalan dengan segala kompleksitas daerah masing-masing. Mereka tidak hanya dituntut untuk melawan kepentingan Belanda yang ingin menancapkan kembali kekuasaannya dan memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Mereka juga mesti berhadapan dengan otoritas regional yang saling berkontestasi dan berebut pengaruh. Para Gubernur pertama ini secara nyata menghadapi penetrasi NICA di berbagai tempat di seluruh Nusantara. Bahkan, tidak jarang juga mereka menghadapi penolakan-penolakan dari kelompok sosial tertentu yang masih menginginkan kehadiran Belanda.

Membaca kiprah gubernur-gubernur pertama dengan segala persoalan yang dihadapinya, dan sejumlah gagasan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, menyadarkan kita betapa periode ini dipenuhi tantangan dan rintangan. Menjadi Gubernur pada periode revolusi berarti siap-sedia merelakan kehidupan pribadi,

mengorbankan jiwa dan raga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan permenungan bagi kita semua serta generasi muda bahwa dalam sejarah Indonesia, pemimpin yang berkarakter dapat lahir dari situasi yang sulit, penuh tantangan dan rintangan.

Semoga buku ini dapat merawat etos kepemimpinan dan semangat rela berkorban demi kepentingan rakyat yang menghidupi para gubernur pertama sehingga dapat kita teladani bersama.

**Direktur Jenderal Kebudayaan**



**Hilmar Farid**

# DAFTAR ISI

---

SAMBUTAN DIREKTUR SEJARAH	i
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	iii
DAFTAR ISI	v
PENDAHULUAN	1
TEUKU MOHAMMAD HASAN Gubernur Pertama dan Terakhir Sumatera	7
SOETARDJO KARTOHADIKOESOEMO Anak Priayi Mengabdikan Bangsa	47
RADEN PANDJI SOEROSO Gubernur Jawa Tengah Pertama	85
R.M.T.A. SOERJO Gubernur di Tengah Perang	119
PANGERAN MOHAMMAD NOOR Imajinasi Kebangsaan di Kalimantan	163
I GUSTI KETUT PUDJA Sang “Kusir” dan Riwayat Sunda Kecil	199
G.S.S.J. RATULANGI Gubernur di Pengasingan	261
JOHANNES LATUHARHARY Hari-hari Membangun Provinsi	289

PENUTUP	319
DAFTAR PUSTAKA	323



Suasana Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)  
(Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI)





# PENDAHULUAN

---

Dua hari setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 diadakan sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) secara berturut-turut. Pada sidang hari pertama, 18 Agustus, diawali dengan ketegangan menjelang pembukaan. Kelompok pemuda menghendaki agar nama PPKI sebaiknya tidak digunakan karena institusi PPKI dianggap sebagai bentukan Jepang yang sesungguhnya tidak dibutuhkan lagi sejak Indonesia merdeka. Oleh sebab itu setelah merdeka, bayang-bayang Jepang harus dihapus. Kelompok pemuda yang terdiri atas Chairul Soleh, Wikana, Sukarni, juga mendesak agar PPKI diganti menjadi KNI atau Komite Nasional Indonesia.

Walau demikian Bung Karno dan Bung Hatta tidak menghiraukan usulan itu dan terus melakukan sidang tanpa perubahan istilah PPKI menjadi KNI. Sidang hari pertama itu mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar negara, dan mengangkat Ir. Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia, dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Pada sidang kedua PPKI esok harinya, suasana sedikit terganggu karena sebelum sidang berlangsung Jenderal Yamamoto menyampaikan sikap resmi Pemerintah Jepang bahwa kehadiran tentara Jepang di Indonesia saat itu hanyalah berstatus selaku penjaga *status quo*, dan tidak lagi memberi bantuan terhadap pemenuhan janji kemerdekaan Indonesia. Atas sikap itu kedua

pemimpin Indonesia, Sukarno dan Hatta, menyampaikan sikap dan pendiriannya disertai harapan agar tentara Jepang tidak menghalang-halangi pelaksanaan kemerdekaan karena segala risiko atas proklamasi itu akan menjadi tanggung jawab rakyat Indonesia.

Maka, pada sidang hari kedua itu pula institusi PPKI yang berbau Jepang diganti menjadi sidang KNI. Dengan demikian, sidang hari kedua PPKI itu menjadi sidang hari pertama KNI. Sidang itu secara khusus membahas pembagian daerah bekas wilayah kekuasaan Hindia Belanda yang telah berganti menjadi wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Ditetapkan bahwa wilayah Republik Indonesia ketika itu dibagi menjadi delapan Provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan, yang dipimpin oleh gubernur.

Pada sidang tersebut sekaligus ditunjuk seorang gubernur yang akan memimpin wilayah masing-masing. Kedelapan gubernur dan wilayah kerjanya itu adalah Mr. Teuku Mohammad Hasan (Sumatera), Soetardjo Kartohadikoesoemo (Jawa Barat), Raden Panji Soeroso (Jawa Tengah), Raden Tumenggung Adipati Arjo Soerjo (Jawa Timur), Mr. I Gusti Ketut Pudja (Sunda Kecil), Mr. Latuharhary (Maluku), Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi (Sulawesi), dan Ir. Pangeran Mohammad Noor (Kalimantan). [Sebagai catatan kecil, seluruh nama diri para gubernur tersebut menggunakan Ejaan Van Ophuysen yang berlaku pada saat itu.]

Hampir semua gubernur yang baru diangkat tersebut adalah tokoh yang mewakili daerah dan aktivis pergerakan nasional di daerahnya. Selain itu tampil pula tokoh kharismatik lokal, berpendidikan Barat, dan dari golongan bangsawan lokal, amtenar. Terlihat secara jelas bahwa seluruh tokoh itu memiliki silsilah geneologi kelas atas dalam masyarakatnya. Dengan kata lain, mereka adalah bagian dari lapisan elite masing-masing wilayahnya.

Pengangkatan tokoh tersebut menandai bahwa mobilitas horisontal pada era awal Republik belum berlaku seutuhnya. Di tengah situasi yang masih “serbadarurat” setelah kemerdekaan, hal tersebut mudah dipahami. Namun, bagaimanapun, kualitas pribadi tokoh-tokoh pemimpin daerah yang terpilih tersebut tetap menjadi

pertimbangan sangat penting sebagai persyaratan utama untuk menduduki jabatannya. Lebih jauh, pertimbangan kualitas itu juga tampak berlaku dalam rekrutmen aparatur negara yang lebih tinggi yaitu Menteri. Para menteri yang duduk dalam kabinet pertama Republik adalah mereka yang pernah malang-melintang dalam pelbagai aktivitas dan jabatan pada masa sebelumnya.

Delapan Gubernur yang baru diangkat tersebut adalah tokoh-tokoh pergerakan yang mewakili daerah masing-masing. Mereka adalah pelaku sejarah dan sekaligus saksi sejarah yang “otentik” karena mereka datang secara khusus ke Jakarta untuk mengikuti sidang PPKI dan secara langsung mengikuti upacara Proklamasi di Pengangsaan Timur pada 17 Agustus 1945.

Kedelapan gubernur bukanlah orang baru dalam politik pergerakan dan secara pribadi memiliki hubungan yang erat dengan kedua tokoh nasional Sukarno dan Hatta. Oleh karena itu penunjukan para gubernur untuk itu bukanlah sebuah kebetulan melainkan sudah melalui perjalanan sejarah pergerakan itu sendiri. Bisa dibayangkan bahwa kehadirannya di daerah masing-masing akan berhadapan dengan perjuangan yang berat dan penuh risiko. Bagaimana mereka harus menata sebuah birokrasi yang berganti 180 derajat, dengan aparatur yang harus berganti baju dan bagaimana membiayainya. Keadaan yang dihadapi para gubernur baru ini, sesungguhnya adalah gambaran yang serupa yang terjadi juga di tingkat pusat.

Selain itu, mereka juga masih berhadapan dengan kelompok-kelompok yang anti- Republik, terutama kekuatan asing—Belanda dan Jepang—yang masih bercokol pada awal Proklamasi Indonesia. Gubernur Ratulangi, misalnya, yang baru tiba di Makassar untuk menjalankan tugasnya selaku Gubernur Sulawesi, dengan mudah ditangkap Belanda. Di Makassar ia pun tinggal di sebuah hotel yang konon disewanya secara pribadi. Selama enam bulan bertugas di Makassar, Gubernur Ratulangi hanya sempat menanamkan dasar-dasar birokrasi sebagai modal awal pemerintahan di Provinsi Sulawesi. Tidak ada satu pun perlawanan yang dilakukan oleh pihak Republik ketika ia ditangkap begitu saja oleh penguasa Belanda dan

diasingkan ke Papua. Ratulangi adalah seorang pejabat Republik Indonesia yang pertama diasingkan justru bukan pada era penjajahan oleh pihak yang sesungguhnya secara *de jure* tidak berhak lagi atas Republik Indonesia.

Peristiwa itu memperlihatkan bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur dalam hal penanganan negara pasca-Proklamasi. Perbedaan yang terjadi khususnya setelah Persetujuan Linggarjati (1947), terutama antara Sumatera, Jawa dan Madura dengan Kalimantan, Bali atau Sunda Kecil, Sulawesi, Maluku dan Papua, yang justru dalam perjanjian Linggarjati merupakan “wilayah kedaulatan” Belanda. Hal itulah yang menyulitkan posisi gubernur-gubernur di timur atau di luar Jawa dan wilayah barat.

Bisa dibayangkan betapa gubernur dan tokoh-tokoh Republik di luar Jawa, Sumatera dan Madura, ditinggalkan dan bahkan diabaikan oleh negara Republik yang berdiri di Jawa, Sumatera dan Madura. Keadaan itu tidak dapat dihindari dan merupakan realitas bahwa masih terdapat bermacam kelompok pro-Belanda yang masih memiliki kekuatan cukup besar dan memiliki agenda mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia setelah kekalahan Jepang dalam perang dunia. Kekuatan anti-Republik itulah yang menjadi musuh utama yang sangat berbahaya karena mereka umumnya adalah bangsa sendiri. Salah satu perjuangan berat dalam mempertahankan kemerdekaan di luar Jawa, Sumatera dan Madura, adalah perjuangan melawan bangsa sendiri.

Dinamika perjuangan delapan gubernur pertama Indonesia tersebut sesungguhnya adalah potret perjuangan yang sangat berat dalam mewujudkan apa yang kita kenal sebagai Indonesia dewasa ini.

**Mukhlis PaEni**

---

# TEUKU MOHAMMAD HASAN

---





# TEUKU MOHAMMAD HASAN

## GUBERNUR PERTAMA DAN TERAKHIR SUMATERA

RAISA KAMILA

Umumnya, sangat sedikit orang di Aceh atau Medan yang mengetahui peran dan asal-usul Mr. Teuku Mohammad Hasan, gubernur pertama sekaligus terakhir Sumatera. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa gelar 'Mr' merujuk pada status kewarganegaraan atau gelar yang diberikan oleh pihak asing. Sedikit yang tahu bahwa Sumatera pada suatu masa pernah dipimpin secara terpusat dari Medan oleh seorang putra Aceh yang memperoleh pendidikan tinggi di Negeri Belanda hingga mendapat gelar Meester in Rechten yang tersemat di depan namanya.

Jejak langkah Muhammad Hasan bisa ditelusuri mulai dari Desa Peukan Set, yang pada saat itu merupakan bagian dari *landschap* Pineung di *afdeeling* Pidie, Aceh. Ia lahir di sana pada 1906. Ayahnya, Teuku Bintara Pineung Ibrahim, adalah *uleebalang* atau penguasa lokal wilayah Pineung, Pidie. Ibunya, Cut Manyak, adalah putri dari *uleebalang* di wilayah Keumangan, Pidie, dan merupakan keturunan Hadrami dari Yaman. Sebagian besar masa kecil Hasan dihabiskan di kampungnya, Lampoh Saka, Sigli.

Statusnya sebagai anak *uleebalang* membuat Hasan memperoleh kesempatan yang berbeda dari anak-anak Aceh lainnya. Hasan menjalani pendidikan secara formal sekaligus informal. Di pagi hari, ia mengikuti pendidikan di sekolah rakyat (*volkschool*) di Lampoh Saka. Sementara di malam hari, ia mengikuti pendidikan agama yang diadakan di balai pengajian milik Teungku Alibasyah, wakil *kadhi* (hakim agama) di *landschap* Pineung. Hasan hanya



bertahan selama dua tahun di *volkschool*, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah Belanda, *Europeesche Lagere School (ELS)*, di Kota Sigli pada 1917. Ini adalah sekolah khusus bagi anak-anak bangsawan dan orang-orang terkemuka. Status ayahnya sebagai *uleebalang* membuat Hasan diterima masuk di sekolah ini. Sebagai satu dari sedikit pelajar bumiputra Aceh, selama tujuh tahun di ELS, Hasan juga mulai belajar bergaul dengan anak-anak Belanda, Indo, Manado dan Ambon.

Selain keseharian di sekolah, Hasan juga dididik oleh ayahnya untuk bertani dan berburu. Bagi kaum *uleebalang*, berburu adalah kegiatan yang menyerupai tradisi. Hasan dilatih oleh ayahnya untuk berburu dengan senapan dan diajari membuat peluru sendiri. Suatu kali, Hasan pernah ikut membantu menembak burung-burung elang yang kerap memangsa anak-anak ayam milik orang-orang di kampung. Kemampuannya berburu dikagumi oleh orang-orang di kampung. Berkat bantuannya mengatasi serangan burung elang, Hasan diberi hadiah seekor ayam kampung. Ia tidak hanya cemerlang secara akademis, namun juga pandai bergaul dengan berbagai kalangan.

Dalam memoarnya, Hasan menyebutkan bahwa secara kebetulan ia memperoleh kesempatan mengikuti ujian sekolah tinggi di Batavia. Ia diterima di sekolah itu dan berarti harus meninggalkan rumah masa kecilnya pada 1924. Sebelum meninggalkan kampung, Hasan menikah dengan Pocut Hijo, anak dari adik bungsu ayahnya. Mereka menikah di Kuta Tuha, persisnya di rumah pamannya, Teuku Manyak alias Teuku di Tiba. Orang-orang di kampung itu percaya, siapa pun yang menikah di Kuta Tuha kelak menjadi orang yang terkemuka. Dari tempat itulah, jalan hidup Teuku Mohammad Hasan menuju ke arah yang berbeda agaknya tidak pernah terbayang sebelumnya.

Setelah berlayar selama tiga hari, Hasan tiba di Tanjong Priok dan menempati satu kamar di asrama Yayasan Pieterzoon Coen yang telah dipesankan oleh asisten residen Belanda di Sigli. Pada waktu itu, asrama itu menjadi persinggahan bagi para pelajar yang ingin

menuntut ilmu di Batavia. Hal pertama yang dilakukan Hasan selama di rantau adalah mengikuti ujian masuk di Koningin Wilhelmina School dan memilih jurusan teknik perairan (*waterbouwkunde*) hingga dinyatakan lulus. Selama masa belajar di KWS, Hasan sering terlibat kerja lapangan dan memiliki banyak teman yang rutin menghabiskan akhir pekan bersama. Pada hari-hari biasa, asrama ditutup pada jam 11 malam, sedangkan pada akhir pekan, murid-murid diperbolehkan berekreasi hingga pukul satu dinihari. Bersama teman-temannya itu, Hasan bersepeda dari asrama menonton film di Cikini.

Dari teman-teman asrama pula, Hasan memperoleh pengetahuan yang tidak dipelajari di KWS. Beberapa temannya di MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) biasa meminjamkan buku-buku bahasa Inggris, Prancis, Jerman, hitung dagang, sejarah dan botani kepada Hasan. Ia menikmati hal-hal baru itu dan membiarkan waktu untuk olahraga tersita habis. Setelah tiga tahun tinggal di asrama, Hasan mulai berpikir melanjutkan pendidikan ke MULO. Pertimbangannya, jika ia “hanya” lulus dari KWS, kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi akan terbatas karena ia diwajibkan kerja terlebih dulu. Sementara jika ia bisa lulus dari MULO, ia bisa melanjutkan ke AMS (Algemeene Middlebare School) dan berlanjut ke perguruan tinggi. Karena prestasinya di KWS cukup membanggakan, Hasan diperbolehkan mengikuti ujian MULO oleh kepala asrama dan direktur KWS. Namun, pada saat itu tidak ada penerimaan murid baru untuk MULO di Batavia. Hasan kemudian mengikuti ujian masuk MULO Douwes Dekker di Bandung dan dinyatakan lulus.

Setelah memperoleh ijazah dari MULO, Hasan mempertimbangkan meninggalkan pendidikannya di KWS dan segera meneruskan ke AMS. Namun, penasihat pendidikan di sekolahnya, Duyvetter, menyarankan Hasan agar menyelesaikan pendidikannya di KWS. Kata sang penasihat, segala pekerjaan pada dasarnya mulia. Pada 1928, Hasan mengikuti ujian akhir di KWS dan dinyatakan lulus dengan peringkat terbaik. Berbekal ijazah dari

MULO dan KWS, Hasan mendaftarkan diri ke AMS di Batavia dan lulus pada 1929 dengan prestasi terbaik, terutama untuk pelajaran Aljabar.

Dengan pencapaian akademik yang baik, masa depan Hasan terbentang luas. Melalui diskusi dengan Teuku Hanafiah, sesama putra *uleebalang* Aceh yang tengah belajar di RHS (Rechtshoogeschool) di Batavia, Hasan pun tertarik ingin belajar hukum. Jelaslah Hanafiah telah mempengaruhi Hasan ketika memilih jurusan itu. Dengan “provokatif” Hanafiah mengatakan jika Hasan memilih jurusan teknik dan menjadi insinyur yang hebat, ia “hanya” akan menghasilkan jembatan. Bila memilih sastra, ia akan dikenang karena syair-syair yang indah. Namun, bila memilih ilmu hukum, hasilnya adalah kemerdekaan bagi Indonesia. Demikianlah, diskusi bersama Hanafiah itu memberi kesan yang sangat mendalam bagi Hasan, seperti yang dikenang dalam memoarnya, “. . . bila memilih ilmu hukum maka buah tangan saya, menurut Teuku Hanafiah itu, adalah Indonesia Merdeka! Alangkah hebatnya, kata T. Hanafiah dengan mata berbinar-binar.”<sup>1</sup>

Dengan semangat, Hasan, karena pengaruh Hanafiah itu, melanjutkan pendidikan di RHS. Pada 1930, ia lulus ujian kandidat I dan berselang setahun lulus kandidat II dan memperoleh ijazah Sarjana Muda. Selanjutnya, pada pengujung 1931, Hasan berlayar menuju Negeri Belanda. Sebelum berangkat, ia sempatkan pulang ke rumah masa kecilnya di Lampoh Saka, berpamitan dengan keluarganya. Ia juga berpamitan dengan Gubernur Aceh, Dr. Van Aken, di Kutaraja. Istri, anak, ayah dan ibu beserta kerabat *uleebalang* lain seperti Teuku Hasan Glumpang Payung ikut mengantar kepergian Hasan di Pelabuhan Sabang.

Di atas kapal Willem Rujs menuju Negeri Belanda, Hasan berkenalan dengan sesama perantau dari Aceh, Teuku Tahir, yang akan melanjutkan pendidikan teknik di Delft. Tiba di Negeri Belanda, dengan tujuan pertama Den Haag, Hasan dan Tahir disambut mahasiswa asal Aceh yaitu Teuku A. Hamid, Teuku Nyak Arif, dan Anwar Ahmad. Dalam tempo sehari, Hasan diberi panduan tentang

kehidupan di Negeri Belanda dan diperkenalkan dengan lingkungan kampus Universiteit Leiden, yang berjarak sekitar 16 kilometer dari Den Haag. Tidak berselang lama, Hasan pindah ke Leiden, indekos di Schelpenkade 49 yang hanya perlu waktu sekitar 10 menit ke kampus.

Di Universiteit (atau Rijksuniversiteit) Leiden, Hasan mendaftarkan diri di jurusan *Indisch Recht* atau Hukum Hindia Belanda. Hasan boleh dikatakan “beruntung” karena ia berkesempatan mendapat ilmu langsung dari pakar hukum dan kebudayaan koloni yang sangat dikenal pada waktu itu seperti Van Vollenhoven, Cleverings, Van den Berg, Kern, dan Snouck Hurgronje. Ia memperoleh materi berbagai topik, mulai dari hukum adat, sejarah Islam, bahasa Melayu, Bahasa Arab dan ilmu tafsir serta analisa surat kabar Arab.

Sebagai mahasiswa, Hasan rajin mengikuti diskusi yang sering digelar Perhimpunan Indonesia (PI), meskipun ia tidak menjadi anggota tetap organisasi mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda itu. Kala itu, PI dipimpin oleh Achmad Subardjo Djojoadisurjo, dan menerbitkan majalah *Indonesia Merdeka*. Pengalaman mengikuti diskusi yang berpindah-pindah lokasi, membuat Hasan berkenalan dengan Sjahrir, Mohammad Hatta, Mariah Ulfah, Rustam Effendi, Darsono dan Soumokil. Oleh teman-temannya di PI, Hasan dijuluki sebagai “profesor” karena giat belajar dan berpembawaan tenang. Dalam memoarnya, Hasan menulis bahwa aktivitasnya itu terdengar hingga ke Gubernur Van Aken dan asisten residen di Pidie, Jongejans. Ia menulis surat kepada kedua pejabat kolonial itu,

Selanjutnya J. Jongejans menulis dan mengajak supaya orang Indonesia bekerja sama dengan orang Belanda untuk kepentingan Indonesia. Waktu itu saya membaca kata-kata “untuk kepentingan Indonesia,” maka hal ini bagaikan kain merah bagi banteng. Sehubungan dengan surat itu, saya membalas surat asisten residen Jongejans sebagai berikut “bekerja sama dengan Belanda untuk kepentingan Indonesia adalah tidak mungkin.” Misalnya tentang tukang jual ikan tidak mungkin bekerjasama dengan Uleebalang

yang memegang kekuasaan. Demikian pula tidak mungkin orang Indonesia bekerja sama dengan orang Belanda untuk kepentingan Indonesia. Selama Belanda berkuasa di Indonesia semuanya dilakukan untuk kepentingan Belanda.<sup>2</sup>

Bisa dimengerti bila keterlibatannya dengan aktivitas PI telah menebalkan kesadaran Hasan terhadap rasa kebangsaannya. Diskusi-diskusi politik yang diikutinya menumbuhkan keberpihakannya pada kemerdekaan Indonesia. Di kemudian hari, pengalaman intelektual selama belajar di negeri jauh itu telah “menggiring” minat Hasan terjun ke kancah politik pemerintahan setelah kemerdekaan.

Pada pertengahan 1933, Hasan mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir di Fakultas Hukum. Ia diwajibkan mempelajari diktat-diktat, dan menyaksikan ujian-ujian teman sejurusan. Setelah dinyatakan lulus dalam mata-mata kuliah hukum adat, hukum dagang dan hukum acara perdata, Hasan menghadapi ujian akhir pada November 1933 di hadapan komite sidang terbuka yang disaksikan oleh teman-teman dari Indonesia dan Belanda. Sebelum memasuki musim dingin, Teuku Mohammad Hasan kembali ke Aceh dengan gelar *meester in de rechten*.

## **PERJALANAN POLITIK DAN BABAK BARU DI SUMATERA**

Hasan kembali ke Aceh pada 1934. Di Pelabuhan Ulee Lheu, ia dijemput sanak keluarganya lalu singgah di rumah Teuku Mohammad Hasan Gluempang Payung atau Hasan Dik sebelum menemui Gubernur Aceh Van Aken. Dari pertemuan itu, Hasan diberitahu bahwa, ia tidak akan melanjutkan pekerjaan ayahnya sebagai *uleebalang*, melainkan akan ditugaskan sebagai pegawai pemerintah di Batavia. Namun sebelum itu, Hasan disarankan pulang terlebih dulu ke rumah istrinya di Kuta Tuha.

Istrinya, Pocut Hijo, dan anaknya, Nurul Hayati telah menanti di rumah. Para tetua di kampung menyiapkan prosesi *peusijuek* atau menepung tawari Hasan untuk memberkati kedatangannya dari

Belanda. Orang di kampung datang berduyun-duyun ingin mendengar cerita Hasan tentang pengalamannya di Eropa. Para pemuka agama di Aceh saat itu, seperti Tengku Daud Beureueh, Habib Yahya Lampoh Leupe dan M. Hasan El Muhammady, juga datang bertemu dan berdiskusi mengenai tasawuf dengan Hasan. Pada waktu itu pula, Hasan berkenalan dengan para *uleebalang* lain yang tinggal di sekitar Pidie, seperti Teuku Haji Ibrahim, Teuku Raja Keucik, Teuku Gade Aron, Teuku Pakeh Mahmud, Teuku Hasan Keumala dan Teuku Radja Abdullah Tjumbo. Agaknya tidak ada seorang pun, termasuk Hasan, yang membayangkan bahwa kedua kelompok elite sosial tersebut akan mengalami benturan setelah kemerdekaan.

Pecahnya Perang Dunia II dan kedatangan Jepang ke Hindia Belanda mengguncang tatanan sosial, politik dan ekonomi yang telah lama dibangun oleh pemerintah kolonial. Ketika tentara Jepang pertama kali mendarat di Medan, orang-orang menerima mereka dengan antusias dan menurut penuturan Hasan dalam memoarnya, bendera Merah Putih dikerek di mana-mana sebagai tanda penghormatan. Sementara di Aceh, keadaannya jauh lebih brutal. Menjelang pendaratan tentara Jepang, terjadi pembunuhan terhadap asisten residen dan kontrolir di Seulimeum. Teungku Daud Beureueh, yang merupakan pimpinan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) menjadi kolaborator utama dengan tentara Jepang.

Pada saat itu, Hasan tengah bekerja di kantor Gubernur Sumatera di Medan dan tidak mengetahui apa-apa mengenai tindakan brutal yang terjadi terhadap pegawai Belanda di Aceh. Pada masa pendudukan Jepang, Hasan kemudian diangkat sebagai pegawai di kantor Tinzukyoku yang dikepalai oleh Mangaraja Soangkupon. Tugasnya adalah menerima orang-orang Sumatera Timur, yakni dari Tanah Karo, Simalungun, Deli Serdang, dan lainnya, yang datang untuk mengadu sebelum kemudian diteruskan kepada Resimen Militer Sumatera Timur.

Dalam perkembangan, tentara Jepang terus mengalami kekalahan dalam banyak pertempuran melawan tentara Sekutu.

Namun, tentara Jepang melarang masyarakat Sumatera mengetahui perkembangan situasi perang dengan menyita radio-radio milik rakyat. Dalam keadaan yang terjepit, pada September 1944, Perdana Menteri Jepang menjanjikan dalam parlemen untuk memberi kemerdekaan bagi Indonesia, yang dimaksudkan untuk mendorong milisi asal Indonesia membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

Terdorong ingin segera meraih kemerdekaan Indonesia, Hasan kemudian bergabung sebagai bendahara Bempa atau Badan Oentoek Membantu Perang Asia Timur Raya di Medan. Badan ini diketuai oleh Karim M.S., Moh. Yusuf, dr. Pirngadi, drh. Abdul Manaf dan Sugondo Kartoprodjo. Berselang setahun dari pengumuman janji kemerdekaan itu, Hasan diminta oleh Somubuco Handa untuk menjadi anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai utusan dari Sumatera. Ia menerima permintaan tersebut dan berangkat ke Jakarta pada 13 Agustus 1945 bersama dr. Moh. Amir. Penunjukan tersebut menjadi penanda babak baru dalam kehidupan Teuku Mohammad Hasan.

Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menandai akhir sejarah panjang penjajahan. Proses perpindahan kekuasaan yang harus dilakukan dalam tempo sesingkat-singkatnya mensyaratkan perumusan dasar negara yang adil bagi berbagai kalangan di Tanah Air. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk untuk memberi pertimbangan mengenai hal-hal penting, seperti pembagian wilayah, dasar negara dan kandidat yang sesuai sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Dalam perjalanan menuju Jakarta, Hasan dan dr. M. Amir singgah di Singapura dan bersama Sukarno dan Hatta menumpang kapal terbang Jepang menuju Jakarta. Bersama dengan para pejabat Jepang, Hasan dan dr. Amir ikut ke Hotel Des Indes untuk merumuskan dasar bagi kemerdekaan Indonesia. Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar rapat di gedung bekas Raad van Indië di Pejambon untuk menetapkan Undang-Undang Dasar serta memilih

presiden dan wakil presiden. Pada rapat itu, utusan dari berbagai daerah dan golongan menyampaikan usul dan pendapatnya agar dipertimbangkan sebagai dasar negara.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, ada dorongan dari beberapa golongan untuk menyertakan kebutuhan mayoritas tersebut dalam dasar negara. Ketegangan tidak terelakkan ketika Ki Bagus Hadikusumo, delegasi dari Muhammadiyah Yogyakarta, meminta agar dalam rancangan Preambule Undang-Undang Dasar, dan Pasal 29, Ayat 1, ditambahkan kalimat, "Dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Mohammad Hatta kewalahan dengan argumentasi Ki Bagus Hadikusumo, karena jika tidak menampung kepentingan kelompok Muhammadiyah, kemungkinan tuntutan tersebut melebar ke kelompok Muslim lainnya. Hatta kemudian mengutus Hasan untuk membujuk Ki Bagus Hadikusumo agar bersedia memikirkan ulang usulannya. Dengan pertimbangan bahwa perjuangan untuk mencapai cita-cita sebagai negara-bangsa yang merdeka dilakukan oleh berbagai kelompok dan golongan, Hasan mengajukan bahwa perlu kesatuan yang teguh, terutama dalam menyusun dasar negara agar tidak mengalami perpecahan. Dalam memoarnya, Hasan menceritakan perundingan dengan Ki Bagus Hadikusumo tersebut,

"Antara lain saya mengemukakan bahwa dalam perjuangan menuntut kemerdekaan Tanah Air perlu persatuan yang bulat dari semua golongan untuk menghadapi musuh bersama, jangan sampai Belanda memecah belah kita sama kita dan mempergunakan golongan Kristen dan lain-lain melawan golongan Islam dan sebagainya."<sup>3</sup>

Setelah perbincangan yang panjang, usulan Mohammad Hasan disepakati oleh utusan yang lain untuk menggantikan kalimat usulan Ki Bagus Hadikusumo dengan formulasi menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Rapat persiapan tersebut juga menjadi awal pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) sebagai badan perhimpunan bagi



wakil rakyat Indonesia di pusat, pusat-daerah dan di daerah-daerah untuk menyelenggarakan perpindahan kekuasaan dari pemerintah Jepang ke pemerintah Republik Indonesia. KNI disahkan pada 22 Agustus 1945 dan didasarkan pada Peraturan Peralihan UUD 45, Pasal 1. Dalam skema KNI, pembagian wilayah terpilah atas pusat-daerah yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Fungsi utama KNI adalah menjembatani aspirasi politik daerah dan pusat, agar dapat mencapai tujuan bersama sebagai bangsa yang merdeka.

Dari rapat ini pula, pemerintah pusat mengambil keputusan pada 29 September 1945 bahwa Sumatera akan menjadi satu provinsi dan dipimpin oleh satu gubernur. Dr. Amir merekomendasikan agar Teuku Mohammad Hasan ditunjuk sebagai Gubernur Sumatera. Pertimbangannya, Hasan memiliki pendidikan yang tinggi dan pengalaman bekerja dalam bidang pemerintahan. Hasan menerima ajuan itu semata-mata karena cita-citanya demi mengabdikan kepada Indonesia merdeka seperti ia tuturkan dalam memoarnya, "Saya menjawab, jika sekiranya saya diangkat menjadi Gubernur, terpaksa menerima jabatan ini untuk melaksanakan kemerdekaan Tanah Air, meskipun belum pernah memegang jabatan itu."<sup>4</sup>

Namun, sebelum ada penetapan Gubernur Sumatera yang sah, separuh dari tokoh politik daerah telah melaksanakan tugasnya atas arahan KNI di daerah masing-masing, seperti di Aceh, Sumatera Barat, Riau, Palembang dan Lampung. A. K. Gani dan Mr. Abdul Abbas, misalnya, telah menjadi Residen Lampung sejak 25 September, dengan penetapan langsung dari Presiden Sukarno. Berdasarkan buku *Medan Area Mengisi Proklamasi*, penetapan gubernur secara terpusat di Sumatera adalah untuk 'kesempurnaan administratif'. Bagi tokoh politik lokal yang lebih senior, seperti di Sumatera Timur, Tapanuli, Jambi, Bengkulu serta Bangka dan Belitung, kerja tata kelola pemerintah baru mulai efektif setelah pelantikan gubernur.

Sementara itu, kabar mengenai proklamasi kemerdekaan tiba terlambat di berbagai kota di Sumatera. Para pemuda yang telah dilatih sebagai milisi Jepang seketika kehilangan orientasi selepas kekalahan Jepang dalam Perang Dunia. Pada 16 Agustus, milisi *Giyugun*, *Heiho* dan *Kenkokutai* dilucuti dan dilarang melakukan aktivitas tanpa mengetahui apa yang tengah terjadi. Berbarengan dengan tentara Inggris, tentara Belanda bergegas kembali merebut koloni. Dalam buku *The Blood of the People*, Anthony Reid menyatakan bahwa Mountbatten Force 136 yang dibentuk di Kolombo pada awal 1945 telah terjun dalam tiga unit komando di bagian utara Sumatera pada akhir Juni. Mereka bertugas mengumpulkan informasi dan kontak yang akan berguna untuk invasi Inggris ke Malaya yang direncanakan awal September. Unit ini kemudian mengajak sultan Langkat dan Deli, serta anggota kelompok elite sosial lainnya untuk bekerja sama jika pihak Belanda kembali.

Perjalanan kembali dr. Amir dan Mohammad Hasan ke Sumatera pada 28 Agustus melalui Lubuk Sikaping, Kota Nopan, Padang Sidempuan, Sipirok, dan bermalam di Tarutung. Di sana, seorang kenalan Amir yang baru tiba dari Medan mengabarkan bahwa para sultan di Sumatera Timur telah mengambil alih kekuasaan dan membentuk komite persiapan penyambutan Belanda, *Comite van Ontvangst*. Menurut pengamatan Reid, situasi ini berbeda dengan di Jawa; tidak ada kelompok pemuda yang siap mempertahankan Republik, terutama karena Bompa yang menjadi poros utama bagi pendukung kemerdekaan telah membubarkan diri pada 23 Agustus. Baik Hasan maupun Amir khawatir tidak ada kekuatan yang memadai untuk menghalau pendukung Belanda dan siap mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Berdasarkan mandat PPKI dan kekhawatiran akan menguatnya kelompok pro-Belanda, maka dibentuk Panitia Kebangsaan Sumatera Timur yang diketuai oleh Teuku Mohammad Hasan. Sebagai bentuk dukungan terhadap Republik Indonesia, salah satu terobosan penting yang dilakukan panitia ini adalah

pembentukan Bank Dagang Nasional Indonesia yang berkedudukan di Medan.



Tentara Sekutu Inggris memasuki perkampungan di Medan, 15 Mei 1945  
(Sumber: Anthony Reid, *The Blood of the People*).

Direksi dan Dewan Komisaris bank itu kemudian menganjurkan kepada pemerintah Sumatera untuk membeli saham sebanyak empat ratus ribu rupiah, agar simpanan dapat mencapai angka dua juta rupiah. Tindakan itu diambil agar dapat menjaga keseimbangan ekonomi Republik yang baru lahir.

Di tengah keadaan tanpa orientasi, para pemuda yang telah dilatih dan ditempatkan di Medan dan kota-kota lain tidak dapat kembali ke kampungnya karena ketiadaan sarana transportasi yang memadai. Para pemuda yang tidak memiliki hubungan dengan para pendukung Republik kemudian menghubungi ketua Bompa, Karim M.S., yang merupakan tokoh kunci dalam konfigurasi kekuatan pemuda baik elite pendukung Republik maupun elite pendukung Belanda. Oleh sebab itu, menurut Reid, ia bertindak sangat hati-hati pada minggu awal kekalahan Jepang dan setelah A. K. Gani mengirim

telegram pada 15 September, barulah Karim menceritakan mengenai kelahiran Republik di Jawa kepada para pemuda yang tidak bersinggungan dengan Mohammad Hasan dan dr. Amir.

Pada 23 September, para pemuda tersebut mengadakan pertemuan yang mengundang para elite politik senior, namun absen pada saat itu. Pertemuan itu dibuka dengan pidato revolusioner Abdul Razak dan B. H. Hutadjulu yang berasal dari lingkaran Bempa pimpinan Karim. Pertemuan itu melahirkan kesepakatan untuk membentuk Badan Pemuda Indonesia (BPI) yang bertujuan mempertahankan kemerdekaan. Di tengah konfigurasi kekuatan yang terpecah itu, Teuku Mohammad Hasan dilantik sebagai Gubernur Sumatera, dengan ibu kota Medan, pada 29 September 1945. Hasan sendiri baru menerima telegram pengangkatannya dari Jakarta pada 2 Oktober.

Dengan jajaran pemimpin tokoh pemuda dari berbagai latar belakang seperti Ahmad Tahir, A. Malik Munir dan Sugondo Kartoprodjo, BPI mulai melakukan kunjungan politis sejak 30 September untuk menyebarkan kabar mengenai kemerdekaan kepada khalayak luas. Dalam hitungan hari, cabang BPI bertumbuhan di Langkat, Asahan, dan Tana Karo. Orang-orang muda mengenakan apapun yang berwarna merah dan putih dan mempropagandakan apa-apa yang mereka ketahui tentang Republik yang belum lama lahir.

Bersamaan dengan itu, Gubernur Mohammad Hasan mengeluarkan dekrit pertama pada 3 Oktober, bahwa siapa pun harus menerima perintah langsung dari otoritas Republik dan berhenti bekerja dari kantor yang tidak boleh mengibarkan bendera Merah Putih. Para pemuda yang bekerja di berbagai kantor sektor kunci seketika mematuhi arahan itu. Sementara di beberapa kantor, seperti di kantor pos dan stasiun kereta api, pengibaran bendera mengalami kesulitan. Koran *Soeloeh Merdeka* diterbitkan sejak saat itu untuk menyebarkan kabar mengenai pengangkatan pejabat di Sumatera. Pada saat itu, kekuatan gerakan pro-Republik menjadi semakin besar. Barulah pada 6 Oktober bendera Merah Putih secara

resmi berkibar pada rapat akbar di alun-alun kota yang dihadiri ribuan peserta.

Di tengah situasi itu, pasokan senjata menentukan status keamanan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Di lapisan yang lebih luas, dekrit Kepala Negara telah dikeluarkan pada 25 Agustus 1945 untuk mengadakan mobilisasi umum bagi pemuda-pemuda dalam Barisan Keamanan Rakyat. Para pemuda yang sebelumnya tergabung dalam berbagai milisi bentukan Jepang diserap dalam Badan Keamanan Rakyat dan ditugaskan mengawal kemerdekaan di tengah kembalinya tentara Belanda yang didukung oleh tentara Sekutu. Golongan yang tidak bergabung dengan BKR berhimpun dalam organisasi Pemuda Republik Indonesia (PRI).

Berdasarkan perintah Presiden Sukarno pada 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat). Untuk wilayah Sumatera, struktur organisasi TKR dipilah ke dalam enam wilayah yakni (1) Lampung dan Bengkulu, (2) Palembang Hulu, Palembang Hilir, dan Jambi, (3) Sumatera Barat dan Riau, (4) Sumatera Timur, (5) Aceh, dan (6) Tapanuli. A. K. Gani diangkat sebagai organisator dan koordinator TKR se-Sumatera, sementara R. Soehardjo Hardjowardoko sebagai Kepala Markas Besar TKR Sumatera dengan pangkat Jenderal Mayor. Di berbagai daerah, dibentuk pula pasukan khusus seperti TKR-B yang dipimpin oleh Letnan Nip Karim di Sumatera Timur atau TKR-C yang mewadahi para tentara bekas KNIL dan dipimpin oleh Letnan II Sunarto.

Sebelum kelahiran TKR, BKR juga telah mendorong tumbuhnya laskar-laskar bersenjata yang berkembang dari *training* sejak masa pendudukan Jepang. Pertumbuhan laskar-laskar di Sumatera itu kemudian bermuara pada lahirnya Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) pada 10 November 1945, yang nyaris tidak memiliki hubungan dengan Pesindo di Pulau Jawa. Selain angkatan bersenjata yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah, ada pula milisi lahir dari kebutuhan untuk mempertahankan diri. Dalam keadaan yang genting seperti ini, kelompok Tionghoa di Medan berada dalam keadaan terjepit. Mereka tidak bisa sepenuhnya

bersandar pada pihak koloni, namun juga tidak bisa berpegang pada apa yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. Kelompok Tionghoa kemudian membentuk milisi Poh An Tui untuk melindungi diri dari huru-hara yang ditimbulkan oleh para pemuda dari laskar.

Pada bulan-bulan awal kemerdekaan Indonesia, para pemuda yang tergabung dalam laskar ataupun bukan kerap terlibat dengan upaya pelucutan senjata, baik dari tentara Jepang, Sekutu maupun kelompok yang dianggap dekat dengan kedua pihak. Sebagai gubernur Sumatera, Teuku Mohammad Hasan dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Salah satu pertempuran paling sengit terjadi di bagian selatan Medan pada 10 Desember ketika pasukan Inggris berusaha merebut alat transportasi bersenjata dan membebaskan tiga tentara di Deli Tua. Mereka menghadapi perlawanan yang keras dari TKR, TKR-B dan pasukan pemuda lainnya. Seluruh angkatan bersenjata Inggris di wilayah tersebut gagal memenuhi tujuannya. Ini kemudian merupakan pertempuran pertama ketika para pemuda mulai menggunakan senjata yang mereka rampas dan menunjukkan kedaulatan Indonesia dalam membatasi operasi yang dilakukan oleh tentara Sekutu di Medan.

Pertempuran sengit juga terjadi di kota-kota lain. Salah satu yang terburuk meletus di Tebing Tinggi. Sebagai pusat produksi beras dan sayur, kota itu mengalami arus masuk pedagang yang tinggi namun banyak orang menderita kelaparan. Sejak periode Jepang, daerah itu memang menjadi basis gerakan Muslim anti-Jepang. Pada 11 Desember, kelompok pemuda di Tebing Tinggi memblokir kereta api dari Medan ke Kisaran yang dipenuhi pejabat dan angkatan bersenjata Jepang. Mereka menuntut agar senjata-senjata tersebut diserahkan kepada pemuda dengan menawan empat orang Jepang hingga permintaan tersebut dikabulkan. Seluruh senjata kemudian diberikan kepada pemuda, namun tiga tawanan Jepang dibunuh.

Dalam keadaan genting, pihak Sekutu dan pemerintah Indonesia sepakat melakukan perundingan. Setelah kembali dari Aceh pada 17 Desember, Gubernur Hasan dipanggil oleh Brigadir

Kelly untuk membahas mengenai keadaan yang memanas. Namun, baru berselang sepuluh hari, kesepakatan yang lebih produktif dengan Komandan Inggris untuk Sumatera, Jenderal Chambers, berhasil dicapai oleh Gubernur bersama Walikota Medan Mohammad Jusuf. Chambers mengakui keberadaan TKR dan diperbolehkan memiliki senjata di luar wilayah-wilayah kunci di bawah kontrol Inggris. Chambers menegaskan bahwa pihak Inggris dan Jepang tidak akan melakukan intervensi apapun dalam urusan sipil di Medan, kecuali keamanan benar-benar terancam. Sebagai balasan, Hasan berjanji mengakhiri embargo Indonesia dalam jasa dan pasokan untuk Sekutu.

---

Gubernur Teuku Mohammad Hasan dan Residen Tapanuli Ferdinand Lumban Tobing di Sibolga, 1946

(Sumber: Anthony Reid, *The Blood of the People*).

---



Gubernur Teuku Mohammad Hasan dapat menunjukkan bahwa hal tersebut adalah bentuk pengakuan pihak Inggris terhadap Republik Indonesia, serta memberi kesan bagi para pemuda perlunya menampilkan tanggung jawab sebagai pemerintah baru kepada pihak lawan. Upaya Hasan itu membuahkan hasil yang baik, dan

selama beberapa bulan, tindak kekerasan kelompok pemuda berkurang jauh dibanding dengan awal Desember. Kekuatan dan energi para pemuda lalu dialihkan dari konfrontasi dengan pihak Sekutu dan Jepang kepada proses pengambilalihan lahan perkebunan atau sumber daya lainnya, sekaligus melawan anasir-anasir konservatif di kalangan orang-orang Indonesia yang tidak ingin bergabung dengan Republik.

Pada periode ini, konflik antara pendukung Republik dan pihak yang masih bimbang menentukan sikap terjadi di mana-mana. Di Aceh, konflik horizontal terjadi di antara kelompok ulama yang tergabung dalam PUSA dan kelompok *uleebalang* di Pidie, kampung Mohammad Hasan.

Setelah Jepang meninggalkan Aceh, proses penyerahan senjata berlangsung secara diplomatis. Selain 600 pucuk senjata diberikan kepada Nyak Arif, residen Aceh pada saat itu, sekitar seratus pucuk senjata diserahkan kepada *guncho* di Seulimeum dan di Lammeulo, Teuku Mohammad Daud Cumbok. Ia adalah pribadi yang populer karena sikapnya yang berani. Daud Cumbok sempat mengadakan pasar malam di Lammeulo, yang melanggar aturan residen setempat, juga menyertakan lapak judi dan minuman keras. Ia adalah *uleebalang* pertama yang mengirim utusan kepada pihak pemerintah Belanda yang sedang dalam kamp interniran di Rantauprapat untuk menyatakan keinginan agar pihak Belanda kembali ke Aceh secepatnya. Sikap Daud Cumbok yang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia ditunjukkan secara gamblang, seperti ketika laskar pemuda mengerek bendera Merah Putih di depan kantornya, ia tidak segan-segan menurunkannya seketika. Tidak ada *uleebalang* lain di Pidie yang berlaku seperti Daud Cumbok. Sebagian dari *uleebalang* di Aceh mendukung kemerdekaan Indonesia, namun dengan harapan terjadi restorasi terhadap kekuasaan yang mereka miliki seperti saat sebelum perang.

Pada minggu terakhir November, ketegangan antara pihak yang pro-Belanda dan pro-Republik semakin meruncing di Aceh. Sekitar 200 pendukung bersenjata dari *uleebalang* Pidie memasuki



daerah perkotaan pada malam hari dan menetapkan diri mereka sebagai kesatuan di rumah *uleebalang* Teuku Cut Hasan. Pada 4 Desember, diatur proses penyerahan senjata dari tentara Jepang kepada TKR. Namun, pendukung bersenjata dari pihak *uleebalang* pada hari yang bersamaan memblokade jalan utama menuju Sigli dan menawan siapa pun yang dianggap akan mengambil senjata Jepang. Berkat pengawalan Sjamaun Gaharu, pemimpin TKR di Sigli, proses penyerahan senjata dari pihak Jepang kepada TKR berjalan baik. Keadaan tiba-tiba menjadi tidak terkendali ketika Sjamaun Gaharu tengah bernegosiasi dengan ketua PRI, tiga tembakan terdengar mengarah pada kerumunan orang yang berada di sekitar lokasi penyerahan senjata. Sekitar lima puluh korban tewas dalam kejadian itu, termasuk ajudan Sjamaun Gaharu.

Kejadian tersebut membuat banyak kelompok berang. Kematian orang-orang sipil semakin memperkuat gambaran mengenai *uleebalang* Pidie yang bengis. Di sisi lain, para *uleebalang* juga cemas bila kekuasaan mereka dihabisi oleh pemerintahan demokratis yang ditetapkan di Aceh. Beberapa *uleebalang* di Pidie seperti Teuku Cut Hasan, mengungsikan diri ke Meureudu. Beberapa orang diutus *uleebalang* untuk meminta bantuan kepada Belanda di Medan. Para *uleebalang* dari Pidie itu kemudian mengadakan pertemuan pada 10 Desember di Lueng Putu; mereka bersepakat mengikuti tindakan yang dianjurkan Daud Cumbok, yakni memperkuat angkatan bersenjata demi mempertahankan diri dari kelompok pro-Republik. Setelah pertemuan tersebut, Daud Cumbok menghukum anggota PUSA, anggota PRI dan para pemimpin gerakan perlawanan. Tidak lama kemudian Teuku Ma'ali dari Samaindra menghabisi markas PUSA di Garut yang merupakan bagian dari wilayah kekuasaannya.

Dalam pada itu, Gubernur Mohammad Hasan tiba di Sigli bermaksud menemui Daud Cumbok dan membicarakan proses penyerahan senjata dari Jepang. Namun, Daud Cumbok menolak menemui Gubernur. Ia juga memanggil seorang tokoh yang dituakan,

Teuku Chik Mohammad Said, dari Cunda untuk menjadi penengah kericuhan itu. Akan tetapi, sejauh itu hasilnya nihil.

Tindakan Daud Cumbok tersebut memancing perlawanan masyarakat terhadap *uleebalang*. Para ulama yang tergabung dalam PUSA bersama kelompok lain mulai melakukan serangan ke Lammeulo dan rumah-rumah *uleebalang* yang menyimpan stok senjata. Di Pidie, Hasan Aly memimpin angkatan bersenjata pemuda dan mendirikan Pusat Markas Barisan Rakyat. Mereka melancarkan serangan ke Lammeulo pada 25 Desember setelah mendengar laporan mengenai rencana penyerangan yang disusun Daud Cumbok. Sekitar seratus pemuda bersenjata bergerak menuju Lammeulo pada akhir Desember. Menjelang awal Januari, anggota Mujahidin dan laskar-laskar pemuda memenuhi kota Sigli dan Garut untuk menghadang kekuatan *uleebalang*. Pasukan yang dipimpin oleh Hasballah Trienggading itu kemudian menawan sejumlah *uleebalang* dan membunuh tidak sedikit di antaranya.

Hampir seluruh *uleebalang* di Pidie “dihabisi” kelompok pemuda dan PUSA, termasuk Teuku Cut Hasan dan Teuku Chik Mohammad Said, yang sebelumnya diutus oleh Gubernur Teuku Mohammad Hasan untuk menengahi perseteruan di Pidie. Asisten Residen Aceh Besar Teuku Ahmad Jeunib diculik dari rumahnya di Kutaraja dan dibunuh karena keterkaitannya dengan *uleebalang* Pidie. Hanya dua dari 25 *uleebalang* asal Pidie yang selamat dari aksi brutal itu. Mereka adalah *uleebalang* Pineung, ayah Mohammad Hasan, dan *uleebalang* Trienggading yang dilindungi oleh Hasballah Trienggading. Dalam memoarnya, Mohammad Hasan awalnya sempat membayangkan bahwa pemerintah Sumatera tidak akan mengubah status *uleebalang* dalam struktur pemerintahan. Mereka diharapkan dapat menjadi bagian dari pemerintahan yang demokratis, namun setelah kejadian Daud Cumbok tersebut Hasan mencatat, “Sejak semula Pemerintah Sumatera telah merencanakan untuk mengadakan pemerintah demokratis untuk swapraja-swapraja yang ada di Sumatera. Maksud ini tidak dapat dilakukan di Daerah

Keresidenan Aceh, berhubung bergolaknya keadaan di sana yang ditimbulkan oleh revolusi sosial.”<sup>5</sup>

Di Sumatera Timur, friksi antara laskar pemuda dan pihak kerajaan yang konservatif juga akut. Para pemuda memiliki kekuatan fisik yang tangguh, namun terbelah sehingga tiap upaya untuk bersatu-padu kadang malah cenderung bersifat destruktif. Di sisi lain, pihak kerajaan bersikeras mempertahankan ilusi kekuasaannya yang membuatnya makin terisolasi dari masyarakat. Pengaruh pihak kerajaan Melayu dan Simalungun, misalnya, hanya sebatas di wilayah etnik mereka sendiri.

Tanggung jawab yang diemban Gubernur Teuku Mohammad Hasan dan wakilnya, dr. Amir, untuk memperantarai dua kelompok tersebut tidaklah mudah. Mereka berdua lebih sering didikte oleh kelompok pemuda dengan todongan senjata. Pada pertengahan Desember, Gubernur Hasan mengunjungi Jawa bersama dengan Luat Siregar, Adinegoro, dan dr. Djamil dari Sumatera Barat. Sekembali mereka pada 3 Januari, dr. Amir membuat pernyataan bahwa “pemerintahan Republik di Jawa menganggap Sumatera merdeka secara politik dan ekonomi dari Jawa, dan diperbolehkan untuk mengambil tindakan yang tidak bertentangan dengan kepentingan Republik.” Lantaran pernyataan itu, beberapa pemuda berusaha menawan Amir. Para pemuda mencurigai wakil gubernur itu berusaha membawa Aceh “keluar” dari Republik. Gubernur Hasan segera menyadari bahwa sentimen pro-Republik di kalangan pemuda sangat kuat. Ia kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada kebijakan Aceh akan “merdeka” sendiri atau berbeda dari kebijakan pemerintahan pusat.

Gejolak dinamis antara pemuda dan pemerintah itu mendorong lahirnya pertimbangan untuk memperkuat pemerintahan dan menjembati jurang antara pemuda dan pejabat. Kabinet Sutan Sjahrir mengeluarkan dekret pada 23 November tentang sistem subregional Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNI Daerah. KNI memang sudah muncul di berbagai tempat yang sebelumnya merupakan basis anggota *hokokai* atau *shu sangi kai*,

namun dalam hal ini basis tersebut diabsahkan sebagai badan perwakilan yang membiaskan perimbangan kekuatan baru, yang dapat membagi proses tata kelola pemerintahan dengan para pejabat yang baru dilantik. KNI baru bagi Sumatera Timur dibentuk pada Desember awal dengan Luat Siregar sebagai ketua. Badan-badan lain kemudian bermunculan di beberapa distrik dan kota selama bulan Januari. Sistem perwakilan yang disetujui di Sumatera Timur adalah pembagian atas tiga divisi yang terdiri dari lima puluh kursi. Divisi pertama diwakili oleh kelompok kiri dan revolusioner, termasuk Partai Komunis Indonesia, Partai Nasionalis Indonesia, dan Pesindo. Divisi kedua mencakup kelompok sosial dan religius, yakni tiga anggota MIT (Majelis Islam Tinggi) dan dua anggota Sabilillah. Divisi ketiga merupakan gabungan berbagai kelompok minoritas dan non-Indonesia dari berbagai kota.

Proses pengesahan dan revitalisasi KNI tersebut memberi kekuatan baru dan legitimasi bagi figur politik. Dalam KNI sendiri, timbul pertanyaan tentang kelompok mana yang seharusnya menjadi fokus pemerintahan di luar wilayah perkotaan, pihak KNI atau pihak kerajaan. Sebagai pimpinan KNI Sumatera Timur, Luat Siregar menegaskan bahwa jika raja-raja tidak menerima semangat demokrasi pada masa itu, mereka dipersilakan keluar dari KNI. Luat Siregar dan dr. Amir sama-sama terkesan dengan kerja sama antara pemerintah Republik dan pihak Keraton Yogyakarta ketika tengah berada di Jawa. Sekembali dari sana, pada 12 Januari, mereka mengatur pertemuan dengan mantan pegawai dan Sultan Langkat untuk membicarakan persoalan posisi kerajaan di Tanjung Pura.

Barangkali karena dua tokoh Sumatera Timur, yakni Tengku Amir Hamzah yang merupakan wakil pemerintah pusat untuk Langkat, dan dr. Amir yang menjembatani pihak Republik dan pihak Kesultanan Langkat, maka kerja sama antara keduanya tercipta. Turut hadir pihak Kesultanan Deli, Kesultanan Serdang, dengan putra mahkota dan pegawainya, Tengku Anwar, namun tidak ada wakil dari Kesultanan Asahan. Pada pertemuan tersebut, dr. Amir menjelaskan bagaimana para penguasa keraton di Jawa telah

menjadi bagian dari Republik yang demokratis; sementara Luat Siregar meminta kedaulatan rakyat dan demokrasi sudah seharusnya berlaku secara cepat dan efektif di kalangan kerajaan Sumatera Timur.

Sementara itu, para pemuda mulai merambah perkebunan karet, sawit dan tembakau di berbagai keresidenan. Pihak pengelola Jepang telah meninggalkan perkebunan sejak Desember dan menyerahkan tanggung jawab kepada pihak Republikan yaitu Dewan Perkebunan di Medan. Pada masa perang, karet dan sawit merupakan aset yang bernilai tinggi namun tanpa pengawalan dari siapa pun. Pihak laskar atau pasukan pemuda kemudian mengambil kontrol terhadap aset itu. Salah satu pihak yang mengambil pasokan karet untuk memperoleh keuntungan adalah Mahruzar yang bertindak mewakili TKR dengan persetujuan Gubernur Mohammad Hasan. Pada Desember, ia merundingkan penjualan 6.000 ton karet di Singapura dan sebagai balasan ia memperoleh pasokan senjata dari Thailand. Kontrol terhadap perkebunan, perdagangan di dalam dan luar negeri, serta status keamanan dan pertahanan tidak menjadi urusan pemerintah, melainkan menjadi urusan TKR, Pesindo, dan laskar Sabilillah. Hal itu membuat pihak kerajaan menjadi semakin tidak relevan di tengah masa peralihan kekuasaan.

Mengetahui nasib para *uleebalang* di Pidie, pihak kesultanan kemudian meminta perlindungan kepada pemerintah Republik. Pertemuan lanjutan diadakan pada 3 Februari yang dihadiri oleh seluruh sultan di Sumatera Timur kecuali dari Serdang. Dalam pertemuan itu, para sultan menyatakan keberpihakannya terhadap Presiden dan pemerintahan nasional serta akan ikut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gubernur Mohammad Hasan memanfaatkan pertemuan itu untuk membujuk para sultan menerima sistem demokrasi. Ia menambahkan, pemerintahan Republik tidak akan menghapuskan struktur kerajaan. Dalam tatanan pemerintahan baru yang demokratis, peranan politik para sultan adalah sebagai pimpinan utama wilayah masing-masing, yang

menjadi bawahan residen dan gubernur, seperti yang digambarkan dalam pidato Hasan;

Dalam zaman merdeka dahulu, Radja-radja adalah Volkshoofd, kepala dan pemimpin rakyat. Dimasa Belanda Radja-radja itu mendjadi perkakas kapitalisme Belanda, kaki tangan kekuasaan asing. Sekarang datanglah masanja jang Radja-radja itu mendjadi pemimpin bangsanja kembali. Arti pemimpin itu adalah dalam. Suasana sekarang sudah berubah, rakyat sudah sadar dan insaf akan harga diri dan harga lapisan atau kastanja. Dia menuntut hak kedaulatan rakyat. Demokrasi itu sebenarnya sedjak dahulu kala telah ada dalam masyarakat kita di Sumatera ini. Dalam negeri di Minangkabau, atau luhak di Tapanuli, hak rakyat dibela dan kata-mupakat dijunjung tinggi.<sup>6</sup>

Sementara itu, di luar lingkaran pemerintah, para pemuda sudah tidak sabar ingin menggantikan “daulat tuanku” ke “daulat rakyat.” Tiga hari setelah pertemuan itu, Gubernur Hasan meninggalkan Medan, berkeliling Sumatera. Tekanan kelompok pemuda revolusioner untuk melakukan “kup” terhadap raja-raja semakin tidak terelakkan.

Dorongan untuk melancarkan “kup” tidak dapat dilepaskan dari front Persatuan Perjuangan yang digagas oleh Tan Malaka. Ia menjadi populer di kalangan pemuda terutama karena sempat berada di Sumatera Timur selama dua tahun dan slogan yang mudah diingat: “Merdeka 100%.” Tokoh-tokoh PKI Sumatera, seperti Karim M.S., Nathar Zianuddin, dan Junus Nasution juga dekat secara personal dan ideologis dengan Tan Malaka. Tuntutan untuk menciptakan tentara rakyat, pemerintahan rakyat dan pengambilalihan perkebunan serta properti milik Belanda lainnya, menjadi dorongan utama revolusi di Sumatera Timur. Perundingan untuk membentuk Persatuan Perjuangan cabang Sumatera dimulai oleh Karim dan Luat Siregar sejak akhir Januari, namun baru membuahkan hasil pada 11 Februari. Sekitar 20 organisasi hadir dalam pertemuan yang dipimpin oleh Luat Siregar itu. Setelah

peresmian, cabang-cabang Persatuan Perjuangan bermunculan di berbagai distrik dan didominasi oleh Pesindo, PKI, PNI serta TKR dan MIT yang memainkan peran seadanya.

Pada 3 Maret, kup terhadap sultan-sultan di Sumatera Timur dilancarkan Persatuan Perjuangan. Ribuan orang berkumpul di Tanjung Balai karena mendengar rumor bahwa pihak Belanda akan mendarat di sana. Menurut Reid, kaum revolusioner itu sebenarnya tidak punya rancangan struktur pemerintahan yang demokratis atau sosialis. Mereka mengantisipasi kembalinya Belanda melalui perantara sultan-sultan dalam *Comite van Ontvangst*. Mereka juga mengambil alih kekayaan kesultanan yang dijustifikasi sebagai “perampasan properti musuh adalah berguna untuk perjuangan nasional.” Sekitar 140 orang, terdiri sultan dan keluarganya, dibunuh kelompok pemuda Persatuan Perjuangan. Kup meluas ke Labuhan Batu, Rantau Prapat, Deli, Serdang, Langkat and Sunggal.

Ketika Gubernur Mohammad Hasan kembali ke Medan pada 21 Maret, ketegangan yang diciptakan oleh kelompok pemuda semakin nyata. Gubernur menyerukan agar orang-orang tidak mudah terpancing dan tetap berkepala dingin. Pada saat yang sama beredar desas-desus bahwa Gubernur juga akan dikudeta. Sempat tinggal beberapa lama di Medan, pada 27 April, Gubernur Hasan ditemani Mr. Hermani menuju Pematangsiantar. Namun, rencana kudeta itu gagal karena perpecahan dalam kelompok revolusioner sendiri, yakni antara kubu Junus Nasution dan Nathar Zianuddin.

Dalam situasi itu, Gubernur Mohammad Hasan memperoleh dukungan utama dari para pengawalinya dari Aceh dan sekretarisnya, Mas Tahir, yang juga merupakan koleganya semasa menjabat di kantor Gubernur sebelum dan setelah pendudukan Jepang. Meski Gubernur Hasan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan berbagai laskar pemuda, ia berhasil mebarik simpati para pemuda karena gagasannya mengenai pemerintah Republikan dan karena dukungan besar dari Karim M.S. Sebagai putra *uleebalang*, Hasan mengalami pergolakan dan menjadi bagian dari sisa penguasa lokal

yang memiliki ikatan emosional dengan Belanda, namun juga berada di bawah tekanan laskar pemuda yang menuntut revolusi sosial.

Setelah upaya kudeta gagal, sekitar akhir Maret 1946, Gubernur Teuku Mohammad Hasan mempertimbangkan usulan Luat Siregar untuk memindahkan ibu kota dari Medan karena keadaan yang semakin tidak aman. Bersama dengan rombongan kecil, Mohammad Hasan singgah di Pematangsiantar untuk memantau kota itu sebagai pusat pemerintahan Sumatera untuk sementara waktu. Proses perpindahan dari Medan ke Pematangsiantar dilakukan secara bertahap.

Tidak lama berselang, dengan dukungan dari Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin dan Menteri Dalam Negeri Mr. Hermani, Gubernur Teuku Mohammad Hasan menerbitkan ketetapan Gubernur Sumatera Nomor 8/MGS tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera (DPS) pada 12 April 1946. Badan ini memiliki tujuh anggota, termasuk ketua, dari berbagai wilayah di Sumatera. Sebelum pembukaan sidang perdana DPS, seluruh residen di Sumatera berkumpul di Hotel Merdeka di Bukittinggi, termasuk Teuku M. Daudsyah dari Aceh, Luat Siregar dari Sumatera Timur, Dr. F. L. Tobing dari Tapanuli, Abdul Malik dari Riau, Dr. M. Djamil dari Sumatera Barat, A. Manan dari Jambi, A. K. Gani dari Palembang, Raden Basjit dari Lampung dan Dr. Hazairin dari Bengkulu.

Hasil pertemuan tersebut adalah penetapan tiga provinsi di Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan, masing-masing dipimpin oleh Gubernur Muda. Kemudian, sebutan pamong praja di Sumatera disamakan dengan sebutan serupa di Jawa; dan penetapan kota-kota berotonomi Medan, Palembang, Padang dan Bukittinggi dengan pengawasan langsung oleh tiap-tiap residen. Sidang perdana DPS diadakan pada 17 April 1946. Sebanyak 62 anggota yang hadir disumpah terlebih dulu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera.

Pelantikan anggota DPS bersamaan dengan kunjungan perdana pemerintah pusat ke Sumatera. Rombongan dari Yogyakarta dipimpin oleh Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin, dengan para



peserta seperti Mohammad Natsir, H. Rasyidi, A. Madjid dan Mr. Hermani.

---

Menteri Pertahanan  
Amir Syarifuddin  
bersama tentara  
Sekut berkunjung ke  
Sumatera, 1946  
(Sumber: Anthony  
Reid, *The Blood of  
the People*).

---



Keputusan yang dihasilkan dari rapat yang berlangsung selama empat hari ini meliputi, pembentukan Badan Pekerja DPS, yang diketuai oleh Mohammad Hasan sebagai Gubernur Sumatera dan membawahi tujuh anggota lainnya. Secara perlahan, tata kelola pemerintah di Sumatera mulai bergerak. Jawatan Keuangan Provinsi Sumatera didirikan pula dan diketuai oleh Raden Mohammad Amrin. Jawatan ini bertanggungjawab untuk membayar gaji pegawai negeri, TKR, laskar rakyat dan mengutip bea terhadap beberapa barang-barang, seperti bir, dan tembakau. Di samping itu, jawatan kehakiman juga didirikan dan dikepalai oleh Teuku Mohammad Hanafiah untuk mengurus perkara pengadilan tawanan rakyat dan harta feodal Sumatera Timur.

Dalam memoarnya, Mohammad Hasan mengenang kabar tentang kunjungan Wakil Presiden Mohammad Hatta, sekaligus karibnya, juga diperoleh pada saat memimpin sidang DPS di Bukittinggi. Menurut kabar yang diterima melalui kawat, Hatta dan rombongan direncanakan mendarat di Pelabuhan Panjang di Keresidenan Lampung sebagai titik awal kunjungannya di Sumatera.

Gubernur Mohammad Hasan sigap menyambut kedatangan Hatta yang berjarak cukup jauh dari tempatnya saat menerima kabar;

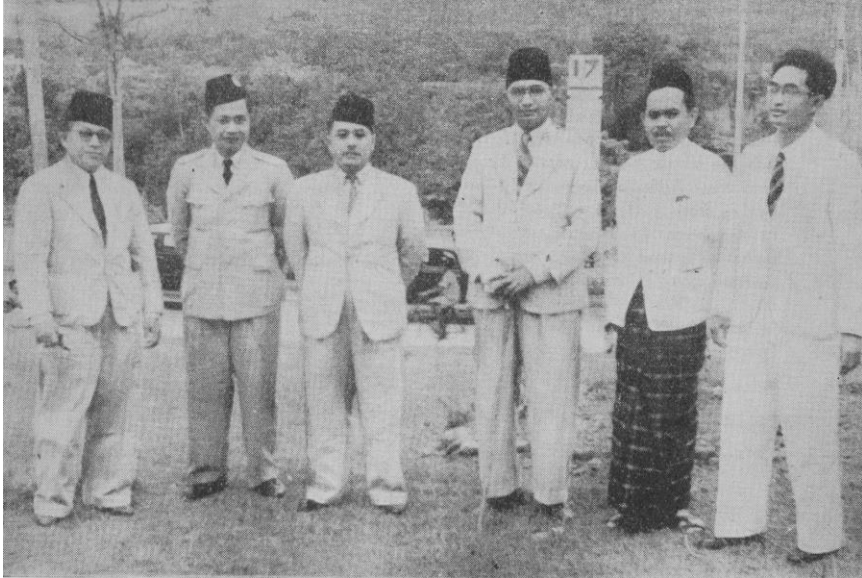
Berhubung dengan berita itu saya menyerahkan pimpinan Sidang II DPS kepada Wakil Ketua DPS. Saya bersiap berangkat ke Lampung guna menjemput Wakil Presiden dan rombongan. Rombongan saya menuju langsung ke Teluk Betung, Ibukota Keresidenan Lampung, melalui Sungai Dareh, Bangko, Muara Tebo, Surulangun Jambi, Lubuk Linggau, Baturaja dan Tanjung Karang. Di tengah jalan, Keresidenan Palembang, mobil kami tersangkut di jalan dalam lumpur, karena jalan dewasa itu masih becek. Keesokan harinya rombongan Gubernur Hasan dan Residen Lampung beserta stafnya menuju pelabuhan Panjang untuk menjemput Wakil Presiden dan rombongan.<sup>7</sup>

Wakil Presiden Mohammad Hatta tiba di Panjang pada 3 Juni 1947, disambut Gubernur Mohammad Hasan, Residen Lampung Abdul Abbas, beserta para pejabat sipil dan militer, kepala laskar rakyat dan pemimpin rakyat Lampung. Dari sana, Hasan menemani Hatta memantau rapat umum di Teluk Betung, lalu bergerak ke Bengkulu, Jambi, Bukittinggi dan akhirnya ke Pematangsiantar. Mereka merayakan hari kemerdekaan RI yang pertama, 17 Agustus 1946, di Hotel Siantar.

Tidak lama setelah itu, Perjanjian Linggardjati disepakati antara pihak Indonesia dan Belanda yang hanya mengakui pemerintah Republik hanya di Pulau Jawa, Madura dan Sumatera. Perjanjian tersebut juga mencakup pembentukan negara Republik Indonesia Serikat yang merupakan persemakmuran dari Kerajaan Belanda. Sementara dalam proses menuju ke tahap itu, kedua belah pihak bersepakat untuk mengawal keamanan dengan cara-cara yang damai.

Namun, belum genap satu tahun Perjanjian Linggarjati, pihak Belanda melancarkan serangan militer pada Juli 1947. Di Sumatera, tersiar kabar bahwa tentara Belanda mulai memasuki Pematangsiantar dari Tebingtinggi pada 29 Juli 1947. Pada saat yang

bersamaan, Wakil Presiden Mohammad Hatta tengah bersama dengan Gubernur Teuku Mohammad Hasan di Pematangsiantar. Mendengar kabar tersebut, Hasan meninggalkan Pematangsiantar menuju Brastagi melalui Kabanjahe di tengah gencarnya pesawat terbang Belanda yang melintas rendah di sana.



Gubernur Sumatera Teuku Moh. Hasan Bersama Rombongan Di Bukittinggi, Sumatra Barat. (Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia-ANRI)

Masuknya tentara Belanda ke Pematangsiantar membuat Gubernur Mohammad Hasan memindahkan ibu kota Provinsi Sumatera ke Bukittinggi agar proses pengiriman dan penerimaan informasi berjalan lancar. Keadaan di Bukittinggi memang jauh lebih kondusif dan memungkinkan seorang penerbang asal India, Biju Patnaik, masuk melalui udara dan mendarat di landasan pacu Gadut. Dalam memoarnya, Hasan menyebutkan bahwa Patnaik adalah sahabat Jawaharlal Nehru, yang datang ke Bukittinggi untuk mengantarkan surat Presiden Sukarno kepada Hatta. Dalam surat itu, Sukarno meminta Hatta ikut bersama Patnaik menemui Nehru di India untuk meminta bantuan persenjataan. Hatta menyanggupi

permintaan itu dan menyamar sebagai *co-pilot* Patnaik dengan nama Abdullah. Setelah perjalanan singkat dan rahasia ke India, Hatta kembali ke Bukittinggi dan berkeliling ke wilayah-wilayah lainnya untuk menggalang dukungan kepada Republik. Selanjutnya Hasan mencatat dalam memoarnya:

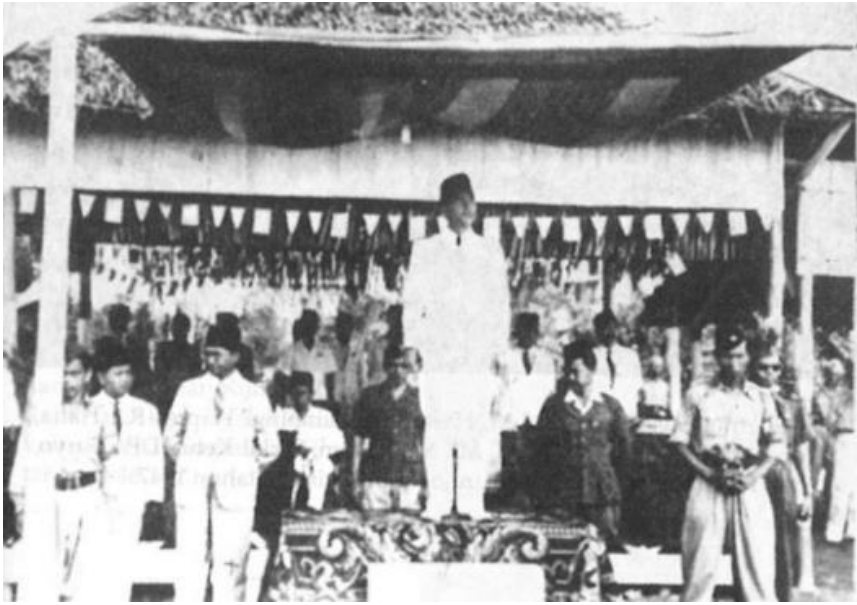
Setelah beberapa hari di India, Wakil Presiden Hatta mendarat di Pekanbaru. Saya segera mendapat berita telepon bahwa Bung Hatta sudah tiba di Sumatera. Saya bersama Sutan M. Rasjid—Residen Sumatera Barat, Pak Suryo—ketua DPA, Wangsa Widjaya—sekretaris Wakil Presiden serta pemimpin lainnya datang menyambut rombongan Wakil Presiden Hatta esok harinya di Gadut, Bukittinggi. Setelah beristirahat semalam, esok harinya rombongan Bung Hatta melanjutkan perjalanan kerjanya ke utara Sumatera, untuk menggalang kekuatan Republik menghadapi Agresi Belanda I. Berdasarkan laporan intelijen yang saya peroleh, saya mengemukakan kepada Bung Hatta, bahwa perjalanan ke utara paling jauh hanya sampai di Pematangsiantar. Walaupun begitu, Bung Hatta tetap bersemangat melanjutkan perjalanan kerjanya. Rombongan kami menuju Palupuh, Sipisang, Bonjol, Lubuk Sikaping di Pasaman.<sup>8</sup>

---

Amir Syarifuddin dan T. M. Hasan di Medan, 1946 (Sumber: *Gubernur Sumatera: Dari Aceh ke Pemersatu Bangsa*)

---





Presiden Soekarno didampingi Gubernur Teuku Mohammad Hasan dalam kunjungan ke Jambi, 1948 (Sumber: *Gubernur Sumatera: Dari Aceh ke Pemersatu Bangsa*).

Atas permintaan Presiden Sukarno, Mohammad Hatta tetap tinggal di Sumatera hingga akhirnya Perjanjian Renville ditandatangani oleh pemerintah Indonesia. Perdana Menteri Amir Syarifuddin bersama Sutan Sjahrir menjemput Hatta kembali ke Yogyakarta pada 5 Januari 1948. Pada Juni, Presiden Sukarno kemudian ganti berkunjung ke Sumatera untuk menggalang dukungan dan kekuatan nasional. Presiden ke Aceh bertemu Tengku Daud Beureueh untuk merumuskan strategi mobilisasi umum dan pengumpulan dana pembelian pesawat Dakota DC-3 untuk kepentingan revolusi nasional. Pada kunjungan itu, struktur pemerintahan Sumatera secara terpusat sebagai satu provinsi dibatalkan. Sebagai gantinya, dibentuk struktur baru yaitu Komisariat Negara Republik Indonesia di Sumatera, yang menjadikan status Gubernur Mohammad Hasan berubah menjadi Wakil Pemimpin Besar Bangsa Indonesia di Sumatera.

Perjanjian Renville ternyata juga tidak berumur panjang. Menjelang akhir 1948, pesawat Belanda terbang di atas kota Bukittinggi dan mengedarkan pamflet yang berisi bahwa Perjanjian Renville tidak berlaku lagi. Satu hari setelah pamflet beredar, Belanda menerjunkan pasukan terjun payung di Maguwo dan menduduki Yogya pada 19 Desember 1948. Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta dan sejumlah pejabat tinggi ditahan. Di Sumatera, Mohammad Hasan memperoleh surat kawat dari Mr. Syarifuddin Prawiranegara mengenai pembentukan pemerintah darurat;

Kami Presiden Republik Indonesia memberitahukan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 06.00 pagi, Belanda telah mulai serangannya atas Ibukota Yogyakarta.

Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasai kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk Pemerintah Republik Indonesia Darurat di Sumatera.

Yogyakarta, 19 Desember 1948

Presiden (Sukarno)  
Wakil Presiden (Mohammad Hatta)<sup>9</sup>

Secara spontan, Mohammad Hasan menyetujui usulan itu karena terdorong oleh kepentingan perjuangan nasional. Sjafruddin Prawiranegara menunjuk Hasan sebagai wakil Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang berkedudukan di Bukittinggi. Keputusan pertama yang diambil Hasan saat itu adalah menginstruksikan pejabat pemerintah di Bukittinggi bersiap mengungsikan diri ke perkebunan Halaban, dekat Payakumbuh. Salah satu tugas utama yang diaman oleh PDRI Sumatera adalah menyiarkan kabar mengenai keadaan Indonesia melalui radio dan menerima kabar internasional dari All India Radio di New Delhi.

Dalam masa darurat ini pula rombongan PDRI terus berpindah-pindah di Sumatera untuk menghindari seragam udara dari Belanda. Hal itu terus dilakukan hingga Perjanjian Roem-Royen disepakati pada 7 Mei 1949. Seperti yang ditulis Hasan, banyak orang yang tidak setuju dengan isi kesepakatan tersebut, namun demi menjaga kesatuan dan keutuhan negara, ia dan para pengurus PDRI memutuskan untuk bersabar.



Tengku Daud Beureueh menyambut kedatangan Presiden Sukarno di Aceh, 1948  
(Sumber: *Gubernur Sumatera: Dari Aceh ke Pemersatu Bangsa*).

Pada awal Juli 1949, utusan Republik yang terdiri dari M. Natsir, J. Leimena, dan Dr. Halim datang ke Bukittinggi menemui para pejabat PDRI. Dari pertemuan dengan para utusan, Sjafruddin Prawiranegara memutuskan terbang kembali ke Jakarta bersama Menteri Keunangan Mr. Lukman Hakim, yang juga menundi pengembalian mandat dari Ketua PDRI kepada pemerintahan Soekarno-Hatta. Setelah pertempuran yang sengit dan memakan banyak korban, perundingan yang menimbulkan perpecahan, dan berbagai krisis sejak kemerdekaan, melalui Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949, menyerahkan kedaulatan Indonesia yang

sesungguhnya telah dicapai bangsa Indonesia pada Proklamasi 17 Agustus 1945.

Seiring dengan pengakuan atas kedaulatan wilayah Indonesia, struktur administrasi negara terus menyesuaikan dengan kebutuhan daerah. Teuku Mohammad Hasan tidak lagi menjabat sebagai gubernur, namun senantiasa ditawarkan berbagai kedudukan. Dalam memoarnya, Hasan mengenang bahwa Mohammad Hatta suatu kali pernah menawarinya posisi sebagai duta besar di Jakarta. Ia menolak tawaran tersebut dengan menyatakan;

Setelah ikut dalam perjuangan pembentukan negara RI sebagai anggota PPKI, mempertahankannya di zaman Revolusi Kemerdekaan, sampai terwujudnya penyerahan kedaulatan dan negara kesatuan, saya sudah merasa cukup bahagia hanya sebagai rakyat biasa, namun yang merdeka di negara yang sudah merdeka.<sup>10</sup>



## PENUTUP

Selama masa perang kemerdekaan Indonesia (1945–49), Sumatera memiliki posisi unik dan tidak terduga. Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, para pemuda laskar dan ulama modernis di Aceh yang tergabung dalam PUSA melancarkan revolusi menumbangkan kekuasaan *uleebalang*—elite lokal yang selama bertahun-tahun menjadi wakil pemerintahan Hindia Belanda dalam menjalankan pemerintahan di Aceh.

Dalam waktu yang tidak terpaut jauh, revolusi sosial menjarlar ke Sumatera Timur. Belanda memang tidak kembali ke Aceh, tetapi selama masa perang kemerdekaan Indonesia, pesisir timur Sumatera menjadi medan pertarungan di antara para elite lokal yang terfragmentasi mendukung negara kesatuan Indonesia di satu pihak, dan Republik Indonesia Serikat di sisi yang lain. Pada tahun-tahun yang paling menentukan bagi Republik itu, Teuku Mohammad Hasan merupakan salah seorang pemain kunci selama perang kemerdekaan Indonesia di Sumatera, termasuk kedudukannya yang problematis sebagai elite tradisional setelah revolusi sosial di Aceh dan Sumatera Timur pada 1946.

Ketika bergabung dalam PPKI, Teuku Mohammad Hasan menunjukkan kemampuan berdiplomasi dengan tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Hadikusumo, untuk mencapai kesepakatan terkait dasar negara yang akan mewisadahi kepentingan bersama. Sikap Mohammad Hasan yang tenang dan mengedepankan dialog, alih-alih konfrontrasi, membuat proses negosiasi berjalan dengan baik. Sikap tenang dan mengedepankan dialog juga tampak ketika Mohammad Hasan harus menengahi friksi yang terjadi di antara kelompok pemuda dan pihak kesultanan di Sumatera Timur. Ia pada mulanya membujuk para sultan di Sumatera Timur untuk bersedia menerima tatanan demokrasi yang ditawarkan oleh pemerintah Republik. Namun, kudeta pemuda membuat Hasan tidak dapat berbuat banyak.

Di kampung halamannya sendiri, kedudukan *uleebalang* juga

diakhiri melalui revolusi sosial. Meski putra *uleebalang*, Mohammad Hasan adalah pendukung Republik sejak awal. Hal itu menjadikannya sebagai pengecualian dari sebagian besar *uleebalang* yang berada di Aceh pada saat itu.

Selama masa studinya di Negeri Belanda, Hasan bukan jenis mahasiswa rantau yang aktif dalam berorganisasi seperti Sutan Sjahrir atau Mohammad Hatta. Meski demikian, ia menunjukkan antusiasme terhadap gagasan kemerdekaan dan bersedia ikut berjuang ketika kembali ke Tanah Air. Hasan menyelesaikan studinya tepat waktu, yang menunjukkan kualitas dirinya sebagai pribadi yang fokus. Ia tak segan-segan menyatakan keberpihakannya terhadap kemerdekaan Indonesia sejak kembali ke Aceh meski tidak serta merta mengikuti organisasi anti-kolonial yang pada saat itu tengah tumbuh subur di Hindia Belanda.

Selain kecakapannya dalam berkomunikasi, Hasan memiliki wawasan yang luas mengenai sistem hukum, situasi ekonomi dan politik global serta pengetahuan yang mendalam mengenai adat-istiadat masyarakat. Latar belakang pendidikan agaknya berkontribusi banyak dalam hal ini sehingga membuat Hasan menjadi salah satu gubernur awal di Sumatera yang memiliki hubungan baik dengan para pejabat di pemerintah pusat, bahkan setelah ia tidak lagi menjadi Gubernur Sumatera. Hasan juga sigap dalam bertindak, meskipun cenderung berhati-hati agar tidak mencederai kepentingan umum.

Selama masa Agresi Militer I dan II, Hasan melimpahkan energi, waktu dan pikirannya untuk mendukung pemerintahan pusat yang tengah dalam krisis. Ia tidak hanya mendampingi Mohammad Hatta selama berada di Sumatera, tetapi juga memastikan wakil presiden pertama tersebut dapat pergi dan kembali dengan keadaan yang aman. Ketika Agresi Militer II dilancarkan oleh pihak Belanda, bersama dengan Sjafruddin Prawiranegara, Hasan langsung sigap menyambut pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Selama delapan bulan menjadi bagian dari PDRI, ia hidup berpindah-pindah untuk menghindari serangan Belanda. Selama masa itu,

Hasan harus hidup berjauhan dari istri dan anak-anaknya. Namun, kegigihannya selama periode sulit tersebut nyatanya berbuah manis, kemerdekaan Indonesia diakui oleh Belanda setelah Konferensi Meja Bundar.

Jika dikaitkan dengan keadaan politik di Aceh, tempat Mohammad Hasan berasal, maka sosok dengan kapasitas politik yang demikian telah menjadi demikian langka. Menjadi pejabat daerah sering kali berarti bersinggungan dengan kepentingan pusat. Setelah perjanjian damai antara pihak Republik Indonesia dan pihak Gerakan Aceh Merdeka ditandatangani pada Agustus 2005, arena politik lokal diwarnai berbagai elemen yang memfokuskan diri pada kepentingan daerah semata dan menolak negosiasi dengan pemerintah pusat. Hal itu dapat dilihat misalnya dalam tuntutan untuk memiliki bendera dan simbol pemerintah sendiri di Aceh yang terus-menerus tidak disetujui pemerintah pusat.

Walau berasal dari konteks zaman yang berbeda, sosok Teuku Mohammad Hasan hadir sebagai figur politik yang menjadi perantara pemerintah pusat dengan berbagai elemen masyarakat di Sumatera selama masa jabatannya sebagai gubernur pada periode revolusi. Di tengah kemajemukan kelompok etnis dan agama di Sumatera, Hasan telah berhasil merangkul berbagai elemen sosial-budaya hingga terwadahi dalam tatanan pemerintahan Republik di Sumatera. Inspirasi utama dari sosok Mohammad Hasan adalah kecakapannya sebagai mediator.

Dalam impitan kepentingan pada masa genting bagi Republik, Teuku Mohammad Hasan menjalani tanggung jawabnya sebagai gubernur untuk wilayah yang luasnya dua kali lebih besar daripada Pulau Jawa, sekaligus menjaga komunikasi dengan pihak pemerintah pusat di Yogyakarta. Sebagai *uleebalang* sekaligus pendukung Republik, Hasan juga bertindak sebagai penengah di antara perseteruan kelompok pro-Republik dan bekas pejabat swapraja, baik di Aceh maupun Sumatera Timur. Sebagai bagian dari elite tradisional, kemampuan Mohammad Hasan dalam mempertahankan hubungan dengan para pemuka agama dan adat pada lapisan

regional serta kemampuan negosiasi dengan para elite nasional telah membuat ia menjadi perantara yang mumpuni antara berbagai pemangku kepentingan politik di berbagai lapisan tersebut.

**Catatan Akhir:**

1. T. M. Hasan, *Gubernur Sumatera, Dari Aceh ke Pemersatu Bangsa: Memoir Mr. Teuku Moehammad Hasan* (Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 1999), hlm. 54.
2. Hasan, *Gubernur Sumatera*, hlm. 86.
3. Hasan, *Gubernur Sumatera*, hlm. 227–8.
4. Hasan, *Gubernur Sumatera*, hlm. 222–3.
5. Hasan, *Gubernur Sumatera*, hlm. 312.
6. Osman Raliby, *Documenta Historica: Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Perjuangan Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Bulang Bintang, 1953), hlm. 575; kutipan langsung menggunakan ejaan aslinya.
7. Hasan, *Gubernur Sumatera*, hlm. 454.
8. Hasan, *Gubernur Sumatera*, hlm. 473–4.
9. Hasan, *Gubernur Sumatera*, hlm. 486.
10. Hasan, *Gubernur Sumatera*, hlm. 501.

---

**SOETARDJO KARTOHADIKOESOEMO**

---





# SOETARDJO KARTOHADIKOESOEMO

## ANAK PRIAYI MENGABDI BANGSA

MARTIN SITOMPUL

Sukabumi, pertengahan 1936. Di pesanggrahannya yang sejuk di Desa Cimelati, diterangi lampu petroleum, Soetardjo Kartohadikoesoemo menyusun konsep petisi yang akan disampaikan dalam sidang Volksraad (Dewan Rakyat) Hindia Belanda. Pukul lima pagi, petisi rampung. Ia menyodorkan petisi itu kepada Sam Ratulangi, rekan sesama anggota Volksraad asal Minahasa, yang tinggal tak jauh dari kediamannya.

*“Zeg, waar haal jij dit vandaan?”* tanya Ratulangi terperanjat. Hai, dari mana kau ambil ini, demikian arti pertanyaan itu.

“Inilah, baca sendiri!” ujar Soetardjo sembari menyodorkan lagi Grondwet Nederland atau Kitab Konstitusi Belanda.

Tanpa ragu, Ratulangi membubuhkan tanda tangannya di bawah rancangan petisi yang disusun Soetardjo.<sup>1</sup> Pada 15 Juli 1936, petisi dilayangkan dalam sidang Volksraad. Publik Hindia Belanda, baik anggota Volksraad maupun bukan, tersentak. Petisi itu juga menjadi pembicaraan di Negeri Belanda.

“Hindia berdiri sendiri,” ujar Agus Salim, tokoh fraksi Partai Sarekat Islam Indonesia dalam Volksraad, menyatakan maksud petisi itu.<sup>2</sup>

Sang pencetus petisi, Soetardjo, justru seorang priayi dan pejabat birokrat kolonial. Pegawai yang mengabdikan pada pemerintah Hindia Belanda. Pada zaman kolonial, priayi merupakan salah satu pilar politik untuk mencapai kepentingan dan arah ‘negeri induk’-nya.



Dalam narasi sejarah Indonesia, peran Soetardjo Kartohadikoesoemo memang lebih dimafhumi sebagai pencetus petisi di Dewan Rakyat Hindia Belanda. Kendati demikian, Soetardjo termasuk salah seorang gubernur perintis pada masa kritis revolusi Indonesia. Namun, dalam hal ini, kiprahnya kurang bergema. Tulisan ringkas ini mengangkat sepak terjang dan perjuangan Soetardjo sebagai gubenur pertama di Jawa Barat.

### **BIROKRAT KOLONIAL**

Mas Soetardjo Kartohadikoesoemo lahir di Desa Kunduran, Blora, Jawa Tengah, 22 Oktober 1890, dari keluarga priayi. Ayahnya, Mas Kartoredjo adalah wedana Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, masih keturunan keluarga pemerintahan dari Madura. Sedangkan ibunya, Mas Ayu Kartoredjo keturunan keluarga pemerintahan dari Banten. Kakeknya dari pihak ayah adalah Kiai Kartowijoyo, lurah Pandean, Kabupaten Tuban. Seluruh keluarganya dididik menjadi abdi pemerintah.

“Saudara berjumlah tujuh orang, yaitu lima orang kakak, dua orang adik. Yang laki-laki semuanya menjadi pegawai negeri, yang wanita jadi isteri pegawai negeri,” ujar Soetardjo sebagaimana dituliskan anaknya, Setiadi Kartohadikusumo dalam *Sutardjo: “Petisi Sutardjo” dan Perjuangannya* (1990).

Pendidikan formal Soetardjo diawali dari ELS (Europeesche Lagere School, setara SD). Setelah tamat dari ELS, Soetardjo melanjutkan ke Opleiding School voor Indlandsche Ambtenaren (OSVIA, sekolah menengah pamong praja bumiputra) di Magelang. Semasa menjadi siswa OSVIA, Soetardjo mulai sadar politik. Ia tergabung dalam organisasi kebangsaan Boedi Oetomo cabang Magelang dan menjabat sebagai ketuanya pada 1909–11.

Soetardjo mengawali karier sebagai birokrat saat menjadi *hulpschrifer* (pembantu juru tulis) di Rembang pada 1911. Kariernya moncer. Pada tahun dan di tempat yang sama ia diangkat menjadi juru tulis jaksa kemudian mantri kabupaten. Di Bogorejo, Blora,

Soetardjo menjabat sebagai asisten wedana pada 1913. Saat itu, terjadi gerakan kepercayaan Samin pimpinan Surontiko yang menentang kekuasaan pemerintah. Soetardjo berperan memadamkan gerakan Samin dengan pendekatan persuasif terhadap para penganutnya.

Pada 1915, ia menyandang jabatan jaksa di Rembang. Kinerja yang baik membawa Soetardjo ke Batavia untuk sekolah di Bestuurschool (sekolah tinggi pemerintahan) antara 1919–21. Di sana, ia memimpin redaksi kalawarta *Oud Osviaan*. Pada 1919, Soetardjo pernah membuat tulisan dalam pamflet yang berisikan keluhan dan diskriminasi yang dialami pamong praja bumiputra.

Mereka seringkali ditegur di depan umum oleh pejabat Belanda, dan tidak memiliki hak inisiatif, atau pengembangan intelektual atau ekspresi berpendapat, tulis Susan Abiyasekere dalam "The Soetardjo Petition" (1973). Tulisan Soetardjo tersebut menjadi tanda awal sentimen antikolonial dalam dirinya. Lebih lanjut Abeyasekere menulis bahwa kampanye Soetardjo untuk menaikkan status dan moral pamong praja kemudian terlihat dalam *Volksraad*; gerakan mendesak pemerintah untuk menunjuk kedudukan orang Indonesia ke tingkat administrasi yang lebih tinggi.

Setelah menyelesaikan pendidikan di Bestuurschool, Soetardjo kembali ke Rembang hingga menjadi wedana. Pada 1929, saat menjadi patih di Gresik, ia terlibat dalam pembentukan Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra (PPBB) dan terpilih sebagai wakil ketua, sedangkan Bupati Bandung Raden Adipati Aria Wiranatakusuma V<sup>3</sup> menjadi ketuanya.

Loyalitas Soetardjo sebagai pegawai kolonial tak disangsikan dalam PPBB. Saat itu, Gubernur Jenderal Jonkheer A. C. D. de Graaf memulihkan kedudukan kepala dan pegawai jawatan pegadaian yang melakukan aksi mogok. Namun kebijakan itu menuai kecaman dari seorang wartawan Belanda bernama Zentgraaf yang dikenal vokal. Dalam surat kabar *Surabaiasch Hendelsblad*, Zentgraaf melontakan kritik tajam yang merendahkan wibawa pemerintah kolonial.

“Jiwa saya sebagai seorang pegawai pemerintah memberontak terhadap kelakuan wartawan Belanda tersebut,” ujar Soetardjo. Ia pun membalasnya dengan karangan yang berisi bantahan terhadap Zentgraaf. “Saya telanjangi dia sebagai seorang warga negara Belanda yang tidak sopan terhadap seorang pembesar Belanda yang tertinggi itu.”

### **BERGULAT DI DEWAN RAKYAT**

Dari PPBB, Soetardjo Kartohadikoesoemo melenggang ke Volksraad.<sup>4</sup> Pada 1931, ia bertolak ke Batavia, bertugas mewakili PPBB dan pemerintahan Jawa Timur. Dalam sidang pertama Volksraad, ia terpilih sebagai anggota College van Gedelegeerde Volksraad atau Badan Pekerja Dewan Rakyat.

Sebagai fraksi yang dipimpin oleh Soetardjo, PPBB berhaluan moderat progresif dan tergolong berposisi terhadap pemerintah. Sebagaimana lembaga legislatif, terdapat pasang-surut dan kecenderungan antarfraksi dalam Volksraad. Soetardjo menjelaskan hubungannya dengan fraksi nasionalis terjalin dengan cukup erat, terutama dengan ketuanya Mohammad Husni Thamrin dan anggota-anggotanya. Namun Soetardjo agak berseberangan dengan kelompok nasionalis yang lebih vokal semisal Mr. Mohammad Yamin, Raden Panji Suroso, Sukardjo Wirjopranoto, dan Wiwoho. Relasi positif juga terjalin dengan fraksi Indo Europeesch Verbond (IEV), terutama dengan ketuanya, Dick de Hoog. Begitu pula dengan fraksi Katolik, terutama dengan ketuanya Piet Kartens dan anggotanya I. J. Kasimo.

Sementara itu, hubungan fraksi Soetardjo kerap memanas dengan fraksi Vaderlansche Club (VC), kelompok nasionalis Belanda yang berhaluan konservatif. Mereka menginginkan penguatan kekuasaan Belanda atas seluruh Hindia. Menurut Soetardjo, VC bersikap ofensif terhadap Gubernur Jenderal Hindia Belanda Jonkheer de Graaf dan Gubernur Jawa Timur Hardeman, ataupun terhadap pembesar Belanda yang melindungi kepentingan rakyat Hindia.

Selama di Volksraad, berbagai kebijakan sipil dicetuskan Soetardjo. Prakarsanya terutama untuk hal-hal yang mendukung kesetaraan terhadap rakyat bumiputera. Pada 1932, Soetardjo mendukung pengajuan petisi Husni Thamrin kepada pemerintah untuk menggunakan sebutan “orang Indonesia” mengganti kata *inlander* alias ‘pribumi’ dalam tata hukum, badan-badan di bawahnya, dan dokumen-dokumen resmi pemerintah. Kata *inlander* secara harfiah berarti anak negeri. Istilah ini muncul secara resmi dalam Regeringsreglement (Undang-undang Administrasi Hindia) pada 1854. Namun, lambat-laun kata *inlander* digunakan oleh orang Belanda untuk merendahkan rakyat Hindia yang dimaknai sebagai ‘bodoh’, ‘pemalas’, dan ‘terbelakang’. Bahkan sempat pula “inlander” disetarakan dengan anjing. Kendati demikian, pemerintah menolak anggapan bahwa istilah *inlander* bernuansa menghina.<sup>5</sup>

Dalam *De Indische Courant* (14 Juli 1933), Soetardjo mencela keputusan pemerintah yang tak bersedia menggunakan kata *Indonesier* ‘orang Indonesia’. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan kolonial Belanda tak lepas upaya dan kerja keras pemerintah bumiputera. Volksraad akhirnya menyetujui agar tak lagi menyebut anak negeri dengan “inlander.” Penggunaan sebutan “orang Indonesia” berangsur-angsur diperbolehkan.

Memasuki paruh kedua 1930, pemerintah kolonial makin memperlihatkan politik tangan besi. Para tokoh politik nasional Hindia Belanda seperti Sukarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir dibungkam. Mereka ditekan dengan diasingkan ke pelosok Hindia demi stabilitas politik. Efek depresi ekonomi global juga menyebabkan penghematan besar-besaran oleh pemerintah kolonial yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sebagai pegawai pemerintah, Soetardjo protes menyaksikan keadaan yang merugikan masyarakat seperti pengurangan gaji, pemecatan, pembatasan kesempatan pendidikan, dan kebijakan pemerintah yang bersifat mencurigai terutama terhadap gerakan nasionalis Indonesia non-koperasi. Soetardjo juga mengkhawatirkan tindakan pemerintah yang represif menyusul pemberontakan De

Zeven Provincien pada 1933. De Zeven Provincien adalah kapal Angkatan Laut Belanda yang dilarikan sekelompok awak kapal berbangsa Indonesia sebagai aksi protes kebijakan pemotongan upah. Soetardjo juga menyampaikan keberatannya atas penangkapan pemimpin sayap kiri nasionalis serta gelagat pemerintah untuk melemahkan kekuatan Keraton Surakakarta dan Yogyakarta.

Pada Maret 1936, Soetardjo mengajukan mosi meminta bantuan 25 juta gulden dari pemerintah Belanda untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat desa. Mosi itu tidak mendapat tanggapan pemerintah. Pemerintah kolonial *kadung* menilai pamong praja yang berpihak kepada kepentingan rakyat sebagai pegawai yang kurang dapat dipercayai. Seorang bekas gubernur jenderal Hindia Belanda bahkan menjuluki Soetardjo “de linkse B.B ambtenaar” yang artinya pegawai pemerintah dalam negeri yang berhaluan kiri.<sup>6</sup>

“Kepercayaan para terpelajar bangsa Indonesia terhadap itikad baik dari pemerintah Belanda telah sangat merosot,” ujar Soetardjo. Ia tegaskan bahwa dirinya dapat menentang kebijakan pemerintah dan meraih dukungan publik asalkan tindakannya berdasarkan hukum.

### **MENCETUSKAN PETISI**

Pada Juli 1936, Soetardjo merancang petisinya yang kemudian dikenal sebagai Petisi Soetardjo. Petisi itu bermula secara tak sengaja tatkala ia membaca Konstitusi Belanda dalam buku himpunan undang-undang yang diterbitkan bekas anggota Dewan Hindia Belanda, Mr. W. A. Engelbrecht, cetakan 1928. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut berbunyi, “Het Koninkrijk der Nederlanden omvat het grondgebied van Nederland, Nederlansch-Indie, Suriname en Curaçao,” yang berarti Kerajaan Belanda mencakup wilayah Belanda, Hindia Belanda, Suriname, dan Curaçao. Menurut Soetardjo, Hindia Belanda memiliki tempat yang sejajar dengan Negeri Belanda karena bersama dengan dua wilayah lainnya membentuk Kerajaan Belanda.

Dalam petisinya, Soetardjo mengusulkan agar diselenggarakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil Belanda dan Hindia Belanda dengan kedudukan sejajar. Tujuannya, membuat rencana berjangka sepuluh tahun untuk menyiapkan kemerdekaan Hindia Belanda yang akan tetap berada dalam kesatuan dengan Kerajaan Belanda sebagaimana negeri persemakmuran.

Di Volksraad, petisi itu dikuatkan beberapa anggota yang lain. Di antaranya Sam Ratulangi, perwakilan Kristen dari Persatuan Minahasa; I. J. Kasimo dari Perkumpulan Politik Katolik; Datuk Tumenggung, aristokrat Minangkabau dan sekretaris PPBB; serta Ko Kwat Tiong dan Alatas dari fraksi minoritas, masing-masing dari kelompok Tionghoa dan Arab. Berbagai komite di tingkat pusat maupun daerah melakukan propaganda untuk mendukung gagasan dalam petisi itu.

Petisi Soetadjo diperdebatkan dalam sidang Volksraad. Sejumlah fraksi mengemukakan sikap beragam. VC berpendapat bahwa rakyat Indonesia belum matang dan selamanya tidak akan matang. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial harus tetap berkuasa. Christelijke Staatkundige Partij (Partai Kristen) mufakat untuk memberi otonomi sebagai negara kepada Hindia Belanda, tetapi masih menganggap belum saatnya hal itu dilakukan. Kecuali Kasimo yang turut menandatangani petisi, Partai Katolik menolak petisi seraya menekankan kerja sama ekonomi lebih penting daripada urusan kemerdekaan.

IEV dapat menyokong asalkan diadakan *rijksraad*, dewan legislatif untuk seluruh negara bagian Kerajaan Belanda. Politiek Economisch Bond (PEB) dan fraksi Islam dapat menyetujui petisi. Sementara fraksi Nasionalis terbelah dalam dua kubu. Mohammad Noor, Suroso, Sukardjo, dan Wiwoho adalah kelompok yang tidak menyokong. Mereka menganggap kedudukan sendiri untuk Hindia Belanda tak patut diperoleh lewat cara meminta-minta sebagai penafsiran terhadap Petisi Soetardjo. Sedangkan Husni Thamrin, Kusumo Utojo, Soangkupon, Abdul Rasjid, Oto Iskandardinata, Bustan, dan Jahja mendukung petisi.

Petisi itu akhirnya diputuskan lewat pemungutan suara. Hasilnya diterima dengan 26 suara setuju, 20 suara menolak. Petisi kemudian diteruskan ke Negeri Belanda. Keputusan Kerajaan baru diperoleh dua tahun kemudian, tepatnya pada 16 November 1938 yang mengukuhkan penolakan terhadap Petisi Soetardjo. Kerajaan berpendapat bahwa rakyat Hindia Belanda belum matang untuk mempersiapkan sebuah pemerintahan sendiri.

Ketika itu pemerintahan di Negeri Belanda dipimpin tokoh maha-konservatif, Perdana Menteri Hendrijk Colijn (lihat P. Swantoro, *Dari Buku ke Buku*). Colijn didampingi Charles Joseph Welter sebagai Menteri Urusan Jajahan. Keduanya berpendapat bahwa perubahan fundamental status Hindia Belanda bersifat prematur, mengingat tahap perkembangan sosial sebagian besar penduduk belum memadai. Welter malah mengemukakan, memperbaharui hukum ketatanegaraan menuntut waktu yang lama. Oleh karena itu belum waktunya Belanda dan Hindia Belanda duduk sederajat pada satu meja.<sup>7</sup> Padahal pada 1910-an, Colijn pernah mengusulkan bentuk pemerintahan federalisme Hindia Belanda untuk mempertahankan kepemimpinan tradisional di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan kepulauan timur Hindia. Menurut Vincent Houben, sesungguhnya, 'kebersamaan' Hindia Belanda dan Nederland hanya demi keuntungan ekonomis-finansial bagi Nederland sendiri (dalam *Van kolonie tot eenheidstaat*, dikutip Swantoro).

Di Negeri Belanda, petisi tersebut hanya mendapat dukungan dari kaum sosial demokrat dan kaum komunis. "Pemerintah di Den Haag tidak mampu menangkap kesempatan emas itu dan bahkan mendukung perasaan superioritas rasial yang sedang tumbuh dalam masyarakat eropa di Hindia," tulis sejarawan Belanda Frances Gouda dalam *Dutch Cultures Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda 1900-1942*. Sementara, di Hindia Belanda, Petisi Soetardjo sebagai kans terakhir untuk penyelesaian damai hanya disadari segelintir orang. Gubernur Jenderal de Jonge dalam *De Sumatera Post* (1936) bahkan menyatakan, "saya berpendapat setelah kami bekerja di

Hindia selama tiga ratus tahun, masih akan memerlukan tiga ratus tahun lagi sebelum Hindia mungkin akan menjadi matang untuk suatu kemerdekaan.”<sup>8</sup>

Penolakan terhadap Petisi Soetardjo menimbulkan kekecewaan besar di kalangan nasionalis yang bekerja dalam tatanan kolonial. Hal itu sekaligus memupus kepercayaan terhadap pemerintah kolonial yang berkaitan dengan masa depan wilayah jajahan. Lantaran petisinya itu, sebanyak empat kali Soetardjo pernah diperiksa oleh alat kekuasaan kolonial.

Walhasil, kelompok nasionalis Indonesia justru semakin memperkuat tuntutan melepas diri dari ikatan kolonial. Menyusul penolakan petisi, pada 1939, partai-partai politik berhaluan nasionalis membentuk Gabungan Politik Indonesia (Gapi) dengan tuntutan utama: Indonesia berparlemen. Sementara bagi pemerintah Belanda, peluang besar untuk mempertahankan Hindia Belanda kandas setelah penolakan Petisi Soetardjo. Kehilangan negeri jajahan yang makmur di ambang pintu. Hal itu terbukti ketika ancaman pendudukan Jepang datang pada 1942. Seruan Ratu Wilhelmina untuk mempertahankan Hindia Belanda tak mendapat tanggapan berarti dari para priayi nasionalis birokrat yang diikuti kalangan priayi lainnya.

## **RESIDEN PADA MASA DAI NIPPON**

Pada masa pendudukan Jepang, Soetardjo Kartohadikoesoemo memimpin departemen dalam negeri atau Naimubu Sanyo. Radio PPRK yang dipimpinnya pada 8 Maret 1942 menyiarkan bahwa tentara Jepang sudah mendarat di pantai distrik Kragan, Rembang dan di Anyer, Banten.<sup>9</sup> Soetardjo juga aktif dalam badan bentukan Jepang lainnya. Ia menjadi anggota badan perwakilan bentukan Jepang, Tjhoeo Sangi-in dan anggota Poetera (Pusat Tenaga Rakyat).<sup>10</sup>

Setahun kemudian, tepatnya 10 November 1943, Soetardjo menjadi residen (*syucokan*) Jakarta. Ia merupakan satu dari tiga



orang Indonesia yang dipercaya menduduki posisi residen sepanjang masa pendudukan Jepang.<sup>11</sup> Sebagai seorang pejabat di lingkungan pemerintahan sipil Jepang, Soetardjo acapkali berurusan dengan pejabat dari kalangan militer. Dalam hal kebutuhan logistik pangan untuk kebutuhan perang, misalnya, pejabat militer Jepang kerap menekan Soetardjo, memaksakan kehendak dengan memforsir kerja petani menyediakan padi. Daerah kekuasaan keresidenan Jakarta kala itu meliputi daerah Karawang, Cikampek, Sukamandi, Tangerang, dan Purwakarta yang terkenal sebagai gudang padi.<sup>12</sup>

Soetardjo menyiasatinya dengan program kerja yang cerdas yakni politik beras. Beras tidak boleh dikuasai seluruhnya oleh pedagang Tionghoa. Maka, di wilayah keresidenan Jakarta dilakukan penertiban distribusi beras. Sejak mulai menanam sampai menjemur gabah harus berada di tangan rakyat desa dan petani. Orang-orang Tionghoa hanya diizinkan menggiling. Mengenai distribusi, Soetardjo lebih banyak membela dan membantu untuk kepentingan rakyat daripada untuk pendudukan Jepang.<sup>13</sup>

Hal pertama sekaligus tersukar yang dicobanya adalah mengembalikan tanah partikelir kepada rakyat untuk menghasilkan sumber pangan. Persoalan lahan terpecahkan dengan mengadakan pembagian sawah dan tanah kering ke tiap-tiap desa yang terdaftar serta dihitung dan ditetapkan pajaknya. Langkah selanjutnya, produksi padi untuk rakyat dan angkatan perang Jepang. Dengan memanfaatkan jasa seorang ahli pertanian Jepang dan seorang ahli pertanahan lokal, Soetardjo memprakarsai gerakan menanam padi berlarik dan pembersihan sawah atau "mengoyos." Hasilnya cukup baik, kebutuhan pangan rakyat Jakarta dan angkatan perang Jepang dapat terpenuhi.<sup>14</sup>

Keresidenan Jakarta pada masa pendudukan Jepang mencakup sebagian dari daerah Jawa Barat saat ini. Oleh karena itu, Soetardjo cukup dikenal oleh para bupati yang di daerah Jawa Barat. Tidak mengherankan ketika memasuki masa Indonesia merdeka, pemerintah pusat atas saran kalangan pamong praja Jawa Barat mengangkat Soetardjo sebagai gubernur Jawa Barat.<sup>15</sup>

Kemampuan dan wawasan Soetardjo dalam penataan birokrasi mencatatkan dirinya sebagai tokoh yang diperhitungkan kaum nasionalis. Itu dibuktikan oleh pengalamannya sebagai pamong praja pada dua rezim yang berbeda: pemerintah kolonial Hindia Belanda dan militer Jepang. Figurnya lebih dipandang lewat konsistensinya memajukan kehidupan rakyat ketimbang ningrat berdarah biru.

Pada waktu Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk pada 1 Maret 1945, Soetardjo menjadi salah satu anggotanya. Sebagai wadah bentukan Jepang, BPUPKI dimaksudkan untuk mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia. Soetardjo tercatat sebagai anggota membidangi Urusan Keuangan dan Perekonomian dengan ketua Mohammad Hatta.

Dalam rapat besar BPUPKI 11 Juli 1945, Soetardjo mengusulkan wilayah Indonesia meliputi seluruh Hindia Belanda ditambah Malaya dan Papua. Namun, yang diputuskan kemudian adalah wilayah Hindia Belanda dan Papua minus Malaya seperti saat ini. Di forum yang sama, Soetardjo menyatakan yang terpenting dalam rancangan untuk negara Indonesia adalah kemerdekaan batin. "Yang paling kuat untuk menyusun negara yaitu memerdekakan batin dengan lain perkataan di dalam agama kita, 'mati dan hidup' atau 'sirnaraga' atau tidak mementingkan diri sendiri atau yang lebih penting lagi 'datang ke alam kesurgaan'."<sup>16</sup>

## **MENJADI GUBERNUR**

Pada 17 Agustus 1945, di Jakarta, Sukarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara republik yang berdaulat. Sukarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden. Dua hari kemudian ditetapkan delapan provinsi di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kendati demikian, formasi resmi kabinet dan penataan regional belum terbentuk. Selain itu, aparatur dan birokrat di tingkat daerah masih diragukan loyalitas nasionalisnya.

Pada 2 September 1945, sebuah konferensi pamong praja di Jawa dan Madura dibuka di Jakarta. Konferensi tersebut berlangsung atas usul bersama antara Presiden Sukarno dan Soetardjo Kartohadikoesoemo yang bertindak selaku juru bicara utama mewakili kelompok pamong praja. Sukarno menyambut baik pertemuan itu dan berharap keberpihakan pamong praja dalam membangun negara. Hasil konferensi memperdengarkan semua ungkapan kesetiaan pamong praja kepada Republik. Para pamong praja sepakat membantu menunjukkan kepada dunia bahwa seluruh rakyat bersatu di belakang kepemimpinan Republik Indonesia.<sup>17</sup>

Sebelum konferensi digelar, Soetardjo telah bertemu dengan Sukarno dan Hatta secara pribadi. Negosiasi politik terjalin di antara ketiganya. Soetardjo meyakinkan dwitunggal pemimpin Indonesia itu tentang dukungan pangreh praja terhadap negara Indonesia asalkan status mereka dapat dijamin.<sup>18</sup>

Pada 6 September 1945, diumumkan bahwa sesuai dengan keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Komite Nasional Indonesia Pusat, wilayah Pulau Jawa dibagi menjadi tiga provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, masing-masing akan dipimpin seorang gubernur yang bekerja langsung di bawah kabinet. Soetardjo ditunjuk sebagai gubernur Provinsi Jawa Barat yang pertama.

### **SITUASI DI JAWA BARAT**

Di Jawa Barat, berita mengenai proklamasi mencapai Kantor *Domei* (kantor berita Jepang) Bandung pada 17 Agustus 1945 siang hari. Dari situ, berita merambat ke seluruh kota dengan sangat cepat. Para wartawan muda mencetak dan menyebarkan sejumlah pamflet yang mempropagandakan kemerdekaan Indonesia. Pamflet ini kemudian menjadi salah satu sarana utama penyebaran berita proklamasi di Bandung.<sup>19</sup>

Berita kemerdekaan disambut positif oleh rakyat Jawa Barat. Namun, sebagian besar orang membutuhkan lebih banyak informasi.

Setelah pidato Sukarno mengudara di radio pada malam hari 23 Agustus, masyarakat menyadari sepenuhnya fakta luar biasa bahwa rezim lama telah runtuh dan era baru sedang dimulai.<sup>20</sup>

Berlatar belakang budaya Jawa, Soetardjo Kartohadikoesoemo yang ditunjuk untuk memimpin Jawa Barat secara umum dapat diterima masyarakat Sunda. Meski untuk sementara waktu memegang kendali dari Jakarta, Soetardjo memberikan instruksi spesifik mengenai apa yang harus dilakukan oleh aparat ataupun masyarakat Jawa Barat. Di atas segalanya, Soetardjo menekankan bahwa apa pun yang mereka lakukan adalah atas nama kemerdekaan Indonesia, suatu ide yang telah lama dipegang bersama. Tak pelak, Soetardjo memiliki peranan yang penting dalam urusan di Jawa Barat.<sup>21</sup>

Dalam usaha mengatur jalannya roda pemerintahan dan ketertiban di Jawa Barat, Soetardjo dibantu oleh tokoh-tokoh setempat yang berpengalaman. Raden Puradiredja, misalnya, diangkat menjadi residen Priangan. Kemudian, Oto Iskandar Dinata yang dalam susunan pemerintahan berkedudukan sebagai Menteri Negara dan Menteri Urusan Keamanan, ikut berperan mengatur persoalan yang timbul di daerah, khususnya di kota Bandung.

Terkait urusan keamanan, Tentara Keamanan Rakyat diorganisasikan di Jawa Barat. Komandemen 1 Jawa Barat—yang kelak menjadi Divisi Siliwangi—dipimpin oleh Jenderal Mayor Didi Kartasasmita dengan Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai kepala staf. Turut serta pula sejumlah kelaskaran, antara lain Pemuda Republik Indonesia, Angkatan Pemuda Indonesia, Laskar Wanita Indonesia, Hizbullah, Sabillillah, Barisan Pemberontak Republik Indonesia, Barisan Banteng Republik Indonesia, Barisan Merah Putih, Pasukan Beruang Merah, Angkatan Muda Kota Besar Bandung, dan Angkatan Muda Kereta Api.

Komitmen Soetardjo terhadap Republik dibuktikan saat perjuangan mempertahankan kemerdekaan memasuki masa genting. Sebagai pemimpin sipil, ia turut mengorganisasikan

pertahanan di Jawa Barat terhadap pendudukan tentara Sekutu dan Belanda.

## **MENGHUBUNGKAN PEMERINTAH DENGAN DAERAH**

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1945, Jawa Barat merupakan daerah otonomi provinsi yang dipimpin Gubernur Soetardjo Kartohadikoeskoemo yang berkedudukan di Jakarta. Provinsi Jawa Barat terdiri dari lima wilayah yaitu Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, dan Cirebon. Masing-masing wilayah dikepalai seorang residen. Setiap wilayah dibagi dalam 16 kabupaten yakni Bandung, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Cirebon, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Purwakarta, Tanggerang, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Serang, Rangkasbitung, Pandenglang. Di dalamnya terdapat lima kota otonomi, yaitu Jakarta, Bandung, Bogor, Cirebon, dan Banten.

Pada masa awal ke gubernurannya, Soetardjo lebih banyak berdinasi di Jakarta sehubungan dengan rencana kedatangan pasukan Sekutu. Pertengahan September 1945, terdengar berita radio, tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta, dan akan dilakukan pengalihan kekuasaan dari tangan pemerintah militer Jepang. Berita menyimpulkan, Sekutu akan mengambil alih Indonesia yang baru merdeka. Sekutu tak sendiri karena membonceng tentara sipil Belanda yang tergabung dalam *Nederlandsch Indie Civil Administratie* atau NICA.

Presiden Sukarno menangkap sinyal politik yang gawat. Untuk menghadapi dan menyambut kehadiran Sekutu, Sukarno mengundang petinggi negara di rumah kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Semua orang terkemuka hadir. Tampak di antaranya Menteri Dalam Negeri Wiranatakusuma dan wakilnya Mr. Hermani. Soetardjo turut serta mewakili eksponen pamong praja. Rapat dipimpin langsung oleh Bung Karno. Namun, pembicaraan berlangsung alot, hadirin berbicara simpang-siur. Menjelang siang, rapat belum menghasilkan keputusan. Sukarno dan Hatta pamit lebih

dulu meninggalkan rapat. Pimpinan rapat diserahkan kepada Wakil Menteri Penerangan Ali Sastroamidjojo.

Bersama Kasman Singodimedjo, Ali Sastroamidjojo melanjutkan rapat. Sementara Soetardjo yang tetap menyaksikan jalannya rapat secara saksama, sambil menimbang, dan berpikir, tiba-tiba ditunjuk Ali Sastroamidjojo untuk berbicara, "Ini Saudara Soetardjo seharian penuh belum pernah bicara. Apakah tidak punya pendapat?" Soetardjo menimpali, "Kalau ditanya, memang saya punya pendapat."<sup>22</sup>

Soetardjo menyampaikan pemikirannya. Ia menyederhanakan persoalan meski agak sedikit bertaruh bahwa jika terjadi pengoperan kekuasaan dari pemerintah militer Jepang kepada Sekutu, itu hanya berarti pengoperan kekuasaan di tingkat pusat. Sementara di daerah, situasinya berbeda. Sebagai seorang birokrat berpengalaman, ia punya alasan kuat. Menurut Soetardjo, pamong praja adalah pemimpin rakyat di daerah. Jika tentara pendudukan Jepang menyerahkan kekuasaannya, akan terjadi kekosongan pemerintahan di daerah. Maka, kekuasaan daerah yang tertinggi praktis berada di tangan bupati. Oleh karena itu, bupati dengan pemerintah Republik Indonesia diharapkan dapat bersinergi demi satu kepentingan yakni mempertahankan kemerdekaan.

Soetardjo menyarankan agar selekas mungkin para bupati dipanggil ke Jakarta. Mereka akan berkonsolidasi dengan pemerintah pusat. Para bupati akan diminta kesediaannya untuk setia mengabdikan kepada Republik. Jika setuju, mereka diminta angkat sumpah: mengakui Republik Indonesia dan tunduk pada pemerintahan yang dipimpin Sukarno-Hatta. Selanjutnya, para bupati diminta berkoordinasi dengan bawahannya, juga melibatkan alim ulama untuk membela negara.<sup>23</sup> Forum sepakat dengan usulan Soetardjo disertai riuh tepuk tangan sekaligus tanda rapat berakhir. Dua hari kemudian, para bupati seluruh Jawa berdatangan ke Jakarta.

Ketika tentara Sekutu mendarat 29 September 1945, pemerintah RI telah tersambung dengan pemerintah daerah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten). Di Bandung, pasukan Sekutu

yang terdiri dari dua batalion (2.000 prajurit) tentara Inggris resimen Gurkha tiba pada 12 Oktober 1945. Tentara Sekutu dipimpin oleh Komandan Brigade ke-37 Inggris, Brigadir Jenderal Mac Donald. Seperti diketahui, dalam rombongan Sekutu ikut serta pasukan Belanda dan petugas NICA sehingga menimbulkan kemarahan rakyat.

Kedatangan Sekutu disambut pamflet yang bertebaran ke berbagai penjuru kota. Cara penyambutan itu diinsiasi oleh berbagai organisasi perjuangan baik politik maupun militer. Isinya seolah-olah menyatakan perang terhadap Sekutu. Segala cara dan senjata dianjurkan untuk digunakan bertempur, mulai dari bambu runcing, golok, senapan, hingga ular berbisa. Semua kekuatan dikerahkan untuk menggempur setiap sikap dan tindakan yang dapat merugikan kedaulatan negara Republik Indonesia.<sup>24</sup>

Apa yang selanjutnya terjadi di berbagai daerah adalah perlawanan mempertahankan setiap jengkal wilayah. Pertempuran demi pertempuran pun meluas di sejumlah daerah di Indonesia. Perlawanan timbul karena rakyat menentang kehadiran tentara Sekutu dan Belanda.

Salah satu kancah pertempuran terbesar dan paling heroik terjadi di Surabaya. Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 menyebabkan banyak korban rakyat Indonesia. Sekira ribuan orang tewas baik dari BKR, laskar, maupun rakyat Surabaya. Pertempuran Surabaya juga berdampak politis besar karena seorang jenderal Inggris A. W. S Mallaby tewas dalam pertempuran. Mallaby menjadi satu-satunya perwira tinggi Inggris yang gugur dalam pertempuran front Perang Dunia II. Hal ini menjadi perhatian bagi Sekutu. Di tingkat pusat, kegiatan diplomatik mulai terjalin. Sekutu berupaya menghindari kerusuhan seperti yang terjadi di Surabaya. Rencana operasi militer ke berbagai daerah di Indonesia dipertimbangkan.

Komandan tentara Sekutu di Jawa Barat, Brigadir Jenderal Mac Donald mencabut perintah penyerahan senjata rakyat pada 17 November 1945. Dengan gembira Gubernur Soetardjo Kartohadikoesoeko menyampaikan perubahan sikap Sekutu kepada

rakyat Jawa Barat. Untuk sementara, Tanah Sunda terhindar dari pertempuran.<sup>25</sup>

## **MENOLAK BERAS BELANDA**

Saat Sekutu menduduki Jawa Barat, kekurangan beras tengah melanda. Krisis pangan yang dialami rakyat terpantau oleh Sekutu dan Belanda. Kendati demikian, mereka tak punya otoritas berhubungan dan menerapkan kebijakannya secara langsung terhadap rakyat, melainkan harus dengan perantaraan pemerintahan Indonesia. Sebuah kesepakatan lantas ditawarkan kepada pejabat tinggi Republik.

Pembicaraan segitiga antara pemerintah Indonesia, Sekutu, dan Belanda digelar. Pertemuan berlangsung di gedung Merdeka Selatan (kantor Pertamina sekarang). Pemerintah Indonesia diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Walikota Jakarta Suwirjo, Ir. Surachman dari Departemen Perekonomian, Mr. Latuharhary dari Departemen Dalam Negeri, dan Soetardjo selaku gubernur Jawa Barat yang sekaligus mewakili sebagai juru bicara pemerintah RI.

Belanda dengan perantaraan pimpinan tentara Sekutu menawarkan pemberian beras gratis dengan jumlah yang agak besar. Soetardjo menilai tawaran itu sebagai jebakan politis. Ia menandaskan bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Maka pemerintah RI-lah yang bertanggung jawab atas nasib rakyat di Jawa Barat. Sambil tetap mengucapkan terima kasih, pemberian beras Belanda itu ditolaknya secara tegas. Tak ingin menyerah, Brigadir Jenderal Mac Donald ikut melobi seraya bertanya apakah Gubernur (Soetardjo) tak takut akan datangnya bahaya kelaparan. Soetardjo tak kalah cerdas menimpali, "Bukankah dahulu pemerintah Belanda sendiri mengatakan bahwa rakyat kami, *de inlanders*, bisa hidup segobang sehari?"<sup>26</sup>

Mendengar jawaban Soetardjo, Sri Sultan Hamengkubuwono IX tertawa terpingkal-pingkal. Beberapa bulan kemudian, saat terjadi



bahaya kelaparan di India, pemerintah Indonesia justru mampu menyumbang 300 ton beras.

## **MENYUSUN KEKUATAN**

Sementara Sekutu sibuk melucuti tentara Jepang, pasukan Belanda dan pejabat NICA menyusun pemerintahan kolonialnya. Upaya provokasi dibangun untuk menekan pemerintah Indonesia. Di Jawa Barat, aksi ofensif Belanda pun cukup masif. Pada pertengahan 1945, tentara Sekutu dan NICA telah memasuki dan menduduki beberapa kota penting yakni Bogor, Cianjur, dan Bandung.

Pada November 1945, Gubernur Soetardjo Kartohadikoesoemo mulai menetap di Bandung. Saat itu ketegangan makin meningkat. Pada 8 November 1945, koresponden harian *Merdeka* melaporkan perilaku arogan orang Belanda yang menggunakan senapan submesin untuk memaksa orang-orang di pasar menjual makanan kepada mereka. Tiga hari kemudian, seorang koresponden Belanda melaporkan perilaku orang Indonesia yang semakin brutal; menculik tentara Sekutu yang ditugaskan mengurus tahanan perang Jepang; mengusir orang-orang Eropa keluar dari rumahnya dan memboikot mereka di toko-toko; mengurangi aliran makanan segar ke kota.<sup>27</sup>

Dalam memoarnya, Soetardjo mengenang suasana yang sangat mencekam. Berbagai pengalaman terekam, suka dan duka perjuangan. Gejolak silih berganti. Suara senapan setiap sore dan malam terdengar menderu di dalam kota. Konflik bersenjata antara pasukan Republik kontra Sekutu dan Belanda memang tak terhindarkan. Rumah gubernuran yang menjadi kediaman Soetardjo di Jalan Stasiun Bandung tak luput dari sasaran serangan. Soetardjo menggambarkan, bagaimana rumah kediamannya ikut dijaga ketat oleh pasukan laskar. Sebanyak satu peleton pemuda bersenjata menjaga rumah itu di sisi kiri sementara di sisi kanan dijaga oleh empat orang gadis cantik bersenjatakan *brengun*.<sup>28</sup> Saban malam,

pekarangan belakang rumah gubernuran dilempari granat oleh serdadu-serdadu Belanda. Beruntung, tak sampai mengenai rumah.

Provokasi tentara Belanda menyulut para pejuang gerilya membalasnya. Aksi kekerasan menjadi gejala sosial berdarah yang menjalar, khususnya di Bandung. Mayoritas korban pembunuhan yang dilakukan oleh orang Indonesia adalah orang Eropa dan Tionghoa, selain orang Belanda dan bahkan sesama orang Indonesia yang dicap mata-mata. Hampir seluruh pembunuhan tersebut terjadi di kawasan pemukiman orang Indonesia di Bandung bagian selatan. Bahkan kawasan pinggiran di Bandung sebelah utara juga tak sepenuhnya aman.<sup>29</sup>

Sementara itu, di kota-kota kabupaten para pemuda mengadakan latihan militer. Kekuatan perjuangan dari daerah diharapkan menjadi penahan manakala Sekutu melakukan ofensif dan pendukung untuk melancarkan serangan umum. Gubernur Soetardjo kerap turun ke daerah-daerah kabupaten menginspeksi pasukan dan kekuatan pertahanan. Selain itu, ia juga sedang mengusahakan memperoleh senjata milik tentara Jepang.

Pada waktu itu, Jenderal Yamamoto, pimpinan staf Komando Angkatan Darat Jepang (Rikugun) diasingkan Sekutu di Bandung. Gubernur Soetardjo menjalin korespondensi dengan Yamamoto. Gubernur melobi agar senjata Jepang tidak diserahkan seluruhnya kepada tentara Sekutu. Sebagian besar senjata itu, bila mungkin hendak dialihkan kepada pejuang-pejuang Republik guna melawan pendudukan tentara Sekutu dan Belanda. Soetardjo meyakinkan Yamamoto, rakyat Indonesia akan memenangkan perjuangan.

Permintaan senjata akhirnya disetujui Yamamoto. Perbincangan itu juga menyusun skenario untuk memperoleh senjata-senjata itu. Caranya, para pejuang gerilya berpura-pura menyerbu setiap *kampemen* yaitu kelompok rumah militer atau barak Jepang. Kemudian, senjata-senjata beserta amunisinya “dibolehkan” direbut para pejuang. Untuk melaksanakan misi itu, Gubernur Soetardjo disarankan menemui panglima resimen Jepang di Jawa Barat yang memegang gudang senjata.<sup>30</sup>

Pada suatu hari, para pemimpin gerilya dan pasukan bersenjata lainnya meminta izin Soetardjo untuk melakukan serangan umum. Sementara senjata yang tersedia masih belum memadai. Senjata-senjata Jepang juga belum diperoleh sesuai kebutuhan. Menurut hemat Soetardjo, waktunya belum tiba untuk ofensif skala besar. Alasannya, kekuatan pemukul di daerah belum siap. Mereka masih dalam pelatihan oleh Angkatan Bersenjata. Menurut Soetardjo, serangan umum baru bisa dilancarkan jika latihan pematangan sudah selesai. Begitu pula dengan perolehan senjata Jepang yang masih perlu waktu untuk mendatangkannya.

Dua hari dua malam rapat berlangsung di rumah gubernuran. Soetardjo bersikukuh percobaan serangan akan berisiko besar. Akan tetapi, tekanan untuk melakukan serangan terbuka terhadap Inggris dan Belanda menjadi luar biasa. Para pejuang menyusun rencana untuk melancarkan serangan umum pada 24 November 1945. Tanpa diduga, serangan dilancarkan pejuang-pejuang Bandung sebelum hari-H.<sup>31</sup>

## **TURUN KE FRONT**

Pada 21 November 1945, terjadi serangan pertama terhadap prajurit patroli Gurkha. Eskalasi bersenjata selanjutnya memuncak pada tiga hari berturut-turut. Harian *Merdeka* (24 November 1945) melaporkan bahwa selama seminggu terakhir, tembakan-tembakan terdengar sepanjang pagi dan malam di seluruh kota. Pada malam hari pertempuran terbuka pecah dan revolusi di Bandung pun mulai memasuki fase yang paling sengit.<sup>32</sup>

Tak hanya saling menyerang dengan senjata, teror juga ditebar dalam bentuk lain. Dini hari, 25 November 1945, serdadu Belanda melancarkan serangan sabotase. Sehabis hujan deras di Kali Cikapundung yang melintasi tengah kota Bandung, tentara Belanda sengaja membuka penahan air. Sabotase itu mengakibatkan banjir besar melanda kawasan Bandung. Banyak rumah berikut penghuninya di tepi kali itu hanyut. Jeritan warga yang tinggal di

sekitar kali beriringan dengan gemuruhnya gelombang air. Suara-suara itu bahkan terdengar sampai ke rumah gubernuran.

Keesokan pagi dilakukan pemeriksaan dan ditemukan banyak orang sipil yang hanyut merenggang nyawa. Banjir itu menghancurkan sekira 500 rumah dan memakan lebih dari 200 korban jiwa. Aktivitas penyelamatan menjadi agenda darurat bagi kelompok perjuangan. Prajurit Gurkha memperkeruh suasana dengan menembaki mereka yang berupaya melakukan penyelamatan. Selain itu, tak sedikit rumah penduduk kampung dirusak atau dibakar serdadu Belanda.<sup>33</sup>

Pada 26 November 1945, para pemuda mengganggu iring-iringan RAPWI (Recovery of Allied Prisoners of War and Internees), organisasi yang mengurus tawanan perang, dari Cimahi menuju bandara di Bandung. Walhasil, iring-iringan tak jadi diterbangkan ke Jakarta. Untuk menyikapinya, Sekutu mengirim sekompas pasukan untuk membersihkan "gerombolan pengacau." Sebanyak sepuluh orang Indonesia tewas dan lima orang lainnya mengalami cedera. Kontak senjata merembet lagi dan terus berlanjut memasuki Bandung.

Gubernur Soetardjo terpaksa mengungsi ke desa Majalaya, di selatan Bandung. Dalam kampung itu, ia tetap mengawasi jalannya pertempuran bersama bupati Bandung. Seperti diduga, serangan itu dapat ditangkis tentara Sekutu. Gerakan pejuang Bandung dipatahkan dan berujung kegagalan. Bagi kubu Sekutu, kondisi anarkis menghambat mereka untuk menguasai seluruh kota dan misi melucuti tentara Jepang. Di sisi lain, mereka juga harus bertanggung jawab untuk menyediakan tempat berlindung bagi orang sipil Eropa. Oleh karena itu, Sekutu menginginkan gencatan senjata berlaku untuk sementara waktu.

Memasuki tengah hari, 26 November 1945, pimpinan Sekutu memanggil Gubernur Soetardjo ke Bandung untuk berunding. Negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Brigade ke-37 Inggris dimulai setelah pertempuran barikade di jalan menuju Cimahi. Pembicaraan dilakukan di markas Sekutu dalam sebuah kamar

penerima tamu. Seorang diri, Soetardjo berhadapan dengan tiga orang perwira Inggris yang dijaga oleh empat orang serdadu Gurkha bersenjata. Keadaan di bawah ancaman demikian membuat Soetardjo terintimidasi dan dalam posisi terjepit.

Jenderal Mac Donald meminta pertanggungjawaban Gubernur Soetardjo atas serangan bersenjata pasukan Indonesia. Ia juga meminta agar barikade harus disingkirkan dari jalan. Tenggat waktu paling lama ditetapkan, yakni hingga pukul 12.00, tanggal 26 November 1945.<sup>34</sup> Namun, Soetardjo menolak tudingan dan permintaan Mac Donald. Menurutnya, sebagai seorang pegawai pemerintahan sipil dengan kedudukan gubernur Jawa Barat, dirinya tak punya kekuasaan atas pasukan bersenjata. Pimpinan tentara Sekutu bergeming, dan melontarkan tuntutan tambahan, yaitu agar orang Indonesia eksodus dari Kota Bandung ke arah selatan. Soetardjo tetap kukuh menolak tunduk seraya menjawab, "setiap orang pun mengerti bahwa hal itu tidaklah mungkin." Pertemuan berakhir dengan ultimatum: dalam dua hari berikutnya seluruh penduduk Kota Bandung sudah harus pindah ke sebelah selatan jalur rel kereta api.<sup>35</sup>

Pada 27 November 1945, dengan alasan menghindari pertentangan yang sering terjadi antara Sekutu dan Indonesia, Kota Bandung ditetapkan menjadi dua bagian. Bagian sebelah utara merupakan wilayah Sekutu dan Belanda sedangkan Indonesia menempati bagian selatan. Sebagai batas dari kedua wilayah, ditetapkan jalan kereta api yang membelah kota Bandung dari barat ke timur.<sup>36</sup>

Setelah pertemuan dengan Gubernur Soetardjo, Jenderal Mac Donald mengeluarkan ultimatum sebagai berikut.

1. Pihak Indonesia harus mengevakuasi (mengosongkan) kawasan utara Bandung dengan patokan jalur kereta api sebelum pukul 12.00.
2. Tidak ada warga sipil yang diperbolehkan berada pada radius 200 meter dari posisi Inggris maupun Jepang.

3. Pihak Indonesia harus mengevakuasi wilayah sekitar gedung-gedung penahanan tawanan perang Sekutu (RAPWI) meliputi Hotel Savoy Homann dan Hotel Preanger di selatan jalur kereta api.
4. Setiap laki-laki yang menjaga atau berada di dekat barikade jalan akan ditembak.<sup>37</sup>

Akan tetapi, pembagian areal Kota Bandung sama sekali tak meredakan pertempuran. Rakyat Jawa Barat enggan memenuhi tuntutan Sekutu. Sebaliknya, perjuangan perlawanan semakin menggebu. Setiap malam terjadi pertempuran antara tentara Sekutu dan pasukan bersenjata Indonesia. Rumah gubernuran pun acap kali menjadi incaran tetap.

Gempuran terhadap Kota Bandung membuat Gubernur Soetardjo harus melindungi keluarganya dengan mengungsikan bolak-balik ke Majalaya yang curah hujannya tinggi. Di Majalaya, keluarga Soetardjo dititipkan di rumah pesanggrahan Menteri Dalam Negeri Wiranatakumah. Pengungsian sering kali berlangsung pada saat hujan lebat. Akibatnya fatal. Istri Soetardjo, Siti Djaetoen Kamarroekmini terserang penyakit jantung.<sup>38</sup>

Soetardjo sendiri tetap tinggal di rumah gubernuran. Namun, karena keadaan kota semakin tak kondusif, komandan Angkatan Bersenjata memintanya pindah permanen. Semula Soetardjo tak menghiraukan. Karena situasinya kian kritis, desakan pihak militer makin kuat. Setiap hari, siang dan malam, kereta api disediakan untuk memboyong Soetardjo sekeluarga keluar dari Bandung. Kepala Angkatan Kepolisian R. M. Suparta memberi batas tempo bagi Soetardjo meninggalkan Bandung.<sup>39</sup>

Akhirnya, Soetardjo memutuskan berangkat ke luar kota. Tasikmalaya menjadi tempat tujuan. Kabupaten yang terletak di selatan Jawa Barat ini masih menjadi daerah yang tenang dan relatif aman.<sup>40</sup>

## **DIPERIKSA PASUKAN SENDIRI**

Dalam menjalankan tugas, Gubernur Soetardjo melintasi Tasikmalaya–Bandung ulang-alik dengan mobil melewati rute selatan. Sementara keluarganya, untuk sementara dimukimkan di Tasikmalaya. Secara berkala, Soetardjo mengunjungi keluarganya untuk melihat kabar dan melepas rindu kepada anak-anaknya.

Soetardjo rutin melakukan keliling ke berbagai daerah kabupaten untuk menggiatkan latihan pasukan. Beberapa daerah yang dikunjungi adalah Bandung, Bogor, Cirebon, Sumedang, Garut, Purwakarta, Tasikmalaya, dan Ciamis. Agar tak memancing perhatian musuh, dalam turnnya Soetardjo hanya ditemani seorang agen polisi kantor gubernuran tanpa konvoi dan iring-iringan.

Meski telah menumpang mobil berpelat nomor “D1”— nomor polisi untuk mobil gubernur—Soetardjo masih juga ditahan oleh pemuda-pemuda pejuang yang menjaga lalu lintas di pos tertentu. Sekali waktu, saat hendak pulang ke Tasikmalaya, Soetardjo mengalami penghadangan di jalan menuju pedalaman. Seorang pemuda bersenjata memberhentikan mobil yang membawa Gubernur itu. Dengan sikap sopan, Soetardjo diminta masuk ke dalam sebuah rumah di tepi jalan. Di dalam rumah, seorang penjaga mengajaknya masuk ke dalam salah satu kamar, kemudian meminta Soetardjo menanggalkan peci dari kepalanya. Setelah peci dibuka, dengan mohon maaf, sang penjaga minta izin “memeriksa” kepala Soetardjo. Setelah memeriksa kepala Gubernur, tanpa menyentuh kepala, penjaga mengucapkan terima kasih.

Soetardjo bertanya penuh keheranan, “Apakah kamu tahu, siapa saya ini?” Penjaga menjawab, “Barangkali tahu. Kalau tidak keliru, Bapak adalah gubernur kita.”

“Apakah maksudnya, kepala saya kamu periksa?” Soetardjo kembali bertanya.

“Saya mendapat perintah dari atasan saya, supaya kita mengadakan pemeriksaan seperti itu kepada setiap orang yang lewat sini, tidak ada yang terkecuali,” jawab si penjaga.

Pada waktu itu beredar kabar tentang mata-mata NICA yang berkeliaran di pedalaman. Tanda pengenalnya berupa grafis huruf “N” yang “diukir” pada kulit kepala si mata-mata. Pemeriksaan tanda mata-mata itulah yang dilakukan oleh para pemuda pejuang terhadap siapa pun, termasuk Gubernur. Bukannya marah atau melampiaskan emosi, Gubernur Soetardjo malah memuji dan berterima kasih atas tindakan siaga si penjaga. Perjalanan ke Tasikmalaya pun dilanjutkan.<sup>41</sup>

“Dengan senang hati saya memimpin perjuangan rakyat Jawa Barat itu,” demikian Soetardjo merefleksikan pengalaman perjuangannya sebagai Gubernur Jawa Barat pada masa revolusi.

Sewaka yang menjadi gubernur Jawa Barat ketiga (1946–52) mengakui betapa sulit menjadi gubernur pada masa kritis setelah Indonesia merdeka. Dalam memoarnya Sewaka antara lain menyatakan, “Memang tak mudah memegang pemerintahan dalam saat meletusnya revolusi semacam itu.”<sup>42</sup>

## **AKHIR SEBAGAI GUBERNUR**

Pada Januari 1946, pemerintahan nasional dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta untuk menghindari serangan Sekutu. Beredar kabar dari Menteri Wiranatakusuma bahwa Soetardjo akan diajak serta mengikuti kepindahan Presiden Sukarno ke Yogyakarta. Berita ini makin terang pada bulan berikutnya dalam konferensi pamong praja yang dihelat di Solo. Presiden Sukarno, dalam konferensi itu, mengatakan lebih membutuhkan tenaga Soetardjo di pusat daripada di Jawa Barat. Bung Hatta menambahkan bahwa pekerjaan di pusat lebih penting. Lebih lanjut, Sukarno menyebutkan bahwa dengan pangkat gubernur Soetardjo langsung diperbantukan sebagai penasihat Presiden.

Secara langsung Presiden Sukarno meminta Soetardjo Kartohadikoesoemo bergabung dengan pemerintah pusat. Berarti jabatan gubernur Jawa Barat tak lama lagi akan dialihkan dari Soetardjo kepada orang lain. Merasa kinerjanya sebagai gubernur tak



bermasalah, tawaran “hijrah” ke pemerintah pusat sesungguhnya mengecewakan Soetardjo. Akan tetapi, bagaimanapun, ia menerima keputusan Presiden dan tetap melakukan kewajibannya sebagai aparat pemerintah. “Sebagai seorang pamong praja, yang selalu patuh kepada pemerintah, saya menjawab bersedia,” ujar Soetardjo.<sup>43</sup>

Demikianlah, Soetardjo Kartohadikoesoemo memulai fase baru sebagai abdi negara dalam Dewan Pertimbangan Agung. Dengan instruksi perpindahan tugas itu, ia tinggalkan Jawa Barat untuk selanjutnya mengemban tugas baru di Yogyakarta. Soetardjo mengenang suasana haru saat segenap pamong praja dan pegawai negeri yang lain ikut mengantarkan dirinya. Di setiap stasiun besar hingga Kroya, kereta api dihentikan sejenak. Para pegawai negeri yang sengaja menunggu di stasiun menghaturkan kata selamat jalan sebagai bentuk hormat dan ucapan perpisahan kepada Soetardjo dan keluarga yang menyertainya.<sup>44</sup>

Perpindahan Soetardjo mengguratkan sedikit keanehan. Ia tak pernah menerima surat keputusan presiden tentang pemberhentian dirinya dari jabatan Gubernur Jawa Barat. Posisinya sebagai gubernur digantikan oleh seorang jaksa yang pernah membantunya. Namun, dalam pandangan Soetardjo, penggantinya bukanlah sosok yang tepat menjadi penyuluh dirinya sebagai gubernur. Hal itu membuatnya kecewa. Sebenarnya, Soetardjo memiliki sendiri calon penggantinya yang ia nilai tepat memimpin Jawa Barat, yakni Ardiwinangun, yang kala itu adalah residen Priangan.<sup>45</sup>

Hanya beberapa hari sebelum penggantian Soetardjo, terjadi berbagai masalah di Bandung. Menurut Didi Kartasasmita, perwira tinggi militer saat itu, keadaan di Bandung bergolak. Dalam suasana demikian, terjadi saling fitnah, saling tuduh, bahkan saling bunuh di antara laskar pejuang.<sup>46</sup>

## KEHIDUPAN SETELAH GUBERNUR

Hingga masa pengakuan kedaulatan, Soetardjo Kartohadikoesoemo berkedudukan sebagai penasihat presiden. Di Yogyakarta, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung yang diperankan dengan baik. Ia memprakarsai penolakan penggabungan Palang Merah Indonesia dengan Palang Merah Belanda; meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi agresi militer Belanda dan pemberontakan Musso di Madiun; menegakkan kewibawaan pemerintah pada waktu ibu kota RI di Yogyakarta diduduki Belanda masa agresi militer kedua. Sukarno acap kali menyebut Soetardjo yang lebih senior itu secara akrab sebagai "saudara tua."<sup>47</sup>

Selama beberapa bulan, Soetardjo sempat "ditepikan" dari pemerintahan. Ia dianggap bagian dari birokrat rezim feodal warisan zaman kolonial. Pada 1950, Soetardjo menerima surat pembebasan tugasnya dari Menteri Dalam Negeri Mr. Mohammad Roem. Namun, atas campur tangan Presiden Sukarno, pada 1953, Soetardjo kembali memperoleh tempat dalam pemerintahan. Mewakili Partai Indonesia Raya (Parindra), Soetardjo menjalankan peran baru sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Selain itu, Soetardjo ikut mengusahakan perbaikan gaji pegawai negeri dan pensiunan. Ia duduk dalam Panitia Gaji Pegawai Negeri sebagai ketua (1951–55). Kariernya berlanjut sebagai Komisaris Negara Urusan Otonomi Daerah pada 1954–56.

Selama enam tahun pengabdianya sebagai anggota Dewan, Soetardjo menggoreskan berbagai pengalaman. Sistem demokrasi liberal yang diterapkan dalam parlemen kala itu dianggapnya telah mengobarkan angkara murka dan hawa nafsu dalam hidup duniawiah. Ia pun mengakui federasi partai politik yang dibentuknya acap kali bersitegang dengan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia.<sup>48</sup> Menurut Herbert Feith, Soetardjo merupakan salah seorang pemimpin di parlemen yang cenderung mendefinisikan demokrasi dalam gagasan politik dan moral tradisional. "Definisi

mistis Soetardjo Kartohadikusumo dari PIR menegaskan bahwa demokrasi adalah 'persatuan Tuhan dengan hambanya,'" tulis Feith dalam *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (2007).

Namun partai yang diawaki Soetardjo juga tak luput dari perpecahan. Menjelang Pemilihan Umum 1955, Parindra pecah menjadi dua kubu yaitu Parindra-Wongso dan Parindra-Hazairin. Soetardjo kemudian pensiun sebagai pejabat negara pada 1957.

Selain sebagai birokrat tulen, Soetardjo juga seorang pemikir dalam bidang kerjanya. Bukunya yang bertajuk *Desa* (1952) membuktikan bahwa Soetardjo sangat memahami dan menghayati seluk-beluk medan pengabdianya. Buku tersebut menguraikan dasar-dasar kebudayaan asli menurut adat desa seperti sistem kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sipil masyarakat. Bagi Soetardjo, kekuatan sebuah bangsa berakar kepada perikehidupan di desa yang merupakan perwujudan demokrasi Ketuhanan. "Bagi beliau nasib orang desa adalah simbol penderitaan bangsanya, tidak hanya pada zaman penjajahan saja, akan tetapi juga pada zaman setelah bangsanya menjadi merdeka," tulis Setiadi Kartohadikoesoemo.

Pada masa senjanya, Soetardjo mengisi waktu sebagai akademisi di bidang ilmu politik dan pemerintahan. Ia menjadi dosen luar biasa pada Universitas Padjajaran (1956–64) dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung (1964–67). Lebih dari itu, Soetardjo diganjar gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Pendidikan Bidang Masyarakat dari IKIP Bandung pada 1967.

Sebagai tanda penghargaan pemerintah atas pengabdianya, Soetardjo menerima Bintang Mahaputra Kelas IV pada 1962 dan Satyalencana Karya Satya Kelas II pada 1968. Pada usianya yang sepuh, Soetardjo menerima nama ningrat Kanjeng Pangeran Hario Soetardjo Kartoningprang dari Sri Paku Alam VII di Yogyakarta pada 1976. Itu menjadi gelar kehormatan terakhir dalam hidup Soetardjo.

Hingga saat akhir kehidupan itu tiba. Soetardjo wafat di Jakarta pada 20 Desember 1976 dalam usia 84 tahun. Jenazahnya dimakamkan di Astana Bibis Luhur, Surakarta.

## PENUTUP

Sepanjang hidup dan aktivitasnya, Soetardjo Kartohadkoesoemo memainkan sikap moderat yang jauh dari kesan radikal. Namun, bukan berarti perjuangannya tak mengalami aral dan onak. Sebagai bagian dari kaum elite yang bisa hidup tenang dan aman, ia cenderung agak melawan arus. Dirinya tak dapat ditebak dengan mudah.

Pada masa kolonial, Soetardjo mengejawantahkan dirinya sebagai birokrat yang loyal. Sebagai pejabat pemerintah, ia menaruh perhatian yang besar terhadap rakyat desa. Di mata Soetardjo, ibarat membentuk keluarga, rakyat desa adalah sendi terpenting dalam pembangunan sebuah negara. Pandangan ini kelak mengantarkannya ke jenjang pengabdian yang lebih tinggi dalam hidupnya. Pengalaman yang kuat di tingkat akar rumput (baca: rakyat) menempa kualitas Soetardjo sebagai birokrat ulung.

Imajinya membayangkan sebuah negara yang maju dengan rakyat yang merdeka lahir-batin. Dalam hal ini, jiwa kepamongprajaan Soetardjo tak diragukan kesetiiaannya pada pemerintah. Di sisi lain, ia juga tampil ke panggung pergerakan secara bertahap sebagai seorang nasionalis. Bukan karena hendak melawan, akan tetapi karena sifatnya yang lurus melihat ketidakdilan yang dialami rakyat sebangsanya. Dukungannya terhadap penolakan penggunaan istilah *inlander* membuktikan karakter ini.

Dalam pentas pergerakan nasional, namanya memang tak sementereng tokoh pergerakan non-koperasi yang menentang penjajah terang-terangan. Ia melawan kolonialisme dari dalam sistem kekuasaan. Soetardjo bersikap hati-hati namun berani, membingungkan orang sebangsanya ataupun orang Belanda. Pada suatu saat ia menunjukkan loyalitas terhadap pemerintah kolonial untuk kemudian mencelanya. Hal itu terbukti ketika ia mengajukan Petisi Soetardjo dan berbagai mosi dalam Volksraad.

Menurut Ongokham, sejarawan Indonesia yang menekuni sejarah birokrasi, usulan Soetardjo membuka relasi baru antara

tokoh pergerakan nasional dengan golongan elite tradisional. Para pegawai pamong praja rendah, misalnya, terdorong membaca secara senyap koran-koran atau penerbitan dari Jong Java, Parindra, dan organisasi kebangsaan lainnya. Mata mereka mulai terbuka terhadap suatu dunia internasional yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh Indonesia modern.<sup>49</sup> “Dari sebab itu sering dikatakan tentang Soetardjo bahwa ia adalah tokoh *plin-plan* dan ini mungkin benar sebab dia harus belajar antara kedua ekstrem, pergerakan dan pemerintah,” tulis Ongokham. Hanya sebagai tokoh yang dilahirkan sebagai pamong praja kita mungkin dapat mengenal Soetardjo dengan betul.<sup>50</sup>

Memasuki zaman Indonesia merdeka, dengan kedudukannya sebagai priayi, Soetardjo memilih menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Di tengah deru revolusi yang ganas, ia turun ke kancha bersama para pejuang. Soetardjo sampai-sampai harus kehilangan istrinya di masa yang kritis itu.

Penolakan segelintir pihak tak luput menerpa Soetardjo sebagai pejabat tertinggi di Jawa Barat. Sebagai seorang Jawa tulen yang menjadi pemimpin di Tanah Sunda memberikan kesukaran sendiri dalam kinerja Soetardjo. Tantangan dan friksi internal pun tak terlekkkan dalam kehidupan bernegara. Itu pula yang dialami Soetardjo sampai melepaskan kepemimpinannya dari pejabat tertinggi provinsi. Kendati demikian, itu tak membuatnya uring-uringan apalagi berontak. Pengabdianya pada negara dan pemerintah tetap merupakan prioritas.

Membaca otobiografi Soetardjo yang dituliskan kembali oleh anaknya, ada kesan yang mengguratkan sisi emosional dalam dirinya. Sebagai memoar, peran dan perjuangannya tak terhindarkan sebagai sajian yang ditonjolkan. Akan tetapi, itu tak mengurangi sisi humanisme Soetardjo sebagai insan dan abdi negara. Sosoknya tetap layak dijadikan suri teladan bagi generasi saat ini maupun yang akan datang.

Sebagai catatan, nama Soetardjo tidak terdaftar dalam buku *Republik Indonesia: Provinsi Jawa Barat* yang diterbitkan

Kementerian Penerangan (1952), yang boleh disebut sebagai buku babon tentang Jawa Barat. Setidaknya buku ini menjadi rujukan dalam menggeluti sejarah Jawa Barat. Padahal Soetardjo adalah gubernur pertama Jawa Barat—yang merupakan salah seorang dari delapan gubernur yang menopang awal Republik Indonesia. Sebagai gubernur pertama, ia tentu menghadap tantangan yang tak mudah. Sementara jabatan itu bukan sebagai sesuatu yang diminta melainkan diamanahkan, ditunjuk, diangkat oleh negara yang baru merdeka. Ada baiknya kiprah Soetardjo dituliskan kembali secara lebih adil dan berimbang dengan mengurai lagi fakta-fakta sejarah.

Soetardjo diperhitungkan lantaran kemampuannya yang andal. Seorang birokrat berpengalaman, pegawai negeri dengan jam terbang yang tinggi. Ia berkontribusi memajukan kehidupan rakyat pada tiga era pemerintahan: Hindia Belanda, Jepang, dan Indonesia. Tak ada pula catatan atau deskripsi yang menyebut Soetardjo memperkaya diri atau korupsi. Melihat rekam jeaknya, lebih dari separuh hidupnya disumbangkan untuk melayani negara. Semangat pelayanan yang demikian tentu dibutuhkan untuk mengisi kemerdekaan negeri kita dewasa ini.

Tak perlu banyak sanjung dan puja-puji untuk menyimpulkan peran Soetardjo Kartohadikoesoemo bagi bangsa dan negaranya. Mental dan karakter kepemimpinannya baik untuk diamalkan dalam kehidupan bernegara sebagaimana diungkapkan Susan Abeyasekere, “Soetardjo adalah seorang pejabat sipil yang berdedikasi. Ia bertanggung jawab atas amanat yang diembannya.”<sup>51</sup>

**Catatan Akhir:**

<sup>1</sup>Setiadi Kartohadikusumo, *Sutardjo: "Petisi Sutardjo" dan Perjuangannya* (Jakarta: Sinar Harapan, 1990), hlm. 125.

<sup>2</sup>Agus Salim, *Hindia Berdiri Sendiri: Usul Petisi Soetardjo cs dan Para Pembijtaraan dalam Volksraad* (Batavia: NV Nederlandsche Anning, Mij., 1936), hlm. 1.

<sup>3</sup>Selanjutnya disebut Wiranatakusuma. Ia seorang menak (bangsawan) Sunda; pada masa awal Indonesia merdeka menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri.

<sup>4</sup>Sejak 1931, orang Indonesia memiliki 30 wakil di Volksraad, setara dengan gabungan orang Eropa dan Timur Asing. Lihat Susan Abeyasekere, "The Soetardjo Petition," *Indonesia*, No. 15, 1973, hlm. 81.

<sup>5</sup>R. E. Elson, *The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan* (Jakarta: Serambi, 2009), hlm. 137–8.

<sup>6</sup>Setiadi, *Sutardjo*, hlm. 14.

<sup>7</sup>P. Swantoro, *Dari Buku ke Buku Sambung Menyambung Menjadi Satu* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), hlm. 259.

<sup>8</sup>Gert Mak, *Abad Bapak Saya* (Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2009), hlm. 297.

<sup>9</sup>Menjelang masa akhir tugasnya di Volksraad, Soetardjo memprakarsai program radio penduduk bumiputra. Tujuannya untuk memperluas kebudayaan bangsa bagi masyarakat terjajah. Soetardjo mengusulkan agar rakyat bumiputra dapat menikmati siaran radio dengan menurunkan biaya langganan. Ia kemudian mengorganisasikan federasi siaran radio lokal bernama Perikatan Perhimpunan Radio Ketimuran pada 1938. Lihat Setiadi, *Sutardjo*, hlm. 111–2; lihat juga Rudolf Mrazek, *Engineer of Happy Land: Perkembangan Teknologi dan Nasionalisme di Sebuah Koloni* (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), hlm. 256.

<sup>10</sup>M. P. B. Manus, dkk, *Tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 1 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 72.

<sup>11</sup>Benedict R. O'G. Anderson, *Java in a Time of Revolution* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1972), hlm. 451. Soetardjo termasuk pejabat sipil terpenting pada masa Jepang. Latar belakang dari kalangan elite, birokrat terdidik pada zaman kolonial, dan punya pengalaman bekerja sama dengan para pemimpin nasionalis membuat Soetardjo diperhitungkan pihak Jepang sebagai residen. Selain Soetardjo, mereka yang menjadi residen adalah Soeroso sebagai residen Magelang dan Soerjo sebagai residen Bojonegoro. Ketiganya menjadi gubernur pertama di daerah Jawa pada masa awal Indonesia merdeka; Soetardjo di Jawa Barat, Soeroso di Jawa Tengah, dan Soerjo di Jawa Timur.

<sup>12</sup>Setiadi, *Sutardjo*, hlm. 17.

<sup>13</sup>Manus, dkk., *Tokoh-tokoh*, hlm. 72.

<sup>14</sup>Manus, dkk., hlm. 158.

<sup>15</sup>Manus, dkk., hlm. 17–8.

<sup>16</sup>Manus, dkk, hlm. 73.

<sup>17</sup>Anderson, *Java*, hlm. 114.

<sup>18</sup>Berdasarkan korespondensi antara Soetardjo dengan Ben Anderson pada 31 Januari 1962. Menurut Anderson, kemungkinan besar salah satu bagian dari tawar-menawar itu adalah bahwa pemimpin pamong praja akan diberi posisi tinggi di provinsi sebagai indikasi kepercayaan pemerintah baru terhadap mereka; lihat Anderson, *Java*.

<sup>19</sup>John R. W. Smail, *Bandung awal Revolusi 1945–1946* (Jakarta: Ka Bandung, 2011), hlm. 45.



<sup>20</sup>Smail, *Bandung*, hlm. 47–8.

<sup>21</sup>Smail, hlm. 52–5.

<sup>22</sup>Setiadi, *Sutardjo*, hlm. 168.

<sup>23</sup>Setiadi, hlm. 170.

<sup>24</sup>Sewaka, *Tjorat-tjaret dari Djaman ke Djaman* (Bandung, 1952), hlm. 80.

<sup>25</sup>Abdul Haris Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, Jilid 1: Kenangan Masa Muda (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 113.

<sup>26</sup>Setiadi, *Sutardjo*, hlm. 172.

<sup>27</sup>Smail, *Bandung*, hlm. 121.

<sup>28</sup>Smail, hlm. 173.

<sup>29</sup>Smail mencatat, pada November 1945, populasi di Bandung meliputi 380.000 orang Indonesia; 40.000 orang Tionghoa; 60.000 orang Eropa (termasuk pasukan Belanda); 2.000 orang tentara Gurkha; 1.500 orang sisa pasukan Jepang. Hingga Maret 1946, lebih dari 800 orang Belanda, Eropa, dan Tionghoa menjadi korban aksi revolusi di Bandung. Lihat Smail, *Bandung*, hlm. 121 dan 131.

<sup>30</sup>Setiadi, *Sutardjo*, hlm. 178.

<sup>31</sup>Menurut Soetardjo, kontak senjata lebih cepat terjadi dari hari-H karena ulah orang dalam. Seorang tenaga subversif dari pihak Sekutu berkhianat dan membocorkan rencana serangan. Lihat Setiadi, hlm. 175.

<sup>32</sup>Smail, *Bandung*, hlm. 121.

<sup>33</sup>Smail, hlm. 123, lihat juga Setiadi, *Sutardjo*, hlm. 174.

<sup>34</sup>Smail, hlm. 133.

<sup>35</sup>Setiadi, *Sutardjo*, hlm. 175.

<sup>36</sup>Kementerian Penerangan, *Profil Propinsi Indonesia: Jawa Barat* (Jakarta: Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992), hlm. 10

<sup>37</sup>Smail, *Bandung*, hlm 133, mengutip dari harian *Merdeka*, 29 November 1945.

<sup>38</sup>Pada 1947, Siti Djaetoen, istri Soetardjo, meninggal dunia di Surakarta setelah Soetardjo dipindahtugaskan ke Jawa Tengah. Soetardjo kemudian menikah lagi dengan janda bupati Bantul, Siti Surat Kabirun (keponakan Sri Sultan Hamengkubuwono IX), dan Koes Sabandinah (adik Sri Paku Alam VII). Lihat silsilah keluarga Soetardjo, Setiadi, *Sutardjo*, hlm. 182 dan 238.

<sup>39</sup>Setiadi, hlm. 176

<sup>40</sup>Hali Iskandar dan Tom Finaldin, *Gubernur Jawa Barat dari Masa ke Masa 1945–2003* (Bandung: Jabar Education and Enterpreuner Center, 20017), hlm. 39.

<sup>41</sup>Hali dan Finaldin, *Gubernur*, hlm. 179.

<sup>42</sup>Sewaka, *Tjorat-tjaret*, hlm. 81.

<sup>43</sup>Setiadi, *Sutardjo*, hlm. 179.

<sup>44</sup>Seiadi, hlm 180.

<sup>45</sup>Soetardjo digantikan oleh Mr. Datuk Djamin yang bernama lengkap Djamin Datuk Sutan Maharaja Besar. Menurut Soetardjo kepindahan dirinya ke Jawa Tengah tak lepas dari peran Datuk Djamin. Namun, Datuk Djamin pun tidak lama menjabat di Jawa Barat karena ia didakwa menggelapkan uang negara. Meski dibebaskan dari tahanan, ia diberhentikan dari jabatan negara; lihat Setiadi, *Sutardjo.*, hlm. 181. Mengenai sosok Datuk Djamin lihat dalam Iskandar dan Finaldin, *Gubernur*, hlm. 37–44.

<sup>46</sup>Tatang Sumarsono, *Didi Kartasmita: Pengabdian bagi Kemerdekaan* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1993), hlm. 120

<sup>47</sup>Setiadi, *Sutardjo*, hlm. 191

<sup>48</sup>Setiadi, hlm. 224.

<sup>49</sup>Onghokham, *Runtuhnya Hindia Belanda* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), hlm. 148-9.

<sup>50</sup>Onghokham, *Runtuhnya*, hlm. 154.

<sup>51</sup>Abeyasekere, "The Soetardjo Petition," hlm. 85.



**RADEN PANDJI SOEROSO**



# **RADEN PANDJI SOEROSO**

## **GUBERNUR JAWA TENGAH PERTAMA**

LINDA SUNARTI

Raden Panji Soeroso lahir pada 3 November 1895 di Porong, Keresidenan Surabaya, Jawa Timur. Ia adalah tokoh multitalenta. Selain pernah menjabat Gubernur Provinsi Jawa Tengah pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri. Titel 'Raden Panji' adalah gelar kebangsawanan pria dalam tradisi feodal Jawa. Gelar ini digunakan di sebagian wilayah budaya Jawa Timur bagi keluarga bupati-bupati daerah vazal Kesultanan Mataram seperti Besuki dan Pasuruan.

Sejauh sumber yang ditemukan tidak terdapat catatan lengkap tentang latar belakang kehidupan R. P. Soeroso. Dalam buku yang berjudul *R. P. Soeroso: Dokumen-dokumen Terbatas tentang Dirinya* susunan Anhar Gonggong juga tidak terdapat catatan lengkap tentang masa kecilnya. Sumber dokumen yang terkumpul dalam buku itu berasal dari catatan pribadi Soeroso dan keluarga serta kerabatnya. Selain itu terdapat berbagai surat kabar, majalah dan artikel media massa yang menggambarkan sosok Soeroso dan kebijakannya dalam menjalankan pemerintahan. Terdapat pula penggambaran tentang tokoh itu dari orang-orang yang mengenal dekat atau pernah berjuang bersamanya sejak masa pergerakan nasional dan setelahnya.

Pada masanya, R. P. Soeroso tergolong manusia berpikiran maju dan pemberani. Pada usia 15 tahun ia bergabung dengan Budi Utomo, organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Dr.

Sutomo pada 1908 yang bertujuan meningkatkan derajat kaum bumiputra khususnya orang Jawa. Namun, seiring perjalanan waktu, ia merasa tidak puas terhadap organisasi tersebut yang dinilainya sangat Jawa-sentris dan semakin konservatif dalam perjuangannya.

Untuk memenuhi hasrat perjuangan melawan ketidakadilan terhadap masyarakat pribumi, R. P. Soeroso bergabung dengan Sarekat Islam pada 1915. Jiwa pembangkangnya terhadap ketidakadilan pemerintah kolonial mulai tampak sejak ia bersekolah di Kweekschool (sekolah guru) di Sidoardjo. Sebenarnya Soeroso termasuk murid yang disenangi guru-gurunya. Namun, pada suatu hari, sebulan menjelang ujian akhir, ia diusir kepala sekolahnya. Dalam penilaian Soeroso, kepala sekolahnya menunjukkan sikap antipribumi dan memperlakukan murid-murid pribumi secara tidak adil dan menghina, mulai dari soal “kecil”—melepas taplak meja makan murid pribumi—hingga pembedaan perhatian dalam pengajaran. Tidak tahan dengan perlakuan semacam itu, Soeroso mengajak teman-temannya mogok sekolah selama beberapa hari. Akibatnya, murid-murid yang mogok diberi hukuman, sedangkan Soeroso dikeluarkan dari sekolah karena dianggap sebagai biang keladi.

Pemecatan itu justru makin membangkitkan semangat perlawanan R. P. Soeroso terhadap praktik kolonial. Kendati dimaafkan dan mendapat panggilan kembali ke sekolah, Soeroso tidak menghiraukannya. Ia kemudian belajar jurnalistik di Surabaya. Melalui pengetahuan jurnalistiknya ia mulai menulis dalam surat kabar dan mengkritik pemerintah kolonial.

Telah disebutkan, pada 1915, R. P. Soeroso bergabung dengan Sarekat Islam. Awalnya, organisasi itu bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada 1911. Tujuannya memperkuat persatuan pedagang pribumi agar mampu bersaing terhadap pedagang asing terutama pedagang Cina. Atas saran Tjokroaminoto, SDI diubah menjadi Sarekat Islam (SI) pada 10 September 1912. Pergantian nama itu didasarkan pertimbangan ruang gerak organisasi lebih luas, tidak terbatas dalam perdagangan

melainkan juga bidang pendidikan dan politik. Selain itu, anggota organisasi tidak terbatas hanya kaum pedagang, tetapi kaum Islam pada umumnya.

Tidak lama setelah bergabung dalam SI pada 1915, R. P. Soeroso diangkat sebagai Presiden Sarekat Islam untuk Probolinggo dan Kraksaan pada umur 20 tahun. Bersama anggota pengurus SI yang lain, Soeroso fokus pada gerakan nasional dan perbaikan perekonomian rakyat. Pengurus SI di Kota Probolinggo membangun dua buah toko untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan harga cukup terjangkau. Akan tetapi, toko-toko milik pengurus SI harus bersaing dengan toko-toko Cina yang menjual barang-barangnya lebih murah. Akibatnya, toko-toko milik pengurus SI terpaksa tutup. Kemudian toko-toko orang Cina kembali menaikkan harga-harga barang kebutuhan masyarakat.

Pada 1916, R. P. Soeroso terpilih menjadi ketua Pengurus Besar Perhimpunan Pegawai (*Burgerlijke Openbare Werken; BOW*) seluruh Indonesia. Setahun kemudian (1917), ia dipilih kembali menjadi anggota *Gemeenteraad* Probolinggo. Dalam posisi itu, Soeroso membela hak-hak pedagang kecil agar tidak mendapat perlakuan buruk dari pemerintah setempat, ia memperjuangkan warung atau kios milik pedagang kecil di pinggir jalan agar tidak dibongkar oleh pihak tertentu terutama kelompok pedagang besar ataupun pemerintah.

Di daerah *gemeente* yang mayoritas dihuni orang Belanda, hak-hak penduduk pribumi menjadi terpinggirkan. Sebagai anggota dewan *gemeente*, Soeroso terus membela kepentingan masyarakat pribumi. Salah satu hal yang diperjuangkannya adalah penerangan listrik di kampung, akses terhadap air minum, pembuatan jalan kampung, dan berbagai hal lain yang berpengaruh besar dan menyentuh kehidupan sehari-hari orang-orang kecil di wilayah tersebut.

Kemudian pada 1918, R. P. Soeroso diangkat sebagai *Commisaris Centraal Bestuur* Sarekat Islam. Pada masa itu, ia sering dikunjungi Douwes Dekker yang sedang berkeliling Jawa untuk



mempromosikan Indische Partij (IP), sebuah partai politik yang tergolong radikal. Ditawari sebagai Ketua IP daerah Probolinggo, Soeroso menolak dengan alasan masih menjabat sebagai ketua Sarekat Islam.

Selanjutnya pada 1919, R. P. Soeroso pindah ke Mojokerto, Jawa Timur. Ia tetap sebagai ketua BOW, dan kemudian Presiden Sarekat Islam Kabupaten Mojokerto. Dalam selang waktu tiga tahun, Soeroso menjadi Ketua Personil Pabrik Bond Daerah Mojokerto. Ia memimpin pemogokan buruh pabrik gula yang seluruhnya—berjumlah 12 pabrik—milik orang Belanda. Pemogokan menuntut perbaikan nasib buruh pabrik yang dirasakan masih di bawah ukuran layak. Tak pelak, pemogokan itu dianggap sebagai simbol nyata perlawanan terhadap kolonialisme Belanda.

R. P. Soeroso konsisten berjuang memperbaiki nasib kaum petani. Ia terus memimpin petani menghadapi pabrik-pabrik gula yang berkuasa. Salah satu hasil perjuangannya yang penting adalah pembagian lahan pertanian kepada para petani di Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Ia juga memperjuangkan harga sewa lahan persawahan untuk berbagai tanaman, termasuk tanaman tebu. Lahan persawahan juga perlu pemeliharaan untuk meningkatkan produktivitas hasil tanaman. Oleh karena itu, Soeroso memperjuangkan agar petani memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengelola sawahnya.

Selanjutnya, sekitar tiga tahun (1922–25), R. P. Soeroso memimpin surat kabar *Kemadjoean Hindia* di Surabaya. Penerbitan surat kabar itu kemudian dihentikan karena “tekor”—pendapatan yang diterima tidak dapat menutup biaya pengeluaran. Uang langganan yang diharapkan bisa masuk 100 persen ternyata hanya sekitar separuhnya. Para penerbit pribumi juga tidak dapat berharap banyak dari hasil pemasangan iklan produk pribumi sendiri. Sementara para pedagang nonpribumi—Eropa dan Cina—tidak tertarik memasang iklan dalam surat kabar milik pribumi.

## KIPRAH DI VOLKSRAAD

Berkat pengaruh dan kedudukannya, Soeroso kemudian diangkat menjadi anggota Volksraad sejak 1924. Meski secara harfiah bermakna ‘dewan rakyat’, fungsi dan peran Volksraad sebenarnya terbatas bagi “rakyat” pribumi. Awalnya, lembaga itu hanya memiliki kewenangan sebagai penasihat. Baru pada 1927, Volksraad memiliki kewenangan kolegislatif bersama Gubernur Jenderal yang ditunjuk oleh Belanda. Selain itu, mekanisme keanggotaan Volksraad dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Pada 1939, hanya 2.000 orang memiliki hak pilih, sebagian besar orang Belanda dan orang Eropa lainnya.

Namun, keterbatasan “perwakilan rakyat” tersebut tidak membuat R. P. Soeroso kehilangan selera berjuang. Dalam pidato pertama yang disampaikan pada sidang tahun 1924, ia mengkritik pemerintah Hindia Belanda yang menerapkan kebijakan menarik pajak *landrente* di wilayah Sumatera Barat. Pidato tersebut membuat Gubernur Jenderal Fock marah kepada Soeroso dan tidak mau mengundangnya berkenalan. Akan tetapi kebijakan penarikan pajak di wilayah Sumatera Barat itu berhasil digagalkan. Lantaran keberhasilannya itu, Soeroso diberi gelar ‘datuk’ melalui rapat umum di Padang.

Dalam karier politiknya, R. P. Soeroso tercatat menjadi anggota Volksraad dalam periode yang cukup panjang. Di Volksraad, Soeroso tergabung dalam sebuah ‘fraksi nasional’ yang dibentuk pada 1927 yang diketuai oleh Mohammad Husni Thamrin. Fraksi itu bertujuan mencapai kemerdekaan dan kedaulatan penuh Indonesia. Namun, di sisi lain, fraksi itu juga berkolaborasi dengan pemerintahan kolonial. Artinya, Soeroso dan tokoh lain dalam fraksi itu juga bersedia bekerja sama dalam pemerintahan Hindia Belanda—seperti halnya ‘kelompok kooperator’ atau golongan nasionalis kanan semisal Koesoemo Oetojo, Oto Iskandardinata, dan Ali Sastroamidjojo. Pada 11 Januari 1941, Husni Thamrin meninggal

dunia sehingga Soeroso tampil menggantikan sebagai ketua fraksi hingga kedatangan tentara Jepang pada tahun berikutnya.

Fraksi nasional menjadi populer pada masanya. Berbagai putusan penting yang diambil fraksi menjadi landasan kebijakan pemerintah terutama dalam masalah kesejahteraan masyarakat pribumi. Pemerintah sendiri menilai bahwa para tokoh dalam fraksi nasional memiliki pengaruh yang sangat besar sehingga banyak tugas penting yang diberikan kepada anggota fraksi tersebut. Salah satu tugas yang cukup besar tanggung jawabnya adalah ketika anggota fraksi—antara lain R. P. Soeroso, Oto Iskandardinata, Wiwoho, dan Sukardjo Wirjopranoto—diminta mendukung pemerintah Hindia Belanda untuk bersama-sama menghadapi kedatangan tentara Jepang yang ketika itu telah bercokol di Semenanjung Malaka. Namun, dalam pertemuan yang membahas masalah itu—dari pihak pemerintah diwakili Dr. Idenburg—tidak dihasilkan kesepakatan yang sesuai dengan harapan pemerintah.

Tidak lama setelah pertemuan tersebut, tentara Jepang datang menduduki Indonesia. Belanda pun menyerah.

### **DALAM MASA PENDUDUKAN JEPANG DAN AWAL KEMERDEKAAN**

Ketika Jepang berkuasa di Indonesia, R. P. Soeroso masih menjabat sebagai ketua Perhimpunan Pegawai, ketua Vaksentraal, dan anggota Volksraad. Namun, dalam masa penjajahan baru itu terjadi pembekuan terhadap seluruh organisasi dan partai politik peninggalan Hindia Belanda. Sebagai gantinya, pemerintah pendudukan Jepang membentuk organisasi Putera (Pusat Tenang Rakyat), pada 16 April 1943. Tujuannya menghimpun kaum nasionalis dan intelektual menyatukan melawan Sekutu. Selain itu, Putera diharapkan melahirkan pemimpin dari kalangan orang Indonesia sendiri.

Untuk memimpin Putera, pemerintah pendudukan menunjuk Ir. Sukarno, Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara, dan K. H. Mas

Mansur yang dikenal sebagai Empat Serangkai. Oleh Empat Serangkai, R. P. Soeroso diminta tetap bekerja di daerah dan duduk sebagai ketua Putera daerah Malang, Jawa Timur, sekaligus duduk dalam Pusat Barisan Pelopor di Jakarta.

Dalam suatu kunjungan ke Malang, Bung Karno atas nama Empat Serangkai meminta R. P. Soeroso menjadi *Sucokan* Kedu yang diangkat oleh pemerintah pendudukan untuk menunjukkan bahwa orang Indonesia mampu menjalankan pemerintahan. Pasalnya, sejak kedatangan Jepang pada Maret 1942 terjadi kekosongan pemerintahan di beberapa daerah. Juga ketika kalah perang melawan Sekutu dan harus menjaga *status quo*, Jepang enggan melakukan apa pun. Sementara, Sekutu sebagai pemenang perang yang akan mengambil alih wilayah Indonesia belum datang.

Menerima jabatan sebagai *sucokan* di Residensi Kedu, Jawa Tengah, R. P. Soeroso aktif mengobarkan semangat kebangsaan kepada lurah-lurah di berbagai desa dan kabupaten di wilayah tugasnya. Kegiatannya itu dapat dilihat sebagai upaya menanamkan sikap nasionalistik masyarakat luas. Dalam waktu yang sama, Soeroso juga memimpin dinas-dinas pertanian dan pendidikan dan pekerjaan Pamong Praja. Ia juga melakukan pengaturan terhadap pengumpulan beras atau padi untuk tentara Jepang dan daerah di sekitar Jakarta.

Hingga awal kemerdekaan (1945), R. P. Soeroso menduduki berbagai jabatan strategis yang dipangkunya sejak masa sebelumnya. Pada masa awal kemerdekaan, jabatannya bertambah sebagai wakil ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), di bawah Dr. Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua. Pada waktu duduk dalam PPKI itulah Soeroso ikut membahas masalah yang kelak mengantarkannya sebagai gubernur. Dalam sidang kedua PPKI (19 Agustus) dibahas pembagian wilayah administrasi Indonesia merdeka. Saat itu diputuskan bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi, yakni Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusatenggara, dan Maluku. Masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur.

Pada waktu itulah, Presiden Sukarno mengangkat R. P. Soeroso sebagai Gubernur Provinsi Jawa Tengah merangkap Residen Kedu. Situasi politik saat itu boleh dikata tidak menentu. Secara *de jure* kekuasaan di tangan Sekutu, sedangkan *de facto* diserahkan kepada Jepang. Situasi itu mendorong rakyat melakukan perlawanan untuk mencapai kemerdekaan seutuhnya. Ketika itu tokoh-tokoh Indonesia berani mengabaikan keputusan pihak Sekutu. Hal itu menjadi dorongan dan dukungan moral tersendiri bagi Soeroso untuk menerima tugas baru dalam suasana perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

### **MENJADI GUBERNUR JAWA TENGAH PERTAMA**

Ketika R.P. Soeroso menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, wilayah Jawa tengah sempat didatangi oleh seorang perwira angkatan udara Inggris yang mengurus keamanan orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa lainnya. Kejadian ini berlangsung sebelum Jakarta didatangi oleh orang-orang Inggris. Dalam hal kepengurusan keamanan, tentara Inggris, melancarkan operasinya terhadap orang-orang Belanda dan Eropa lainnya di Jawa Tengah, terutama di Semarang. Selain itu, para tentara Inggris tersebut memperluas operasi mereka sampai ke Jogja, Solo dan berbagai wilayah lainnya yang mana terdapat kamp tahanan orang-orang Belanda.

Selain itu, terdapat orang-orang Belanda yang mengaku sebagai kepala Palang Merah Internasional Belanda yang datang untuk menjumpai pejabat Jepang dan mengatur kegiatan Palang Merah Internasional di daerah Jawa Tengah, terutama Magelang. Hal tersebut dilakukan dengan mengumpulkan orang-orang bekas tentara KNIL dengan jumlah kurang lebih 400 orang untuk menjadi perawat. Kekuasaan *de facto* yang dimiliki oleh Jepang terhadap Indonesia tidak dapat menjadi jaminan bahwa Jepang berani menolak permintaan orang-orang Belanda dari pihak sekutu tersebut. Akan tetapi, R.P. Soeroso mengambil langkah yang berani

terhadap kegiatan tersebut dengan membubarkan 400 orang perawat bekas KNIL tersebut, dan meminta pemimpin Palang Merah Internasional tersebut untuk meninggalkan Magelang, dan daerah Jawa Tengah lainnya dalam periode secepatnya.

Kisah lain yang dimiliki oleh R.P. Soeroso ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, adalah ketika terjadinya perang saraf oleh Sekutu yang dilancarkan di Jawa Tengah, dan para pemimpin pribumi harus melayani perang tersebut, terutama oleh tokoh-tokoh besar di wilayah tersebut. Pada saat itu terdapat banyak panggilan telepon yang memberikan ancaman tentang penyerbuan pihak Sekutu yang dapat terjadi secara tiba-tiba. R.P. Soeroso mengaku dalam catatannya bahwa ketika menduduki posisi Gubernur Jawa Tengah ia hampir tidak bisa tidur setiap malam.

Dalam menjalankan kepemimpinan di Jawa tengah, R.P. Soeroso mendapat bantuan dari rakyat Kedu dalam menjalankan kewajiban tersebut R.P. Soeroso bersama rakyat gedung di mana ia menjadi Residen di wilayah tersebut mendapat dukungan penuh dari masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam upaya perlawanan perjuangan terhadap pihak sekutu. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi apa Suroso, karena pada saat itu juga memiliki kesibukan untuk ke Jakarta dan menyelesaikan rencana undang undang dasar dan berbagai hal lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat pada saat itu.

Kisah lain yang dicatat oleh R.P. Soeroso adalah terdapat pegawai staf komando Inggris dari Semarang yang datang ke Magelang untuk menjumpai dan meminta tolong agar mengoreksi pidato komandonya akan disiarkan di radio di Solo pada esok harinya. Pada pidato itu terdapat persoalan politik yang menjadi pembahasan utama dan memerlukan koreksi dari R.P. Soeroso.

Selain aktif dalam berbagai kegiatan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara utuh melalui daerah-daerah, R.P. Soeroso juga menjadi anggota KNI pusat sejak terbentuknya organisasi tersebut. Atas permintaan dari delegasi di Solo, R.P. Soeroso menjalankan konsolidasi pemerintahan terhadap wilayah

Jawa Tengah dalam bulan Oktober 1945 dan sekaligus menjadi komisaris tinggi untuk wilayah Solo dan Jogjakarta sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia yang berkedudukan di Solo. Jabatan baru yang diemban oleh R.P. Soeroso ini tidak memiliki tugas dan tanggung jawab yang ringan apabila dibandingkan dengan jabatannya ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Seringkali tiap malam R.P. Soeroso mendapat laporan dari orang-orang Eropa maupun orang-orang pribumi yang saling culik menculik satu sama lain dan terdapat golongan-golongan yang bersifat radikal dan melakukan perlawanan secara sepihak.

Untuk mempermudah urusan terkait pemerintahan administratif, terutama di daerah Kasunanan, Mangkunegaran, dan Pakualaman pada waktu itu, R.P. Soeroso menjalankan pemerintahan yang bersifat legislatif maupun eksekutif. Ketika itu, hal tersebut tidak berada pada ranah yang sewajarnya. Oleh karena itu, di antara KNI Daerah, sel diketuai oleh Kusumadiningrat dan Sri Sunan XII, dan Mangkunegara VIII. Terdapat pembagian tugas terhadap Sri Mangkunegara yang menjalankan urusan legislatif bersama KNI Daerah, sedangkan Sri Sunan dan Mangkunegoro menjalankan urusan eksekutif di wilayah tersebut. Hal tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak yang masing masing menerima pembagian tugas tersebut. Akan tetapi beberapa hari kemudian R.P. Soeroso menerima surat dari para penasehat Sunan dan Mangkunegara bahwa yang menjalankan pemerintahan eksekutif adalah para patih dari kedua raja tersebut. Keputusan tersebut ditolak oleh daerah dan kemudian lembaga tersebut membentuk Presidium untuk mengurus urusan eksekutif. Ketika itu ketua Presidium yang dipilih adalah R.P. Soeroso sendiri.

Untuk daerah Jogjakarta, R.P. Soeroso berusaha untuk mengadakan pertemuan antara para pemimpin daerahnya. Diantarnya dengan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Jogjakarta yang diketuai oleh Mohammad Saleh, Sri Sultan IX dan Sri Paku Alam XI. Pertemuan ini berhasil menyepakati pembagian tugas diantara anggota KNID Jogjakarta, yaitu adanya pembagian tugas

antara eksekutif dan legislatif, yaitu KNI Daerah menjalankan urusan legislatif, sedangkan Sri Sultan dan Sri Paku Alam menjalankan urusan pemerintahan eksekutif dan sekaligus menjadi kepala daerah yang secara turun-temurun dapat disahkan menurut undang pokok pemerintahan daerah nomor 22/1948. Undang-undang tersebut merupakan hasil dari buah pikiran R.P. Soeroso.

Semasa menjabat sebagai gubernur, terdapat satu insiden yang menjadi catatan tersendiri bagi R.P. Soeroso, yaitu insiden menaikkan bendera merah putih oleh para pemuda pimpinan Patih Judadibrata dari kantor gubernur di Magelang. Pada waktu itu, Jepang oleh tentara Sekutu masih diberikan kekuasaan *de facto* dan masih melarang mengibarkan bendera Merah Putih sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia.

Rakyat yang sudah berkumpul di Gunung Tidar karena telah mendengar kabar akan dilaksanakannya peristiwa pengibaran bendera tersebut, kemudian mulai menyeruak masuk ke dalam kantor gubernur. Akan tetapi pihak tentara Jepang berupaya untuk menghalang-halangi kegiatan tersebut sehingga kadang menjadi panas. Kemudian hingga saat siang hari, rakyat berdatangan dari sekitar kota Jogjakarta karena terjadi peristiwa penembakan dari pihak Jepang sehingga terdapat dua pemuda pribumi yang jatuh menjadi korban. Rakyat sekitar menjadi marah dan menyerang tentara Jepang yang kemudian berujung kepada masuknya para tentara Jepang ke dalam markas besar. R. P. Soeroso yang menerima laporan tersebut, langsung datang dan memberikan nasehat maupun imbauan kepada masyarakat agar tenang dan tidak menyerbu markas besar tentara *Kenpetai* dari pihak Jepang yang siap dengan berbagai senjata lengkap yang dapat menimbulkan jatuhnya korban dalam jumlah lebih banyak. Setelah itu, R. P. Soeroso pergi menghadap Jenderal Tanaka untuk memintanya menghukum tentara *Kenpetai* yang bertindak kejam terhadap masyarakat pribumi, setelah itu Jenderal Tanaka menyanggupi permintaan dari R. P. Soeroso tersebut.



Insiden lain terjadi ketika R. P. Soeroso menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah dan kedatangan seorang jenderal Inggris yang datang ke Solo untuk melihat keadaan tahanan orang-orang Belanda. Akan tetapi, kenyataannya adalah orang Inggris yang datang untuk melihat keadaan tahanan orang-orang Belanda tersebut bukanlah seorang jenderal tetapi merupakan seorang komando yang telah ditemui ketika yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

R.P. Soeroso mendapatkan kabar bahwa Sekutu akan mengirim tentara pendudukan ke Solo yang didasarkan atas kondisi dan keadaan tahanan Belanda, akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan janji dari komandan Tull sewaktu R. P. Soeroso menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah yang berjanji tidak akan mengirim tentara Sekutu ke Magelang. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya pertempuran antara tentara nasional Republik Indonesia dengan tentara Sekutu.

Keadaan tersebut sangat menyedot tenaga dan pikiran dari R. P. Soeroso, sehingga ia meminta kepada Presiden Sukarno agar dipindahkan keluar daerah Solo untuk menjadi gubernur di daerah Jawa Timur. Sedangkan Gubernur Jawa Timur, Suryo, dipindahkan ke Solo untuk menjalankan pemerintahan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dilakukan, karena komandan Jendral Sunarto mengadakan pemerintahan militer di wilayah Solo. Kondisi tersebut menyebabkan kembalinya R. P. Soeroso menjadi pimpinan di wilayah Solo.

Ketika terjadi situasi tersebut, terdapat insiden penculikan Sutan Sjahrir, seorang perdana menteri pada saat itu. Akan tetapi, atas anjuran Presiden Sukarno, Sutan Sjahrir dilepaskan oleh para penculik. Selain itu, jabatan komisaris tinggi kemudian dihapus dan R. P. Soeroso ditempatkan di Departemen Dalam Negeri sebagai gubernur diperbantukan.

Jabatan komisaris tinggi di Solo itu sendiri diganti dengan jabatan Residen. Di dalam Departemen Dalam Negeri, R. P. Soeroso mendapat tanggung jawab untuk memimpin urusan minoritas dan menjadi kepala bagian urusan pemerintah daerah pada awal tahun

1948. Ia diangkat menjadi panitia gaji pegawai negeri yang juga merangkap sebagai kepala urusan pegawai. Selain itu, ia juga diangkat menjadi penasihat Sutan Sjahrir dalam perundingan antara wakil Republik Indonesia dan wakil pemerintah Belanda dalam perundingan dengan Schmerhorn. Lalu R. P. Soeroso juga sempat diminta oleh wakil presiden Bung Hatta untuk membuat rencana undang-undang tentang pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Rencana undang-undang yang dibuat oleh tim tersebut, diterima oleh badan pengurus pusat dan menjadi undang-undang nomor 22 tahun 1948. Undang undang tersebut menjadi landasan terciptanya tata kerja pemerintahan daerah yang pada waktu itu masih dalam keadaan yang belum stabil dan diisi oleh pertikaian antara pihak Republik Indonesia dan pihak sekutu terutama Belanda.

Selain menjabat dalam berbagai posisi pemerintahan, R. P. Soeroso juga memiliki pengalaman untuk mengkonsolidasikan perdamaian di daerah, salah satunya adalah ketika terjadi pertikaian antara panglima TNI Sudjaki dengan Residen Malang Mr. Sunarko. Ketika itu R. P. Soeroso datang dengan kereta api dari Jogjakarta ke Blitar pada malam hari, lalu ia berangkat ke Malang dengan kereta api. Setelah itu, ia mendapat permasalahan ketika kereta yang dinaikinya berhenti di tengah tengah sawah. Saat itu ia melihat pesawat milik Belanda melintas di atas kereta tersebut dan banyak penumpang yang turun dan lari dari kereta api. Pesawat milik Belanda tersebut bersiap-siap untuk melakukan penyerangan dan kemudian menembaki lapangan di sekitar kereta tersebut. Setelah situasi mulai reda, baru R. P. Soeroso berjalan ke arah stasiun tanpa mengetahui nasib dari para penumpang yang lari ke tengah sawah. Ketika ia sudah sampai di kota Malang, ia menemukan rumah Residen yang sudah terbakar lalu yang mencari Panglima Sudjaki, tetapi mendapat kabar bahwa ia sudah keluar kota. Sementara itu tentara Belanda telah mendekati kota. R.P. Soeroso kemudian ikut bersama orang-orang untuk mengungsi ke arah Selatan, tetapi kemudian masuk ke rumah milik dr. Surodjo. Ia kemudian tinggal di rumah itu hingga pagi hari, kemudian pada malam hari ia melihat api

berasal dari kota Malang yang membuat dia merasa prihatin terhadap kondisi masyarakat di wilayah tersebut. Lalu pada malam harinya, ia berjalan kaki meninggalkan kota Malang menuju Kepanjen. Dalam perjalanan itu, R.P. Soeroso duduk di kereta barang bersama para pengungsi yang dulunya berasal dari Surabaya, Malang dan berbagai wilayah lainnya di Jawa timur.

Dalam perjalanan tersebut R.P. Soeroso merasakan suasana yang jauh dari rasa putus asa, ia melihat senda gurau, tawa dari para pengungsi yang berpikir positif akan kembali lagi ke Surabaya nantinya melalui Blitar. Setelah sampai di Jogjakarta ia laporkan apa yang telah ia alami dan hasil dari upaya meredam pertikaian tersebut.

Tugas lain yang dilakukan oleh R.P. Soeroso dalam masa perjuangan revolusi adalah merencanakan undang undang pembentukan provinsi, kabupaten dan kota demikian pula rancangan mengenai otonomi pemerintahan daerah. R.P. Soeroso menjadi salah satu anggota di komite nasional Indonesia pusat yang aktif dalam memperjuangkan dan membentuk bermacam undang undang terkait pemerintahan di dalam negeri.

R.P. Soeroso juga ikut menjalankan pemerintahan dan diangkat menjadi anggota pemerintahan darurat Republik Indonesia yang ditempatkan di Jawa untuk urusan urusan dalam negeri bersama dengan beberapa menteri termasuk Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprodjo, Menteri PMN Kasimo, dan Menteri Agama Kiai Haji Mansur untuk pemerintahan gerilya.

Dalam beberapa kebijakannya, R.P. Soeroso mengangkat Milono, seorang pensiunan Residen Pati yang juga ikut gerilya sebagai Residen Pati yang ikut kembali ke kota Pati. Setelah itu, R.P. Soeroso juga mengangkat Gubernur Jawa Barat yang bernama Ir. Okar setelah ditangkapnya Gubernur Jawa Barat sebelumnya, yaitu Sewaka. R.P. Soeroso juga mengangkat Samadikun sebagai Gubernur Jawa Timur yang menggantikan Murjani yang sebelumnya ditangkap oleh tentara Belanda.

Dalam upaya memperjuangkan perjuangan pada masa Revolusi, R.P. Soeroso mengadakan rapat dengan para lurah di desa desa agar para petani menyerahkan 10% hasil tanaman padi yang mereka tanam untuk diberikan kepada tentara nasional Republik Indonesia, tentara pelajar dan para pejuang agar dapat memenuhi kebutuhan harian dan menunjang berjalannya kegiatan gerilya yang berlangsung di berbagai daerah. Pada periode tersebut, dari 18 Desember 1948 hingga akhir Juni 1949. Ia bergerilya dari daerah Tawangmangu ke timur hingga Ngrambe, Madiun, hingga terus ke timur, hingga Belanda tidak bisa mencapai daerah tersebut.

Pada periode tersebut, perjuangan diplomasi pada saat itu juga dilakukan oleh Mr. Roem dan van Royen di New York yang kabarnya sampai ke Jakarta. Pada perundingan tersebut, terdapat wakil perkebunan Belanda yang mengeluhkan ditariknya tentara Belanda yang menjaga kebun-kebun milik perusahaan Belanda. R.P. Soeroso beranggapan bahwa kedudukan tentara Indonesia cukup kuat dan mampu menjaga wilayah-wilayah strategis, sehingga seharusnya dapat menghasilkan perundingan yang lebih menguntungkan bagi pemerintah Republik Indonesia.

Setelah agresi militer kedua pada akhir bulan Juni 1949 di Jogjakarta, R.P. Soeroso menjabat sebagai menteri. Ia menduduki posisi sebagai Menteri Dalam Negeri untuk urusan pemerintahan daerah dan menjadi kepala Kantor Urusan Pegawai. di kota Jogjakarta ia tinggal di rumah kerabat saudaranya. Menurut catatan yang ditulis olehnya, keadaan yang ia alami selama bergerilya sangatlah sengsara.

R.P. Soeroso sempat menderita penyakit bronkitis yang amat parah, sehingga ia harus melalui perjalanan pulang dengan tandu. Akan tetapi, dalam waktu tempo kurang lebih satu bulan, R.P. Soeroso dapat sembuh dan kembali bekerja dengan baik. Ketika berada di rumah sakit, R.P. Soeroso, mendapatkan kunjungan dari Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta yang datang dan menjenguk keadaan R.P. Soeroso. Ia merasakan kegembiraan ketika delegasi Indonesia berangkat ke negeri Belanda untuk

mendapatkan kedaulatan kemerdekaan Indonesia pada Republik Indonesia secara penuh pada tahun 1949.

Pada bulan Januari 1950, R.P. Soeroso diminta oleh Menteri Dalam Negeri untuk pergi ke Solo bersama dengan sekretaris jenderal departemen dalam Negeri untuk menjumpai Sri Sunan Pakubuwono XII dan seri Mangkunegara VIII untuk memberikan status daerah istimewa Surakarta yang terdiri dari Kesunanan dan Mangkunegaran. Hal ini sesuai dengan status yang diterima oleh Jogjakarta menurut undang undang nomor 22/1948, di mana Sri Sunan dan Sri Mangkunegara menjadi kepala daerah kesatu dan kedua.

Dalam persetujuan ini, Sri Sunan tidak keberatan terhadap keputusan tersebut, akan tetapi Sri Mangkunegara meminta posisi masing-masing untuk berdiri secara sendiri-sendiri. R.P. Soeroso menegaskan bahwa pemerintahan daerah harus sesuai dengan undang-undang yang ditetapkan. Tetapi, penasehat dari Sunan dan Mangkunegoro meminta beberapa kekuasaan masih dapat diteruskan oleh raja. Salah satu dari hak yang diminta adalah kekuasaan untuk pengangkatan wedana. Meskipun mendapat persyaratan berat yang diajukan oleh pihak raja, R.P. Soeroso tetap menerangkan kembali bahwa tugas tugas kepala daerah telah ditetapkan pada undang undang nomor 22/1948 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa apa yang diminta oleh para penasihat raja tersebut, berada di luar aturan dan ketentuan undang undang. Ketidaksepakatan yang dialami oleh R.P. Soeroso bersama dengan para penasihat raja tersebut menghasilkan kebuntuan. Oleh karena itu, pembicaraan dan rapat tidak dilanjutkan serta R.P. Soeroso kembali pulang dan memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri. Hasil pembicaraan antara kedua raja tersebut yang berakhir dalam kebuntuan. Upaya untuk membentuk Provinsi Daerah Istimewa Surakarta kemudian tidak dilanjutkan.

## **KIPRAH DI ERA KEMERDEKAAN**

Semenjak berakhirnya masa Revolusi kemerdekaan Indonesia, R.P. Soeroso menjabat berbagai jabatan pemerintahan di Republik Indonesia. Dimulai sejak era Demokrasi Parlementer R.P. Soeroso juga terlibat aktif di pemerintahan. Pada tahun 1950, ia menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang kemudian diangkat menjadi Menteri. Beberapa posisi menteri yang ia duduki antara bulan September 1950 hingga bulan maret 1956, secara berturut-turut menjabat adalah:

1. Menteri Perburuhan dari Kabinet Mohammad Natsir;
2. Menteri Urusan Pegawai dari Kabinet Dr. Sukiman;
3. Menteri Urusan pegawai dari Kabinet Wilopo;
4. Menteri Sosial dari Kabinet Wilopo;
5. Menteri Sosial dari Kabinet Ali Sastroamindjojo;
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dari Kabinet Burhanuddin Harahap;
7. Sekaligus merangkap Menteri Dalam Negeri ad interim selama satu tahun.

Ketika menjabat sebagai Menteri Perburuhan pada masa Kabinet Wilopo, R.P. Soeroso dapat menyelesaikan permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada pemerintahan sebelumnya. Permasalahan tersebut adalah pemogokan buruh perkebunan Belanda yang berjumlah puluhan ribu pekerja. Kemudian hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi R.P. Soeroso yang kemudian dapat menyelesaikan hal ini dengan baik. Ia memberikan kenaikan upah dan jatah pangan secara berkala kepada seluruh pekerja di perkebunan, sehingga mereka bekerja seperti sediakala.

Sebagai hasil dari peristiwa tersebut, R.P. Soeroso membentuk sebuah panitia yang bertugas untuk memfasilitasi pertikaian dan permasalahan terkait dengan kegiatan pekerja. R.P. Soeroso kemudian membentuk Panitia Penyelesaian Perselisihan

Pekerja atau yang juga dikenal dengan P - 4. Panitia tersebut didirikan untuk mencakup berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di wilayah pusat maupun di daerah-daerah. Hal ini mendukung terjadinya optimalisasi dan efisiensi pekerja agar dapat memfasilitasi berbagai keperluan dan kebutuhan pekerja.

Sewaktu R.P. Soeroso memegang jabatan sebagai Kementerian Sosial Republik Indonesia, ia membantu kelancaran datangnya para Transmigran dari Jawa keluar Jawa. Oleh karena itu, ia mengambil percobaan untuk membuka hutan secara mekanis bagi para transmigran tersebut. Salah satu tempat yang menjadi wilayah yang ditargetkan oleh R.P. Soeroso adalah Metro, di mana ia menjadi pimpinan dari bagian Dinas Transmigrasi. Ketika itu, banyak wilayah yang dihuni oleh gajah, oleh karena itu R.P. Soeroso memberi nama kota tersebut sebagai Kota Gajah yang kemudian semakin ramai pada tahun 1970-an. Di tempat itu R.P. Soeroso menempatkan sebuah bengkel dan reparasi Traktor yang digunakan untuk membuka lahan dari hutan. Upaya tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat di Jawa yang ingin bermigrasi ke luar Jawa. Oleh karena itu banyak transmigran yang membiayai sendiri perjalanan mereka untuk pergi keluar Jawa. Pemerintah dapat menghemat anggaran untuk tidak mengeluarkan biaya transmigrasi bagi masyarakat Jawa untuk luar Jawa. R.P. Soeroso sadar bahwa dengan pembangunan infrastruktur dan membuka lahan usaha yang baru di tempat tujuan para Transmigran, kemudian akan menghasilkan magnet bagi para masyarakat yang ingin mengadu peruntungan di wilayah yang baru tersebut.

Sebelumnya pada bulan Desember 1949, Partai Indonesia Raya atau Parindra diaktifkan kembali, dan memilih R.P. Soeroso menjadi ketua partai tersebut. Meskipun Partai Indonesia Raya terlambat dalam mendapat sambutan baik dari berbagai daerah. Akan tetapi partai tersebut ditunggu tunggu kehadirannya kembali baik dari cabang yang ada di Jawa maupun di luar Jawa. Hal ini kemudian berdampak pada Pemilihan Umum pada tahun 1955.

Anggota Partai Indonesia Raya, pada umumnya adalah orang-orang terpelajar dan intelektual yang memiliki pengalaman dalam pemerintahan, oleh karena Parindra mengutamakan kecakapan, kejujuran, dan keinginan untuk membela kepentingan rakyat kecil. Meskipun begitu, Partai Indonesia Raya tidak memiliki massa yang cukup besar karena pada pemilihan umum, diadakan sistem memilih orang, atau calon dari partai politik ikut dalam pemilihan umum bukan memilih gambar partai seperti pemilihan umum di Inggris. Akan tetapi, pada pemilihan umum tahun 1955, sistem lama dalam pemilihan partai masih berlaku, sehingga Partai Indonesia Raya kalah dalam pemilihan tersebut karena tidak memiliki massa anggota yang besar.

Pada tahun 1954, R.P. Soeroso mendirikan yayasan untuk mendorong adanya kemajuan kesehatan terhadap anak-anak terutama bagi anak-anak yang menderita sakit paru-paru. R.P. Soeroso membangun gedung-gedung untuk rumah sakit di atas tanah seluas 44 ha di desa Cilandak Selatan yang berlangsung selama empat tahun dari tahun 1954 hingga tahun 1958.

Ketika bangunan tersebut selesai didirikan, R.P. Soeroso mendapatkan kredit untuk membeli peralatan rumah sakit dan alat-alat kesehatan untuk menunjang kegiatan di rumah sakit tersebut. Kemudian R.P. Soeroso menyerahkan rumah sakit tersebut kepada Departemen Kesehatan yang kemudian menjadi rumah sakit pemerintah. Yayasan tersebut pada awalnya bernama Yayasan Ibu Sukarno, lalu kemudian saat lahirnya Orde Baru, yayasan tersebut berganti nama menjadi Yayasan Fatmawati dan tetap dipimpin oleh R.P. Soeroso sebagai ketua yayasan tersebut.

Baru kemudian pada tahun 1967, Departemen Kesehatan mengajak Yayasan Fatmawati di bawah kepemimpinan R.P. Soeroso untuk bekerjasama dengan Rumah Sakit Fatmawati sesuai dengan prinsip pemerintah dalam menggalakkan partisipasi rakyat sebesar mungkin untuk usaha kesehatan. Di dalam kerjasama itu terdapat persetujuan yang dinamakan "Piagam Kerja Sama" antara Departemen Kesehatan dan Yayasan Fatmawati. Dalam kegiatan



sehari-hari, pengawasan diserahkan kepada dewan direksi yang terdiri dari dua orang wakil Departemen Kesehatan dan dua orang wakil dari Yayasan Fatmawati. Komposisi tersebut dianggap sebagai komposisi yang adil dan merepresentasikan masing-masing pihak dengan baik.

Di bulan Maret 1956, R.P. Soeroso terpilih menjadi Ketua Badan Koordinasi Pusat Koperasi Pegawai Negeri Seluruh Indonesia. Badan tersebut kemudian namanya berganti menjadi Induk Koperasi Pegawai Negeri atau IKPN pada tahun 1960. R.P. Soeroso juga terpilih menjadi ketua umum dari Dewan Koperasi Indonesia pada September 1959, hingga dewan ini dibubarkan oleh Menteri Koperasi Ahmadi pada bulan Maret 1961. Menteri Koperasi tersebut mendirikan kesatuan Organisasi Koperasi Indonesia yang sekaligus menjadi ketua dari organisasi itu. R.P. Soeroso di kemudian hari menganggap bahwa koperasi ditujukan sebagai alat politik, sehingga terjadi kemunduran yang sangat signifikan. Pada periode lahirnya Orde Baru, gerakan koperasi tidak dapat berkembang dan lumpuh.

Kemudian pada bulan Agustus 1958, R.P. Soeroso diangkat oleh Presiden Republik Indonesia Sukarno untuk menjadi anggota Pertimbangan Penghargaan Perintis kemerdekaan Indonesia. Ia kemudian menempati posisi sebagai wakil ketua. Posisi tersebut ia manfaatkan untuk memberikan penghargaan terhadap tokoh-tokoh penting pada masa perjuangan mendapatkan kemerdekaan Republik Indonesia.

Lalu pada tahun 1961, Presiden Republik Indonesia Sukarno kembali mengangkat R.P. Soeroso menjadi ketua sekaligus anggota dari Panitia Negara Urusan Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Panitia tersebut memiliki tugas untuk menyusun rencana undang-undang pokok tentang pemerintahan daerah, kemudian lakukan tinjauan terhadap pertimbangan keuangan serta menyusun rancangan pemerintahan desa yang memiliki hak otonomi. Panitia tersebut tersebut kemudian menyelesaikan tugasnya pada tahun 1962.

Kemudian di bulan Maret 1966 hingga bulan Maret 1973, R.P. Soeroso diangkat menjadi anggota MPR sebagai wakil gerakan koperasi. Selanjutnya pada bulan Mei 1966 ia terpilih menjadi ketua Gerakan Koperasi Indonesia dan dilanjutkan dengan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia pada bulan Juli 1973. Selain jabatan-jabatan tinggi dan pemerintahan tersebut, R.P. Soeroso juga menjabat sebagai ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga di wilayah tempat ia tinggal yaitu di Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Bagi R.P. Soeroso jabatan-jabatan itu adalah lembaga perwakilan rakyat terendah yang baginya sangat menarik karena ia dapat berbakti tanpa imbalan yang besar.

Selain menjabat dan menduduki berbagai posisi penting di pemerintahan Republik Indonesia, R.P. Soeroso juga menerima banyak tanda penghargaan baik bintang maupun Lancana dari pemerintah republik Indonesia, tanda tanda penghargaan itu antara lain adalah:

1. Bintang Maha Putera Adhi Pradana;
2. Bintang Gerilya;
3. Bintang Perintis Kemerdekaan RI;
4. Lencana Satya Karya KL. 1;
5. Lencana Kemerdekaan;
6. Lencana Pembangunan.

Setelah itu, pada tahun 1979, R.P. Soeroso dikukuhkan sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri oleh Presiden Soeharto. (Gonggong, 1983: 7-40)

### **BAPAK KOPERASI PEGAWAI NEGERI**

Terkait dokumen yang dimiliki oleh R.P. Soeroso, terdapat sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Soeharto. Dalam salah satu isi dari surat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Soeharto pada tanggal 8 Juni 1981,

keluarga R.P. Soeroso menyatakan sejumlah nilai-nilai yang perlu diteladani oleh bangsa Indonesia dari R.P. Soeroso itu sendiri, agar R.P. Soeroso diangkat menjadi pahlawan nasional. Di dalam surat tersebut, terdapat berbagai lampiran mengenai pencapaian yang menjelaskan karakter pejuang yang dimiliki oleh R.P. Soeroso.

Dalam perjalanan hidupnya, R.P. Soeroso terus memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sejak tahun 1952, R.P. Soeroso menjadi Menteri Sosial Republik Indonesia. Ketika itu R.P. Soeroso memikirkan kondisi kantor Kementerian Sosial yang berwujud sebagai gedung lama, perlu segera diperbaiki karena gedung di Jalan Nusantara 36 tidak mencukupi untuk menampung para pegawai dari Jakarta maupun yang datang dari luar Jakarta seperti dari Jogjakarta, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur. Hal tersebut disebabkan karena pada waktu itu Kementerian Sosial Republik Indonesia di Jogjakarta harus bergabung dengan kementerian sosial Republik Indonesia Serikat yang ada di Jakarta.

Untuk menunjang kesejahteraan pegawai, R.P. Soeroso berupaya untuk merealisasikan dengan cara memperluas gedung Kementerian Sosial di Jalan Nusantara 36 dan dibelinya gedung di Jati Petamburan 4 untuk menjadi kantor Jawatan Sosial. Selain itu, gedung di Jalan Nusantara 36 kemudian dirombak dan direnovasi untuk menjadi gedung bertingkat dua di bagian depan.

Selain daripada perluasan kantor kementerian sosial, R.P. Soeroso juga memikirkan rumah hunian bagi para pegawainya. Oleh karena itu, R.P. Soeroso membangun rumah-rumah dinas untuk para pegawainya di beberapa wilayah, antara lain:

1. Jelambar dengan jumlah 15 rumah,
2. Setiabudi dengan jumlah 10 rumah;
3. Cipinang dengan jumlah 12 rumah;
4. Kebayoran Baru dengan jumlah 4 rumah.

Selain rumah hunian, R.P. Soeroso juga mendirikan balai-balai peristirahatan untuk para pegawai negeri yang ada di Bandung serta balai peristirahatan Kementerian Sosial di Ciloto, Puncak, Bogor.

Ketika menjabat sebagai Menteri Sosial, R.P. Soeroso juga mengusulkan agar rumah-rumah yang dibangun dapat diangsur oleh para pegawai negeri. Usul tersebut kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yaitu Profesor Doktor Soemitro Djohadikusumo yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Hal tersebut dibahas dalam sidang Kabinet yang kemudian menjadi Peraturan Pemerintah yang memutuskan bahwa rumah-rumah tersebut dapat diangsur oleh para pegawai negeri dalam kurun waktu lima tahun.

Keputusan pemerintah tersebut baru dapat dilaksanakan ketika R.P. Soeroso menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Ketika ia menjabat, R.P. Soeroso mengatur angsuran pembelian rumah yang dijalankan mulai tahun 1955 dan pegawai negeri yang menempati rumah-rumah dinas tersebut, dapat membeli rumah-rumah mereka dengan mengangsur dalam waktu 20 tahun serta dapat dilunasi dalam waktu lima tahun.

Hingga akhir hayatnya, R.P. Soeroso tetap berjuang untuk mendanai pembangunan rumah-rumah bagi pegawai negeri melalui Koperasi Pegawai Negeri dengan jalan jangka panjang dan jangka pendek melalui tabungan oleh pegawai negeri melalui modal sendiri. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada para pegawai negeri yang sudah mempunyai tanah atau mempunyai rumah yang kecil, sehingga dapat diberikan kemudahan untuk membangun rumahnya sendiri di atas tanah mereka serta memperbaiki atau memperluas rumah mereka, dengan pinjaman dari Koperasi Pegawai Negeri yang dapat diangsur.

Selain urusan mengenai perumahan bagi para pegawai negeri, R.P. Soeroso juga memikirkan keperluan-keperluan lain baik dari pegawai negeri itu sendiri maupun anggota keluarga mereka. Hal tersebut dilakukan salah satunya dengan membentuk Koperasi Pegawai Negeri di setiap kantor mulai dari pusat hingga di daerah-

daerah. Hal tersebut kemudian disetujui oleh pemerintah dengan keluarnya surat Edaran kepada para menteri-menteri Republik Indonesia pada 22 November 1954 nomor 34146 / 54 terkait pembentukan Koperasi Pegawai Negeri.

Selain itu terdapat pula Surat Edaran dari Perdana Menteri Republik Indonesia kepada para menteri pada 7 April 1955 nomor 9190 / 55 yang membebaskan para pegawai negeri untuk keperluan Koperasi Pegawai Negeri. Kesejahteraan para pegawai negeri terus diperjuangkan oleh R.P. Soeroso hingga munculnya Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1969 dan nomor 22 tahun 1970 mengenai Koperasi Pegawai Negeri untuk mendapat modal dari potongan gaji pegawai negeri sehingga dengan mudah, gerakan Koperasi Pegawai Negeri dapat berkembang secara terus menerus.

Kemudian modal dari keputusan presiden tersebut sudah mulai berjalan semenjak tahun 1969 hingga tahun 1974, dan selama lima tahun tersebut gerakan Koperasi Pegawai Negeri memperoleh modal sekitar 2,25 miliar Rupiah. Dana tersebut kemudian menjadi dana abadi yang terus diputar sebagai usaha simpan pinjam, pembangunan proyek-proyek daerah untuk keperluan pegawai negeri, mendirikan pabrik sepeda Turangga pada tahun 1974 yang diresmikan oleh presiden republik Indonesia Soeharto, dan untuk keperluan lain lain yang bertujuan untuk menyejahterakan pegawai negeri Republik Indonesia.

Masalah lain selain kesejahteraan dan perumahan bagi para pegawai republik Indonesia yang menjadi perhatian khusus dari R.P. Soeroso adalah masalah kesehatan. R.P. Soeroso sejak tahun 1952 telah membeli tanah sebesar 44 ha di Cilandak Beran baru dengan cita cita untuk mendirikan rumah sakit di atas lahan tersebut. R.P. Soeroso sudah memikirkan bahwa wilayah Jakarta akan menjadi kota yang padat dan memiliki harga tanah yang sangat mahal. Oleh karena itu, R.P. Soeroso berupaya untuk mendirikan rumah sakit yang letaknya sedikit jauh dari pusat kota agar dapat dilakukan perluasan bila diperlukan.

Atas gagasan yang di Usung oleh R.P. Soeroso, lahirlah yayasan Ibu Soekarno di mana ia duduk sebagai penasehat dari yayasan tersebut. Usaha ia yang telah dirintis sejak tahun 1952 kemudian berhasil mengumpulkan modal awal sebesar 28 juta Rupiah dan ia berhasil mendirikan rumah sakit yang diberi nama Rumah Sakit Ibu Sukarno yang berada di bawah yayasan milik R.P. Soeroso tersebut. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya yang terus diperjuangkan oleh R.P. Soeroso untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia secara luas.

R.P. Soeroso dalam memberikan akses kesehatan lebih memadai terhadap masyarakat Indonesia, kemudian mendapatkan dukungan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menjadikan Rumah Sakit Fatmawati menjadi rumah sakit swasta bersubsidi. Rumah Sakit Fatmawati yang dibangun oleh R.P. Soeroso, memiliki rancangan *masterplan* 20 tahun ke depan untuk menjadi rumah sakit terbesar di Jakarta dan juga memungkinkan untuk menjadi rumah sakti terbesar di seluruh Indonesia. Rumah sakit tersebut dapat menampung lebih dari 1000 kamar dan memiliki beragam fasilitas yang sangat memadai. R.P. Soeroso telah melihat potensi dan permasalahan kesehatan yang perlu ditangani secara lebih komprehensif sejak tahun 1952.

Selain di dalam bidang kesehatan, kegiatan lain yang dilakukan oleh R.P. Soeroso adalah memperjuangkan nasib para perintis kemerdekaan. Ia menjabat sebagai ketua badan pertimbangan Perintis kemerdekaan. Dalam perjuangannya, R.P. Soeroso berusaha untuk menjadikan Gedung Pola di Pegangsaan Timur nomor 56 menjadi Gedung Perintis Kemerdekaan yang diresmikan oleh Presiden Soeharto.

Hasil perjuangan dari R.P. Soeroso yang paling penting antara lain adalah gagasan mengenai koperasi. R.P. Soeroso mendirikan koperasi di berbagai daerah baik tingkat satu mau tingkat dua di daerah-daerah. Koperasi di daerah tingkat dua, juga didukung oleh gabungan koperasi di tingkat provinsi dan kemudian menggabungkan diri dalam Induk koperasi di pusat yang menjadi

cikal bakal apa yang kita kenal juga sebagai Induk Koperasi Pegawai Negeri. Koperasi bentukkan R.P. Soeroso ini mendapat perhatian yang penuh dari Kabinet Parlemitter yang sedang berkuasa pada saat itu.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah, Koperasi Pegawai Negeri berhasil mendapatkan pinjaman dari Bank Indonesia hingga mencapai angka 250 juta Rupiah, yang tidak disertai dengan bunga. Modal tersebut dipergunakan oleh para anggota koperasi untuk melakukan pembelian berbagai komoditas seperti kain batik dan tekstil untuk para anggota Koperasi Pegawai Negeri. Anggota dari Koperasi Pegawai Negeri itu sendiri terdiri dari para pegawai pemerintahan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Atas kecapakan dalam pengelolaan usaha, uang pinjaman yang didapat dari Bank Indonesia itu kemudian dapat dikembalikan tanpa adanya bunga, sehingga modal dan keuntungan bisa dipergunakan secara optimal dan keuntungan didapat secara maksimal. Selain itu, koperasi pegawai negeri juga memberikan fitur terhadap para anggotanya untuk dapat mengangsur berbagai barang selama beberapa bulan maupun beberapa tahun. Kemajuan yang diperoleh oleh gerakan koperasi pegawai negeri, merupakan buah tangan pimpinan langsung dari R.P. Soeroso yang mendapat dukungan pula dari Kabinet Parlemitter dari periode 1952 hingga 1958. Ketika itu gerakan tersebut sudah mencapai jumlah anggota sekitar 1,3 juta orang.

Kendala yang dialami oleh Induk Koperasi Pegawai Negeri, baru mulai terlihat ketika terjadi perubahan sistem pemerintahan dari parlemitter menuju presidensil pada tahun 1959. Ketika itu Gerakan Koperasi Pegawai Negeri mengalami kemunduran pada tahun 1960 karena banyak bank-bank yang sebelumnya merupakan sumber pemodal yang digunakan oleh Koperasi Pegawai Negeri, dibekukan oleh pemerintah. Koperasi Pegawai Negeri mengalami kesulitan pencarian modal pada saat itu.

Permasalah lain juga kemudian muncul. Ketika itu, gerakan koperasi dipimpin langsung oleh Menteri Koperasi yang menjadi

ketua kesatuan organisasi koperasi Indonesia yang berada di bawah pengawasan Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis). Gerakan Koperasi pegawai Negeri menjadi satu-satunya gerakan yang dipimpin langsung oleh R.P. Soeroso yang tidak diawasi oleh Nasakom. Secara keseluruhan, Gerakan Koperasi Pegawai Negeri mengalami periode kesulitan ketika terjadi peristiwa 30 September pada tahun 1965 karena sulitnya pencarian modal untuk dapat bertahan.

Dengan kemampuan dan keinginan yang kuat dari R.P. Soeroso, Induk Koperasi Pegawai Negeri dapat tetap bertahan dengan kredit dari Bank Rakyat Indonesia serta jaminan dari para anggota pengurusnya. R.P. Soeroso berusaha dengan sekuat tenaga menjaga agar Koperasi Pegawai Negeri dapat mendapatkan kredit untuk usaha-usahanya, sekaligus mengembalikan modal tepat waktu kepada bank yang memberikan modal pinjaman. Dapat dikatakan bahwa periode tersebut dilalui oleh para pengurus koperasi pegawai negeri dengan sangat sulit, para anggotanya melakukan pengabdian tanpa imbalan jasa dan dilakukan secara sukarela.

Baru setelah tahun 1969, R.P. Soeroso berkesempatan untuk menghadap Presiden Soeharto untuk mengungkapkan kesulitan gerakan koperasi pegawai negeri yang terus mengupayakan kesejahteraan bagi para anggotanya yang terdiri dari pegawai pemerintahan. Hingga akhirnya permasalahan tersebut berupaya diatasi oleh Presiden Soeharto. Gerakan Koperasi Pegawai Negeri kemudian mendapat bagian dari potongan gaji pegawai negeri termasuk angkatan bersenjata republik Indonesia beserta polisi republik Indonesia. Gerakan Koperasi Pegawai Negeri yang di dalamnya termasuk beberapa koperasi yang antara lain:

1. IKPN;
2. INKOPAD;
3. INKOPAL;
4. INKOPAU;
5. INKOPOL;



Setelah melewati perjuangan dan upaya bertahan yang cukup sulit, pada tahun 1969, keluar Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1969 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1970. Sejak saat itu, Gerakan Koperasi Pegawai Negeri mendapat modal dari potongan gaji para pegawai negeri hingga tahun 1974.

Permasalahan lain yang menjadi tantangan bagi R.P. Soeroso adalah keperluan untuk menambah jumlah anggota koperasi pegawai negeri sipil. Jumlah pegawai negeri pada saat itu hampir dua juta jiwa, akan tetapi yang menjadi anggota koperasi hanya berjumlah sekitar 600 ribu jiwa. Angka tersebut hanya mencakup satu per tiga dari jumlah total keseluruhan pegawai negeri di Indonesia pada periode tersebut. R.P. Soeroso melakukan berbagai upaya tersebut dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh Instansi dan para gubernur di daerah agar para pegawainya ikut menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri.

Pada tahun 1974, saat Keputusan Presiden Nomor 22 / 1970 akan dihentikan, Direktur Jenderal Koperasi ingin mengambil modal dari koperasi pegawai negeri sesuai dengan keputusan presiden nomor 36 / 69 dan keputusan presiden nomor 22 / 19 70 bersamaan dengan keputusan bersama tiga menteri lainnya, akan tetapi R.P. Soeroso menentang tindakan tersebut. Bagi R.P. Soeroso, keputusan tiga menteri tidak menjadi landasan yang kuat serta bukan peraturan pemerintah. Baginya, bantuan presiden yang sudah diberikan itu harus menjadikan modal tetap untuk berada di dalam Koperasi Pegawai Negeri yang dikelola dan dijalankan oleh Induk Koperasi Pegawai Negeri di bawah pimpinan R.P. Soeroso.

Akan tetapi, penentangan yang dilakukan oleh R.P. Soeroso, tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Keputusan Presiden Nomor 56 tahun 1974 mulai berlaku pada 1 Januari 1975. Modal yang didapat selama kurun waktu 1969 hingga 1974 yang berasal dari potongan gaji pegawai negeri, Kemudian bisa membiayai koperasi pegawai negeri untuk memperpanjang aktivitasnya. Akan tetapi, modal tersebut tidaklah cukup untuk menutup berbagai keperluan

dan kebutuhan serta kesejahteraan pegawai negeri yang berjumlah sekitar dua juta jiwa dengan keluarganya yang berjumlah sekitar 10 juta jiwa, sehingga perlu adanya modal tambahan dari berbagai sumber.

Induk Koperasi Pegawai Negeri di bawah pimpinan R.P. Soeroso kemudian berjuang untuk terus mendapatkan tambahan modal dengan modal awal yang didapat dengan nilai 105 juta Rupiah, Induk Koperasi Pegawai Negeri kemudian mencoba untuk membuat proyek pembangunan perumahan untuk pegawai negeri di Jakarta, tepatnya di Desa Bintaro Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Di dalam proyek itu, R.P. Soeroso mendirikan 188 buah rumah dari tipe 25, 45, 54, dan 70, yaitu tipe yang dibuat oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik. Di dalam kompleks perumahan yang didirikan tersebut, dilakukan pula pembangunan sekolah dasar dari modal INPRES, kemudian terdapat pula bangunan tempat ibadah berupa musolah yang dibangun oleh Induk Koperasi Pegawai Negeri. Proyek yang dibangun oleh Induk Koperasi Pegawai Negeri yang dibangun di wilayah Bintaro tersebut, kemudian menjadi contoh perumahan nasional yang ditangani langsung oleh pemerintah dan dikembangkan secara berkala.

Dengan perkembangan yang cukup signifikan, kemudian muncul proyek perumahan yang kemudian tumbuh dan dilaksanakan oleh gabungan dari Koperasi Pegawai Negeri. Oleh karena pembiayaan proyek yang cukup besar, dibutuhkan modal yang cukup besar dalam memulai proyek perumahan tersebut. Dalam hal ini, R.P. Soeroso sebagai Ketua Umum Induk Koperasi Pegawai Negeri, berupaya untuk mengajukan permintaan kepada Presiden Suharto pada 12 Juli 1979 atau yang juga nantinya dikenal dengan Hari Koperasi. Hal tersebut berujung pada ditanganinya proyek perumahan yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perumahan Rakyat yang bekerjasama dengan Induk Koperasi Pegawai Negeri.

Pada akhir November 1980 Menteri Perumahan Rakyat mengirimkan surat kepada Kabinet untuk mendirikan unit usaha

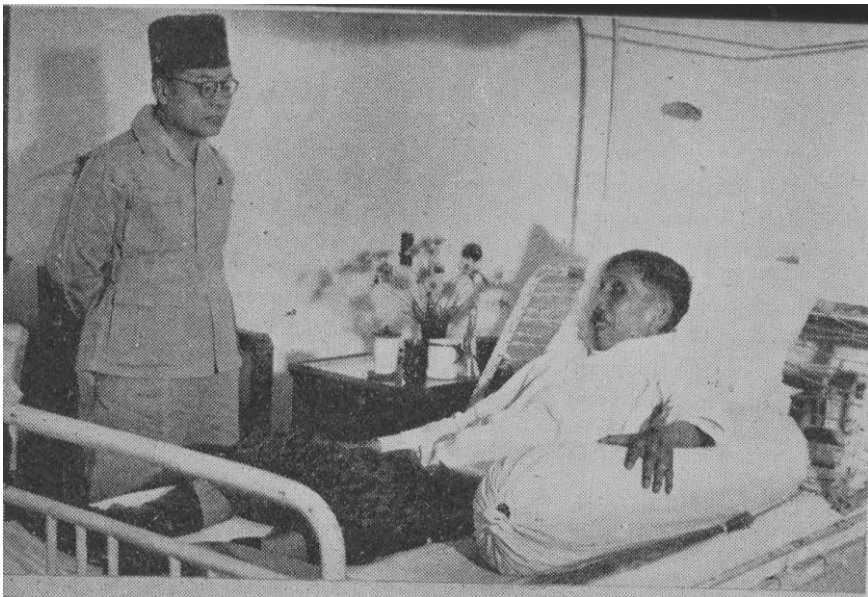
pembiayaan atau tabungan perumahan Induk Koperasi Pegawai Negeri untuk pegawai negeri. Unit usaha tersebut mendapatkan modal awal dari Presiden Soeharto. Melalui pembiayaan dari presiden pada tahun 1981, cita cita R.P. Soeroso untuk mendirikan koperasi secara berkelanjutan sudah dapat terlaksana. R.P. Soeroso juga kemudian diberikan gelar sebagai Bapak Koperasi oleh Presiden Soeharto.

Kemudian pada 12 Juli 1974, R.P. Soeroso mendirikan pabrik sepeda nya disebut sebagai pabrik sepeda Turangga IKPN. R.P. Soeroso mendirikan pabrik ini dengan landasan keinginan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan Allah angkut dan alat transportasi yang sederhana. Oleh karena itu, sepeda merupakan salah satu kebutuhan bagi pegawai negeri maupun masyarakat dari bermacam golongan di berbagai daerah.

Sebagai ketua umum dari Induk Koperasi Pegawai Negeri, R.P. Soeroso terus berjuang untuk memberikan kesejahteraan terhadap pegawai negeri di Republik Indonesia. Bagi R.P. Soeroso, kesejahteraan pegawai negeri akan memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hari ini sejalan dengan undang undang dasar 1945 pasal 33 yang bermakna bahwa Pancasila akan tercapai melalui demokrasi ekonomi yang diterapkan terhadap rakyat Indonesia melalui koperasi sebagai wahananya yang bersifat gotong royong. Berwarna sosialis, religious, dan bertujuan untuk mencapai kemakmuran bersama bagi seluruh rakyat Indonesia.

## PENUTUP

Jalan hidup Raden Pandji Soeroso diwarnai oleh perjuangan yang mengedepankan nasionalisme terhadap bangsanya. Ia memilih sebagai bagian dari kelompok nasionalis yang menginginkan tercapainya kedaulatan Indonesia sepenuhnya, sehingga ia mendapatkan tempat yang luhur di dalam catatan sejarah bangsa Indonesia.



Bung Hatta sedang menjenguk Gubernur Jawa Tengah RP Suroso yang terbaring sakit akibat kelelahan keluar masuk medan gerilya.  
(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia-ANRI)

Proses perjuangan yang ditempuh oleh R.P. Soeroso, memiliki tidak hanya terbatas pada periode dan batasan wilayah tertentu, melainkan mencakup wilayah yang berlaku secara nasional. Karakter pejuang yang dimiliki oleh R.P. Soeroso, tidak hanya terlihat ketika ia menduduki posisi jabatan tertentu, akan tetapi terus tampak ketika berbagai posisi pemerintahan ia duduki. Sifat kepemimpinan inilah yang menjadi teladan bagi bangsa Indonesia yang perlu dipetik dan

dimanfaatkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga para pemimpin bangsa dapat membangun Republik Indonesia yang adil dan makmur untuk seluruh rakyatnya.

Raden Pandji Soeroso meninggal pada 16 Mei 1981, pemerintah Indonesia mengangkat ia sebagai salah seorang Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986, melalui Surat Keputusan Presiden No.81/TK/1986.

---

**R. M. T. A. SOERJO**

---





# **R. M. T. A. SOERJO**

## **GUBERNUR DI TENGAH PERANG**

HENDI JOHARI

Ketika mendengar terjadi pembunuhan terhadap Soerjo pada November 1948, semua orang menundukkan kepala dan menyesali peristiwa tersebut. Bukan hanya kawan-kawan sehaluan, lawan-lawan politik Soerjo seperti Soeripno pun menyatakan bahwa pembunuhan itu tak seharusnya dilakukan. “Tentang hal ini, kami merasa sangat menyesal,” ujar tokoh teras Partai Komunis Indonesia itu.

Soerjo dikenal sebagai seorang birokrat Republik yang elegan dan pemberani. Keberanian dan sikap elegan priayi Magetan, Jawa Timur, itu memang sudah dibawanya sejak duduk di bangku OSVIA (Sekolah Pamongpaja Hindia Belanda) Madiun. Menurut Donny Ariotedjo, salah seorang cucu Soerjo, eyangnya tak segan berkelahi dengan para sinyo Belanda jika menyangkut harga diri bangsa. “Kata orang-orang tua kami, Eyang Soerjo bahkan pernah membela kawannya yang akan dikeluarkan karena menolak ikut dalam peringatan bebasnya Belanda dari penjajah Prancis,” ungkap Donny.

Soerjo memang sangat membenci penindasan. Namun, berbeda dengan orang lain, dalam mengekspresikannya ia selalu menggunakan otak dingin agar tak berakhir konyol. Itu pula yang menjadi jawaban mengapa saat Jepang berkuasa di Indonesia, ia terpaksa “bekerja sama” dengan militer Jepang. Menurut Wawardi, sebagai seorang pemimpin, banyak rakyat yang menjadi



tanggungannya. “Tapi pada dasarnya ia adalah seorang nasionalis yang baik,” ujar salah seorang sahabat Soerjo itu.

Kepentingan rakyat banyak menjadi perhatian utama Soerjo. Ketika bertugas sebagai wedana di Sidorajo pada 1933, banjir tiba-tiba melanda kawasan Porong (masuk dalam Kewedanaan Sidoarjo) dan menimbulkan penderitaan terutama bagi para petani yang mengalami gagal panen. Dengan kejadian itu, Soerjo merasa terpukul dan bertekad mencegah kejadian yang sama terulang. Dengan bantuan rakyat, ia langsung terjun memperbaiki tanggul-tanggul yang sudah rusak.

Contoh yang lain, saat menjadi bupati di Magetan, Soerjo banyak melindungi rakyatnya dari kesewenang-wenangan militer Jepang. Ia melarang keras kepada warganya terlibat dalam pengumpulan kaum perempuan untuk pemuas nafsu para serdadu Jepang. Entah segan atau merasa memerlukan peran Soerjo, balatentara Jepang pun tak pernah berani mengusik pendirian bupati Magetan itu. Ketika pemerintahan pendudukan Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Soerjo diangkat sebagai anggota.

Pada masa awal Indonesia merdeka, Presiden Sukarno mengangkat Soerjo sebagai gubernur pertama Jawa Timur. Dalam posisi itulah, Soerjo membuktikan jiwa nasionalismenya: membangkitkan kaum Republik di Jawa Timur terutama saat berhadapan dengan pasukan Sekutu yang datang ke Pulau Jawa sebagai pemenang Perang Dunia II. Soerjo tak pernah merasa takut menghadapi musuh. Ketika Mayor Jenderal E. C. Mansergh mencoba menggertaknya, ia malah balik menggertak pemimpin tentara Inggris di Surabaya itu. Termasuk saat ia menolak “panggilan” Mansergh untuk menghadapnya pada 9 November 1945.

Penolakan Soerjo itu melahirkan ultimatum Inggris kepada rakyat Surabaya untuk secepatnya bertekuk lutut. Sebagai wakil Republik Indonesia di Surabaya, Soerjo lantas meminta pendapat Presiden Sukarno di Jakarta. Sukarno mengangkat bahu dan menyerahkan keputusan kepada Soerjo sendiri. Maka, setelah

berunding dengan jajarannya, pada 9 November malam, ia berdiri di depan corong radio. Pidato gubernur Jawa Timur di tengah suasana perang itu sangat jelas: rakyat Surabaya tak sudi bertekuk lutut. “Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita lebih baik hancur daripada dijajah kembali . . . Selamat berjuang!” demikian seruan Soerjo seperti dicatat oleh Nugroho Notokusanto dalam *Pertempuran Surabaya*.

Keesokan harinya, dunia menjadi saksi betapa tidak mudah bagi militer Inggris menaklukkan perlawanan arek-arek Suroboyo. Walaupun akhirnya mereka menang, itu terjadi setelah mereka bertempur sekitar tiga minggu dalam situasi seperti di neraka.

## **LAHIRNYA SEORANG PEMIMPIN**

Suatu hari pada 1943, suasana ramai di kantor Kabupaten Magetan tiba-tiba berubah jadi mencekam. Sebagian besar pegawai kabupaten menghindari kala seorang perwira Jepang marah-marah sambil menghunus *gunto*, pedang panjang khas negeri matahari terbit. Tak jelas benar apa yang menyebabkan perwira Jepang itu murka dan menebar ancaman, namun yang pasti tak ada satu pun orang-orang di sana saat itu yang berani bereaksi kecuali seorang lelaki hampir setengah baya.

Raden Mas Tumenggung Aryo Soerjo, nama lelaki itu, alih-alih gentar justru mendekati perwira yang tengah kalap tersebut. Dalam nada yang keras namun berwibawa, ia malah balik memarahi sang perwira yang sudah mengganggu ketenteraman lingkungan kerjanya. “Saudara ini sudah datang tanpa permissi dan mengenalkan diri, membuat kericuhan pula di sini! Saudara harus tahu, karena saya merasa benar saya tidak takut sama sekali kepada anda!” bentak lelaki yang tak lain adalah Bupati Magetan saat itu.

Dihadapi dengan sikap berani dan elegan seperti itu, sebagai seorang samurai, si perwira Jepang menjadi malu. Ia pun menurunkan tensi dan coba membicarakan masalah yang ia hadapi secara baik-baik. Masalah berakhir setelah perwira Jepang minta

maaf karena mengganggu ketentraman orang-orang yang bekerja di kabupaten.



Soerjo (paling kanan) bersama keluarga besarnya.  
(Foto Dokumen Keluarga Besar R.M.T.A. Soerjo)

Raden Mas Tumenggung Aryo Soerjo—yang lebih dikenal dengan panggilan nama terakhirnya—adalah putra kedua pasangan Raden Mas Wirjosumarto, Ajun Jaksa Magetan, dan Raden Ayu Kustilah. Lahir di Magetan, 9 Juli 1896, Soerjo tumbuh dewasa dalam lingkungan sekolah yang menerapkan pendidikan Belanda. Setelah menamatkan pendidikan di Tweede Inlandsche School Magetan, ia lantas melanjutkan ke Hollandsch Inlandsche School di Magetan.<sup>1</sup> Kendati dididik dalam lingkungan Belanda, tidak menjadikan Soerjo merasa beda. Laiknya anak-anak desa, ia pun kerap menghabiskan

waktu untuk bermain kelereng, mencari ikan di sungai dan mengembala kerbau di sawah. Kenakalan khas anak-anak kampung juga menjadi bagian masa kecil Soerjo. Menurut Raden Ajeng Kustinah, Soerjo kecil dan kawan-kawannya pernah dikejar-kejar oleh seorang mandor tebu yang terkenal galak. "Mereka nekad mencuri beberapa batang tebu dari lori (kereta kecil) pabrik untuk dimakan bareng-bareng," ujar salah satu adik Soerjo itu.<sup>2</sup>

Berhubung kedua orangtuanya mengharapkan Soerjo menjadi *ambtenaar* atau pamong praja, seperti halnya sang ayah, ia dimasukkan ke Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaar (OSVIA) di Madiun. Soerjo menyambut baik harapan orangtuanya itu yang memang sejalan dengan cita-citanya untuk menjadi pejabat. Selama di OSVIA, Soerjo terbilang siswa aktif. Ia sangat gandrung pada berbagai cabang olahraga seperti angkat besi, pencak silati dan senam. Tak aneh jika tubuh Soerjo tegap, sehat dan kekar. Ia pun kerap didapuk sebagai pemimpin olahraga senam di lingkungan sekolah. Selain berolahraga, Soerjo juga menyenangi permainan sulap dan bermain wayang orang. Peran favorit yang kerap dimainkannya adalah tokoh Semar atau raksasa.

Sebagai anak muda, Soerjo dikenal sebagai seorang pemberani terutama pada hal-hal yang ia anggap tidak benar. Karena prinsip itu, tak jarang ia harus berkelahi dengan para sinyo Belanda yang selalu meremehkan anak-anak bumiputera. Rasa setia kawan Soerjo juga tak usah diragukan. Kepada sesama kawan yang selalu "ditindas" Soerjo pasti membelanya mati-matian. "Eyang pernah membela empat kawannya yang dikeluarkan oleh pihak OSVIA," ungkap Donny Ariotejo, salah seorang cucu dari Soerjo.<sup>3</sup>

Kisahny, pada 1913 pemerintah Hindia Belanda akan mengadakan pesta besar-besaran terkait 100 tahun bebasnya negeri mereka dari penjajahan Prancis. Tentu saja niat itu mendapat penolakan dari sebagian tokoh bumiputera. Salah satunya adalah Raden Mas Soewardi Soerjaningrat alias Ki Hadjar Dewantoro. Ia menulis sebuah artikel berjudul *Als ik een Nederlander ben* (Andaikan saya seorang Belanda). Dalam artikel itu, secara kritis Soewardi

menyebut orang-orang Belanda yang akan merayakan momen itu sebagai tidak tahu diri karena berpesta atas nama kemerdekaan di atas penderitaan orang-orang yang justru kemerdekaannya sedang mereka tindas.<sup>4</sup> Tulisan Soewardi itu menerobos masuk ruang belajar dan kamar-kamar asrama anak-anak OSVIA. Secara blak-blakan, empat siswa OSVIA menolak mentah-mentah merayakan pesta. Akibatnya, mereka dikucilkan dan dipecat sebagai siswa sekolah calon pegawai negeri tersebut.

Aksi solidaritas pun muncul terhadap pemecatan itu, termasuk dari Soerjo. Dengan mengabaikan sanksi akademis yang siap mengancamnya, Soerjo bersama kawan-kawannya melakukan advokasi dan diam-diam membantu keseharian keempat siswa OSVIA yang dikeluarkan tersebut. Namun, konflik itu ibarat gajah melawan semut. Soerjo dan kawan-kawannya tetap “kalah” dan permintaan mereka agar pemecatan itu dibatalkan tetap tak digubris pihak OSVIA. Bisa jadi kegagalan itu menjadikan sikap anti-kolonialisme Soerjo semakin menumpuk. Itu terbukti dengan seringnya Soerjo bertrok dengan dengan para sinyo Belanda yang kerap menghina kebumiputeraan mereka. Bahkan salah seorang gurunya yang bernama Sastrohutomo pernah memergoki Soerjo tengah membersihkan keris pusaka warisan keluarganya.<sup>5</sup>

“Mengapa anak [sebutan ini tertuju kepada Soerjo] membersihkan pusaka itu?” tanya sang guru. “*Kangge njagi menawi wonten tiyang ingkang kurang ajar* (untuk berjaga-jaga jika ada orang yang kurang ajar terhadap saya),” jawab Soerjo sambil dengan tenang tetap membersihkan kerisnya.

Sastrohutomo mafhum atas jawaban anak didiknya itu. Ia memastikan Soerjo tengah siap-siap bertarung sampai mati dengan para sinyo Belanda yang kerap berlaku kurang ajar dan menghina anak-anak OSVIA. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, sang guru lantas melaporkan soal itu kepada orangtua Soerjo. Dengan tergopoh-gopoh, Raden Mas Wirjosumarto dan Raden Ayu Kustiah datang ke Madiun, menasihati agar Soerjo lebih memikirkan

masa depannya ketimbang menuruti gejolak mudanya. “Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna,” ujar sang ayah.

Soerjo tak pernah membantah apa pun terhadap kedua orangtuanya. Ia yakin orangtuanya pasti memiliki harapan dan maksud yang baik dengan nasihatnya. Hingga hari-hari terakhir di OSVIA, Soerjo bisa menahan gejolak perasaan tidak senang kepada sinyo-sinyo itu. Namun, diam-diam ia memupuk semuanya hingga menjadi butiran kristal patriotisme yang menjadi modal utama kelak saat ia ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

## **JALAN MENUJU GUBERNUR**

Pada 1918, Soerjo lulus dari OSVIA Madiun. Beberapa bulan setelah kelulusannya, ia diangkat sebagai GAIB (Gediplomeerd Assistant Inlandsch Bestuursambtenaar) di kantor Kontrolir Ngawi. Kali pertama datang ke Ngawi, ia menetap di rumah adik iparnya, Raden Mas Sayid yang baru saja menikahi adik perempuan Suryo bernama Raden Ayu Kustinah. Namun beberapa bulan kemudian, Soerjo memutuskan tinggal di rumah eyangnya—eks Patih Magetan—yang tengah menikmati masa pensiun di Ngawi.

Dua tahun kemudian, Soerjo dipindahkan ke Madiun dan diangkat sebagai Mantri Polisi. Melihat bakatnya yang luar biasa, atasannya menyekolahkan Soerjo ke Sekolah Polisi di Sukabumi pada 1922. Pada waktu itu, pengetahuan tentang ilmu kepolisian sangat berguna untuk menunjang tugas seorang pamong praja. Selesai sekolah dari Sukabumi, Soerjo ditempatkan sebagai wedana di wilayah Karangrejo, Glodog, Madiun.

Seolah anak panah yang diluncurkan, karier kepomongprajaan Soerjo terus melesat. Pada 1926, pemerintah Hindia Belanda mengangkatnya sebagai asisten wedana di Madiun Kota. Di tempat yang membesarkannya sebagai seorang pamong praja, Soerjo menemukan jodohnya yakni Raden Ayu Mustapeni, putri dari Raden Adipati Hadiwinoto, Bupati Magetan. Kendati

menikahi seorang janda beranak satu, Soerjo sangat bahagia dengan pernikahan itu.

Dari Madiun, selanjutnya Soerjo—masih sebagai asisten wedana—dipindah ke Jetis, Ponorogo. Teruji sebagai seorang asisten wedana di dua tempat, pada 1929 pemerintah lantas menaikkan pangkat Soerjo menjadi wedana di Pacitan. Namun, hal itu tidak lama karena dua tahun kemudian ia disekolahkan kembali ke Bestuursschool (Akademi Pamong Praja) di Batavia. Selama sekolah itu, ia menetap di kawasan Kebon Sirih.

Lulus dari Akademi Pamong Praja pada 1931, Soerjo ditempatkan sebagai wedana di Gedeg, Mokokerto. Sukses di sana, ia lalu dipromosikan menempati jabatan yang sama di Porong, kawasan di Sidoarjo yang dikenal sebagai daerah rawan banjir. Jika musim hujan datang bisa dipastikan Porong akan terendam. Selain mengakibatkan para petani merugi karena sawah-sawah yang digarapnya menjadi rusak, banjir pun pun membuat rakyat Porong terkena banyak penyakit. Sebagai wedana, Soerjo tak berpangku tangan melihat kondisi tersebut. Ia berpikir keras supaya masyarakat yang dipimpinnya segera lepas dari bencana tahunan itu. Maka dibuatlah berbagai terobosan, seperti memperbaiki bendungan dan saluran di daerah aliran Sungai Porong.

Untuk lebih menyempurnakan upayanya, Soerjo mencari dana guna membangun bendungan baru dan memperbaiki irigasi yang rusak. Kerja bakti pun digalakkan dengan melibatkan semua pihak termasuk Soerjo sendiri yang langsung terjun memperbaiki tanggul rusak. Upaya tersebut tidak sia-sia, saat hujan datang mendera, banjir musiman di Porong pun perlahan berkurang.

Pada 1938, Soerjo dipanggil kembali ke tanah kelahiran. Di Magetan ia diangkat menjadi bupati, menggantikan ayah mertuanya Raden Adipati Aryo Hadinoto. Selama menjadi Bupati Magetan, Soerjo selalu menunjukkan sikap yang baik dan penuh tanggungjawab sebagai seorang pamongpraja dan pemimpin rakyat. Soerjo dikenal oleh masyarakat Magetan kala itu sebagai seorang bupati yang berani

dan tegas. Terhadap rakyat ia selalu terbuka dan mengayomi. Karena itu, adalah wajar jika rakyat Magetan sangat mencintainya.

Selama menjadi bupati di Magetan, banyak hal yang telah dilakukan Soerjo demi kemajuan dan pembangunan wilayah dan masyarakat setempat. Antara lain, perbaikan jalan antara Magetan dan Sarangan. Jalan yang semula sempit itu diperlebar dan untuk kali pertama permukaannya dilapisi aspal. Beberapa tanjakan dan kelokan berbahaya dikurangi sedemikian rupa sehingga dapat dilalui secara aman dan mudah bagi kendaraan bermotor tanpa khawatir mengalami kecelakaan.

Terobosan Bupati Soerjo tersebut sangat penting dan besar manfaatnya bagi daerah Magetan dan Sarangan. Selain tingkat aktivitas perekonomian berjalan lancar, banyak orang dari berbagai wilayah berdatangan ke Magetan dan Sarangan, baik untuk berdagang maupun sekadar bertamasya. Sarangan dengan danau dan pemandangannya yang indah merupakan tempat berlibur dan rekreasi yang sangat menarik bagi para wisatawan. Untuk memanjakan wisatawan, fasilitas menuju tempat-tempat tamasya diperbarui. Apa yang dilakukan Soerjo berimbas baik bagi sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi rakyat di sana. Para wisatawan yang datang bukan saja dari daerah Magetan dan sekitarnya, tapi juga datang dari Semarang, Surabaya, Madiun dan sekitarnya.

Selain pariwisata, Sarangan merupakan daerah pertanian sayuran dan buah-buahan terutama di daerah Magetan dan sekitar Madiun. Perbaikinya jalan antara Sarangan dan Magetan membuat pengiriman hasil pertanian dan perkebunan rakyat ke wilayah kota berjalan lancar. Produksi pertanian mengalami surplus dengan harga yang bisa dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Kemajuan ekonomi Magetan menjadikan nama Bupati Soerjo populer dan dikenal baik oleh pejabat Hindia Belanda. Namun, hal itu tidak menjadikan Soerjo larut berpuas diri. Menurut Wawardi, Ketua Perintis Kemerdekaan seluruh Jawa Timur yang mengenal dekat Soerjo, kendati seorang bupati Soerjo sejatinya berjiwa patriot dan



mencintai bangsanya. Hal itu dialami sendiri oleh Wawardi menjelang kedatangan Jepang. Wawardi, aktivis Partai Indonesia Raya, ditangkap pemerintah Hindia Belanda karena kegiatannya dalam pergerakan kebangsaan. Sebagai hukuman ia diasingkan ke Plaosan (terletak antara Magetan dan Sarangan) dan harus melaporkan diri setiap waktu kepada Bupati Soerjo.

Kali pertama melapor kepada Soerjo, Wawardi memiliki kesan yang baik terhadap sang Bupati. Kendati memiliki jabatan penting dan berdarah bangsawan, sikap Soerjo jauh dari feodalisme. Alih-alih merasa bertemu dengan seorang pejabat kolonial, Wawardi melihat bahwa Soerjo sesungguhnya adalah seorang patriot dan nasionalis yang mencintai bangsanya. "Tidak usah segan atau takut kepada saya. *Blijf een goed nationalis en hoed moed!* (Tetaplah menjadi seorang nasionalis yang baik. Tabahlah, jangan berputus asa," ujar Soerjo memberikan semangat kepada Wawardi.<sup>6</sup>

Wawardi meyakini sejatinya Soerjo sangat membenci penindasan dan penjajahan. Namun berbeda dengan orang-lain, dalam mengekspresikannya, ia selalu menggunakan otak dingin agar tak berakhir konyol. Kendati sejak muda sudah memiliki jiwa anti-penjajaha, kala menjadi pejabat ia terpaksa "bekerja sama" dengan pihak pemerintah Hindia Belanda. Sebagai seorang pemimpin, banyak rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. "Tapi pada dasarnya ia adalah seorang nasionalis yang baik," ujar salah seorang sahabat Soerjo itu dalam buku *Pahlawan Nasional Gubernur Suryo* karya Sutjiatiningsih.

Pada 8 Desember 1941, Angkatan Perang Kekaisaran Jepang secara tiba-tiba menyerang Pangkalan Militer Amerika Serikat di Pearl Harbour. Gempuran tanpa permakluman itu otomatis menyeret Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia II. Usai membom Pearl Harbour, kekuatan balatentara Jepang seolah tak tertahankan. Pada bulan yang sama mereka berhasil merebut Hongkong dari Inggris. Dua bulan kemudian, giliran Singapura mereka kuasai.<sup>7</sup> Awal Maret 1942, balatentara Jepang memasuki wilayah Hindia Belanda. Kendati KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) coba menahan laju tentara

Jepang, namun tak berdaya dalam setiap pertempuran. Akhirnya, pada 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer dan Panglima Tertinggi KNIL Jenderal Hein ter Poorten menyerah kepada Panglima Tentara Jepang Ke-16 Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Jawa Barat. Sejak itu Hindia Belanda di bawah kuasa militer Jepang.<sup>8</sup>

Kedatangan Jepang yang mengklaim sebagai “saudara tua” itu semula disambut baik oleh rakyat Hindia yang sedang rindu akan kemerdekaan. Sambutan itu kemudian dibalas oleh penguasa militer Jepang dengan mengizinkan orang Indonesia untuk mengibarkan bendera Merah Putih serta mengumandangkan lagu *Indonesia Raya*. Bahasa Belanda sebagai bahasa resmi sebelumnya diganti oleh bahasa Indonesia dan jabatan-jabatan strategis segera berpindah tangan ke orang-orang Jepang dan bumiputera.

Namun di Magetan, situasi agak berbeda. Alih-alih memberikan sambutan meriah seperti di kota-kota besar, masyarakat Magetan pada awalnya merasa bingung dan ketakutan. Nyaris hari demi hari, rakyat Magetan tak berani untuk keluar rumah. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas, apa yang akan terjadi kemudian.<sup>9</sup> Soerjo yang masih berposisi sebagai Bupati Magetan, berupaya agar “kelumpuhan aktivitas” tersebut segera berakhir. Atas inisiatif sendiri, ia menyerukan kepada rakyat Magetan untuk tidak perlu takut. Pernyataan tersebut diikuti dengan contoh yang ia berikan sendiri: setiap pagi bersama sang istri, Soerjo berjalan-jalan di alun-alun Magetan. Kebiasaan itu merupakan simbol bahwa dalam kondisi yang tak menentu sekali pun, sang pemimpin sama sekali tak meninggalkan rakyatnya.<sup>10</sup>

Menyaksikan bupatinya berada di tengah-tengah mereka, masyarakat Magetan mulai berani keluar rumah untuk menjalankan kembali kewajiban mereka sehari-hari. Kehidupan pun berjalan seperti sediakala. Berita keberhasilan Bupati Soerjo mengembalikan kepercayaan diri rakyatnya didengar pejabat militer Jepang di Magetan. Ia pun tetap diapuk untuk memimpin rakyat Magetan.

Bupati Soerjo sejatinya sangat membenci perilaku penguasa militer Jepang, namun ia sadar sementara dirinya tidak berbuat apa-apa selain menerima uluran kerja sama dengan mereka. Namun, jauh dalam hatinya, Soerjo yakin bahwa keberadaan orang-orang Jepang di Indonesia tidak akan lama. Selain melihat kondisi perang yang pelan-pelan menyudutkan posisi Jepang, terutama setelah Amerika Serikat terlibat, jauh sebelumnya para orang tua sudah meramalkan bahwa “orang-orang kate bermata sipit itu” tak akan lama berada di Nusantara.

Hari demi hari, Bupati Soerjo tetap memimpin rakyat Magetan dalam suka dan duka. Kendati memutuskan untuk bekerja sama dengan penguasa militer Jepang, sikap Soerjo jauh dari watak seorang penjilat. Itu dibuktikan dengan tidak sudinya ia memenuhi permintaan penguasa militer Jepang mengumpulkan perempuan muda untuk diserahkan kepada para serdadu sebagai pelampiasan nafsu mereka. Sikap tegas sang Bupati tidak saja dianut sendiri, namun kerap ia katakan sebagai perintah resmi kepada bawahannya. “Jangan sampai mau disuruh mencarikan perempuan oleh orang-orang Jepang,” katanya kepada teman-teman sejawat dan para anak buahnya.<sup>11</sup>

Ketegasan dan keberanian Soerjo juga terlihat saat ia memarahi seorang opsir Jepang yang mengamuk di pendopo kabupaten Magetan sekira 1943. Alih-alih mendapat teguran dan hukuman, pemerintah militer Jepang malah semakin menghargai Soerjo. Mereka maklum bahwa pemimpin berwibawa seperti Soerjo merupakan aset berharga untuk menggerakkan rakyatnya saat menghadapi Sekutu.

Sementara itu, penguasa militer Jepang mulai mengkonsolidasi dan mengubah sistem pemerintahan di bekas jajahan Belanda. Guna mengatur tata kelola pemerintahan, maka pada September 1943, mereka mengangkat tujuh orang Indonesia terkemuka sebagai penasihat pada pemerintahan militer Jepang. Mereka adalah Ir. Sukarno sebagai *Somubu* (pimpinan Departemen Urusan Umum), Mr. Suwandi sebagai *Naimubu* (pimpinan

Departemen Urusan Dalam Negeri), Dr. Abdul Rasyid sebagai wakil *Naimubu*, Prof. Mr. Dr. Soepomo sebagai *Syihobu* (pimpinan Departemen Kehakiman), Mochtar bin Prabu Mangkunegoro sebagai *Kosubu* (pimpinan Departemen Lalu Lintas), Mr. Muhammad Yamin sebagai *Sendenbu* (pimpinan Departemen Propaganda), dan Prawoto Sumodilogo sebagai *Sangyobu* (pimpinan Departemen Ekonomi).

Di tingkat daerah, pemerintah militer Jepang menghapus tiga provinsi di Pulau Jawa yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sebagai gantinya, pada 8 Agustus 1942 dibentuk 17 daerah *syu* yang dipimpin oleh seorang *syucokan* (setara dengan jabatan residen pada masa kolonial namun kekuasaannya seperti seorang gubernur).<sup>12</sup> Dalam hal ini, Soerjo diangkat sebagai *syucokan* di wilayah Bojonegoro pada 10 November 1943.

Penguasa militer Jepang menjadikan wilayah bekas jajahan Belanda sebagai modal perang melawan Sekutu. Dengan memanfaatkan tanah subur dan produktif, mereka memaksa rakyat untuk memberikan sebagian besar hasil pertanian kepada penguasa militer Jepang. Padi yang merupakan makanan pokok penduduk pun tak lepas dari incaran mereka. Akibatnya rakyat tak bisa menikmati hasil jerih payahnya dan terpaksa hidup miskin karena tak memiliki apa-apa lagi.

Bukan hal yang aneh jika saat itu rakyat hanya mengkonsumsi singkong, jagung bahkan akar pohon pisang untuk pengganti nasi. Sebagai lauknya, mereka terpaksa memakan bekicot, tikus sawah dan belalang. Ketiadaan uang membuat rakyat juga tak memiliki daya beli. Untuk pakaian sehari-hari, mereka terpaksa menjadikan karung goni sebagai bahan baju dan celana. “Kalau dipakai rasanya tidak enak dan gatal luar biasa karena pakaian goni yang kami pakai sering dijadikan sarang kutu busuk,” ujar Kasmijo (93), salah seorang penduduk Magetan yang pernah mengalami masa penjajahan Jepang.<sup>13</sup>

Selain menjadikannya tenaga logistik, penguasa militer Jepang memaksa orang-orang yang masih muda terlibat dalam persiapan perang. Puluhan ribu kaum lelaki produktif dijadikan

romusha (prajurit pekerja) dan dikirim ke berbagai front terdepan untuk membangun benteng pertahanan, jalan kereta api, lapangan terbang, jembatan dan dermaga. Khusus bagi para pemuda, mereka direkrut menjadi tenaga tempur dalam berbagai kesatuan "sukarelawan" semacam Heiho, Sainedan, Keibodan, dan tentara Peta atau Pembela Tanah Air.

Kaum perempuan pun tak lepas dari kesewenang-wenangan penguasa militer Jepang. Dengan dalih akan dipekerjakan di bagian administrasi, mereka dipaksa sebagai pemuas nafsu para serdadu yang baru pulang dari medan laga. Jumlah *jugun ianfu* (perempuan penghibur) ini sangat banyak, hingga mencapai puluhan ribu. Bukan hanya di wilayah eks-jajahan Belanda, mereka pun disebar ke wilayah-wilayah luar yang dikuasai oleh militer Jepang seperti Singapura, Malaya dan Burma.

Sebagai pejabat tinggi dalam pemerintahan yang dikendalikan militer Jepang, Soerjo menghadapi dilema dalam situasi yang suram itu. Bisa dipastikan, menghadapi kesewenang-wenangan serdadu Jepang terhadap rakyatnya, Soerjo sendiri nyaris tak bisa berbuat banyak. Hanya satu yang berani ia lakukan yaitu menolak mentah-mentah permintaan penguasa militer Jepang untuk menyerahkan kaum perempuan sebagai *jugun ianfu*.

Memasuki tahun 1945, kemarahan rakyat terhadap penguasa militer Jepang mencapai puncaknya. Bibit-bibit perlawanan mulai muncul ketika sekelompok prajurit Peta pimpinan Soeprijadi dan Moeradi melakukan pemberontakan di Blitar pada 14 Februari 1945. Meskipun pemberontakan tersebut bisa ditindas, namun tak urung membuat penguasa militer Jepang waspada. Mereka khawatir, situasi di Blitar akan diikuti oleh tempat-tempat lain.<sup>14</sup>

Sementara itu di palagan Perang Asia Timur Raya, tentara Amerika Serikat, Inggris dan Australia terus mendapat kemajuan signifikan. Di wilayah Pasifik, balatentara Jepang tak bisa membendung gempuran tentara Amerika Serikat dan terpaksa membiarkan pulau demi pulau dikuasai oleh negara yang tergabung dengan kekuatan Sekutu itu. Di wilayah Burma, Singapura, Malaya,

Filipina, Halmahera, Maluku dan Papua, balatentara Jepang pun kerap mengalami kekalahan telak dari tentara gabungan Inggris dan Australia.

Sadar situasi semakin menyudutkan posisi mereka, pemerintah militer Jepang di Indonesia menghidupkan rencana memberi janji kemerdekaan Indonesia. Pada 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang berisi 68 tokoh terkemuka di Indonesia. Soerjo adalah salah satunya. Pengangkatannya terjadi kala ia menjabat sebagai *syucokan* Bojonegoro.<sup>15</sup> Namun, sebelum mewujudkan janjinya, Jepang keburu kalah oleh Sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki, dua kota penting di Jepang) dibom oleh Amerika Serikat. Pemboman itu menimbulkan efek kejut yang signifikan bagi rakyat dan pemerintah kekaisaran Jepang. Lima hari kemudian, atas nama bangsa Jepang, Kaisar Hirohito menyatakan bertekuk lutut kepada pihak Sekutu.

Kekalahan Jepang tak disia-siakan oleh kaum nasionalis Indonesia. Di Jakarta pada 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Sukarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian, BPUPKI yang berubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang istimewa yang melahirkan lima keputusan penting. Salah satu keputusan penting itu—dalam kaitan dengan Raden Mas Tumenggung Aryo Soerjo—adalah pembentukan delapan provinsi yang menjadi bagian wilayah Republik Indonesia, yakni Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. Dalam hal ini, Soerjo diangkat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Timur.

Meski telah diumumkan diangkat sebagai gubernur, Soerjo tidak cepat bergerak dan memilih menunggu karena merasa belum mendapatkan surat pengangkatan resmi dari pemerintah pusat. Selain itu, ia merasa ragu apakah akan diterima secara baik oleh rakyat Surabaya.<sup>16</sup> Sikap menunggu Soerjo itu berbeda dengan keinginan kaum muda setempat. Ketika berita proklamasi di Jakarta sampai ke telinga para pemuda Bojonegoro keesokan harinya, mereka langsung menyerukan masyarakat untuk mengibarkan

bendera Merah Putih. Seruan itu sontak diamini rakyat Bojonegoro dengan mengibarkan bendera kebangsaan di seluruh kota kecuali di kantor *Syucokan*.

Keengganan pihak *Syucokan* Bojonegoro merespon kabar dari Jakarta, membuat para pemuda kesal. Mereka lantas mengontak Komite Nasional Indonesia Pusat; meminta petunjuk apa yang harus dilakukan untuk membentuk pemerintahan Republik di Bojonegoro. Maka pada 31 Agustus 1945, di bawah supervisi dua utusan KNIP, yaitu Goenadi dan Boedisoetjito, terbentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Bojonegoro yang beranggotakan 37 orang. Pembentukan KNID Bojonegoro diikuti pembentukan KNI di seluruh kabupaten dan kewedanaan dalam wilayah Bojonegoro pada 2 September 1945. Maraknya pembentukan KNI menjadikan *Syucokan* bereaksi dengan membentuk Dewan Pimpinan Pegawai Republik Indonesia yang langsung diketuai oleh Soerjo sebagai Residen Bojonegoro.

Atas desakan KNI tersebut, Sang Merah Putih dikibarkan di rumah dinas Residen Bojonegoro. Namun, tidak berlangsung lama. Entah merasa ragu atau belum yakin terhadap situasi yang sudah berubah, pada hari yang lain di kantor-kantor pemerintahan, Sang Merah Putih kembali diturunkan, digantikan Hinomaru, bendera Jepang. Atau, kadang-kadang, kedua bendera itu dikibarkan berdampingan. Aksi *plin-plan* kaum pamong praja itu membuat para pemuda berang. Mereka kemudian melakukan gerakan penempelan simbol merah putih pada rumah-rumah dan mobil-mobil. Bahkan khusus untuk mobil-mobil yang dikendarai oleh orang-orang Jepang, mereka menambahnya dengan kata-kata "milik Republik Indonesia."

Giliran penguasa militer Jepang yang menjadi berang. Atas perintah Gunseikanbu (kepala pemerintah militer Jepang), para residen dan bupati melarang aksi-aksi yang mengarah kepada dukungan terhadap proklamasi 17 Agustus 1945. Termasuk menaikan bendera Merah Putih. Alih-alih mendapat sambutan baik, seruan itu malah ditentang habis-habisan oleh hampir seluruh rakyat di Jawa Timur termasuk rakyat Bojonegoro.

Para pemuda menanggapi pelarangan itu dengan mendatangi KNID. Mereka mendesak KNID agar mengambil tindakan tegas. Pada 22 September 1945, KNID Bojonegoro bersama KNI dari tiga kabupaten mengadakan rapat. Dari KNI Kabupaten Lamongan muncul usul agar rapat mengambil keputusan menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan Keresidenan dan agar semua kepala daerah dipecat karena tidak berpihak kepada proklamasi kemerdekaan. Secara aklamasi usul disetujui KNI Kabupaten Tuban dan KNI Kabupaten Bojonegoro. Namun dalam perkembangan selanjutnya, tuntutan pun diperlunak jadi mendesak *Syucokan* untuk mencabut pidatonya di tiga kabupaten dan segera menyatakan Keresidenan Bojonegoro sebagai bagian dari Republik Indonesia.

Keesokan harinya, KNID Bojonegoro menyampaikan desakan tersebut langsung kepada Residen Soerjo. Awalnya, Soerjo berupaya mencari kompromi, namun karena kerasnya desakan para pemuda yang tergabung dalam KNID, akhirnya Residen bersedia memenuhi tuntutan KNID. Pagi baru saja menyeruak ketika pada 24 September 1945 ratusan pemuda Bojonegoro membanjiri halaman rumah Residen Soerjo. Tepat jam 8.00, mereka masuk ke dalam rumah dan menjemput Residen untuk dibawa ke alun-alun kota. Di hadapan ribuan rakyat Bojonegoro, Residen Soerjo membacakan dukungan resmi Keresidenan Bojonegoro terhadap Republik Indonesia sebagai berikut.<sup>17</sup>



## PROKLAMASI

Berdasarkan Proklamasi Indonesia-Merdeka oleh Paduka Yang Mulia Sukarno dan Paduka Yang Mulia Hatta, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kami atas nama seluruh rakyat Daerah Keresidenan Bojonegoro dari segala lapisan, pada hari ini: Senin Wage 24 September 1945 meresmikan pernyataan telah berdirinya Pemerintah Republik Indonesia Daerah Keresidenan Bojonegoro, dan terus mengadakan tindakan-tindakan seperlunya.

Kepada seluruh rakyat kami serukan supaya tetap tinggal tenang dan tenteram melakukan kewajibannya masing-masing.

Bojonegoro, 24 September 1945  
R. M. T. A. Soerjo

Demi menyaksikan kejadian itu, pemerintah militer Jepang di Bojonegoro tidak bisa bertindak apa-apa. Alih-alih melarang, para pegawainya yang berbangsa Jepang hanya bisa melihat dari kejauhan Sang Merah Putih dikibarkan di tengah alun-alun Bojonegoro. Sekira sepuluh hari kemudian, pengoperan kekuasaan pun dilakukan dari penguasa militer Jepang kepada pemerintahan Republik Indonesia yang diwakili Residen Soerjo. Bojonegoro pun semakin mantap di belakang Republik Indonesia.

## KIPRAH DI TENGAH PERTEMPURAN

Meski secara resmi Pemerintah Republik Indonesia telah mengumumkan Soerjo sebagai Gubernur Jawa Timur, namun pada kenyataannya hingga awal Oktober 1945 pemerintahan daerah di provinsi tersebut belum terselenggara. Kekosongan kekuasaan itu menjadikan para pemuda pro-Republik khawatir. KNI mendesak

Gubernur Soerjo agar secepatnya berangkat ke Surabaya untuk menduduki jabatannya.

Namun, Soerjo kembali beralasan bahwa pemerintah pusat di Jakarta belum memberinya surat keputusan resmi pengangkatan dirinya sebagai gubernur. Selain itu, ia masih ragu apakah kedatangannya di Surabaya akan diterima baik masyarakat setempat. Sebagai kompromi, KNI mengusulkan agar Soerjo melakukan peninjauan terlebih dulu ke Surabaya dan melihat situasi mutakhir di ibu kota Jawa Timur kala itu. Soerjo menyetujui usulan itu. Disertai pasukan Badan Keamanan Rakjat dan wakil KNI (Abdul Soekiman dan Soekarno) Soerjo berangkat ke Surabaya. Ternyata apa yang dikhawatirkan Soerjo tidak terjadi sama sekali. Masyarakat di Surabaya antusias menyambutnya dan meminta secepatnya ia berkiprah sebagai gubernur.<sup>18</sup>

Maka, pada 11 Oktober 1945 diadakan rapat perpisahan di Bojonegoro. Masyarakat Bojonegoro melepas residen mereka yang akan mengemban amanah yang lebih tinggi memimpin seluruh Jawa Timur dalam pemerintahan Republik Indonesia merdeka. Keesokan harinya, Soerjo diantarkan oleh wakil-wakil KNI hingga tapal batas Surabaya. Di sini ia kemudian “diserahkan” kepada Wakil Residen Surabaya.

Gubernur Soerjo langsung menempati kantornya. Langkah pertamanya adalah menyusun staf pegawai. Soerjo mengangkat Doel Arnowo (Ketua KNID Surabaya) sebagai Pembantu Gubernur; beberapa tokoh terkemuka, antara lain Roeslan Abdulgani, Mr. Dwidjosewojo, Bambang Suparto, dan Subianto, menjadi bagian dari tulang punggung pemerintahannya. Tak lupa, Gubernur mengangkat Wawardi (sahabat lamanya, bekas aktivis Parindra) sebagai Kepala Pertanian Keresidenan Surabaya sekaligus pejabat yang mengurus soal persediaan makanan rakyat—serupa Badan Urusan Logistik sekarang.

Ketika Gubernur Soerjo tiba di Surabaya, situasi kota tersebut sedang panas-panasnya menyusul perlucutan terhadap tentara Jepang yang sering kali diikuti aksi kekerasan. Suasana anti-Belanda

masih sangat terasa seperti terlihat dalam insiden perobekan bendera Belanda yang tengah berkibar di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Situasi itu mendorong Soerjo bergerak cepat mengatasi keadaan.

Di tengah kesibukan Gubernur Soerjo dan jajarannya membenahi kondisi Surabaya, tiba-tiba muncul berita bahwa pasukan Inggris sebagai bagian dari Sekutu akan masuk ke kota itu. Tujuannya, mengurus tawanan perang dan kaum interniran (orang-orang Eropa bekas tahanan Jepang), dan menjaga ketertiban serta keamanan setelah perang. Namun isu yang bergulir pada waktu itu, kedatangan pasukan Inggris diikuti oleh orang-orang Belanda yang berniat bercokol kembali di Indonesia. Situasi menjadi panas seperti terlihat dalam insiden bendera di Hotel Yamato tersebut. Pemerintah Jawa Timur memperingatkan militer Inggris dan orang-orang Belanda beserta simpatisannya agar tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Gubernur Soerjo malah mengusulkan kepada pihak Inggris di Jakarta agar membatalkan kedatangannya ke Surabaya karena kehadiran mereka tidak diperlukan. Pemerintah Jawa Timur menyatakan akan menyelesaikan urusan bekas tahanan perang dan tentara Jepang secepatnya.<sup>19</sup>

Sementara itu, pemerintah pusat di Jakarta yang tengah membangun posisi tawar dengan Inggris menyarankan kepada Pemerintah Jawa Timur untuk menyambut baik kedatangan tentara Inggris. Bahkan Menteri Penerangan Amir Sjarifoeddin, atas nama Pemerintah RI, memberikan instruksi untuk tidak menghalang-halangi kedatangan tentara Inggris.<sup>20</sup> Menurut Des Alwi, seorang saksi sejarah, instruksi untuk “tidak menghalang-halangi pendaratan pasukan Inggris” dapat dipahami para pejuang setempat, khususnya dilihat dari sudut perjuangan diplomatik (dalam *Pertempuran Surabaya November 1945*). Namun, situasi aktual di Surabaya dan kebijakan diplomatik Pemerintah RI menempatkan Gubernur Soerjo dalam posisi yang dilematis —antara bersikap tegas menghadapi “musuh baru” dan taat pada pemerintah pusat.

Kamis pagi, 25 Oktober 1945, Gubernur Soerjo menerima laporan dari para pembantu bidang ekonomi di gubernuran bahwa tentara Inggris/Sekutu mulai mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak. Dengan perlindungan beberapa kapal perang, mereka menurunkan sekitar 6.000 prajurit Brigade 49 Infanteri India di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A. W. S. Mallaby.<sup>21</sup> Melalui dua perwira utusannya, Mallaby menyampaikan undangan lisan kepada Gubernur Soerjo untuk melakukan pertemuan di atas kapal Inggris. Namun, Gubernur tidak dapat memenuhi undangan itu karena sedang sibuk dengan tugas yang lain. Mendapat jawaban demikian, utusan Inggris langsung meninggalkan ruang kerja gubernur tanpa permisi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Gubernur tetap bersikap tenang. Kepada pembantunya yang ikut menyaksikan kepongahan dua utusan itu, Soerjo menyatakan bahwa Pemerintah Jawa Timur tidak harus selalu menuruti kemauan pihak Inggris. “Jangan khawatir, kita sudah menang karena mereka sudah berperilaku buruk dan kasar,” kata Gubernur.<sup>22</sup>

Sebenarnya Gubernur Soerjo telah mendelegasikan soal perundingan dengan Sekutu itu kepada Jenderal Mayor drg. Moestopo, Ketua Badan Keamanan Rakyat Jawa Timur, namun tidak terlaksana. Kemudian disusul delegasi kedua yang terdiri dari Komisarisi Polisi Mr. Masmuin, Inspektur Polisi Mohammad Jasin, dan T. B. Kundan—nama terakhir itu merupakan pimpinan komunitas etnis India di Surabaya. Pada perundingan 26 Oktober 1945, pihak Inggris/Sekutu setuju datang ke kantor gubernur, langsung berunding dengan Gubernur Soerjo. Hasilnya, dicapai empat kesepakatan. Pertama, Sekutu mengakui keberadaan Republik Indonesia sebatas distrik Surabaya. Kedua, Sekutu tidak akan membawa masuk pasukan Belanda dan tidak ada pasukan Belanda yang disusupkan pada pasukan Inggris yang mendarat di Surabaya. Ketiga, pasukan Sekutu hanya dibolehkan berada pada radius 800 meter dari pelabuhan. Keempat, untuk memperlancar komunikasi antara Sekutu dan Republik dibentuk biro kontak yang beranggotakan perwakilan kedua belah pihak.

Hasil kesepakatan tersebut disiarkan secara luas oleh Radio Surabaya. Semua pihak tampak bisa menerima kesepakatan. Untuk membuktikan niat baik Pemerintah Jawa Timur, komandan kesatuan tentara Inggris yang mendarat di Tanjung Perak mendapat sambutan kalungan bunga. Namun, dalam suasana revolusioner, kesepakatan semacam itu rawan pecah. Pasalnya, begitu mendarat, Mallaby memerintahkan pasukannya menduduki 20 titik strategis di dalam kota—suatu tindakan yang jelas melanggar kesepakatan, khususnya tentang radius yang boleh “diduduki” tentara Sekutu. Bahkan, ketika pemerintah Republik di Jawa Timur tengah membangun kesepakatan dengan Mallaby, diam-diam pasukan Inggris di Surabaya menerima perintah baru dari Mayor Jenderal Douglas Hawthorn (Komandan Tentara Inggris untuk Jawa, Madura, Bali dan Lombok) untuk secepatnya menduduki Surabaya secara militer.

Mallaby yang telanjur menempuh jalan diplomasi tampak gamang. Dalam situasi itu, tiba-tiba sebuah pesawat melayang-layang di langit Surabaya. Pesawat milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris itu menyebarkan ribuan pamflet ancaman, “. . . seluruh rakyat Surabaya harus mengembalikan seluruh senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Mereka yang menyimpan senjata akan langsung ditembak di tempat.”<sup>23</sup> Penyebaran pamflet itu (terjadi 24 Oktober) sungguh mengejutkan kedua pihak. Satu jam kemudian, Moestopo dan Residen Soedirman mendatangi Mallaby, meminta keterangan tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Mallaby menyatakan tidak tahu-menahu soal pamflet yang ditandatangani oleh atasannya itu.<sup>24</sup> “Namun sebagai perwira British, meski saya sudah menandatangani persetujuan dengan para pemimpin Republik di Surabaya, saya harus mematuhi instruksi panglima saya,” kata Mallaby seperti dikutip Des Alwi.

Tindakan tentara Inggris dan Sekutu jelas menimbulkan sentimen negatif masyarakat Surabaya, terutama *arek-arek* muda yang tersulut semangat juangnya. Sejak awal, masyarakat sebenarnya meragukan bahkan kemudian tidak percaya terhadap konsistensi Sekutu dalam perjanjian yang mereka sepakati bersama pemerintah.

Apalagi ketika Mallaby memerintahkan pasukannya menyita kendaraan milik orang-orang Indonesia, merampas senjata, menduduki gedung-gedung baru dan memamerkan kekuatan di tengah kota, atmosfer di Surabaya semakin mendidih.

Gubernur Soerjo terus berupaya mencari jalan keluar dari situasi kemelut. Lewat para pembantunya, Gubernur tetap berusaha agar Mallaby dan Sekutu kembali ke jalur kesepakatan. Namun, hal itu bagaikan melukis di atas air. Dari jam ke jam, situasi Surabaya semakin memanas. Muncul insiden di sana-sini seperti di Kedungdoro dan Keputren. Sekelompok tentara Inggris berkebangsaan India menembakkan senjatanya secara provokatif sehingga menimbulkan aksi balasan dari pejuang Republik.

Minggu pagi, 28 Oktober 1945. Berbeda dengan hari-hari biasa, suasana kota Surabaya tampak sepi. Di sudut-sudut jalan, para pemuda, anggota badan perjuangan, polisi dan TKR tengah menunggu komando penyerbuan Komandan Divisi TKR Jenderal Mayor Jonosewojo. Kekuatan rakyat dan kaum bersenjata bahu-membahu menggempur kedudukan pasukan Sekutu sehingga terjadi pertempuran pada hampir seluruh wilayah Surabaya. Praktis, tidak ada pos tentara musuh yang dilewatkan. Gubernur Soerjo juga telah menyerahkan komando pertempuran kepada para pemuda pejuang. Semua unit bergerak di bawah koordinasi pemimpin masing-masing. Total pasukan "jalan-jalan" yang dikerahkan saat itu mencapai sekitar seratus ribu orang dan terus bertambah dari jam ke jam. Mereka gabungan relawan dari kampung-kampung dan kota-kota lain di Jawa Timur seperti Mojokerto, Malang, Sidoarjo, Jombang, Bangil dan Pasuruan. Propaganda dari Radio Pemberontak yang dikobarkan Bung Tomo merupakan salah satu faktor penting dari semakin bertambahnya tenaga tempur di medan perang.

Taktik Jenderal Mallaby menempatkan satuan-satuan kecil di seluruh kota terbukti malah menjadi bencana besar bagi pasukan Sekutu. Alih-alih unggul, pasukan Sekutu yang hanya sekitar 4.000 personel menjadi mangsa empuk bagi pejuang Republik. Meski memiliki persenjataan modern dan kemampuan terlatih, tak ada

jaminan Sekutu mampu melawan relawan pejuang yang seolah tak kunjung habis. "Jika ada seorang yang gugur, tempatnya segera digantikan oleh yang lain. . .," tulis sejarawan militer Nugroho Notosusanto.<sup>25</sup>

Hingga hari kedua pertempuran, *arek-arek Suroboyo* telah menewaskan sekira 400 serdadu Inggris termasuk 16 perwira. Sejarawan McMillan memiliki versi angka yang berbeda dan seperti menyindir Sekutu ia menyebutkan, "Karena 'pamer kekuatan' menyebabkan 427 nyawa dari suatu pasukan yang memiliki kurang lebih 4.000 prajurit melayang begitu saja. . ."<sup>26</sup> Untuk mengatasi situasi yang makin gawat, pihak Inggris terpaksa harus menjilat ludah sendiri. Dengan menafikan protes dari Belanda, mereka mengakui secara *de facto* negara Republik Indonesia dan meminta bantuan para pemimpin pergerakan yang semula mereka sepelekan. Komandan Pasukan Sekutu di Asia Tenggara, Jenderal Sir Philip Christison, segera meminta Sukarno-Hatta meredakan kemarahan *arek-arek Suroboyo* yang tak terbendung.

Memenuhi permintaan Christison, pada 29 Oktober, rombongan Presiden Sukarno bertolak ke Surabaya bersama Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeddin menggunakan pesawat RAF milik Inggris. Disertai para perwira Inggris, rombongan langsung ke kantor gubernur untuk berunding dengan Gubernur Soerjo. Di hadapan Presiden dan Wakil Presiden, para pemimpin Jawa Timur menjelaskan situasi terakhir di Surabaya kala itu. Mereka menegaskan tekadnya untuk terus melanjutkan pertempuran, dan menjamin bahwa mereka tak pernah melanggar perjanjian 26 Oktober. Peningkaran janji, menurut para pejuang, dilakukan oleh Inggris atau Sekutu. Secara khusus, Gubernur Soerjo dan Doel Arnowo meminta Presiden bersikap tegas terhadap Inggris. Begitu pula pemuda Sutomo, atau Bung Tomo, meminta Sukarno memahami perasaan rakyat Surabaya. Sukarno bergeming, ia meminta agar gencatan senjata dijalankan dan kerja sama dengan tentara Inggris terus dilakukan.<sup>27</sup>

Keesokan harinya dilakukan perundingan antara pihak Inggris/Sekutu yang diwakili Hawthorn dan Mallaby dengan perwakilan RI yang diwakili Sukarno-Hatta. Pada intinya, hasil perundingan itu antara lain untuk mencapai gencatan senjata antara Sekutu dan RI; pengakuan Sekutu atas tentara dan kepolisian RI; pembatasan ruang gerak tentara Sekutu pada kamp-kamp interniran; dan meningkatkan komunikasi antara Sekutu dan RI. Sukarno juga menjamin keselamatan pasukan Sekutu untuk melewati kota dalam mengevakuasi sisa tentara dan warga sipil yang terperangkap bisa mencapai Pelabuhan Tanjung Perak.<sup>28</sup>

Namun, seperti sebelumnya, hasil perundingan semacam itu berpotensi buyar di tengah jalan. Di mata para pejuang Surabaya, hasil perundingan antara RI dan Sekutu tersebut sama sekali tidak ada harganya. Pokok masalahnya adalah kecurigaan para pemuda pejuang yang telanjur berkembang terhadap niat baik Sekutu, dan terutama Belanda yang membonceng di belakangnya. Sekembali rombongan Presiden Sukarno ke Jakarta pada siang hari, baku tembak masih tetap berlangsung. Meski demikian, seruan Presiden untuk menghentikan pertempuran secara umum ditaati. Di sisi lain, gencatan senjata itu memberi kesempatan kepada pasukan Inggris untuk menyusun kembali kekuatannya. Mereka diam-diam mendatangkan pasukan tambahan.

Di tengah berlangsungnya gencatan senjata, Brigadir Mallaby diberitakan tewas dalam suatu insiden di depan Gedung Internatio, persis di tepi Kali Mas.<sup>29</sup> Peristiwa itu terjadi hanya beberapa jam setelah kesepakatan antara Sukarno-Hawthorn ditandatangani. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan kedua belah pihak. Perundingan antara RI-Inggris praktis mengalami kemunduran. Di Jakarta, Presiden Sukarno yang menerima laporan tewasnya Mallaby tersebut dari Doel Arnowo menyatakan rasa penyesalannya. Presiden mengulangi kembali pernyataannya bahwa pasukan Inggris bukan musuh Republik. Yang menjadi musuh Republik adalah NICA dan pasukan Belanda. "Kerja sama dengan pasukan Inggris jangan dihentikan! Jalankan semua perintah saya!" tegas Presiden.<sup>30</sup> Melalui



siaran radio, Sukarno menegaskan kembali penyesalan dan harapannya. "Dalam sebuah negara yang terorganisir, rakyat tidak boleh main hakim sendiri. Peristiwa Surabaya telah melemahkan posisi kita di mata dunia internasional. Maka sekali lagi saya memerintahkan untuk secepatnya menghentikan pertempuran melawan pasukan Inggris!"

Kendati terasa panas, situasi Surabaya setelah kematian Mallaby relatif tenang. Ada kesan, kedua pihak sedang menahan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Sementara itu pada 1 November 1945, sebuah kapal perang Inggris bernama HMS Sussex pimpinan Laksamana Muda Laut Petterson merapat di Pelabuhan Tanjung Perak. Ikut bersama HMS Sessex, sebuah kapal angkut pasukan bernama HMS Carron yang membawa 1.500 personel prajurit. Tiga hari kemudian, muncul kapal-kapal lain yang menurunkan 24 ribu prajurit, dilengkapi panser, tank, dan kesatuan artileri dengan membawa sejumlah meriam lapangan. Pasukan dilengkapi 25 pesawat tempur Mosquito dan Thunderbolt. Seluruh kekuatan itu berada di bawah kendali Mayor Jenderal E. C. Mansergh dari Divisi V Infanteri India, pengganti Mallaby.

Pada 7 November 1945, Gubernur Soerjo menerima surat dari Mansergh. Dalam surat itu, Mansergh menuduh pihak Indonesia telah menunda-nunda evakuasi kaum interniran dan pengembalian pasukan Inggris yang tertawan atau terluka dalam pertempuran 28-30 Oktober. Mansergh juga menyatakan akan mengambil-alih Morokrembangan dengan alasan lapangan terbang itu akan digunakan pasukan Indonesia untuk menyerang Inggris.<sup>31</sup> Sehari kemudian datang lagi surat dari Mansergh, berisi ancaman dan tuduhan yang lebih serius bahwa kota Surabaya telah dikuasai oleh para perampok (*looters*) dan pihak Indonesia nyata-nyata telah melanggar persetujuan, menghalang-halangi jalannya evakuasi para tawanan dan orang asing serta melanggar perlucutan senjata tentara Jepang. Mansergh juga mengancam akan menduduki kota Surabaya dan akan melucuti "gerombolan yang tidak mengenal tata tertib

hukum.” Pada akhir surat, sang jenderal meminta Gubernur Soerjo datang ke kantornya pada 9 November 1945.

Gubernur Soerjo membalas kedua surat Mansergh hanya dalam satu surat tertanggal 9 November 1945. Gubernur menjawab segala tuduhan Mansergh bahwa pihak Indonesia tidak bermaksud menunda evakuasi kaum interniran dan prajurit Inggris yang terkepung di dalam kota. Gubernur juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengembalikan mayat-mayat tentara Inggris dan korban luka kepada induk pasukannya.<sup>32</sup> Tentang Morokrengan, Gubernur menjelaskan bahwa lapangan udara tersebut tak pernah diserahkan kepada Inggris. Status lapangan itu tidak pernah dibahas dalam perundingan dengan Mallaby sebelumnya. Soerjo juga menyangkal tuduhan Mansergh bahwa para pejuang Indonesia telah mengambil posisi siap tempur di sekitar Lapangan Udara Morokrengan.

Menanggapi surat Mansergh kedua, Gubernur Soerjo mengingatkan Panglima Inggris untuk Jawa Timur itu kepada kesepakatan antara Presiden Sukarno dengan Jenderal Hawthorn. Menurut kesepakatan itu, terdapat dua lokasi di Surabaya yang akan dijaga oleh tentara Inggris yakni daerah sekitar Darmo dan Tanjung Perak. Penjagaan berlangsung selama proses pemindahan interniran dari sekitar daerah itu hingga Tanjung Perak. Jika proses pemindahan para tawanan telah selesai, pasukan Inggris dipersilakan mundur ke Tanjung Perak. Gubernur Soerjo juga memutuskan tidak memenuhi “undangan” ke kantor Mansergh melainkan mengutus Roeslan Abdulgani, Residen Soedirman, dan Kundan.

Mansergh pun tidak mengindahkan surat balasan Gubernur Soerjo. Ia malah mengirim dua pucuk surat lagi; yang pertama ditujukan kepada R. M. T. A. Soerjo (tanpa embel-embel jabatan gubernur), dan satu pucuk yang lain lagi dialamatkan kepada seluruh orang Indonesia di Surabaya. Kedua surat itu berisi pesan yang sama. Singkatnya, Mansergh menuntut pimpinan pemerintah RI di

Surabaya, pemuda, dan badan-badan perjuangan agar melaporkan diri untuk menyerah kepada Inggris atau Sekutu.<sup>33</sup>

Gubernur Soerjo tetap bersikap tenang menghadapi sikap sombong pihak Inggris. Ia tetap menekankan kepada para stafnya untuk mengikuti pesan Presiden Sukarno. Diutusnya lagi Residen Soedirman dan Jenderal Major Mohammad Mangoendiprodo untuk menawarkan perundingan dan meminta Inggris mencabut ultimatumnya. Namun Inggris menolaknya. Begitu pula utusan Gubernur Soerjo berikutnya—Roeslan Abdulgani dan Dokter Soegiri—ditolak mentah-mentah oleh pihak Inggris. “Sepanjang sejarah, British belum pernah membatalkan sebuah ultimatum militer. Kini terserah sepenuhnya kepada tuan-tuan, bersedia memenuhinya atau menolaknya. . .,” jawab seorang opsir yang menerima Roeslan dan Soegiri.<sup>34</sup>

Selepas tengah hari, masyarakat Surabaya dikejutkan oleh sebuah pesawat Inggris yang melayang-melayang di atas kota. Pesawat menyebarkan ribuan pamflet yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal E. C. Mansergh selaku Panglima Tentara Inggris di Jawa Timur. Isi pamflet persis sama dengan ultimatum yang telah diterima Gubernur Soerjo. Disebutkan bahwa semua yang tergolong pemimpin bangsa Indonesia, termasuk para pemuda, kepala polisi dan petugas radio diharuskan melapor kepada tentara Sekutu dan menyerahkan segala jenis senjata yang dimiliki.

Tak pelak, ultimatum Inggris itu membuat rakyat Surabaya sangat marah. Begitu “hujan pamflet” reda, nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Dalam ingatan Suhario alias Hario Kecil (Wakil Komandan Tentara Polisi Keamanan Rakjat), di sekitarnya berkumpul ratusan pemuda, semua menenteng senjata dan pistol otomatis. “Minimal mereka yang disebut tidak lengkap, membawa granat,” ujar Suhario.<sup>35</sup> Pertemuan pemuda dan kaum bersenjata di Surabaya memutuskan mengangkat Sungkono sebagai Komandan Pertahanan Kota Surabaya dan Surachman sebagai Komandan Pertempuran. Dari sinilah muncul semboyan

“Merdeka atau Mati” dan Sumpah Pejuang Surabaya sebagai berikut.<sup>36</sup>

Tetap Merdeka!  
Kedaulatan Negara dan Bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggungjawab bersama, bersatu, ikhlas berkorban dengan tekad: Merdeka atau Mati!  
Sekali Merdeka tetap Merdeka!  
Surabaya, 9 November 1945, jam 18.46.

Gubernur Soerjo menerima laporan mengenai keputusan para pemuda Surabaya. Sementara, Doel Arnowo menghubungi Jakarta dan berbicara langsung dengan Presiden Sukarno. Presiden menyatakan telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Soebardjo untuk meminta Jenderal Christison membatalkan ultimatum namun yang bersangkutan menolaknya.<sup>37</sup> Menurut Soebardjo, keputusan akhir sepenuhnya di tangan Gubernur Soerjo secara keseluruhan. Tampaknya, pernyataan dari Jakarta tersebut menggosarkan Surabaya. “Jawaban macam apa itu! Tidak bilang bertempurlah sampai darah penghabisan atau sekalian bilang menyerah saja. Tapi mereka malah bilang “terserah Surabaya.” Pasti akan kami jawab: kami akan berjuang!” kenang Roeslan Abdulgani.<sup>38</sup>

Pada akhirnya Gubernur Soerjo memang harus mengambil keputusan. Didampingi Doel Arnowo, tepat jam 21.00, Gubernur berbicara di depan corong Radio Surabaya:

Saudara-saudara sekalian!  
Pucuk pimpinan kita di Jakarta telah mengusahakan akan membereskan peristiwa di Surabaya pada hari ini. Tetapi sayang sekali, sia-sia belaka, sehingga kesemuanya diserahkan kepada kebijaksanaan kita di Surabaya sendiri.  
Semua usaha kita untuk berunding, senantiasa gagal. Untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, maka kita

harus menegakkan dan meneguhkan tekad kita yang satu, yakni berani menghadapi segala kemungkinan.

Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah: Lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum itu. Dalam menghadapi segala kemungkinan besok pagi, mari kita semua memelihara persatuan yang bulat antara pemerintah, rakyat, TKR, Polisi dan semua badan-badan perjuangan pemuda dan rakyat kita.

Mari kita sekarang memohon kepada Tuhan Yang Mahakuasa, semoga kita sekalian mendapat kekuatan lahir batin serta rahmat dan taufik dalam perjuangan.

Selamat Berjuang!

Gubernur Soerjo menyampaikan pidatonya dalam nada serius, mirip gaya pidato Perdana Menteri Inggris Winston Churchill saat Perang Dunia, sangat berbeda dengan pidato Bung Tomo sebelumnya yang berapi-api dan berdarah-darah. Pidato Soerjo terdengar sangat terhormat dan berwibawa.<sup>39</sup> "Namun dia berpidato tanpa bertele-tele dan memahami keinginan rakyat Surabaya untuk melawan tentara Inggris," kenang Hario Kecik.<sup>40</sup>

Seusai pidato Gubernur Soerjo, Surabaya dicekam semangat perlawanan yang sangat kuat. Para pemuda di berbagai kampung bergotong royong membangun basis pertahanan berupa barikade tumpukan perabotan rumah, rongsokan kendaraan dan barang bekas lainnya. Mereka coba menahan laju tank dan infanteri Inggris sehingga membuka celah para pejuang melakukan penyerangan. Surabaya sedang bersiap menghadapi badai besar.

Tepat jam 06.00 pada 10 November 1945, tentara Inggris membombardir Surabaya yang berlangsung hingga tengah malam, diikuti serbuan tank dan infanteri. Akibat penyerbuan besar itu, ribuan orang tewas seketika, mayoritas rakyat sipil. "Di Pasar Turi saja saya menyaksikan gelimpangan mayat berjumlah hingga ratusan," ungkap Letnan Kolonel (Purn.) Moekajat, salah seorang pelaku pertempuran di Surabaya.<sup>41</sup> Dari hari ke hari, Surabaya

menjadi lautan api dan mayat. Jasad manusia, kuda, anjing, kucing, kambing dan kerbau bergelimpangan di selokan dan jalan-jalan utama. Bau busuk yang bersanding dengan mesiu telah menjadi aroma sehari-hari di kota itu.

Di bawah “guyuran” agitasi Bung Tomo dari Radio Pemberontak, pertempuran antara dua pihak berlangsung makin keras. Kendati hanya mengandalkan senjata tajam dan senjata api peninggalan KNIL dan rampasan dari tentara Jepang, *arek-arek Suroboyo* dan pemuda lainnya melakukan perlawanan sengit. Di pusat kota, pertempuran lebih dahsyat, jalan-jalan harus diduduki satu per satu, dari satu pintu ke pintu lainnya. Perlawanan pejuang Indonesia dalam dua cara; pertama pengorbanan diri secara fanatik dengan orang-orang yang hanya bersenjatakan pisau belati dan dinamit di badan menyerang tank-tank Sherman; dan kedua, dengan cara yang lebih terorganisasi dan lebih efektif, mengikuti dengan cermat buku-buku petunjuk militer Jepang.<sup>42</sup>

Pada hari pertama pertempuran, Gubernur Soerjo untuk kesekian kali berpidato melalui corong radio:<sup>43</sup>

Saya berterimakasih, bahwa pemerintah pusat telah menyerahkan jawaban terhadap ultimatum Inggris kepada kami di Jawa Timur. Keputusan kami telah mengakibatkan meletusnya pertempuran seru di Surabaya. Namun itulah keputusan kami yang terbaik. Kami bertempur untuk merebut kembali hak-hak serta kedaulatan kami dari tangan musuh. Saat ini kami semua berada dalam suatu akhir masa. Suatu masa lama yang segera akan berakhir. Peristiwa di Surabaya tidak dapat dihindari, tidak dapat diubah. Ini adalah kemauan Tuhan Yang Maha Tinggi.

Ini merupakan tanda-tanda, bahwa zaman keemasan segera akan datang kepada tanah air kita Indonesia. Seluruh rakyat Jawa Timur tanpa kecuali, semua buruh tinggi maupun rendah, percaya dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan Yang Maha Tinggi akan melimpahkan tegaknya kebenaran kepada seluruh bumi dan alam Indonesia, yang sudah berabad-abad lamanya hilang.

Kami tidak pernah ingin menyerang.

Tetapi kami akan mempertahankan hak-hak kami. Sebagai suatu bangsa yang mencintai kebebasan, kami berada di pihak yang benar. Kami hanya menghendaki kebenaran. Terpujilah selalu, Tuhan Yang Maha Tinggi.

Tentara Inggris sempat terkejut menghadapi perlawanan rakyat Surabaya. Di hari kedua, tiga pesawat Mosquito ditembak jatuh. Termasuk yang membawa Brigadier Robert Guy Loder Symonds, Komandan Detasemen Artileri Pasukan Inggris, terkena tembakan PSU Bofors 40 (sejenis senjata penangkis serangan udara milik KNIL) yang dikendalikan oleh sekelompok veteran Heiho yang berpengalaman menghadapi pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat di palagan Halmahera dan Morotai.<sup>44</sup>

Hingga pertempuran berakhir pada hari ke-21, korban tewas diperkirakan mencapai puluhan ribu jiwa. Menurut laporan dr. Moh. Suwandhi, kepala kesehatan Jawa Timur yang aktif menangani korban pihak Indonesia, jumlah orang Indonesia yang tewas dalam pertempuran itu sekitar 16.000 jiwa. Di pihak Inggris, sejak mendarat di Surabaya, telah kehilangan sekitar 1.500 prajuritnya, termasuk dua jenderal tewas dan 300 serdadu Inggris Muslim asal India dan Pakistan yang diklaim pihak Indonesia telah menyebrang ke pihak mereka.<sup>45</sup>

Kegubernuran dipertahankan mati-matian oleh para pemuda Surabaya. Kantor tempat para pemimpin Jawa Timur bekerja itu baru berhasil dikuasai pada 17 November 1945. Begitu pertempuran meletus di hari pertama, Gubernur Soerjo dan para stafnya, diamankan ke kawasan Sepanjang. Berhubung terus-menerus dibombardir tentara Inggris, tiga hari kemudian Soerjo memindahkan lagi kantornya ke Mojokerto sebelum akhirnya pada pertengahan November 1945 memilih Kediri sebagai pusat kegiatan pemerintahan Republik di Jawa Timur.<sup>46</sup>

## HARI-HARI TERAKHIR

Di Kediri, Gubernur Soerjo menjalankan tugas-tugasnya yang tertunda akibat perang di Surabaya. Ia memfokuskan pembenahan struktur ekonomi daerah lewat pertanian. Sejarah mencatat, Jawa Timur pada era Soerjo merupakan salah satu daerah penyumbang terbesar bantuan beras Indonesia ke India yang tengah dilanda kelaparan.<sup>47</sup>

Ketika tentara Belanda—yang menyelinap di balik Sekutu—mendekati wilayah Kediri, pemerintah Jawa Timur pindah ke Malang pada Februari 1947. Saat Gubernur Soerjo berkantor di kota berhawa sejuk itu, terselenggara Sidang Lengkap KNIP yang ketiga pada 25 Februari hingga 6 Maret 1947. Selanjutnya, pada Juni 1947, Pemerintah RI yang pindah sementara dari Jakarta ke Yogyakarta akibat agresi militer Belanda menghendaki Soerjo menjadi wakil ketua Dewan Pertimbangan Agung mendampingi R. A. A. Wiranatakusumah sebagai ketua. Ketika menjadi Wakil Ketua DPA itulah, takdir hidup Soerjo ditentukan.<sup>48</sup>

Pertengahan September 1948, Partai Komunis Indonesia pimpinan Muso melancarkan gerakan melawan pemerintahan Sukarno-Hatta. Pada mulanya fokus gerakannya di Solo dan Madiun, namun berhasil dipukul mundur oleh TNI hingga ke pelosok-pelosok di Jawa Timur. Dalam gerakan mundur itulah, pada November 1948, PKI melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap feodal. Salah seorang yang menjadi korban pembunuhan adalah adik laki-laki Soerjo yang bernama R. M. Sardjoeno yang kala itu menjabat Wedana Sepanjang.

Soerjo yang saat itu tengah berada di Yogyakarta, sangat berduka dengan kematian adik tercinta. Namun, berhubung tugas-tugasnya sebagai Wakil Ketua DPA tidak bisa ditinggalkan, ia tidak bisa langsung mengikuti pemakaman Sardjoeno. Baru pada 10 November 1948, Soerjo berkesempatan ikut memperingati 40 hari kematian sang adik di Madiun. Maka, usai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan, Soerjo berkemas ke Madiun dengan hanya



dikawal salah seorang ajudan, Mayor Soehardi, dan sopirnya, Letnan Soenarto. Banyak kawannya, termasuk Hatta, yang menganjurkan Soerjo tidak berangkat ke Madiun karena situasi jalan menuju kota itu belum aman. Namun Soerjo bersikeras berangkat.

Semacam pertanda buruk terasa ketika Soerjo baru saja keluar kota Yogyakarta, ban depan mobil tiba-tiba meletus. Ban cadangan pun dipasang dan mobil kembali melaju, namun tiba-tiba mogok karena kehabisan bensin. Menjelang Solo, hari mulai gelap. Soerjo dan kedua pendampingnya memutuskan menginap di rumah Soediro, Residen Solo.

Keesokan harinya, rombongan kecil Soerjo melanjutkan perjalanan pada pagi sekali. Awalnya, perjalanan lancar-lancar saja. Hingga pada siang menjelang sore, mereka melintasi kawasan hutan jati di wilayah Bogo, Kedungalar, Ngawi, Jawa Timur. Tanpa sepengetahuan mereka, kawasan hutan itu menjadi tempat istirahat sekitar 3.000 prajurit pro-PKI pimpinan Maladi Yusuf, yang tengah melarikan diri menuju Gunung Lawu. Mobil dihentikan, Soerjo, ajudan dan sopir ditahan. Ikut pula ditahan dua anggota Kepolisian RI yakni Komisariss Besar M. Doerjat dan Komisariss Soeroko yang pada saat bersamaan juga tengah melewati kawasan tersebut. Setelah membakar mobil-mobil para tawanan, anggota pasukan Maladi Yusuf menggiring kelimanya ke Kampung Sundi di Desa Bangunrejo Lor, sekitar 5 kilomrter dari lokasi mereka dicegat.

Menurut Trisno (92), sesepuh Desa Bangunrejo Lor, malam itu Soerjo dan keempat tawanan lain diinapkan di Kantor Kehutanan Sundi. Santer terdengar kabar bahwa besok hari Bangunrejo Lor akan diserang oleh pasukan pemerintah. Pagi harinya (12 November 1948), dalam keadaan hanya memakai celana dalam dan mata tertutup secarik kain, pasukan Maladi membawa tawanan ke tepi Kali Kakah di Dusun Ngandu. Dengan senjata tajam, orang-orang Maladi Yusuf menghabisi satu persatu kelima tawanan tersebut dengan cara memenggal kepala mereka.<sup>49</sup> “Saya ingat, ada sekitar tujuh orang dewasa di desa kami yang disuruh tentara-tentara itu

menguburkan mayat Pak Soerjo dan kawan-kawannya,” ujar Mbah Trisno.



Kali Kakah di Sundi, Ngawi, tempat dieksekusinya Soerjo oleh pasukan Maladi Yusuf dari FDR PKI. (Dokumentasi Penulis)

Tiga hari kemudian, Bangunrejo Lor diserang pasukan pemerintah. Pasukan Maladi Yusuf yang tidak mengira posisinya sudah diketahui lintang-pukang menuju Randublating. Sepeninggal mereka, sejumlah penduduk Bangunrejo Lor dikerahkan untuk menggali kembali jasad Soerjo dan keempat korban lainnya untuk dimakamkan di tempat yang layak. “Kami menemukan jasad Pak Soerjo tertanam secara dangkal di dalam lumpur Kali Kakah yang sedang kering kerontang . . .,” kenang Trisno.

Jasad Soerjo kemudian dibawa ke Madiun. Atas keinginan keluarga besarnya, Soerjo dikebumikan di pemakaman keluarga besar istrinya di Sawahan, Desa Kapalorejo, Magetan. Banyak kalangan yang bersedih dan mengecam pembunuhan itu sebagai sesuatu yang seharusnya tak dilakukan kepada orang yang sangat berjasa kepada negara. Soeripno, tokoh PKI yang terlibat dalam Peristiwa Madiun 1948 termasuk orang yang menyesali

pembunuhan itu. Dalam suatu catatannya di Penjara Solo sebelum dihukum mati, ia menulis:

Tentang wafatnya Pak Soerjo. . . Kami sudah memerintahkan kepada kawan-kawan agar mereka jangan diganggu. Karena masih dalam pemeriksaan. Tetapi sayang sekali, sebelum saya bisa bicara dengan mereka secara baik-baik, tempat kami diserang. Terjadilah panik dan dalam keadaan panik dari penjaga tawanan terjadilah pembunuhan di luar kontrol dan pengawasan malahan di luar pengetahuan kami. Tentang hal ini, kami sangat menyesal . . .<sup>50</sup>

## PENUTUP

Penyesalan Soeripno dan tokoh-tokoh teras PKI lainnya bisa jadi hanyalah basa-basi pesakitan politik yang sedang tertekan. Tetapi memang kehilangan seorang Soerjo ketika Republik masih berumur muda sesungguhnya adalah suatu kerugian bagi bangsa ini. Sejak dipercaya sebagai Gubernur Jawa Timur, Soerjo secara total tak pernah lelah memperjuangkan eksistensi Republik Indonesia di wilayahnya.



Tugu peringatan gugurnya Soerjo di Jalan Raya Ngawi-Solo.  
(Dokumentasi Penulis)

Ketika Surabaya akan digempur oleh militer Inggris pada 10 November 1945 dan Jakarta tak bisa memberikan pilihan pasti, Soerjo secara elegan tampil ke muka, mengumumkan bahwa meskipun rakyat Surabaya mencintai perdamaian namun mereka tak akan diam saja jika tanah airnya diserang. Memang pada akhirnya rakyat Surabaya tak mungkin bisa menahan gempuran tentara Inggris yang terlatih dan memiliki persenjataan canggih, namun dengan keputusan Soerjo untuk melawan itu membuktikan kepada

dunia bahwa Indonesia memiliki harga diri dan kebanggaan sebagai suatu bangsa.

Walaupun kematian Sang Gubernur di Tengah Perang begitu menyedihkan karena melibatkan saudara-saudara sebangsanya, tetapi lagi-lagi ini merupakan takdir sejarah yang mungkin memang harus diterima. Persis seperti kata-kata yang pernah diucapkan Soerjo kala berpidato di depan corong Radio Surabaya pada hari pertama Pertempuran Surabaya, “. . . Ini adalah kemauan Tuhan Yang Maha Tinggi: tidak dapat dihindari, tidak dapat diubah.”

### Catatan Akhir:

<sup>1</sup>Sutjiatiningsih, *Pahlawan Nasional Gubernur Suryo* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hlm. 24.

<sup>2</sup>Sutjiatiningsih, *Pahlawan*, hlm. 28.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Donny Ariotejo, Jakarta, 11 Februari 2017.

<sup>4</sup>*De Express*, 13 Juni 1913.

<sup>5</sup>Sutjiatiningsih, *Pahlawan*, hlm. 34.

<sup>6</sup>Sutjiatiningsih, hlm.47–8.

<sup>7</sup>Onghokham, *Runtuhnya Hindia Belanda* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 297.

<sup>8</sup>Onghokham, *Runtuhnya*, hlm. 356–7.

<sup>9</sup>Sutjiatiningsih, *Pahlawan*, hlm. 57.

<sup>10</sup>Sutjiatiningsih, hlm. 58.

<sup>11</sup>Wawancara dengan Witjaksono, Yogyakarta, 20 Oktober 2017.

<sup>12</sup>Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976), hlm. 8.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Kasmijo, Magetan, 21 Oktober 2017.

<sup>14</sup>Edy Burhan Arifin, “Pemberontakan Tentara Peta di Blitar: Sebuah Kesaksian Sejarah,” dalam Purbo S. Suwondo (peny.), *PETA: Tentara Sukarela Pembela Tanah Air* (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1996), hlm. 163.

<sup>15</sup>M. P. B. Manus, dkk., *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 114.

<sup>16</sup>Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia: Propinsi Jawa Timur* (Malang:

Kementerian Penerangan, 1953), hlm. 43.

<sup>17</sup>Kementerian Penerangan, *Republik Indonesia*, hlm. 42.

<sup>18</sup>Kementerian Penerangan, hlm. 44.

<sup>19</sup>Frank Palmos, *Surabaya 1945, Sakral Tanahku* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), hlm. 163.

<sup>20</sup>Des Alwi, *Pertempuran Surabaya November 1945* (Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, 2012), hlm. 221.

<sup>21</sup>Nugroho Notosusanto, *Pertempuran Surabaya* (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 1985), hlm. 41.

<sup>22</sup>Palmos, *Surabaya*, hlm. 163.

<sup>23</sup>Notosusanto, *Pertempuran*, hlm. 50.

<sup>24</sup>Mallaby sesungguhnya sangat marah dengan penyebaran pamflet tanpa sepengetahuannya itu. Dalam satu suratnya kepada istrinya, Mollie (Margaret Catherine Jones), 27 Oktober 1945, ia menyebut atasannya “telah merusak segalanya” dengan penyebaran pamflet tersebut. “Pamflet ini adalah tamparan yang amat memalukan bagiku sebagai perwira tinggi,” tulisnya. Surat tersebut dibacakan oleh Anthony Mallaby (putra tunggal Mallaby-Mollie) di depan Des Alwi dalam suatu kunjungan ke London, Inggris (2005). Lihat Alwi, *Pertempuran*, hlm. 242.

<sup>25</sup>Notosusanto, *Pertempuran*, hlm. 57.

<sup>26</sup>Richard McMillan, *The British Occupation of Indonesia 1945–1946* (London dan New York: Routledge, 2005), hlm. 32.

<sup>27</sup>Palmos, *Surabaya*, hlm. 235.

<sup>28</sup>Roeslan Abdulgani, “Seratus Hari di Surabaya yang Menggemparkan Dunia,” *Surabaya Post*, 30 Oktober 1973.

<sup>29</sup>J. G. A. Parrots, “Who Killed Brigadier Mallaby?” *Indonesia*, Vol. 20, Oktober 1975, hlm. 87.

<sup>30</sup>Alwi, *Pertempuran*, hlm. 324.

<sup>31</sup>Notosusanto, *Pertempuran*, hlm. 139.

<sup>32</sup>Notosusanto, hlm. 139.

<sup>33</sup>Notosusanto, hlm. 141.

<sup>34</sup>Alwi, *Pertempuran*, hlm. 352.

<sup>35</sup>Suhario Padmowirio, *Memoar Hario Kecil* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 209.

<sup>36</sup>Palmos, *Surabaya*, hlm. 248–9.

<sup>37</sup>Palmos, hlm. 251–2.

<sup>38</sup>Palmos, hlm. 251–2.

<sup>39</sup>Palmos, hlm. 251.

<sup>40</sup>Suhario Padmowirio, *Pemikiran Militer I Sepanjang Masa Bangsa Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 209.

<sup>41</sup>Hendi Jo, *Zaman Perang: Orang-orang Biasa dalam Sejarah Luar Biasa* (Yogyakarta: Mata Padi, 2015), hlm. 102).

<sup>42</sup>David Wehl, *The Birth of Indonesia* (London: Allen and Unwin, 1948), hlm. 54.

<sup>43</sup>Palmos, *Surabaya*, hlm. 251.

<sup>44</sup>Pihak Inggris mengklaim kematian Symonds disebabkan oleh suatu kecelakaan teknis (*Reuters*, 10 November 1945). Tetapi berdasarkan kesaksian salah satu pelaku Pertempuran Surabaya yakni Brigadir Jenderal (Purn.) Barlan Setiadidjaja sejatinya Symonds gugur karena tembakan meriam oleh Goemoen dan kawan-kawan dari Barisan Pemberontak Republik Indonesia. Meriam bekas yang sempat diperbaiki itu didapat dari gudang senjata tentara Jepang di Don Bosco dan ditembakkan ke arah sebuah pesawat Mosquito dari sebelah utara Stasiun Kereta Api Tandes. Lihat Alwi, *Pertempuran*, hlm. 404–5.

<sup>45</sup>Jo, *Zaman*, hlm. 105.



<sup>46</sup>Irna H. N. Hadi Soewito, *Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan*, Bagian I (Jakarta: Grasindo, 1994), hlm. 111.

<sup>47</sup>Sutjiatiningsih, *Pahlawan*, hlm. 158–9.

<sup>48</sup>Sutjiatiningsih, hlm. 158.

<sup>49</sup>Wawancara dengan Trisno, Bangunrejo Lor, Ngawi, 20 Oktober 2017.

<sup>50</sup>Tulisan tangan Soeripno di dalam Rumah Penjara Solo sebelum ia dihukum mati pada 1948; disadur oleh Djamal Marsudi (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia).

---

# PANGERAN MOHAMMAD NOOR

---





# **PANGERAN MOHAMMAD NOOR**

## **IMAJINASI KEBANGSAAN DI KALIMANTAN**

TAUFIK AHMAD

Tulisan ini menelusuri kiprah kepahlawanan Ir. Pangeran Mohammad Noor pada masa awal kemerdekaan. Meski demikian, patut dicatat bahwa keterlibatan Pangeran Mohammad Noor dalam politik telah dimulai ketika ia menjadi anggota Volksraad wakil Kalimantan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kemudian menjadi anggota BPUPKI menjelang kemerdekaan. Selanjutnya, Pangeran Mohammad Noor menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan, dan sebagai katalisator perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan dengan membentuk organisasi gerilya. Saat menjadi Gubernur, walau relatif singkat dan penuh keterbatasan, ia mampu membuat langkah-langka strategis dan menentukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan.

Pangeran Mohammad Noor lahir di Martapura pada 24 Juni 1901 dari pasangan Pangeran Ali dan Ratu Intan binti Pengeran Kesuma Giri. Kedua orang tuanya merupakan keturunan bangsawan Kerajaan Banjar. Gelar pangeran disematkan kepadanya sebagai menerus tahta Kesultanan Banjar.

Kerajaan Banjar pernah berperan penting dalam perdagangan dan penyebaran Islam di Kalimantan. Daerah Banjar juga dikenal sebagai “serambi Mekah” karena ketaatan masyarakatnya menjalankan syariat Islam. Pada abad ke- 17, Kerajaan Banjar mengalami masa keemasan seiring dengan

perkembangan Islam yang ditandai lahirnya ulama-ulama Banjar semisal Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, seorang ulama tersohor yang memelopori perkembangan studi Islam dengan melahirkan beragama kitab yang banyak menjadi rujukan di berbagai negara.<sup>1</sup> Pada masa itu, Kerajaan Banjar mempersatukan kerajaan lain di Kalimantan seperti Kerajaan Paser dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, Kerajaan Kotawaringin di Kalimantan Tengah, serta Kerajaan Qodriah, Kerajaan Landak, dan Kerajaan Mempawah di Kalimantan Barat.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa Pangeran Mohammad Noor berada dalam dua lingkungan sosial yang kelak berpengaruh terhadap karakter, posisi dan perannya. Pertama, Pangeran Mohammad Noor dibesarkan di lingkungan keluarga bangsawaan Kerajaan Banjar yang pengaruhnya mulai redup sebagai akibat dari penguasaan Hindia Belanda. Narasi kejayaan masa lalu Kerajaan Banjar yang diperoleh Mohammad Noor hanya dari cerita-cerita yang dituturkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Kedua, Pangeran Mohammad Noor dididik dan dibesarkan di tengah kebudayaan Islam dan ketaatan terhadap syariat Islam.

Pangeran Mohammad Noor juga dihadapkan pada realitas politik Kerajaan Banjar dalam penguasaan pemerintah Hindia Belanda. Selama dekade awal abad ke-20, Pemerintah Hindia Belanda mengalami perkembangan pesat. Pada waktu itu kolonialisme juga memberi kesempatan kepada anak negeri kalangan elite untuk menempuh pendidikan modern dalam kerangka Politik Etis. Pangeran Mohammad Noor menjadi satu dari sedikit orang Banjar yang mendapat pendidikan modern.

Pangeran Mohammad Noor tumbuh dan berkembang dalam lingkungan norma-norma keningratan tetapi ia terbiasa membaurkan diri dengan anak-anak rakyat. Orangtuanya, Pangeran Ali, pada waktu menjabat Kepala Distrik yang berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya.<sup>2</sup> Situasi itu mengharuskan Pangeran Mohammad Noor berpindah-pindah mengikuti orangtuanya sehingga ia berkesempatan mengenal berbagai macam lokasi dan bertemu

orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Pengalaman melihat tempat dan bertemu berbagai kalangan membentuk kepribadiannya mudah bergaul. Keadaan itu, di sisi lain, menyadarkan Pangeran Mohammad Noor akan ketertinggalan masyarakat Banjar dalam berbagai bidang kehidupan.

Pangeran Mohammad Noor berkesempatan melihat “dunia baru” ketika mengikuti orang tuanya pindah ke Kota Baru, Pulau Laut. Berlokasi di tepi pantai, Kota Baru membuka pandangan Mohammad Noor tentang alam Kalimantan yang kaya raya, tidak hanya hutan dan sungai. Sebutan Kalimantan sendiri dihubungkan dengan dua hal; pertama, sejenis pohon besar yang sesuai dengan alamnya dilintasi sungai-sungai seperti Mahakam, Barito, Kapuas dan banyak sungai kecil lainnya. Kedua, Kalimantan berasal dari kata kali yang berarti sungai dan mantan berarti intan; jadi Kalimantan adalah sungai yang mengandung intan.<sup>3</sup> Martapura, kota kelahiran Mohammad Noor, adalah daerah yang terkenal sebagai penghasil intan hingga dieskpor ke berbagai negara sejak zaman kerajaan. Bagi Mohammad Noor, kenangan masa kecil itu membentuk imajinasi tersendiri tentang tanah kelahirannya.

Pangeran Mohammad Noor menyaksikan rakyat yang bertelanjang dada dan kaki dikerahkan untuk membangun jalan poros antara Tapus hingga Sungai Buluh. Ia melihat rakyat menyelam dengan mata memerah ke dalam air coklat-hitam untuk mengambil tanah. Jalan poros itu dibangun di atas keringat, air mata dan penderitaan rakyat terjajah yang terekam dalam memorinya. Pengalaman indrawi ketika masih kecil itu menghubungkannya dengan kesadaran hingga keberpihakannya terhadap rakyat kecil dan rasa simpati kepada yang lemah.<sup>4</sup>

Mohammad Noor mendapat pendidikan Islam di lingkungan keluarganya, mulai dari mengaji, salat, puasa, dan seterusnya. Ia sudah terbiasa melafazkan Surah Al-Fatihah lalu meminum air putih sebelum menghadapi ujian di sekolah hingga meraih gelar Insinyur di Bandung. Praktik olah spiritual itu mengkristal dalam dirinya. Mohammad Noor menempuh pendidikan formal awal di Sekolah

Rakyat di Kota Baru dan Amuntai. Ia biasa bermain dengan teman-temannya yang berasal dari rakyat jelata, menguber burung burak-burak di semak-semak karamunting.<sup>5</sup> Pada 1911, Mohammad Noor melanjutkan pendidikan di HIS (Hollands Inlandse School) di Banjarmasin. Orangtuanya saat itu bertugas di Pantai Hambawang, sebuah kota kecil antara Amuntai dan Barabar. Saat pulang liburan, Mohammad Noor harus menempuh perjalanan sekitar 155 kilometer dengan rute yang cukup ekstrem, dari Sungai Buluh melintasi Danau Bangkau menggunakan jakung—sejenis perahu kecil. Perjalanan dari Banjarmasin ke Kota Pantai Hambawang membuatnya makin mengenali alam Kalimantan dengan potensi air melimpah yang menjadi sumber kehidupan namun sekaligus juga bencana banjir yang ia saksikan hampir setiap tahun. Dalam perjalanan itu pula, ia menyaksikan betapa orang Banjar yang bekerja keras dalam kehidupannya di sekitar sungai.

Bagi Mohammad Noor, perjalanan itu melahirkan imajinasi tersendiri tentang Kalimantan. Kekayaan alam melimpah, kehidupan di sungai beserta keuletan penduduk di sekitarnya, kemiskinan, ketertinggalan, dan sekaligus kebanggaan sebagai orang Kalimantan adalah narasi-narasi yang terekam dalam memorinya yang kelak berpengaruh pada langkah-langkahnya, terutama ketika ketika dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit era revolusi.

Pada 1917, Mohammad Noor melanjutkan pendidikan di HBS (Hogere Burger School) di Surabaya dan menyelesaikan ujian akhir pada 1923. Pada tahun itu, Ratu Intan binti Pangeran Giri, ibundanya, meninggal dunia. Peristiwa itu menjadi pukulan berat bagi Mohammad Noor. Di tengah duka yang mendalam itu, ia menikah dengan Gusti Aminah binti Gusti Mohammad Abi.

Setelah menikah, Mohammad Noor melanjutkan pendidikan ke THS (Technische Hooge School) di Bandung pada pertengahan 1920-an. Lingkungan sekolah mempertemukannya dengan Sukarno dan pemuda-pemuda pergerakan lainnya di Bandung. Ia aktif dalam berbagai diskusi pergerakan nasional dan menjadi anggota Jong Islamieten Bond. Pada 1927, Mohammad Noor meraih gelar insinyur

sipil dan menjadi orang Kalimantan pertama yang berpredikat sarjana.

### **LANGKAH AWAL MENUJU PERJUANGAN**

Setelah memperoleh gelar insinyur, Pangeran Mohammad Noor diangkat sebagai insinyur sipil pada Departement Verkeer en Waterstaat dan ditempatkan di Tegal, Jawa Tengah, untuk menangani irigasi. Kemudian, pada 1929, ia ditempatkan di Malang, Jawa Timur, dan dipindahkan lagi ke Batavia. Pada 1933, ia ditempatkan di Banjarmasin selama tiga tahun. Di Banjarmasin, Pangeran Mohammad Noor berkesempatan mengabdikan keahliannya di tanah asalnya. Pengalaman panjang sejak masa kecil menyaksikan kehidupan masyarakat di sungai, danau dan rawa-rawa adalah bekal yang berharga dalam mengkonstruksi visinya sebagai seorang Insinyur sipil yang berpengalaman di bidang pengairan. Pengalaman dan keahliannya itulah yang kelak didedikasikan dalam bidang ketahanan terutama melalui gagasan Proyek Irigasi Sungai Barito yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah aliran sungai Barito.<sup>6</sup>

Pada 1931, Pangeran Mohammad Noor memulai karier di bidang politik pemerintahan dengan menjadi anggota Volksraad—semacam parlemen yang dibentuk pemerintah kolonial—mewakili Kalimantan menggantikan ayahnya, Pangeran Muhammad Ali. Walau berkedudukan sebagai pegawai pemerintahan Belanda, dalam sebuah sidang terbuka Volksraad, Pangeran Mohammad Noor mengkritik pemerintah terhadap rubber-restrictie yang merugikan industri karet rakyat. Lantaran kritiknya itu, ketua Volksraad kemudian mencabut hak berbicara Pangeran Mohammad Noor dalam sidang itu. Hal itu membuktikan bahwa Volksraad sebenarnya tidak memenuhi fungsi dan peran perwakilan rakyat layaknya parlemen.

Selama aktif sebagai anggota Volksraad (1931–39), Pangeran Mohammad Noor juga masih aktif pada Departemen BOW yang



bertugas di Banjarmasin, lalu dipindahkan ke Bandung (1937) sebagai tenaga insinyur sipil pada Departement Verkeer en Waterstaat. Setelah berhenti sebagai anggota Volksraad, ia kembali bertugas di Lumajang bagian Irigasi Afdeling Bakalen-Sampen. Kemudian, pada 1941 hingga pendudukan Jepang ia ditempatkan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada posisi sectie-ingeneur.

Perpindahan tugas dari satu tempat ke tempat yang lain menjadikan Pangeran Mohammad Noor makin matang dalam bidang keahliannya. Hal itu juga memperlihatkan bahwa dirinya adalah ilmuwan profesional yang mendedikasikan keahliannya bagi masyarakat.

Pada masa pendudukan Jepang, Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah; Sumatera ditempatkan di bawah Angkatan Darat Ke-25, Jawa dan Madura di bawah Angkatan Darat Ke-16, Kalimantan dan Indonesia Timur dikuasai oleh Angkatan Laut.<sup>7</sup> Penguasaan atas wilayah Kalimantan sangat taktis bagi kepentingan perang Jepang mengingat kebutuhan bahan-bahan strategis untuk kepentingan perang, seperti minyak, karet, batubara, mangan, besi, uranium dan lain sebagainya, ada di daerah itu.<sup>8</sup> Wilayah Kalimantan menjadi arena pertempuran antara Sekutu dengan Jepang yang mengakibatkan ketidaktenangan masyarakat Kalimantan.

Di tengah kondisi perang, pemerintah pendudukan Jepang membutuhkan dukungan tenaga kerja rakyat untuk membangun infrastruktur dan menyediakan sumber bahan pangan untuk kepentingan perang. Pemerintah pendudukan Jepang menugaskan Pangeran Mohammad Noor sebagai Kepala Irigasi Pakalem-Sampean di Bondowoso. Perhatian pemerintah pendudukan terhadap pertanian dan irigasi untuk kepentingan logistik perang memanfaatkan tenaga-tenaga ahli, termasuk dari Indonesia. Pada 1945, Pangeran Mohammad Noor diangkat menjadi wakil sumobucho (sekretaris jenderal) pada Departemen Perhubungan/Pekerjaan Umum.<sup>9</sup>

Pada 28 Mei 1945, pemerintah pendudukan di Jakarta meresmikan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia yang beranggotakan 76 orang, terdiri atas perwakilan wilayah, tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia,<sup>10</sup> Pangeran Mohammad Noor terpilih sebagai anggota BPUPKI perwakilan wilayah Kalimantan. Keikutsertaan Pangeran Mohammad Noor dalam BPUPKI mempertemukannya kembali dengan para pejuang dan kaum pergerakan nasional dari seluruh Indonesia. Sebagai perwakilan wilayah Kalimantan, Pangeran Mohammad Noor memastikan bahwa rakyat Kalimantan mendukung cita-cita kemerdekaan Indonesia. Salah satu yang paling membekas dalam ingatan Pangeran Mohammad Noor ketika ia dipertemukan dan mendampingi Mohammad Hatta di Banjarmasin menyampaikan misi persiapan kemerdekaan Indonesia.

... saya tidak mengetahuinya, tetapi nyatanya pada suatu hari di tahun 1945 saya mendapat undangan untuk datang ke tempat kediaman Basuki-Syukyokan (Residen Basuki). Saya dipersilahkan berangkat ke Surabaya untuk bertemu dengan seorang pemimpin Indonesia di Hotel Oranje, Surabaya. . . . Saya bertemu dengan Bung Hatta . . . dengan senyum beliau memberitahu kepada saya, "Kita akan berangkat ke Banjarmasin."<sup>11</sup>

Perjalanan bersama Bung Hatta ke Banjarmasin menyimpan kisah menarik, menegangkan dan inspiratif bagi Pangeran Mohammad Noor. Menegangkan ketika perjalanan mereka dengan pesawat terbang pemerintah terhambat oleh pertempuran selama dua jam antara Sekutu melawan Jepang. Pesawat yang mereka tumpangi harus berputar-putar kira-kira di atas perairan sebelah selatan Teluk Sampit. Pesawat tidak diperbolehkan mendekati lapangan terbang Banjarmasin karena tentara Sekutu sedang melakukan pemboman di sekitar lapangan terbang itu.

Namun, di balik perjalanan yang menegangkan itu muncul ide-ide inspiratif dari Bung Hatta untuk mengelola Kalimantan. Dalam perjalanan dari bandar udara ke Kota Banjarmasin—setelah

pesawat diizinkan mendarat—yang berjarak sekitar 60 kilometer, tampak padang ilalang yang luasnya sejauh mata memandang. Pangeran Mohammad Noor mengisahkan,

Spontan Bung Hatta meminta kepada saya untuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman saya sebagai insinyur irigasi untuk menjadikan padang ilalang itu menjadi sawah yang subur. Lupa perang, lupa pemboman, hanya pembangunan saya perhatikan. Sejak itu, berkembang ide-ide dan cita-cita ke arah suatu konsepsi untuk pembangunan Kalimantan.<sup>12</sup>

Bagi Pangeran Mohammad Noor, perjalanan bersama Bung Hatta menyimpan kenangan dan menghasilkan visi besar dalam membangun Kalimantan. Hal itu makin menegaskan dirinya untuk terus berkarya memajukan kesejahteraan masyarakat Kalimantan khususnya di kemudian hari.<sup>13</sup>

Setelah tiba di Banjarmasin, pada malam itu juga diadakan rapat umum di gedung bioskop Rex. Kehadiran Bung Hatta telah dinanti masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan yang memadati sesak ruang rapat. Seperti telah disebutkan, kedatangan Bung Hatta di Banjarmasin dalam rangka menyampaikan rencana persiapan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi ketika ketua panitia menyampaikan sambutannya, *koosukaiho*, serine tanda bahaya berbunyi. Balikpapan digempur tentara Sekutu sehingga rapat dibubarkan untuk menjaga segala kemungkinan terburuk bagi Bung Hatta. Walaupun rapat tidak terlaksana sampai selesai, semangat kemerdekaan tampak terpancar dari wajah-wajah yang hadir pada malam itu.

Setelah serine tanda bahaya berhenti dan tanda “all clear” terdengar, masyarakat yang masih tidak puas berkerum di halaman tempat penginapan rombongan Bung Hatta. Mereka masih ingin mendengarkan pidato Bung Hatta tentang kemerdekaan Indonesia. Maka, di tengah suasana kegelapan waktu itu, Bung Hatta berpidato tentang masa depan kemerdekaan Indonesia. Para pejuang

dari berbagai penjuru Kalimantan tampak antusias menyambut pidato Bung Hatta. Hingga akhirnya, menjelang tengah malam, Bung Hatta masuk ke penginapan, dan masyarakat pun membubarkan diri.

Keesokan harinya, setelah salat subuh, serine tanda berbahaya berbunyi, suasana tegang kembali. Bung Hatta kemudian di bawa ke tempat perlindungan yang aman. Setelah keadaan kembali tenang, dan berhubung waktu yang sangat terbatas, maka diadakan pembagian tugas 'Operation Kalimantan'. Pangeran Mohammad Noor ditugaskan mengadakan pertemuan dengan wakil rakyat di Balai Kota. Pertemuan ini merupakan yang pertama bagi Pangeran Mohammad Noor dengan para pemimpin rakyat di Banjarmasin. Pertemuan ini menghasilkan kebulatan tekad bahwa rakyat Banjarmasin khususnya dan Kalimantan pada umumnya mendukung sepenuhnya negara Republik Indonesia yang akan dibentuk.<sup>14</sup> Setelah berhasil menyakinkan para pemimpin rakyat Kalimantan, Pangeran Mohammad Noor kembali ke Jakarta guna mengikuti rapat BPUPKI. Pada 7 Agustus BPUPKI dibubarkan dan dibentuk PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

## **SEBAGAI GUBERNUR**

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemerintah Republik Indonesia mulai melakukan serangkaian pengaturan dan pembentukan lembaga-lembaga negara. Dalam sidang PPKI, Presiden Sukarno menunjuk sembilan orang sebagai panitia kecil yang bertugas menyusun rancangan wilayah negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian.<sup>15</sup> Salah satu hasil rapat panitia kecil ini menghasilkan keputusan bahwa pembagian wilayah Indonesia terdiri atas delapan provinsi.

Pada awalnya, panitia kecil yang diketuai oleh Sukarno menunjuk A. A. Hamidhan untuk menduduki jabatan Gubernur Kalimantan. Namun, Hamidhan menolak karena tetap ingin berjuang sebagai wartawan. Ia mengusulkan nama Pangeran Mohammad Noor kepada Wakil Presiden Moh. Hatta dan Otto Iskandar Dinata untuk

menduduki jabatan tersebut. Akhirnya, atas usul Hatta, Pangeran Mohammad Noor didaulat sebagai gubernur Provinsi Kalimantan dengan ibu kota Banjarmasin.<sup>16</sup>

Penunjukan terhadap Pangeran Mohammad Noor sebagai gubernur Kalimantan merupakan pilihan yang tepat karena ia memiliki modal kultural sebagai putra bangsawan Kerajaan Banjar, berpengalaman dalam bidang birokrasi pemerintahan, dan telah lama bersentuhan dengan pergerakan nasional. Dedikasi Pangeran kepada bangsa dan Tanah Air tidak diragukan lagi. Bersama Sukarno, ia aktif dalam berbagai diskusi pergerakan mulai ketika berstatus mahasiswa THS di Bandung. Lingkungan belajar mempertemukannya dengan Sukarno dan pemuda-pemuda pergerakan lainnya. Kemudian ketika menjadi anggota BPUPKI, Pangeran Mohammad Noor dipertemukan dengan Bung Hatta. Berapa kali ia mendampingi Bung Hatta dalam berbagai perjalanan tugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pangeran Mohammad Noor memperoleh banyak gagasan dalam membangun Kalimantan. Kedekatannya dengan Bung Hatta juga dilandasi oleh kesamaan melahirkan gagasan pembangunan.

Menjadi gubernur pada masa revolusi tentu bukanlah perkara mudah. Pangeran Mohammad Noor harus menghadapi tantangan yang berat, antara lain masalah terbatasnya infrastruktur dan fasilitas untuk menunjang jalan roda pemerintahan. Bahkan, gubernur harus bersiap mewakafkan harta dan jiwanya untuk negara. Secara sosio-politik, tantangan yang menghadang Gubernur Pangeran Mohammad Noor kala itu adalah, pertama, Belanda berniat kembali berkuasa di Kalimantan. Kedua, Kalimantan terdiri atas beragam kelompok sosial dengan kepentingan yang beragam pula. Dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia sangat dibutuhkan di Kalimantan, tetapi terdapat juga kelompok yang cenderung menerima kembali Belanda. Gubernur sadar bahwa sebagian rakyat Kalimantan menyambut gembira dan menjadi bagian dari Republik, namun sebagian dari elite tradisional yang pernah menjadi pegawai Belanda sebelum perang menyambut kemerdekaan

dengan sikap skeptis sambil berharap akan kedatangan kembali Belanda.

Ketiga, terdapat kelompok oportunis yang memanfaatkan kesempatan dalam revolusi. Kelompok itu bisa saja menerima kehadiran NICA ataupun berada dalam barisan perjuangan untuk mendapatkan keuntungan. Bisa dikatakan, kelompok ini menjadi duri dalam daging selama revolusi. Kemudian, keempat, tantangan yang dihadapi Pangeran Mohammad Noor adalah munculnya konflik di kalangan pejuang itu sendiri. Perbedaan pandangan tampaknya membuka “ruang retak” antar-pejuang di tengah revolusi.

Tentara Sekutu mendarat di Kalimantan Timur sebelum proklamasi kemerdekaan, yakni Juli 1945, dan sekitar awal Agustus 1945 di Kalimantan Barat. Akan halnya di Kalimantan Selatan, tentara Sekutu tiba pada 17 September 1945, satu bulan setelah proklamasi. Kedatangan Sekutu bertujuan melucuti tentara Jepang dan membebaskan tahanan perang. NICA yang membonceng Sekutu mendapat dukungan dari sekitar 70 tentara KNIL, baik yang dibebaskan dari tahanan Jepang maupun yang melaporkan diri dan menyatakan bergabung dengan NICA.<sup>17</sup> Selain itu, kedatangan NICA juga diikuti sekitar 160 orang tentara lengkap dengan pegawai sipilnya di bawah pimpinan Mayor A. L. van Assendrep. Mereka langsung menduduki kantor-kantor instansi pemerintahan di Banjarmasin, Kandangan, Barabai, dan Amuntai dengan maksud mengembalikan kekuasaan Belanda.<sup>18</sup>

Hari-hari pertama di Kalimantan Selatan setelah proklamasi kemerdekaan memperlihatkan situasi dan kondisi yang tidak menentu karena simpang siurnya berita proklamasi yang sampai ke daerah ini. Radio disita dan dirusak oleh tentara Jepang. Berita tentang kekalahan Jepang hanya diperoleh langsung oleh H. M. Arsyad, Xalfy Zamzam, dan Hamid Cara dari Tuan Kanda di Kandangan, kemudian disampaikan secara sembunyi-sembunyi dari mulut ke mulut.<sup>19</sup> Berita proklamasi resmi bersumber dari siaran radio Domei cabang Banjarmasin kemudin dimuat dalam surat kabar *Borneo Simboen*.<sup>20</sup> Berita proklamasi semakin jelas ketika Hamidhan

dan Rivai tiba di Banjarmasin dalam tugas menyebarkan berita proklamasi, membentuk Komite Nasional Indonesia, mendirikan Partai Nasional Indonesia Daerah dan membentuk Badan Keamanan Rakyat.<sup>21</sup>

Di tengah niat NICA berkuasa kembali di Kalimantan, para tokoh dan rakyat di daerah ini menyikapinya dengan membentuk organisasi perjuangan atau kelaskaran yang bertujuan menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Di Banjarmasin, para pemuda mendirikan organisasi PRI (Pemuda Republik Indonesia) sebagai pengganti *Kenkoku Dosikai* semasa Jepang.<sup>22</sup> Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Kalimantan dengan ketua A. Ruslan dan Hadhariyah sebagai sekretaris serta mengangkat Pangeran Musa Ardikesuma sebagai Residen Republik Indonesia Daerah Kalimantan.<sup>23</sup> Di daerah Kandangan, dibentuk organisasi Geperindo (Gerakan Pemuda Republik Indonesia) dengan tugas utama memperbanyak selebaran tentang Indonesia merdeka dan mengutuk Belanda. Kemudian, pejuang-pejuang dari Kalimantan yang selama itu bergabung dalam organisasi perjuangan di Jawa kembali ke Kalimantan melalui ekspedisi lintas laut setelah Agustus 1945.

Perlawanan rakyat Kalimantan terhadap NICA ditanggapi oleh Belanda dengan mendirikan “negara” kecil dan menunjuk orang-orang yang dapat dijadikan sebagai kepala negara.<sup>24</sup> Van Mook mendekati para pemuka politik dan tokoh masyarakat di luar Jawa, mula-mula dengan pejabat pemerintahan di Indonesia bagian timur untuk menyelenggarakan sebuah konferensi di Malino pada 14 Juli 1946. Agendanya membahas “ketatanegaraan baru” dan susunan pemerintahan. Wakil dari Borneo dalam konferensi itu antara lain Sultan Hamid, Oevang Oeray, Tok Hiang Soen, Lauw (penasihat) dari Kalimantan Barat; dari Kalimantan Selatan adalah Abdoel Asikin Noer, R. Cyrillus, Haji Abdoel Samad, dan Ibas bin Oega; sedangkan Kalimantan Timur diwakili A. R. Afloes, Datoe Mohamad, Sampan alias Zainuddin, dan Raden Soeroto sebagai penasihat.<sup>25</sup> Keputusan konferensi ini adalah membentuk Negara Indonesia Serikat yang

terdiri atas Jawa, Sumatera, Timor Besar dan Borneo.<sup>26</sup> Dalam rancangan, akan dibentuk Negara Borneo dengan wilayah Daerah Istimewa Borneo Barat, Borneo Timur, Borneo Selatan, Borneo Tenggara, dan Borneo “Barat Daya” dan Dayak Besar.

Selanjutnya, pada Juli 1945, Belanda membentuk Panitia Pembantu Perubahan Pemerintahan Kalimantan Selatan beserta cabang-cabangnya di setiap kota. Kemudian di Kalimantan Barat dan Timur, Belanda mancapkan kekuasaannya kembali dengan mendekati dan mengangkat kerabat sultan. Kedudukan raja-raja dihidupkan kembali. Hamid Alkadiri dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Pontianak dan menjadi Kepala Pemerintahan Daerah Istimewa Kalimantan Barat. Di Kalimantan Selatan, Belanda mengangkat seorang Kiai Besar sebagai kepala daerah Hulu-Sungai. Situasi memperlihatkan bahwa Belanda menghidupkan kembali alat-alat kekuasaannya pada hampir seluruh wilayah Kalimantan.<sup>27</sup> Tampaknya, pemerintah Belanda merebut hati keluarga sultan dalam membangun kembali perangkat pemerintahannya.

Pemerintah Belanda juga memanfaatkan media massa untuk merebut hati rakyat Kalimantan. Belanda menerbitkan harian *Soeara Kalimantan* sebagai pengganti *Borneo Shimbun* dengan mengambil alih semua fasilitas milik surat kabar itu. *Soeara Kalimantan* gencar mempromosikan rencana pemerintahan yang akan dibentuk oleh Belanda. Sepanjang 1946–48, koran itu terus-menerus meliput perkembangan pemerintahan di Kalimantan dalam nada “positif” namun memojokkan para pejuang Republik.

Tantangan lainnya yang dihadapi oleh Gubernur Pangeran Mohammad Noor adalah munculnya kelompok oportunistis yang berusaha mendapatkan keuntungan di tengah ketidakstabilan politik dan keamanan daerah Kalimantan. Kelompok itu sebagian menjadi mata-mata Belanda dan sebagian yang lain bergabung bersama pejuang kemerdekaan. Mereka yang bergabung bersama pejuang kemerdekaan inilah yang sering memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi. Seperti dalam kasus “gula perjuangan” yang bermula ketika Gubernur Pangeran Mohammad Noor mengirimkan



bantuan logistik kepada pejuang ke Kalimantan, namun sebagian besar bantuan itu tidak tepat sasaran karena disalahgunakan untuk kepentingan perorangan.

### **LANGKAH STRATEGIS DAN MENENTUKAN**

Menanggapi berbagai tantangan, Gubernur Kalimantan Pangeran Mohammad Noor melakukan berbagai langkah untuk menjamin bahwa rakyat Kalimantan berada di belakang Republik Indonesia. Dua langkah prioritas yang paling mendesak harus dilakukan adalah, pertama, menyatukan seluruh komponen kekuatan, baik para pejuang yang berada di Kalimantan maupun yang berada di luarnya; dan kedua, mempersiapkan organisasi yang dapat mendukung pemerintahan Provinsi Kalimantan.

Untuk menjalankan tugasnya, Gubernur Pangeran Mohammad Noor membuka Kantor Perwakilan Gubernur Kalimantan yang pertama di Yogyakarta (Jalan Lapangan 2).<sup>28</sup> Di kantor itulah, Gubernur mengendalikan pemerintahannya dengan pelbagai keterbatasan, baik dari sisi jarak yang jauh dari Kalimantan maupun dana. Namun, dengan tekad yang kuat dan sarat pengalaman dalam pemerintahan, Pangeran Mohammad Noor mampu membentuk berbagai badan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan.

### **PEMBENTUKAN BADAN PEMBANTOE OESAHA GOEBERNOER**

Untuk menjalankan pemerintahan di tengah perang, pada 2 September 1945, Gubernur Pangeran Mohammad Noor membentuk sebuah badan yang berfungsi membantu tugas-tugas gubernur, yaitu Badan Pembantu Oesaha Gubernur (BPOG). Tujuan utama BPOG adalah (1) mempersatukan seluruh putra Kalimantan yang berada di Jawa untuk dapat membantu perjuangan rakyat di Kalimantan, baik secara politik, militer, maupun ekonomi; (2) membentuk cabang-cabang BPOG di daerah-daerah yang lain; dan (3) membantu

Gubernur Kalimantan dalam melaksanakan tugasnya.<sup>29</sup> Gubernur Pangeran Mohammad Noor tampaknya bermaksud mengkonsolidasikan seluruh kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik di Kalimantan.

Untuk memaksimalkan tugas BPOG, Gubernur Pangeran Mohammad Noor menempatkan markas utama BPOG di Surabaya (Jalan Embong Tanjung 17). Dengan mempertimbangkan beberapa kenyataan, Surabaya dinilai strategis untuk mengkonsolidasikan kekuatan. Pertama, sejumlah pemuda asal Kalimantan telah bergabung dalam berbagai laskar di Surabaya; kedua, Surabaya merupakan salah satu basis perjuangan nasional yang penting; dan ketiga, Pelabuhan Surabaya strategis sebagai titik tolak penyeberangan ekspedisi militer ke Kalimantan yang telah terkoordinasikan secara baik dengan daerah dan pelabuhan lain. Dengan demikian, letak geografis Surabaya memudahkan penyatuan pejuang Kalimantan dalam satu garis komando gubernur.

Gubernur Pangeran Mohammad Noor menunjuk G. Obos sebagai ketua dan A. Gani sebagai wakil ketua BPOG. Keduanya dibantu oleh beberapa staf, antara lain M. Mugni Thalib (keuangan), Gusti Majur (sekretaris), H. Saadiat (tata usaha), H. Ahmad Hasan dan Hassan Thamrin (pembantu). Kemudian BPOG membuka cabang di Jakarta, dipimpin oleh G. Djohan dan Firmansyah, dan Bandung di bawah pimpinan M. Rasyid dan Guru Barmawi.<sup>30</sup> Pembukaan cabang-cabang itu bertujuan mempersatukan dan mengkoordinasikan putra-putra Kalimantan di seluruh Pulau Jawa di tengah minimnya anggaran dana dan keterbatasan saluran komunikasi.

Di tengah keterbatasannya, BPOG berhasil mengirimkan bantuan logistik kepada para pejuang di Kalimantan melalui pedagang yang berniaga di Pulau Jawa. Akan tetapi, menurut Hassan Basry, seorang ekspediter, pengiriman bantuan itu sering tidak tepat sasaran. Dalam rapat dengan BPOG ia mengusulkan agar dilakukan peninjauan dan penyelidikan ke Kalimantan terlebih dulu sebelum dilakukan pengiriman. Dalam bukunya yang terbit di kemudian hari,

Hassan Basry menegaskan apa yang ia sampaikan dalam rapat tersebut:

Di antara rombongan ekspedisi lainnya, tidak dapat pula dilupakan rombongan ekspedisi yang dikirim oleh BPOG dari pelabuhan-pelabuhan di pantai Jawa, terutama pelabuhan Probolinggo sangat banyak dipergunakan. Dengan bertopengkan sebagai pedagang gula, pedagang hasil hutan dan lain-lain, berangkatlah mereka menuju Kalimantan. Gula dan lain-lain keperluan hidup yang dibawa dari Jawa itu dimaksudkan untuk membantu badan-badan perjuangan dan guna perjuangan di Kalimantan, tetapi sayang sekali tidak semuanya sempat benar-benar dipergunakan untuk kepentingan perjuangan dimaksud, melainkan banyak disalahgunakan guna kepentingan perorangan. Di sinilah mulai timbul istilah "gula perjuangan" yang pernah dihebohkan di Kalimantan. Ekspedisi-ekspedisi yang *dikirim* dari Jawa, baik dari Pemerintah sendiri maupun dari badan-badan perjuangan yang seakan-akan berlomba itu, akan tetapi semuanya gagal dalam artian fisik walaupun tidak gagal seluruhnya dalam artian psikologis dan juga politis. Hal ini dapat dimengerti karena akibat dari pemikiran-pemikiran yang tumbuh berlomba-lomba itu selalu menyampingkan persiapan-persiapan dan rencana-rencana yang teliti dan sempurna terlebih dahulu. Terutama sekali pengetahuan yang dalam mengenai daerah operasi serta adanya kordinasi dan hubungan yang baik antara tiap-tiap ekspedisi yang daerah tujuannya bersamaan yang sama sekali tidak terpikir oleh gembong-gembong ekspedisi dan juga tidak terpikir oleh pemerintah sendiri apalagi badan-badan perjuangan.<sup>31</sup>

Gubernur Pangeran Mohammad Noor pun menanggapi pandangan Hassan Basry dalam rapat BPOG. Gubernur menyadari bahwa selalu terdapat orang-orang oportunistis yang memanfaatkan dan mengambil keuntungan di tengah suatu perjuangan sehingga memang perlu dilakukan peninjauan. Revolusi tidak hanya berjuang melawan musuh negara tetapi juga menghadapi hambatan internal

yang bersumber dari kaum pejuang itu sendiri. Langkah Gubernur berikutnya adalah memerintahkan kepada BPOG mengusahakan bantuan bagi Hassan Basry untuk melakukan penyelidikan di Kalimantan sebagai upaya mematangkan ekspedisi selanjutnya. Secara spesifik, Hassan Basry bertugas melakukan penyelidikan untuk ekspedisi berikutnya. Selain itu, ia ditugasi menyelidiki kemungkinan pembentukan pemerintahan (daerah) di Kalimantan di bawah kendali Gubernur Pangeran Mohammad Noor; dan mempersiapkan kedatangan Gubernur yang berencana menempati pos tugasnya di Kalimantan pada akhir Oktober 1945.

Untuk mempersiapkan perjalanan ke Kalimantan tersebut, Gubernur Pangeran Mohammad Noor juga memerintahkan kepada Tjilik Riwut bersama pemuda pejuang lain asal Kalimantan berangkat ke Surabaya sebagai rombongan pendahulu.<sup>32</sup> Menurut rencana, dari Pelabuhan Gresik di Surabaya, rombongan Gubernur menyeberang ke Kalimantan. Sebelum berangkat, rombongan Tjilik Riwut mendapat pelajaran tentang Palang Merah dan latihan militer bersama kelompok Ikatan Pelajar Kalimantan (IPK) di Malang yang dipimpin oleh Darmasyah Syaid Asegaf. Tjilik Riwut ditunjuk sebagai ketua rombongan karena berpengalaman ketika bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit.

Selanjutnya, akhir Oktober 1945, Gubernur Pangeran Mohammad Noor bersama staf dan anggota BPOG bergabung dengan sekitar 120 orang pemuda Kalimantan yang telah berada di Surabaya. Sesuai rencana awal, rombongan Gubernur akan bertolak dari Pelabuhan Gresik ke Samarinda menumpang kapal Merdeka. Rombongan mendapat dukungan dari Residen Surabaya, Sudirman, dan Radio Surabaya yang membekali dua buah pemancar radio sebagai perangkat komunikasi selama di perjalanan. Akan tetapi, rombongan gagal berangkat karena terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Republik Indonesia melawan tentara Inggris Gurkha. Kapal Merdeka terkena tembakan dan dalam posisi miring sehingga tidak layak layar. Akhirnya, rombongan Gubernur Pangeran Mohammad Noor tertahan di Surabaya. Seperti mendapat

kesempatan mendadak, para pemuda Kalimantan anggota rombongan ikut serta dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya,<sup>33</sup> sedangkan Gubernur Mohammad Noor kembali ke Yogyakarta untuk menjalankan pemerintahan daerahnya dari jauh.

Setelah pertempuran Surabaya berakhir, rombongan Tjilik Riwut dan kawan-kawan juga kembali ke Yogyakarta. Mereka tiba di Yogyakarta pada 1 Desember 1945 setelah menempuh perjalanan sekitar 20 hari dengan berjalan kaki. Kegagalan Gubernur Pangeran Mohammad Noor beserta rombongan ke Kalimantan berarti kegagalan mendirikan pemerintahan sipil di sana. Namun, Kegagalan itu menjadi pelajaran berharga bagi Gubernur untuk menyusun rencana berikutnya.

### **PEMBENTUKAN PASUKAN MN 1001**

Gubernur Pangeran Mohammad Noor sangat menyadari bahwa persoalan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan pada waktu itu ialah pendanaan. Hal itu sangat dirasakan ketika hendak memberangkatkan ekspedisi ke Kalimantan beberapa waktu sebelumnya. Sementara ia tidak lagi memiliki dana pribadi lagi untuk membiayai perjuangan. Menjadi makin jelas bahwa menjadi gubernur masa revolusi bukanlah hal mudah, diperlukan pengorbanan harta dan nyawa sekalipun. Untuk menghadapi masalah tersebut, Gubernur berkoordinasi dengan Bung Hatta. Ia menyatakan bahwa

Setelah hijrah dari Bandung ke Yogyakarta, saya dibebaskan dari fungsi sebagai Wakil Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum. Kementeriannya sendiri dihapuskan, karena sudah dipecah menjadi dua kementerian. Di Yogyakarta hubungan antara Wakil Presiden dengan Gubernur Kalimantan sangat erat. Tidak sedikit bantuan yang telah diberikan oleh Bung Hatta kepada saya sebagai Gubernur Kalimantan. Salah satu daripada itu adalah merupakan rekomendasi kepada Bank Negara Indonesia untuk memberikan kredit kepada saya sebesar satu juta rupiah, untuk dijadikan modal dasar membentuk fonds perjuangan yang revolving. Setelah fonds itu

terbentuk maka pinjaman dari BNI itu telah dapat dilunasi sama sekali dalam waktu kurang dari jangka waktu pembayaran kembali.<sup>34</sup>

Hampir seluruh perjuangan yang diprakarsai oleh Gubernur Kalimantan, dapat dibiayai dari dana tersebut. Antara lain, pertama, pengiriman ekspedisi ke berbagai daerah di Kalimantan yang diduduki oleh Belanda, seperti ekspedisi Rahadi Usman ke Kalimantan Barat (1945), ekspedisi Firmansyah ke Kalimantan Selatan (1946), ekspedisi Kapten Mulyono ke Kalimantan Selatan (1946), ekspedisi Tjilik Riwut ke Kalimantan Tengah (1946), dan ekspedisi Mustafa Ideham ke Kalimantan Selatan (1946). Kedua, pembentukan pasukan MN 1001 oleh Tjilik Riwut di daerah Kalimantan (1946). Ketiga, pembentukan Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi IV (1947), mula-mula di bawah pimpinan Kolonel Zakaria Madun, kemudian diteruskan oleh Hassan Basry. Keempat, pembentukan pasukan payung sebagai bagian dari pasukan MN 1001—organisasi militer yang dibentuk oleh Gubernur Pangeran Mohammad Noor—dipimpin oleh Tjilik Riwut yang diterjunkan di Kalimantan Tengah (1948). Terakhir, Gubernur juga mendanai penerbitan surat kabar *Mimbar Indonesia* di Jakarta.<sup>35</sup>

Telah disebutkan sepintas bahwa Gubernur Pangeran Mohammad Noor membentuk organisasi kemiliteran khusus setelah memperhatikan perkembangan politik dan keamanan di Kalimantan dan pengalaman kegagalan ekspedisi beberapa waktu yang lalu. Pasukan itu dirancang untuk mengefektifkan pelaksanaan instruksi gubernur sekaligus menjadi perwakilan pemerintahan di Kalimantan. Organisasi militer itu diisi oleh orang-orang sipil terlatih. Gagasan pembentukan organisasi itu berawal sejak Kongres Pemuda Indonesia (10–11 November 1945) yang mengakibatkan munculnya berbagai organisasi militer atau kelaskaran seperti jamur di musim hujan. Kesempatan itu penting untuk melatih putra-putra pejuang Kalimantan sehingga andal di medan pertempuran.



Pangeran Mohammad Noor (kanan), mendampingi Mohammad Hatta (tengah); paling kiri adalah H. M. Said (Sumber: Wadiji)

Pelaksanaan pembentukan organisasi kemiliteran tersebut diawali dengan rangkaian latihan militer Pasukan Hisbullah Kalimantan dan beberapa kelompok pasukan yang lain pada awal November 1945. Rombongan Tjilik Riwut yang tiba di Yogyakarta setelah pertempuran di Surabaya langsung bergabung dalam latihan. Materi latihan adalah pelajaran strategi perjuangan, metode penyelidikan, cara memberi penerangan kepada rakyat mengenai pemerintahan, dan sebagainya.<sup>36</sup>

Setelah berlatih sekitar tiga bulan, pasukan siap dikirim ke Kalimantan. Khusus pasukan yang dibentuk oleh Gubernur Pangeran Mohammad Noor diberi nama Pasukan MN 1001.37 Dalam suatu rapat pada 2 Februari 1946, Gubernur menginstruksikan kepada pimpinan pasukan agar segera memberangkatkan pasukannya untuk membantu perjuangan rakyat Kalimantan menghadapi NICA. Hadir dalam rapat itu antara lain Achmad Rizekan pemimpin Pasukan Pesindo Kalimantan di Surabaya, Tjilik Riwut pemimpin Pasukan MN

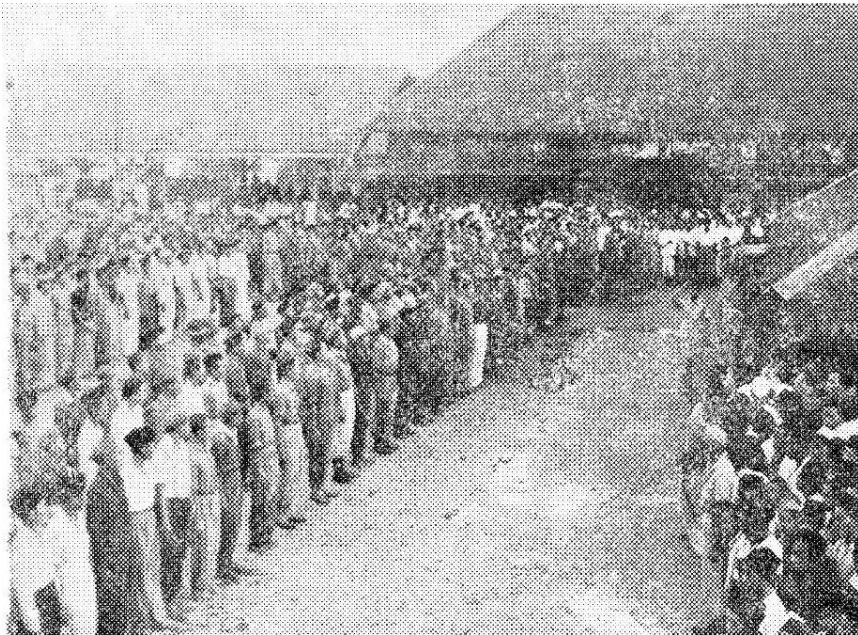
1001, Mustafa Ideham dari Pasukan Hisbullah Kalimantan di Solo, dan Organisasi Perjuangan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Pada 12 Januari 1946, Gubernur Pangeran Mohammad Noor membuat surat perintah kepada Tjilik Riwut untuk berangkat lebih awal ke Kalimantan. Dalam surat perintah itu disebutkan bahwa Gubernur Provinsi Kalimantan memberi kuasa kepada Tjilik Riwut untuk mengambil tindakan yang selaras demi pembelaan dan pembangunan negara di daerah Kalimantan, dan kepada segenap pegawai negeri dan penduduk setempat dapat membantunya. Surat kuasa diberikan kepada Tjilik Riwut pada 16 Januari 1946.<sup>38</sup> Untuk melaksanakan tugas itu, Gubernur memberi dana sebesar Rp16.000 (enam belas ribu rupiah) dan satu pucuk senapan untuk keamanan.<sup>39</sup>

Pada 4 Februari 1946, pasukan MN 1001, bersama pasukan Pesindo pimpinan Husin Hamzah, bertolak dari Pelabuhan Pekalongan menuju Kalimantan menyusuri pantai utara Jawa, terus menyeberang ke daerah Pangkalan Bun dan Sampit. Akan tetapi di tengah perjalanan, di pantai Tegal, rombongan bertemu dengan pelayar yang baru datang dari Kalimantan yang menyatakan bahwa daerah Pangkalan Bun, Sampit dan Kotawaringin diduduki oleh NICA, sedangkan daerah yang masih bebas adalah Batakan di Kalimantan Selatan. Berdasar informasi itu, pasukan MN 1001 kembali ke Pekalongan, dan selanjutnya ke Yogyakarta untuk melapor kepada Gubernur Pangeran Mohammad Noor.<sup>40</sup> Ia mengusulkan agar penyeberangan dipindahkan ke Batakan karena pangkalan Bun dan Sampit sudah dikuasi NICA. Pertimbangan lain, daerah Batakan memiliki sumber atau persediaan makanan yang cukup memadai. Akan tetapi Gubernur Pangeran Mohammad Noor menolak usulan Tjilik Riwut dan tetap menjadikan Pangkalan Bun dan Sampit sebagai sararan, hanya saja siasat perjuangan yang diubah.<sup>41</sup>

Akibat penundaan tersebut, pasukan MN 1001 baru tiba di Sungai Tabuk pada 6 Maret 1946. Kedatangan pasukan MN 1001 di Sungai Tabuk disambut oleh para pemuda dan rakyat setempat. Sambutan pertama yang luar biasa itu disebabkan oleh pandangan masyarakat setempat bahwa pasukan MN 1001 adalah representasi



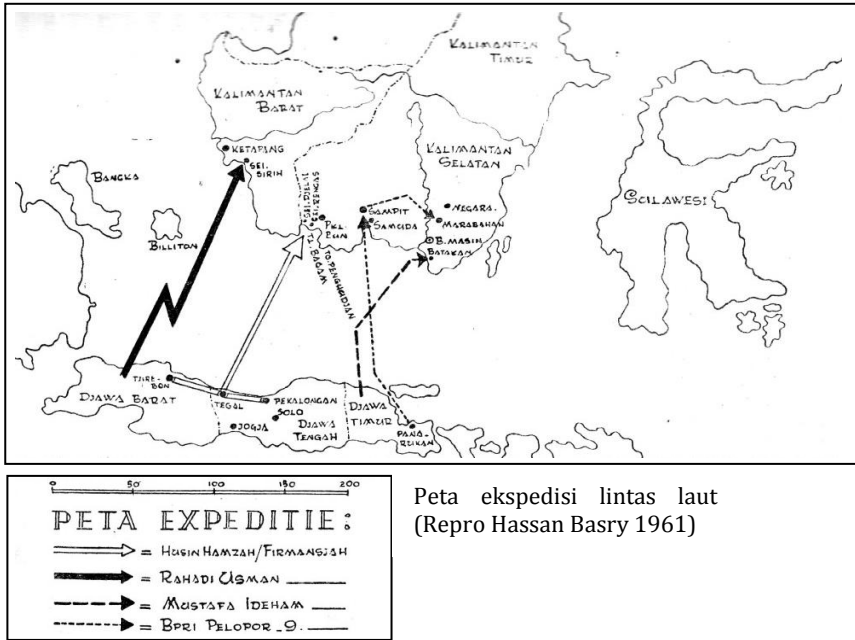
Pangeran Mohammad Noor dan merupakan utusan pemerintah pusat yang sering diasosiasikan sebagai “orang merah putih.” Pada malam harinya diadakan rapat untuk memberi penerangan dan gambaran mengenai kemerdekaan Indonesia yang belum lama diproklamasikan. Selain itu, rapat menjadi forum untuk memperkenalkan visi dan misi Gubernur Provinsi Kalimantan, sekaligus pembentukan pasukan MN 1001 di daerah itu.



Pasukan MN 1001 (Sumber: Wadiji)

Dari Sungai Tabuk, sekitar pukul 03.00 dinihari, Tjilik Riwut memimpin rombongan sebanyak 19 orang berjalan kaki menuju Kotawaringin.<sup>42</sup> Di tengah perjalanan mereka bertemu pasukan Pasindo pimpinan Husin Hamzah di Teluk Bogan. Mereka kemudian berbagi tugas dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok Tjilik Riwut dengan tujuan ke Kotawaringin; kedua, pasukan yang tergabung dalam pasukan Pasindond pimpinan Husin Hamzah; dan ketiga, Yusuf Mubarak memimpin pasukan ke Ketapang, Kalimantan Barat.

Bersama-sama mereka menyebarkan informasi pembentukan pemerintahan sipil di daerah tujuan masing-masing.



Peta ekspedisi lintas laut  
(Repro Hassan Basry 1961)

Terkait dengan penguatan pemerintahan daerah di Kalimantan, peran Tjilik Riwut dalam pembentukan pasukan MN 1001 pantas dicatat. Setelah berhasil membentuk pasukan MN 1001 di Kotawaringan Lama, ia bersama tokoh dan masyarakat setempat membangun Pemerintahan Sipil Darurat, sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahannya. Untuk melancarkan jalannya Pemerintahan Sipil Darurat dan mencegah infiltrasi NICA, pasukan MN 1001 melakukan pembersihan mata-mata atau kaki tangan musuh.<sup>43</sup> Namun, juga harus dicatat peran pemuda pejuang lain yang berhasil membentuk pasukan MN 1001 atau pemerintahan sipil. Misalnya A. Mukran yang membentuk Pemerintahan Sipil Darurat di Bulik, dan Badan KNI serta Angkatan Muda MN 1001.<sup>44</sup> Begitu pula pembentukan markas MN 1001 di Banjar diinisiasi oleh Mukran bersama Tjilik Riwut.

Sejak kedatangannya di Kalimantan hingga kembali ke Yogyakarta, Tjilik Riwut bersama pemuda pejuang yang lain telah berhasil membentuk pasukan MN 1001 di berbagai daerah di Kalimantan. Antara lain di daerah Sungai Tabuk, Sukamara, Pangkalan Bun, Kotawaringin Lama, Nanga Bulik, Pahanan, Sungkup, Mangoh Jooi, Nanga Pinoh (Kalimantan Barat), Nanga Sayan (Kalimantan Barat), Nanga Mancur (Kalimantan Barat), Nanga Sakon (Kalimantan Barat), Kotabaru (Kalimantan Selatan), Nanga Gatal, Kumai, Tapin Bini, Riam, Malata, Rantau Panjang, Buntut Sapau, Tumbang Manjul, Tumbang Sabelong, Tumbang Mahup, Tumbang Samba, Tumbang Sanamang, Mandung, Mandawai, Kasongan, Petak Bahandang, Tewang Kampung, Kuala Kapuas, Pulang Pisau, Palingkau, Lupak Luar, Pagatan (Kalimantan Tengah sekarang), Bahaur, Pahandut, Buntok, Muara Teweh, Tabunganen, Handil Buncit, Jambu Burung, Kurau, Gambut, Banjarmasin, Anjir Serapat, Marabahan, Bentuk/Bati-Bati, Pelaihari, Martapura, Kotabaru, Kandangan, Tanjung, Batu Sopan, Rantau, Barabai, Muara Uya, Balikpapan. Jumlah anggota pasukan MN 1001 terbanyak berada di daerah Gambut. Pasukan ini juga disebut Pasukan MN 1001 daerah Banjar.<sup>45</sup>




---

Pimpinan ALRI Divisi IV di Tuban, Jawa Timur, bersama Gubernur Pangeran Mohammad Noor (Repro Hassan Basry).

---

## LINGGARJATI DAN AKHIR JABATAN

Perjanjian Linggarjati pada dasarnya merupakan salah satu strategi Indonesia untuk memperkokoh eksistensinya di dunia internasional dan menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah fakta. Perjanjian Linggarjati tentu tidak dapat dilepaskan dari latar belakang internasional dan nasional. Bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terdapat tiga hal penting dari perjanjian Linggarjati. Pertama, Linggarjati mengindikasikan pengakuan Belanda atas eksistensi pemerintah Indonesia; kedua, Linggarjati menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mengorganisasi pemerintahnya dan menyusun kekuatan fisiknya. Ketiga, dunia Internasional sudah melihat bahwa pemerintahan Indonesia adalah sebuah fakta.<sup>46</sup>

Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* Pemerintah Republik Indonesia atas Jawa, Sumatera dan Madura. Adapun daerah-daerah yang diduduki oleh tentera Serikat atau oleh tentera Belanda dengan berangsur-angsur dan dengan kerja sama antara kedua belah pihak akan dimasukkan pula ke dalam daerah Republik. Untuk menelenggarakan yang demikian itu, maka dengan segera akan dimulai melakukan tindakan yang perlu-perlu supaya selambat-lambatnya pada waktu yang disebutkan dalam Pasal 12 termasuk daerah yang tersebut itu telah selesai. Adapun negara-negara yang kelak merupakan Negara Indonesia Serikat itu ialah Republik Indonesia, Kalimantan dan Indonesia Timur, yaitu dengan tidak mengurangi hak kaum penduduk daripada sesuatu bagian daerah untuk menyatakan kehendaknya, menurut aturan demokratis, supaya kedudukannya dalam Negara Indonesia Serikat boleh mengadakan aturan istimewa tentang daerah ibu negerinya.

Demikian antara lain bunyi pembukaan Persetujuan Linggarjati yang terdapat dalam Pasal 1 dan 4, ditandatangani oleh Komisi Jenderal Belanda dan delegasi Pemerintah Republik pada 15 November 1946. Sebagian kalangan di Kalimantan memandang bahwa persetujuan itu memperlihatkan Pemerintah RI seakan-akan

melupakan dan membiarkan rakyat. Kendati Pemerintah RI pada dasarnya dari segi strategi politik dan diplomasi telah mendapat kemajuan, yaitu pengakuan atas kedaulatan Indonesia.

Reaksi rakyat Kalimantan terhadap persetujuan tersebut justru mendorong lebih kuat untuk menemukan jalan keluar dari hambatan perjuangan yang dihadapi. Rakyat Kalimantan, terutama anggota kelaskaran, termasuk Pasukan MN 1001, tidak pernah mengakui Persetujuan Linggarjati sekalipun persetujuan politik itu dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Rakyat Kalimantan beranggapan bahwa perjuangan mencapai kemerdekaan tidak bisa dibatasi dengan Linggarjati. Sekalipun Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan bersedia mengakui kedaulatan Belanda atas daerah di luar Jawa, Madura dan Sumatera berdasar atas kepentingan rakyat Indonesia umumnya namun politik yang dijalankan Republik itu tidak pernah mengecilkkan hati rakyat Kalimantan.<sup>47</sup>

Bagi Tentara Republik Indonesia di Kalimantan, dan anggota kelaskaran lainnya Persetujuan Linggarjati (25 Maret 1947) merupakan tamparan terhebat sepanjang perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan. Persetujuan itu resmi melepaskan Kalimantan dari wilayah Republik Indonesia. Setelah perjanjian itu, Belanda dengan gigih berupaya memaksakan "Negara Kalimantan (Borneo)" berdiri dengan terlebih dulu membentuk daerah otonom Kalimantan Tenggara dan Banjar yang dilengkapi dengan Dewan Banjar. Rencana pembentukan Negara Kalimantan telah mengakibatkan sikap rakyat Kalimantan Selatan terbagi dalam tiga golongan.

Pertama, golongan yang pro-Belanda yang merasa berutang budi dan merasa perlu setia kepada Belanda. Mereka umumnya golongan feodal yang mempertahankan kedudukannya di birokrasi pemerintahan secara turun-temurun sebagai hadiah dari sistem pemerintah kolonial Belanda. Termasuk dalam golongan ini adalah pasukan KNIL, dan Polisi Belanda yang dipersenjatai Belanda untuk memerangi sesama bangsa. Kedua, golongan federal yakni golongan

yang mendukung ide pemerintah kolonial Belanda mendirikan Negara Kalimantan di luar Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara bagian dalam Negara Indonesia Serikat yang kemudian akan dibentuk. Dan ketiga, golongan unitarisme yakni golongan yang bercita-cita ke arah negara kesatuan. Golongan ini mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 dan bercita-cita menjadikan Kalimantan sebagai bagian atau provinsi dari Republik Indonesia.

Untuk mencapai cita-cita negara kesatuan, golongan unitarisme terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan bersenjata yang bergerilya di hutan-hutan menentang politik Belanda dengan kekerasan senjata. Para gerilyawan itu antara lain tergabung dalam MN 1001/MTKI dan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Golongan para pimpinan partai politik yang secara legal dan kooperatif berjuang di saluran politik (anggota Dewan Banjar) menentang pembentukan Negara Kalimantan, terdiri dari Partai SKI (Serikat Kerakyatan Indonesia) dan Partai Sermi (Serikat Muslimin Indonesia). Termasuk juga dalam golongan ini adalah kelompok wanita bernama Pertiwi (Persatuan Tindakan Wanita Indonesia). Usaha-usaha SKI dan Sermi didukung pihak ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang bergerilya di hutan-hutan sebagai siasat menghadapi politik negara federal Belanda.<sup>48</sup>

Melihat perkembangan politik setelah Linggarjati, beberapa anggota SKI menemui Gubernur Pangeran Mohammad Noor untuk melaporkan keadaan perjuangan di Kalimantan Selatan. Mereka juga bermaksud menghadap Presiden untuk menyampaikan rencana Belanda membentuk Dewan Banjar. Akan tetapi Presiden tidak ada di tempat sehingga mereka diterima oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Kepada Wakil Presiden, mereka melaporkan bahwa rakyat Kalimantan Selatan baik dari golongan gerilyawan maupun dari golongan politik yang terhimpun dalam Partai SKI kompak dalam menghadapi Belanda. Setelah menjelaskan situasi Kalimantan, mereka atas nama SKI menyampaikan sebuah pernyataan kepada

Wakil Presiden berupa dukungan dan kesetiaan SKI terhadap Republik Indonesia.<sup>49</sup>

Konsekuensi politik dan yuridis Persetujuan Linggarjati menjadikan Kalimantan berada di luar wilayah Republik Indonesia. Dengan sendirinya, kedudukan Gubernur Kalimantan tidak ada lagi karena dihapuskan berdasarkan Penetapan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1947. Konsekuensi lainnya seluruh satuan tentara Republik di luar Jawa dan Sumatera harus dibubarkan. Selaras dengan Persetujuan Linggarjati, Ir. Pangeran Mohammad Noor berhenti menjadi Gubernur Kalimantan, sedangkan Markas Besar ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan di Tuban dilikuidasi dan diubah statusnya menjadi Mobiele Brigade ALRI bermarkas di Madiun.

Menanggapi Persetujuan Linggarjati, Gubernur Pangeran Mohammad Noor menyatakan,

Sebagai konsekuensi dari Persetujuan Linggarjati dan untuk melaksanakan salah satu daripada siasat perjuangan yang digariskan oleh Panitia Pemikir Siasat di bawah pimpinan Bung Hatta, maka dengan restu beliau cara perjuangan saya alihkan dari infiltrasi bersenjata ke infiltrasi politik (infiltrasi ke daerah pendudukan Belanda). Menurut perhitungan secara tehnik-realistis maka untuk mencapai efisiensi yang sebesar-besarnya, markas besar saya harus dipindahkan dari Yogyakarta ke Jakarta di mana tersedia segala fasilitas untuk melaksanakan infiltrasi politik itu.<sup>50</sup>

Gubernur Pangeran Mohammad Noor kemudian pindah ke Jakarta pada 1947. Di Jakarta, ia mendirikan Yayasan Dharma, menerbitkan mingguan *Mimbar Indonesia* dengan tujuan memberikan penerangan serta menanamkan semangat dan keinsyafan bernegara, terutama bagi rakyat Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda. Misi terbitan ini adalah mengalahkan wacana federal yang dibangun pemerintah Belanda.

Sementara itu, pasukan MN 1001 yang telah berkembang di Kalimantan berganti nama menjadi Partai MTK (Mandau Talabang

Kalimantan). Perubahan nama ini sebagai tanggapan atas pembubaran kesatuan TRI di wilayah kekuasaan *de facto* NICA akibat Perjanjian Linggarjati. Perubahan itu dapat menghilangkan kesan kepada pemerintah NICA bahwa MTK bukan organisasi perjuangan atau sebuah pasukan bersenjata, hanya dianggap sebagai organisasi kepartaian biasa. Nama Mandau Talabang dan Kalimantan juga memberi kesan bahwa organisasi itu tidak memiliki hubungan dengan organisasi pergerakan di Jawa.

Meski tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan, Pangeran Mohammad Noor tetap melakukan konsolidasi dengan pasukan MN 1001 atau Partai MTK. Demikian pula, meski telah menjadi partai politik, pasukan MN 1001 tetapi beraksi layaknya laskar bersenjata. Sepanjang 1947 hingga 1949 sering terjadi kontak senjata antara anggota pasukan MN 1001/MTK terhadap NICA dan KNIL.<sup>51</sup> Tidak hanya aksi kontak senjata, pasukan MN 1001/MTK giat mengkampanyekan penolakan negara federasi bentukan Belanda, dan pada saat yang sama pemerintah Belanda di Kalimantan juga sangat antusias mengajak rakyat mendukung negara Kalimantan.

Sebutan pasukan MTK diubah menjadi pasukan MTKI atau Pasukan Mandau Talawang Kalimantan Indonesia. Perubahan itu kembali menegaskan bahwa pasukan MTKI adalah lasykar rakyat. Akibatnya, pemerintah Belanda semakin gencar berupaya menumpas pasukan MTKI. Akhir 1947, pimpinan MTKI, Aliansyah Jusuf dan Hadhariah Haiho, ditangkap oleh NICA sehingga pucuk pimpinan pasukan digantikan oleh Guru Alwi sekaligus dilakukan reorganisasi dalam struktur dan personel pasukan. Dibentuk markas besar yang membawahkan beberapa markas daerah, sedangkan markas daerah membawahkan beberapa markas pangkalan di tingkat desa atau kampung.

Pangeran Mohammad Noor pun tetap melakukan konsolidasi dengan anggota pasukan MTKI. Bahkan aktivitas pasukan MTKI makin kuat dengan pemilikan senjata yang lengkap. Pangeran Mohammad Noor memberi bantuan pembelian sekitar seribu pucuk senjata di Filipina dan Singapura. Pasukan MTKI menjelma menjadi



kelompok gerilya dengan jumlah pasukan dan kemampuan penguasaan wilayah terbesar kedua setelah ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan pada masa perang kemerdekaan di Kalimantan Selatan.

Hingga akhir 1949, MTKI daerah Banjar tetap berdiri sendiri atau tidak bergabung ke dalam ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Pasukan MTKI diresmikan menjadi sebuah Batalyon dengan sebutan Batalyon MN 1001/MTKI TNI AD Kalimantan di bawah komandan Mayor M. A. Arsyad. Peresmian batalyon itu dilakukan oleh Letnan Kolonel Sukanda Bratamenggala pada 12 Oktober 1949 bertempat di Pasar Gambut. Namun, batalyon itu hanya berumur sekitar tiga bulan karena bubar dengan sendirinya. Sisa personel yang berjumlah sekitar satu kompi dimasukkan ke dalam Kompi II Batalyon I STM III, dan pada 1 Juli 1950 diintegrasikan ke dalam Batalyon 605.<sup>52</sup>

## PENUTUP

Pangeran Mohammad Noor mendedikasikan hidupnya untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara sebagaimana terlihat pada jejak perjalanannya sebagai Gubernur Kalimantan. Kendatipun dengan keterbatasan dana dan fasilitas, Ir. Pangeran Mohammad Noor dapat menjalankan tugasnya sebagai gubernur dengan penuh tekad dan dedikasi. Selama menjabat Gubernur Kalimantan yang berkedudukan di Yogyakarta, Pangeran Mohammad Noor telah menggunakan segala daya upaya untuk mengawal Kalimantan tetap sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Pangeran Mohammad Noor berupaya meletakkan dasar-dasar persatuan dan kesatuan Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia. Ia berhasil mempersatukan keberagaman etnik Kalimantan dalam satu tujuan perjuangan. Penunjukan Tjilik Riwut sebagai komandan pasukan MN 1001 adalah contoh terbaik untuk melihat upaya Pangeran Mohammad Noor membangun prinsip-prinsip multikulturalisme dalam perjuangan. Tjilik Riwut adalah putra Dayak sedangkan Pangeran Mohammad Noor berasal dari Kesultanan Banjar. Dalam sejarah, kedua etnik ini memperlihatkan kontestasi dari waktu ke waktu.

Gagasan dan sepak terjang Pangeran Mohammad Noor dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Kalimantan memperlihatkan hasil yang signifikan terutama dalam membangun persatuan dan kesatuan di Kalimantan. Pasukan yang dibangunnya berhasil membuka cabang di seluruh wilayah Kalimantan sehingga mempersatukan beragam etnis dan agama dalam satu wadah perjuangan. Pasukan MN 1001 merupakan kekuatan revolusi terbesar kedua setelah ALRI Divisi IV Kalimantan. Tidak salah bila dikatakan bahwa Pangeran Mohammad Noor telah membangun imajinasi kebangsaan di Kalimantan pada masa revolusi.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Kalimantan, Pangeran Mohammad Noor mendirikan *Mimbar Indonesia*, majalah nasional yang memiliki visi kebangsaan dan kesatuan bangsa, di

Jakarta. Melalui media itu, Pangeran Mohammad Noor berperan serta menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia dan menolak negara federal bentukan Belanda. Ia mengajak dan membangun imajinasi kebangsaan di tanah kelahirannya dengan melihat kerangka yang lebih luas yaitu sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak terpisahkan.

**Catatan Akhir:**

<sup>1</sup>Muhammad 'Arsyad, sangat berpengaruh terhadap kaum muslim Kalimantan terutama dalam bidang tasawuf. Jika Muhammad 'Arsyad dikenal terutama sebagai ahli syariat, Muhammad Nafis termashur sebagai ulama sufi karena ajarannya yang terkenal berjudul "Al-Durr Al-Nafis fi Bayan Wahdat Al-Af'al Al-Asma wa Al-Shifat wa Al-Dzat Al-Tagdis" yang beredar luas di Nusantara. Lihat Azyumardi Azra, *Edisi Revisi Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad Ke-17 dan 18* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 320.

<sup>2</sup>Noor, *Teruskan . . . Gawi Kita Balum Tuntung* (Banjarmasin: Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45 dan Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Kalimantan Selatan, 1981), hlm. 22.

<sup>3</sup>Suwarti Kartiwa, *Sekilas Budaya Kalimantan* (Jakarta: t.p., 1977), hlm. 1.

<sup>4</sup>Noor, *Teruskan . . .*, hlm. 22.

<sup>5</sup>Noor, hlm. 22.

<sup>6</sup>M. P. B. Manus, dkk., *Tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), 1993.

<sup>7</sup>M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: UGM Press, 2011), hlm. 297.

<sup>8</sup>Kolonel H. Hassan Basry, *Kisah Gerilya Kalimantan* (Banjarmasin: Yayasan Lembu Mangkurat, 1961), hlm. 1.

<sup>9</sup>Noor, *Teruskan . . .*, hlm. 25.

<sup>10</sup>Tentang BPUPKI, lihat Saafroedin Bahar, dkk. (ed.), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*, Edisi II, Cetakan 4 (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1993).

<sup>11</sup>Bahar, dkk. (ed.), *Risalah Sidang*, hlm. 26.

<sup>12</sup>Bahar, dkk. (ed.), hlm. 48.

<sup>13</sup>Pangeran Mohamad Noor berjasa menorehkan catatan penting yang akan senantiasa mengingatkan kita tentang pemenuhan kebutuhan pangan nasional melalui proyek pengembangan daerah rawa pantai. Sebagai penggagas ide tersebut, pemikiran dan pengaruhnya terbaca jelas melalui kebijakan pemerintah serta realisasi proyek pengembangan kawasan rawa, termasuk rawa-rawa pantai, dalam rangka meningkatkan produksi pangan nasional.

<sup>14</sup>Noor, *Teruskan . . .*, hlm. 49.

<sup>15</sup>Panitia Sembilan terdiri atas Oto Iskandar Dinata, Subardjo Djojoadisurjo, Sajuti Malik, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusumah, Dr. Amir, A. A. Hamidhan, Dr. Ratulangi, dan Ketut Pudja. Lihat Mawarti Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.). *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 160.

<sup>16</sup>Selain sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan, Ir. Pangeran Mohammad Noor juga diangkat sebagai Wakil Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum dalam Kabinet Presidentil pertama hingga terbentuknya Kabinet Natsir I; kemudian pada 1945–50 menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung yang pertama. Tulisan ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan tugas sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan.

<sup>17</sup>Poesponegoro dan Notosusanto (ed.), *Sejarah Nasional*, hlm. 6.

<sup>18</sup>Wajidi, *Revolusi Kemerdekaan di Kalimantan Selatan 1945–1949* (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 5.

<sup>19</sup>Wajidi, *Revolusi*, hlm. 1.

<sup>20</sup>Ahmad Gafuri, *Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan 1945–1949* (Kandangan: Departemen Penerangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 1984), hlm. 36.

<sup>21</sup>Suriani, *Pasukan MN 1001/MTKI* (Banjarbaru: PT Grafika Wangi Kalimantan, 2015), hlm. 3.

<sup>22</sup>Hassan Basry. *Kisah Gerilya di Kalimantan Periode Tahun 1945–1949*, Jilid I (Banjar-masin: Yayasan Bhakti Banua, 2003), hlm. 12.

<sup>23</sup>Basry, *Kisah*, hlm. 22.

<sup>24</sup>A. H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia* (Bandung: Penerbit Angkasa, 1978).

<sup>25</sup>Ida Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm 95–7.

<sup>26</sup>Agung, *Dari Negara*, hlm. 113–4.

<sup>27</sup>Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan* (Jakarta: Kementerian-an Penerangan, 1952), hlm. 32–3.

<sup>28</sup>Suriani, *Pasukan*, hlm. 11.

<sup>29</sup>Basry, *Kisah*, hlm. 52.

<sup>30</sup>Suriani, *Pasukan*, hlm. 12.

<sup>31</sup>Basry, *Kisah*, hlm. 50; kutipan langsung dalam tulisan ini menggunakan Ejaan yang Disempurnakan.

<sup>32</sup>Suriani, *Pasukan*, hlm. 14.

<sup>33</sup>Basry, *Kisah*, hlm. 48.

<sup>34</sup>Noor, *Teruskan . . .*, hlm. 50.

<sup>35</sup>Noor, hlm. 50.

<sup>36</sup>Suriani, *Pasukan*, hlm. 16.

<sup>37</sup>Sebutan 'Pasukan MN 1001' merupakan singkatan nama Mohammad Noor, sedangkan '1001' adalah 'cara' atau 'jalan' yang bermakna banyak cara atau jalan perjuangan.

<sup>38</sup>Surat Keterangan Gubernur Borneo, 12 Januari 1946, dan Surat Pas Jalan dari Gubernur Borneo, 14 Januari 1946, kepada Tjilik Riwut selaku utusan Pemerintah RI ke Kalimantan. Lihat Suriani, *Pasukan*, hlm. 17-8.

<sup>39</sup>Suriani, *Pasukan*, hlm. 19.

<sup>40</sup>Suriani, hlm. 21.

<sup>41</sup>Wawancara Suriani dengan Darham Hidayat menyebutkan pertemuan antara Tjilik Riwut dan Pangeran Mohammad Noor membahas strategi penyeberangan ke Kalimantan. Strategi penyebaran juga terdapat dalam Surat Instruksi Gubernur, No. 73/170.0, 4 Februari 1946. Lihat Suriani, *Pasukan*, hlm. 21.

<sup>42</sup>Rombongan Tjilik Riwut terdiri atas tujuh pasukan lama, lima orang pasukan baru bergabung berasal dari Sungai Tabuk, lima orang awak kapal dan seorang kepala desa sebagai pemandu. Suriani, *Pasukan*, hlm. 25.

<sup>43</sup>Suriani, hlm. 26.

<sup>44</sup>Basry, *Kisah*, hlm. 49.

<sup>45</sup>Suriani, *Pasukan*, hlm 31-3.

<sup>46</sup>Perjanjian Linggarjati didahului oleh perundingan di Hoge Voluwe, Negeri Belanda (14 -24 April 1946) berdasarkan suatu rancangan yang disusun oleh Sjahrir, perdana menteri dalam Kabinet Sjahrir II. Sebelumnya (10 Februari 1946), ketika Sjahrir menjabat perdana menteri dalam Kabinet Sjahrir I, Van Mook telah menyampaikan kepada Sjahrir rencana Belanda yang berisi pembentukan negara persemakmuran Indonesia, yang terdiri atas kesatuan-kesatuan yang memiliki otonomi dari berbagai tingkat negara persemakanuran menjadi bagian dari Kerajaan

Belanda. Bentuk politik ini hanya berlaku untuk waktu terbatas; setelah itu peserta dalam Kerajaan dapat menentukan apakah akan melanjutkan hubungan berdasarkan kerja sama yang bersifat suka rela. Sementara itu, pemerintah Inggris mengangkat seorang diplomat tingkat tinggi, Sir Archibald Clark Kerr, untuk bertindak sebagai ketua dalam perundingan Indonesia–Belanda. Lihat A. B. Lopian dan P. J. Droglever, *Menelusuri Jalur Linggarjati* (Jakarta: PT Temprint, 1992), hlm. 11.

<sup>47</sup>Kementerian Penerangan RI. *Republik Indonesia*, hlm. 37.

<sup>48</sup>Wajidi, *Revolusi*, hlm. 43.

<sup>49</sup>Wajidi, hlm. 43.

<sup>50</sup>Noor, *Teruskan . . .*

<sup>51</sup>Ancaman dan ultimatum kepada anggota laskar yang selama itu melakukan kontak senjata terhadap Belanda. Pemerintah Belanda meminta kepada anggota laskar, terutama anggota Hassan Basri, untuk menyerahkan diri sebelum 10 Juni 1948. Lihat *Soeara Kalimantan*, 26 Mei 1948.

<sup>52</sup>Waliji, “Pasukan MN 1001/MTKI,” <https://bubuhanbanjar.wordpress.com>, diunduh 15 Desember 2009.

---

I GUSTI KETUT PUDJA

---



Sumber: Koleksi Udayana P. Tisna





# I GUSTI KETUT PUDJA

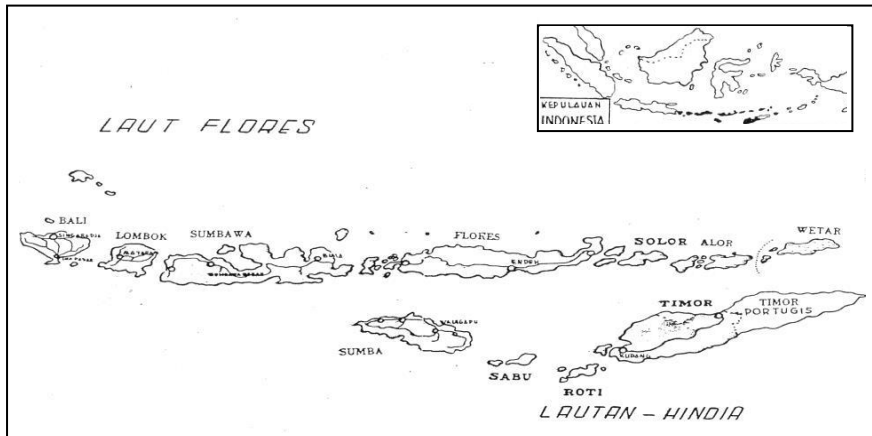
## SANG “KUSIR” DAN RIWAYAT SUNDA KECIL

I GUSTI AGUNG AYU RATIH

I Gusti Ketut Pudja lahir di lingkungan Puri Sukasada, Buleleng, pada 19 Mei 1908, sehari sebelum Boedi Oetomo berdiri di Batavia dan ditandai sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jawa sedang digerakkan oleh gairah kaum priayi terpelajar untuk membangun organisasi modern, membicarakan ketidakadilan yang dialami rakyat terjajah, dan menyebarkan gagasan tentang nasion melalui berbagai bentuk terbitan. “*Insulinde, de schoone slaapster’ was ontwaakt!*” (Insulinde, gadis cantik yang tidur itu telah terjaga), demikian komentar tokoh pencetus Politik Etis, Conrad T. van Deventer, tentang bangkitnya kesadaran nasional di kalangan bumiputra.<sup>1</sup>

Sementara itu, di Bali para bangsawan sedang terpuruk setelah kerajaan-kerajaan mereka beruntun digempur pasukan Belanda sejak pertengahan abad ke-19. Tepat tiga minggu sebelum Pudja lahir, pada 28 April 1908, kerajaan Klungkung, kerajaan mandiri terakhir di Bali, berhasil ditaklukkan setelah raja dan seluruh keluarganya melakukan *puputan*—perlawanan sampai titik darah penghabisan.<sup>2</sup> Kerajaan Buleleng sendiri telah terlebih dahulu dikalahkan dalam perang habis-habisan di Desa Jagaraga, 12 kilometer di sebelah timur Kota Singaraja, pada 1849.<sup>3</sup> Dengan jatuhnya Buleleng, pemerintah kolonial memantapkan posisinya di Bali Utara sebagai pijakan untuk memperluas kekuasaan politiknya ke seluruh Bali antara lain dengan menunjuk seorang residen untuk mengurus administrasi pemerintahan pulau tersebut. Selanjutnya,

Bali dan Lombok digabung menjadi satu keresidenan dengan kota pelabuhan Singaraja sebagai pusat pemerintahan.<sup>4</sup>



Peta Provinsi Sunda Kecil

Sumber: Kempen RI, Sunda Ketjil (Singaradja, 1953), hlm. 3-4.

Awalnya, Pemerintah kolonial Belanda tak menganggap penting untuk menaklukkan Bali karena wilayah tersebut, selain pemasok budak dan prajurit yang tangguh, dianggap tidak menjanjikan keuntungan ekonomi yang terlalu besar. Namun, ada beberapa hal yang membuat penguasa kolonial memutuskan untuk menertibkan Bali. Pertama, raja-raja Bali tidak dapat menyudahi adat “tawan karang,” yaitu perampasan barang terhadap kapal-kapal dagang yang karam di perairan Bali walaupun sudah berulang kali diadakan perjanjian antara penguasa kolonial dan para raja agar rakyat Bali tidak lagi melakukannya.<sup>5</sup> Adat ini tentunya mengancam keamanan jalur-jalur perdagangan yang dikuasai Belanda.<sup>6</sup> Kedua, persaingan dan perang berkelanjutan antar-kerajaan, serta ancaman masuknya penguasa asing dari negeri lain melalui kerja sama dengan raja-raja yang bersaing, tidak mendukung politik *Pax Neerlandica*, yaitu pemantapan negara kolonial dengan kendali tunggal atas keamanan dan ketertiban wilayah jajahan. Ketiga, sejak awal abad ke-20 ada kebutuhan pelaksanaan Politik Etis yang dilandasi niat penegakan ketertiban dan pengadaban masyarakat bumiputra. Pejabat-pejabat kolonial melihat kaum bangsawan dan raja-raja Bali

sebagai despot penikmat candu dan penindas rakyat yang hidup berfoya-foya dari upeti dan pajak, tapi tidak dapat menjamin keselamatan manusia dan hak milik pribadi. Penguasa kolonial tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat Bali, tetapi mereka ingin memastikan bahwa ada hukum yang berlaku, penjaga keamanan dan ketenteraman, dan pengelolaan pajak dan penghasilan yang teratur untuk kepentingan “umum”—yang berarti kepentingan Belanda.<sup>7</sup>

Bali beralih dari masyarakat yang disibukkan oleh peperangan menjadi masyarakat yang ditata untuk kebutuhan akumulasi modal dan konsolidasi negara kolonial. Berbeda dengan raja-raja Jawa yang sudah melalui berbagai percobaan pengelolaan administrasi pemerintahan sejak VOC mengukuhkan kekuasaannya di Batavia,<sup>8</sup> raja-raja Bali tidak pernah mengalami intervensi terlalu berarti dalam pengelolaan wilayah kekuasaan mereka. Hingga Buleleng jatuh, kerajaan-kerajaan di Bali praktis menjalankan pemerintahan secara mandiri dan hubungan dengan negara kolonial terbatas pada aneka perjanjian dagang. Bali pada awal abad ke-20, di satu sisi, berkenalan dengan birokratisasi pemerintahan yang lebih bersifat legal-rasional, mekanis, dan rumit. Raja-raja tidak lagi memiliki wewenang politis, tetapi mendapat ruang cukup leluasa untuk berperan sebagai simbol kultural. Para ksatria di sekeliling kerajaan tidak lagi memiliki kewajiban berperang, pasukan mereka didemobilisasi, dan direkrut menjadi pegawai pemerintah Belanda.<sup>9</sup> Di lain sisi, Bali mulai dikenal sebagai pulau magis dengan ragam kegiatan seni-budaya yang memukau antropolog dan seniman asing terutama dari Eropa Barat. Pemerintah kolonial melihat potensi penting keunikan ini. Mereka menggiatkan pariwisata untuk mengimbangi berita tentang penaklukan Bali yang demikian berdarah. Bali seakan terbelah antara wilayah yang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di sebelah utara dan negeri wisata di sebelah selatan.<sup>10</sup>

Puri Sukasada, tempat Pudja lahir dan besar, merupakan salah satu rumah pokok bagi cikal bakal Kerajaan Buleleng. Konon, puri itu dibangun oleh raja pertama Buleleng, Ki Gusti Anglurah Panji Sakti, sebelum ia mendirikan istana Puri Agung Buleleng di Singaraja.

Terletak di Desa Sangket yang sangat subur, kira-kira dua kilometer di selatan pusat kota Singaraja, Puri Sukasada terkenal sebagai tempat bertumbuhnya sosok-sosok yang kuat secara politik dan terdidik dengan baik.<sup>11</sup>



Igusti Nyoman Raka Punggawa Sukasada Panji, ayah dari Mr I G K Pudja (Sumber: Museum Prumusan Naskah Proklamasi)



Jero ratna Kusuma, Ibumnda Mr I Gusti K Pudja yang ada di Pangkuannya (Sumber: Museum Prumusan Naskah Proklamasi)

Ayah Pudja, I Gusti Nyoman Raka, adalah seorang *punggawa*,<sup>12</sup> yang berpandangan sangat maju dalam hal pendidikan. Seperti kebanyakan orang Bali pada masa itu, tampaknya ia sempat ragu untuk mengirimkan anaknya ke sekolah. Walau sudah berdiri sekolah pionir milik pemerintah, *Tweede Klasse School* (Sekolah Angka Loro), di Singaraja sejak 1875, ia memilih memanggil seorang mantri candu ke rumah untuk mengajari anak-anaknya membaca, menulis, dan berhitung.<sup>13</sup> Namun, selanjutnya ia bersedia membiayai anak-anaknya menempuh pendidikan tinggi hingga ke luar Bali. Bahkan, sebelum meninggal dunia ia mewasiatkan agar anak-anaknya tidak perlu mengadakan upacara *ngaben* yang berbiaya besar—cukup pemakaman dengan biaya 200 ringgit. Ia meminta

agar seluruh warisannya digunakan untuk menyekolahkan cucu-cucunya hingga lulus sarjana.<sup>14</sup>

Latar belakang ibunda Pudja, Jero Ratna Kusuma, tak kalah menarik. Ia adalah putri I Nyoman Gempol, *perbekel* (kepala desa) di Banjar Jawa, daerah yang terkenal gigih melawan Belanda dan kelak menjadi pusat pergerakan kaum nasionalis pada masa revolusi. Mendapat inspirasi dari keberanian para pahlawan Perang Jagaraga, Gempol ikut memimpin pemberontakan besar yang sangat mencemaskan pemerintah Belanda di Banjar Jawa pada 1858. Pemerintah Belanda harus mengerahkan satu batalion untuk menyerbu Banjar Jawa dan menangkap Gempol dan kawan-kawannya. Sebagai hukuman ia dibuang ke Padang. Di rantau ia menikah dengan Sa'adiyah Alimatu, seorang muslimah asli dari Minangkabau.<sup>15</sup> Di Padang pula ia bertemu dengan raja Buleleng ke-8, Ki Gusti Anglurah Ketut Jelantik alias Anak Agung Padang, yang dibuang karena dianggap mendukung pemberontakan yang jauh lebih besar di Banjar Jawa pada 1868. Di kalangan masyarakat sekitar, Gempol dikenal sebagai ahli kebatinan dan pernah dimintai nasihat oleh pesilat ternama dari Jawa Timur, Ki Ngabehi Surodiwiryo, yang belakangan mendirikan perguruan pencak silat Setia Hati.<sup>16</sup> Ketika Gempol dan Sa'adiyah kembali ke Buleleng pada 1897, mereka berkesempatan mendirikan masjid pertama di wilayah tersebut. Boleh jadi pengalaman merantau dan berkeluarga dengan suku bangsa lain itulah yang memberi orang tua Pudja, dan kemudian Pudja sendiri, wawasan berbangsa yang maju dan luas.

Sebagai anak bangsawan, Pudja beruntung dapat menikmati pendidikan terbaik sepanjang masa sekolahnya. Persis ketika ia berusia 6 tahun, pada 1914, untuk kali pertama pemerintah kolonial mendirikan sekolah dasar berbahasa Belanda bagi kaum bumiputra, *Hollandsch Inlandsche School* (HIS), di Singaraja. Ayah Pudja pun segera mendaftarkan putranya ke HIS. Berbeda dengan Sekolah Angka Loro yang terbuka bagi orang kebanyakan, HIS bersifat eksklusif. Hanya mereka yang berasal dari keluarga kerajaan atau bangsawan diperbolehkan bersekolah di HIS. Hierarki sekolah berdasarkan kelas sosial—dan ras—sengaja dibuat untuk

menyesuaikan dengan struktur sosial yang bekerja dalam masyarakat saat itu dan meyakinkan keluarga aristokrat bahwa pendidikan ala Eropa tidak akan mengacaukan sistem kasta yang berlaku. Memang banyak keluarga aristokrat mencurigai sekolah modern sebagai institusi asing yang akan menghancurkan adat-istiadat Bali dengan membuat anak-anak kurang ajar dan tidak menghormati lagi orang-orang berkasta tinggi.<sup>17</sup> Ayah Pudja tampaknya berpandangan berbeda. Ia justru melihat bahwa anak-anaknya perlu belajar “ilmu Belanda” agar lebih mudah memperoleh pekerjaan dalam pemerintahan kelak.<sup>18</sup> Lebih dari itu, mungkin ia menyadari bahwa bangsa Belanda/Eropa memiliki kelebihan tersendiri yang membuat mereka berhasil mengalahkan bangsa Bali. Ia ingin anak-anaknya mempelajari kelebihan tersebut.<sup>19</sup>

Setelah tujuh tahun belajar di HIS, Pudja lulus dengan baik dan didorong untuk melanjutkan pendidikannya. Saat itu di Bali belum ada sekolah menengah sehingga ia harus melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Malang. Tidak ditemukan banyak cerita tentang pengalaman Pudja merantau untuk kali pertama. Namun, menilik cerita putra-putra raja Gianyar dan Karangasem yang juga bersekolah di MULO Malang beberapa tahun kemudian, Pudja mungkin *mondok* pada keluarga Belanda dan mempelajari kebiasaan hidup baru yang sangat berbeda dari kesehariannya di Bali.<sup>20</sup> Misalnya, ia harus menjalani kegiatan rutin dan tepat waktu sesuai dengan jarum jam, membiasakan diri tampil bersih dan teratur, atau berbincang-bincang dengan orang dewasa. Di sekolah, Pudja harus bekerja keras karena banyak mata pelajaran yang wajib diambil dan tidak mudah karena tidak langsung berhubungan dengan pengalaman hidupnya sebagai orang Bali. Selain empat bahasa asing—Belanda, Inggris, Perancis dan Jerman—ia juga harus mempelajari sejarah Tanah Air dan ketatanegaraan Belanda. Hal lain yang mungkin baru bagi Pudja adalah pergaulan dengan suku-suku bangsa lain yang bersekolah di MULO dan memberinya gambaran lebih luas tentang masyarakat Hindia Belanda.

Ayah Pudja tidak tanggung-tanggung menjalankan niatnya memberikan pendidikan terbaik bagi putranya. Begitu lulus dari MULO pada 1926, Pudja dikirim ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, *Algemeene Middelbare School (AMS) Bagian A* di Bandung, dengan biaya tidak sedikit. AMS adalah sekolah termahal kedua setelah *Technische Hoogeschool (THS, Sekolah Tinggi Teknik, sekarang ITB)* pada zaman itu, terutama karena para pengajarnya adalah sarjana yang bertugas mempersiapkan murid-muridnya melanjutkan studi ke perguruan tinggi di Hindia Belanda atau Negeri Belanda. Konsentrasi pengajaran di AMS-A adalah *Westerse-klasse* (sastra-budaya klasik Barat) dengan sejumlah mata pelajaran seperti sejarah, sastra, filsafat, ketatanegaraan, sains, olahraga dan kesenian selain bahasa-bahasa Belanda, Inggris, Prancis dan Latin. Tokoh-tokoh nasional lain yang juga bersekolah di AMS-A pada periode yang sama, dan kemungkinan satu angkatan dengan Pudja, adalah Sutan Sjahrir, Mohamad Natsir, dan Sjafruddin Prawiranegara. Namun, berbeda dengan Sjahrir yang sangat aktif dengan pelbagai kegiatan kepemudaan dan menjadi sangat populer di kalangan siswa AMS,<sup>21</sup> Pudja tampaknya lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar. Padahal Bandung kota metropolitan yang dihidupkan oleh bukan saja beragam acara kebudayaan, tetapi juga politik. Di Bandung pula, Ir. Sukarno, yang baru lulus dari THS setahun sebelumnya, mencanangkan berdirinya Perserikatan Nasional Indonesia pada 1927.



---

Asrama Guntur adalah koleksi <https://share.house.wordpress.com/2012/07/07/archive-snaps-old-guntur-theater-pasar-rumput-jakarta/>

---



Lulus dari AMS-A, Pudja diterima di Rechtshogeschool (RHS, Sekolah Tinggi Hukum, sekarang Fakultas Hukum UI) di Batavia. Pelajaran di sekolah itu luar biasa sulit.<sup>22</sup> Dosen-dosennya adalah pakar hukum dan ilmu sosial ternama dari Negeri Belanda, seperti J. H. J. Schepper dan B. J. O. Schrieke, dan seorang guru besar bumiputra pertama, R. A. Hoesein Djajadiningrat, yang mengajar Hukum Islam dan bahasa Melayu. Mereka menetapkan standar kelulusan yang sangat tinggi. Sejak awal, RHS memang dimaksudkan untuk setara dengan universitas di Negeri Belanda dalam hal rentang keluasan pengetahuan agar para mahasiswanya terdidik sebagai ahli hukum yang mumpuni secara intelektual.<sup>23</sup> Selama belajar di RHS, Pudja tinggal di asrama mahasiswa di daerah Guntur, Menteng, dan setelah mencapai sarjana muda ia pindah ke *Studentenhuis* di Jalan Pegangsaan Timur 17.<sup>24</sup> Kedua asrama itu cukup istimewa karena banyak mahasiswa berbagai suku bangsa dari kota-kota lain di Hindia Belanda yang tinggal di sana, bergaul secara leluasa, dan berbincang-bincang tentang nasionalisme dan kolonialisme.<sup>25</sup> Tidak ada catatan bahwa Pudja ikut dalam kelompok studi atau organisasi tertentu tetapi hampir dapat dipastikan bahwa ia paling tidak menyimak perbincangan yang terjadi di antara teman-temannya.

Pudja lulus dari RHS tanpa halangan berarti dalam waktu lima tahun. Ia adalah orang Bali pertama yang memperoleh gelar *Meester in de Rechten*. Ayah Pudja memintanya pulang ke Bali dan ia pun tidak keberatan. Selama kurang-lebih 12 tahun merantau, Pudja melihat perbedaan besar antara keadaan sosial masyarakat di Bali dan di Jawa. Ia ingin menyumbangkan apa yang dipelajarinya untuk membuat Bali lebih maju dan berkembang.

### **BELAJAR MENATA NEGARA (1934–42)**

Bali yang ditinggalkan Pudja pada awal 1920-an sudah banyak berubah ketika ia kembali pada 1934. Pemerintah kolonial berusaha menata Bali dan masyarakatnya sedemikian rupa agar tercapai keamanan dan ketertiban di seluruh Hindia Belanda. Bali bagi pemerintah jajahan merupakan pintu gerbang masuknya bermacam

gagasan baru yang mendorong sentimen anti-kolonialisme dari Jawa ke daerah-daerah lain di sebelah timur. Setelah pemberontakan Partai Komunis Indonesia 1927 mengguncang tatanan kolonial, pemerintah mengawasi pergerakan kaum bumiputra dengan amat ketat. Mereka harus memastikan bukan saja gagasan komunisme, tetapi juga nasionalisme dan pan-Islamisme tidak menyebar ke Bali dan pulau-pulau di bagian timur Hindia Belanda.

Ada dua cara utama yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan Bali. Pertama, pemerintah memulihkan kekuasaan tradisional raja-raja di delapan wilayah swapraja (*zelfbestuur*) dan memberi mereka kewenangan terbatas untuk mengatur wilayah masing-masing, termasuk menarik pajak dan menegakkan sistem pengadilan adat. Para raja berhak menggunakan titel dari zaman prakolonial, seperti 'Anak Agung', 'Dewa Agung' dan 'Cokorda'. Pemerintah kolonial, diwakili seorang residen yang dibantu oleh kontrolir, tetap mengawasi jalannya pemerintahan, tetapi yang berhadapan dengan rakyat sehari-hari adalah raja dan perangkat pemerintahan swapraja yang diikat oleh perjanjian pendek (*korte verklaring*) untuk bersetia kepada Kerajaan Belanda dan tunduk kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda.<sup>26</sup>

Cara kedua, pemerintah memastikan Bali terisolasi dari perkembangan pesat gerakan nasionalis di Jawa dengan membuat Bali sebagai 'museum' Jawa Kuno yang belum tersentuh peradaban agama-agama samawi, baik Islam maupun Kristen. Proyek kultural yang sering disebut *Baliseering* (Balinisasi) ini berpusat pada upaya konservasi tata busana, tata wicara, arsitektur dan kesenian tradisional yang dijaga keajegannya oleh lembaga hukum adat *Raad van Kerta* dengan kaum brahmana sebagai penentu keputusan akhir. Pemerintah kolonial seakan ingin membatasi pengembangan pengetahuan orang Bali tentang dunia luar dan konsep-konsep baru, seperti kemerdekaan atau demokrasi, atas nama kepentingan menjaga 'keaslian' dan 'keunikan' Bali, dan mengurung masyarakat Bali dalam satu masa yang tidak boleh berubah. Penampilan Bali sebagai 'museum hidup' menjadi daya tarik tersendiri bagi ilmuwan, peneliti, seniman, dan wisatawan asing yang berbondong-bondong

datang ke Bali sejak akhir 1920-an. Bali menjadi salah satu tujuan utama para pelancong mancanegara yang berperjalanan ke Asia Pasifik, dan turisme semakin mengaburkan struktur represi yang diciptakan pemerintah kolonial Belanda. Bagi rakyat Bali yang merasakan kesulitan hidup, raja-raja merekalah pelaku utama penindasan, bukan pemerintah Belanda.<sup>27</sup>

Kedua kebijakan konservatif itu didukung oleh sistem kasta yang secara kaku sudah ditegakkan terlebih dulu berdasarkan pemahaman sempit pejabat-pejabat kolonial tentang kebudayaan Bali dari abad sebelumnya. Walaupun sistem kasta sudah berlaku sejak zaman kerajaan masih berkuasa penuh, pembagian kerja dan kekuasaan di antara tiga kasta tertinggi (*triwangsa*)—brahmana, ksatria, dan weisa—dan sudra tidak terlalu ketat dan sering kali bisa dirundingkan. Selain itu, terdapat kelompok masyarakat non-bangsawan dengan keahlian tertentu, seperti pandai besi dan pekerja seni, atau klan tua yang berpengaruh dalam hal-hal spiritual yang tidak dapat serta merta digolongkan sebagai *triwangsa* atau sudra. Birokrasi kerajaan terbuka terhadap masuknya orang-orang dari berbagai kasta tanpa ada pembatasan ketat dalam hal kepantasan atau keharusan untuk melakukan pekerjaan tertentu.

Pemerintah kolonial yang berusaha mengendalikan masyarakat Bali kemudian membakukan pemahaman mereka setelah melakukan konsultasi dengan orang-orang tertentu dari kalangan *triwangsa*, terutama kaum brahmana, dan menetapkan secara legal tugas-tugas sosial dan politik masing-masing golongan. Keputusan itu berdampak pada pembagian tanah, penetapan pajak, dan pengaturan kerja bakti untuk puri dan desa (*ngayah*), termasuk di dalamnya kerja rodi (*corvée*) untuk pembangunan infrastruktur publik. Golongan *triwangsa* secara otomatis dapat menjadi pegawai pemerintah tanpa perlu diuji kemampuannya, sementara kelompok masyarakat lainnya yang dianggap sudra diharuskan untuk memenuhi berbagai kewajiban kerja kasar yang ditentukan oleh pejabat *triwangsa*.<sup>28</sup>

Pelaksanaan kebijakan tersebut bukannya tanpa tentangan. Sebaik-baik upaya pemerintah mencegah gagasan pembaruan

menyebar di Bali, tetap saja ada celah yang dimanfaatkan oleh kaum inteligensia, yaitu mereka yang kembali dari sekolah di Jawa dan orang-orang Jawa yang bekerja di Bali sebagai guru, dokter, atau pegawai negeri.<sup>29</sup> Perlawanan awal muncul dari kalangan non-bangsawan terdidik di Singaraja—kebanyakan adalah guru di sekolah-sekolah rakyat—yang bergabung dalam kelompok Surya Kanta dan menerbitkan surat kabar dengan nama yang sama pada pertengahan 1920-an.<sup>30</sup> Mereka terutama mempersoalkan pemilihan pegawai jawatan pemerintah berdasarkan kasta tertinggi, bukannya berdasarkan kemampuan dan tingkat pendidikan.

Pada 1930-an dan 1940-an, kaum aktivis bermunculan dengan semangat nasionalisme dan kritik terhadap ketidakadilan yang diciptakan sistem kolonial meluas ke soal pendidikan dan ekonomi bagi rakyat kebanyakan. Mereka mendirikan partai politik pertama, Parindra (Partai Indonesia Raya), dan berbagai organisasi sosial seperti Budi Welas Asih dan Bali Darma Laksana yang membantu rakyat dengan beasiswa dan penyuluhan. Berdirinya sekolah Taman Siswa di bawah pimpinan Ki Wiyono Suryokusumo di Denpasar pada 1933 juga berpengaruh besar bagi perkembangan gerakan nasionalis di Bali.<sup>31</sup>

Pudja berada di tengah kancah perubahan itu namun ia tidak menampakkan keterlibatan yang berarti. Ia mungkin saja mengetahui perkembangan gerakan nasionalis di Jawa, tetapi ia tidak terlibat dalam organisasi-organisasi nasionalis di Bali. Ia bukan bagian dari kelompok inteligensia yang berada di luar lingkaran pangreh praja dan berusaha mendobrak kekolotan budaya aristokrat walaupun ia mungkin mengenal gagasan-gagasan mereka melalui terbitan yang banyak beredar pada masa itu. Segera setelah tiba di Bali pada awal 1935, Pudja bekerja secara suka rela di kantor Residen Bali dan Lombok di Singaraja untuk mengawasi *Volkscrediet Bank* (Bank Perkreditan Rakyat). Dua tahun kemudian ia diperbantukan sebagai tenaga cadangan di *Raad van Kerta*, lembaga peradilan adat yang menangani perkara ringan dan mengatur tata tertib kerajaan, di Denpasar. Ia diminta mempersiapkan revisi putusan lembaga peradilan itu di seluruh Bali dan melakukan

pengawasan terhadap pengalihan tanah di kerajaan Badung, Tabanan, dan Klungkung untuk tanah bengkok.<sup>32</sup> Sebagai seorang sarjana hukum yang baru lulus, Pudja menimba banyak pengalaman dalam hal menyelaraskan hukum kolonial dan hukum adat. Apalagi masalah yang ia tangani berkaitan dengan pemanfaatan tanah kerajaan yang sering kali mengundang pertikaian.

Posisi pemerintah Belanda semakin tidak menentu sejak meluasnya ekspansi Jerman di Eropa. Pada 10 Mei 1940, pasukan Jerman menyerbu Belgia, Luxemburg dan Belanda karena mereka menduga Inggris dan Prancis akan menggunakan ketiga negara tersebut sebagai basis untuk menyerang wilayah industri Jerman di Ruhr. Setelah bertempur kurang lebih sepekan pemerintah Kerajaan Belanda menyerah kalah dan Ratu Wilhelmina terpaksa mendirikan pemerintahan di pengasingan di Inggris. Jepang yang sudah bergabung dengan aliansi militer Poros Roma-Berlin-Tokyo sejak 1939 semakin mengincar Indonesia dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah untuk memperkuat daya tempur mereka menghadapi Blok Sekutu. Setelah Prancis jatuh ke tangan Nazi Jerman pemerintah Vichy memperbolehkan Jepang mendirikan basis militer di Indocina Prancis (sekarang Vietnam) untuk persiapan menginvasi Indonesia.

Di Bali, sebagai persiapan menghadapi serangan Jepang, komandan tentara kerajaan Belanda (KNIL) setempat merekrut pemuda-pemuda Bali untuk dilatih kemiliteran dan diberi nama pasukan Prayoda (Parayuda, dalam bahasa Bali). Struktur pasukan Prayoda mirip dengan Legiun Mangkunegaran di Surakarta, Legiun Pakualaman di Yogyakarta, dan Barisan Madura, yang sudah dibentuk sejak abad ke-19. Sekitar 1.000 personel pasukan Prayoda ditempatkan di empat swapraja yakni Badung, Buleleng, Gianyar dan Karangasem. Kelompok pemuda lain direkrut dan dilatih dalam badan *Nederlandsch-Indische Lucht Beschermings Dienst* (layanan penjagaan angkasa) untuk mengawasi serangan udara. Kalangan pemuda pergerakan tidak kalah sigap. Walaupun mereka tidak tahu persis apa yang akan terjadi, mereka menganggap perlu membentuk kelompok bela diri yang berkegiatan secara klandestin. Pemuda-

pemuda yang ahli pencak silat, ilmu bela diri lainnya, bahkan yang bergerak di bidang seni tari dan ilmu kebatinan, mendirikan Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia Merdeka (PPRIM, kata 'merdeka' sering diganti 'mulia' untuk mencegah polisi Belanda membubarkan organisasi mereka). Secara terbuka mereka seakan-akan sekadar berkumpul dan berkegiatan di sanggar-sanggar seni tari, pencak silat, dan kebatinan tetapi mereka sebenarnya juga membicarakan rencana masa depan Bali dan Indonesia yang merdeka.<sup>33</sup>

### **BEKERJA UNTUK JEPANG (1942-45)**

Pada 8 Desember 1941, dunia dikejutkan oleh pemboman pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, oleh pasukan Jepang. Setelah hari naas itu peristiwa demi peristiwa berlangsung dengan cepat di berbagai penjuru dunia dan mengguncang Hindia Belanda ke arah yang tak pernah dibayangkan siapa pun sebelumnya. Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Amerika dan sekutunya di Asia Pasifik segera membentuk mandala perang Komando ABDA (American-British-Dutch-Australian) yang berbasis di Singapura untuk menjaga gugus penghalang Melayu yang mencakup wilayah Semenanjung Malaka, Singapura, hingga pulau-pulau paling selatan Indonesia. Namun, pasukan Jepang dengan sistematis merangsek ke tenggara, menguasai Hong Kong, lalu ke selatan, menyerbu Thailand dan bagian utara Tanah Melayu.

Dari titik itu gerak pasukan Jepang seperti tidak terbendung lagi. Dalam waktu sepuluh hari mereka berhasil menguasai pusat kilang minyak di utara Sarawak, lalu disusul dengan penguasaan dua kilang minyak terbesar Indonesia di Pulau Tarakan dan Balikpapan. Garnisun KNIL yang berjaga-jaga sudah terlebih dulu membakari ladang-ladang minyak utama. Tetapi jumlah mereka tak sebanding dengan serdadu Jepang dan tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti.<sup>34</sup> Pertempuran paling sengit, panjang, dan menentukan berlangsung di seputaran Tanah Melayu dan Singapura antara 8-15 Februari, yang berakhir dengan kekalahan pasukan gabungan ABDA.

Perdana Menteri Inggris saat itu, Winston Churchill, menyatakan kekalahan itu sebagai “malapetaka terburuk” dalam sejarah militer Inggris.<sup>35</sup>

---

Mr Pudja bersama pegawai dari bala tentara Jepang  
(Sumber: Museum Prumusan Naskah Proklamasi)

---



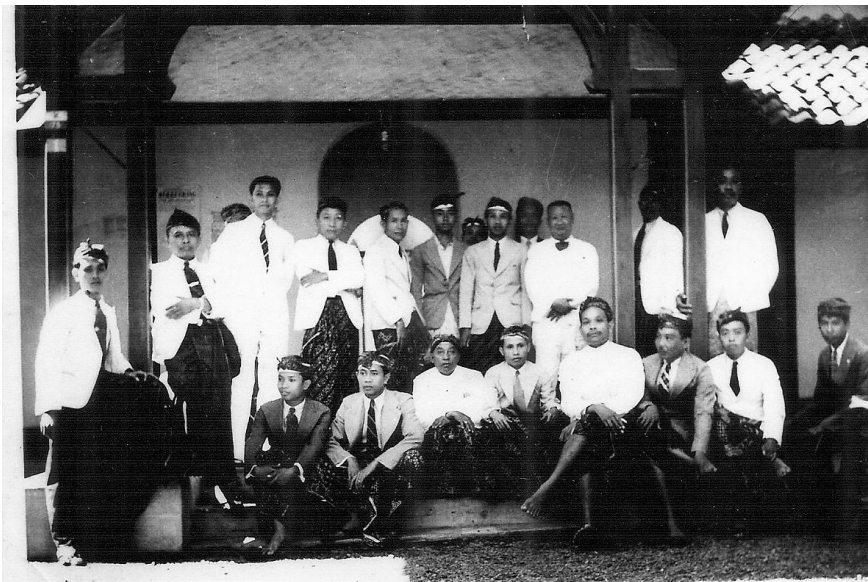
Setelah Singapura jatuh, penguasa militer Belanda menyadari bahwa hanya soal waktu sebelum Jepang menyerbu Jawa. Pada 27 Februari konvoi kapal perang Jepang melaju dari arah timur laut melalui Selat Makassar dan Laut Maluku menuju pantai utara Jawa. Armada ABDA berusaha menghadang gerak konvoi itu. Pertempuran hebat pun berlangsung sepanjang siang dan malam hari di perairan Laut Jawa yang berakhir dengan kekalahan telak armada angkatan laut ABDA hanya dalam waktu dua hari: sepuluh kapal perang hancur dan sekitar 2.000 pelaut hilang. Pimpinan armada, Laksamana Muda Karel Doorman, ikut tewas bersama tenggelamnya kapal penjelajah Belanda *De Ruyter* yang dihujam torpedo Jepang. Kekalahan itu mengakhiri operasi maritim ABDA di Asia Tenggara dan memantapkan posisi Jepang di wilayah tersebut. Pada 8 Maret 1942, Letnan Jendral Hein Ter Poorten, komandan pasukan darat ABDA di Jawa, yang juga Panglima KNIL, mewakili Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh-Stachouwer, menyerah tanpa syarat kepada penguasa militer Jepang di Kalijati, Jawa Barat.

Mengherankan bahwa pemerintah Belanda begitu abai dengan persiapan menghadapi invasi Jepang di Indonesia. Mereka begitu bergantung pada Indonesia karena sudah ratusan tahun mencari hidup di negeri ini. Mereka tahu bahwa Indonesia adalah sasaran utama gerak militer Jepang karena kekayaan sumber daya alamnya terutama karet dan minyak bumi. Indonesia pada saat itu adalah pengeksport minyak bumi terbesar keempat setelah AS, Iran, dan Rumania.<sup>36</sup> Di satu sisi, tampaknya Belanda demikian percaya bahwa kekuatan militer Inggris dan AS lebih dari cukup untuk menghadang balatentara Jepang. Di lain sisi, sikap pemerintah Belanda memusuhi kalangan pergerakan pada gilirannya merugikan ketahanan Indonesia sebagai koloni. Saat situasi genting dan mereka berusaha menggalang dukungan dari rakyat Indonesia untuk “bela negara,” sambutan rakyat dingin-dingin saja walaupun sebagian tokoh pergerakan menyadari bahaya fasisme yang dibawa pasukan Jepang. Para pemuda di Bali, misalnya, lebih memilih bergabung dengan PPRIM yang tidak dibayar apa-apa daripada menjadi “serdadu sewaan” untuk pasukan militer Belanda.<sup>37</sup>

Ketika pasukan Jepang masuk dari pantai Sanur pada 19 Februari, opsir Belanda yang diperintahkan menjaga pelabuhan dan lapangan terbang segera mundur teratur ke pedalaman, tanpa melawan, dan mencari jalan untuk melarikan diri ke Jawa atau Australia. Mereka memerintahkan pasukan milisi Prayoda untuk melepas seragam, meletakkan senjata dan perangkat perang yang lain, dan pulang ke rumah masing-masing. Karena Bali dianggap tidak memiliki obyek vital yang harus dilindungi, pemimpin militer Belanda tidak menempatkan pasukan khusus di pulau tersebut. Orang Eropa di Bali juga hanya berjumlah sekitar 100 jiwa. Satu-satunya perlawanan terakhir dilancarkan oleh *vernieling brigade* (brigade perusak) yang dengan sengaja menghancurkan pusat-pusat logistik dan infrastruktur militer agar tidak dapat dimanfaatkan oleh Jepang. Mobil, truk dan kendaraan lain milik militer dipreteli, mesinnya dirusak, lalu dijerumuskan ke jurang yang dalam. Mereka juga membakar instalasi militer, gudang-gudang beras, dan pompa bensin sehingga Denpasar dilanda lautan api.<sup>38</sup>

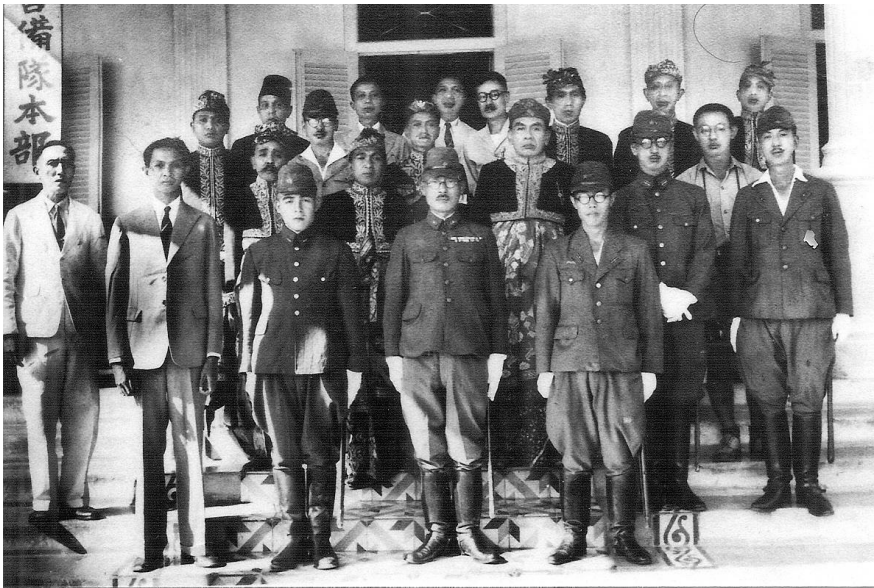


Pada masa awal pendudukan Jepang, Bali sempat dikuasai oleh pasukan Angkatan Darat Jepang selama kurang lebih tiga bulan sebelum pasukan Angkatan Laut masuk. Pertempuran hebat di Selat Badung pada 19–20 Februari 1942, yang diikuti pergantian demi pergantian pasukan asing, sempat menimbulkan kekacauan di kalangan rakyat yang tidak terlalu paham apa yang terjadi. Sudah sekitar 30 tahun Bali dalam keadaan tanpa perang sehingga rakyat dapat lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar di sekolah dan berkesenian. Masuknya serdadu Jepang yang kasar dan gila hormat membuat rakyat ketakutan dan memilih mengungsi ke desa-desa di pelosok dan gunung-gunung untuk beberapa saat. Keterbatasan bahasa juga menyebabkan banyak kesalahpahaman. Baru setelah pimpinan militer meyakinkan bahwa keadaan sudah aman dan Jepang datang untuk bersama-sama membebaskan Asia dari penindasan bangsa kulit putih, rakyat kembali ke tempat tinggal mereka semula dan menjalankan pekerjaan masing-masing seperti sediakala.



Mr I G K Pudja pada waktu dinas di Pengadilan Negeri Badung (Lieded Kerta)  
(Sumber: Museum Prumusan Naskah Proklamasi)

Untuk membantu menghidupkan kembali pemerintahan sipil di Bali pimpinan AD Jepang menunjuk Ketut Pudja, yang sudah menjadi hakim di *Raad van Kerta* Badung, sebagai *Rijikan-dairi* atau Wakil Residen. Bali tetap dikelola bersama Lombok dalam satu keresidenan yang disebut *Syo Sunda Minseibu* dan dipimpin oleh seorang *Chōkan*—setara dengan residen pada zaman Belanda—berkebangsaan Jepang yang berkantor di Singaraja. *Minseibu Chōkan* bertanggung jawab kepada panglima militer (*Shireikan*) yang bermarkas di Denpasar. Bali dibagi menjadi dua wilayah militer: Bali Utara yang mencakup kerajaan-kerajaan (*syu*) Buleleng dan Jembrana; Bali Selatan mencakup enam kerajaan lainnya. Raja-raja Bali diberi nama *Syuco* dan dalam memerintah didampingi oleh penasihat Jepang (*bunken kanrinkan*) yang tugasnya mirip dengan kontrolir zaman Belanda.



Mr Pudja waktu pelantikan sebagai kepala pemerintahan Swa Praja Rezikan Dairi yang tugasnya menjalankan pemerintahan Karesidenan wilayah Bali Lombok tahun 1942. (Sumber: Museum Prumusan Naskah Proklamasi)

Dewan raja-raja yang dibentuk Belanda pada 1938, Paruman Agung, dipertahankan sebagai wadah komunikasi antara pihak

kerajaan dengan penguasa militer Jepang. Setelah pasukan AD digantikan pasukan AL, pimpinan AL Jepang tampaknya melihat pengalaman Pudja bekerja untuk birokrasi kolonial Belanda bermanfaat untuk mengelola administrasi pemerintahan sipil di Keresidenan Bali-Lombok. Ia kemudian ditunjuk menjadi kepala daerah Bali Utara, sedangkan untuk Bali Selatan ditunjuk I Putu Serangan.<sup>39</sup>

Untuk memastikan dukungan dari rakyat Indonesia, penguasa militer Jepang membutuhkan bantuan tokoh-tokoh nasionalis senior seperti Sukarno, Hatta, dan Sjahrir yang pada saat Jepang masuk masih berada di pengasingan di Bengkulu dan Banda Neira. Pada pertengahan 1942 mereka dibebaskan dan dipulangkan ke Jawa untuk berbagi tugas dengan Jepang dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Atas desakan Sukarno dan Hatta pemerintah mendirikan badan propaganda baru, Pusat Tenaga Rakyat (Putera), untuk mengajak berbagai organisasi nasionalis yang sudah ada bekerja sama mendukung Jepang melawan Sekutu. Dipimpin oleh empat serangkai— Sukarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K. H. Mas Mansur—dalam waktu singkat Putera meraih dukungan di Jawa dan Madura. Pimpinan Putera secara efektif menggunakan perangkat organisasi, seperti jaringan, radio dan surat kabar, untuk menyampaikan pesan kemerdekaan secara terselubung kepada rakyat.

Tidak lama setelah Putera bekerja, pemerintah mendirikan *Chuo Sangi-in* (Dewan Pertimbangan Pusat), semacam dewan perwakilan rakyat, tetapi tidak memiliki wewenang membuat undang-undang. Fungsi utamanya adalah menjadi wadah bagi kaum nasionalis untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan rencana Indonesia berpemerintahan sendiri. Lembaga serupa juga didirikan di tingkat keresidenan dengan nama *Shu Sangi-kai* (Dewan Pertimbangan Karesidenan); khusus untuk karesidenan Bali-Lombok lembaganya bernama *Syu Kaigi*. Pudja ditunjuk menjadi penasihat umum (*gyōsei komon*) dalam lembaga itu bersama beberapa tokoh masyarakat Bali, seperti putra Raja Gianyar, Anak Agung Gde Agung. Berdasarkan catatan Gde Agung tidak banyak tugas yang perlu

dikerjakan di dewan itu sehingga mereka banyak menganggur. Kegiatan Pudja sehari-hari adalah membaca koran *Asia Raya*, yang tersedia di kantor, dan belajar bahasa Jepang.<sup>40</sup> Tampaknya dewan itu memang didirikan sekadar untuk memberi kesan bahwa Jepang berniat memberi Indonesia kesempatan menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Sejak pertengahan 1942 Jepang boleh dikatakan berhasil menguasai wilayah yang teramat luas dari Samudra Hindia hingga Pasifik Tengah, tetapi kebutuhan logistik untuk mempertahankan wilayah taklukan itu luar biasa besar. Jepang tidak memiliki sumber daya alam, manusia, dan basis industrial yang cukup kuat untuk memasok kebutuhan itu. Sementara itu, blok Sekutu yang sudah berhasil memulihkan kekuatannya kembali terus-menerus menyerang Jepang dan semakin memojokkan posisinya hingga akhirnya Jepang kalah pada 1945. Penguasa Jepang di Indonesia kemudian melipatgandakan segala upaya produksi dan pengumpulan bahan-bahan sandang-pangan dan kebutuhan industri perang. Di Bali, dari raja hingga pegawai di tingkat desa menjadi ujung tombak mobilisasi logistik itu dan berhadapan langsung dengan rakyat, terutama petani, untuk memaksa mereka menyerahkan beras dan hasil bumi lainnya dan ternak. Petani tak jarang diharuskan menanam tanaman yang dibutuhkan tentara Jepang, seperti pohon jarak, kapas, dan bambu secara masal, dan menghancurkan tanaman yang sebelumnya menjadi sumber nafkah petani, seperti kopi dan buah-buahan. Ketika beras menjadi langka, rakyat disuruh makan singkong dan sayuran, atau kelaparan.

Kelaparan, pemiskinan, dan kesengsaraan yang ditimbulkan kampanye perang Jepang membuat rakyat Indonesia sadar sepenuhnya bahwa Jepang bukanlah penyelamat dan bahwa mereka harus menentukan nasibnya sendiri setelah dilempar dari satu penguasa asing ke penguasa asing lainnya. Perlawanan terhadap kekuasaan Jepang sebenarnya sudah terjadi sejak akhir 1942 terutama di luar Jawa, misalnya pemberontakan petani yang dipimpin kaum ulama di Aceh, atau perlawanan kaum Tionghoa dan Dayak di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Semua

perlawanan ini ditumpas dengan kejam oleh pasukan Jepang namun hal itu tidak menghentikan usaha rakyat mempertahankan diri. Pemerintah berusaha mengendalikannya dengan mengorganisasikan para tokoh Muslim yang disegani rakyat pedesaan dan mendirikan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) di bawah pimpinan pendiri Nahdlatul Ulama K. H. Hasjim Asj'ari, tetapi para ulama justru menggunakan Masyumi untuk menguatkan rakyat.

Di Bali, para pemuda telah mengorganisasikan diri sejak Jepang masuk di sana. Pejuang-pejuang itu membangun jaringan bawah tanah dengan sistem sel di semua swapraja setelah mereka berhubungan dengan berbagai kelompok di Jawa dan bertukar informasi tentang situasi di daerah masing-masing.<sup>41</sup> Mereka mendirikan organisasi klandestin ESSTI (Eka Setia Stiti—kesetiaan tunggal kepada dharma, bangsa, tanah air dan Ida Sang Hyang Widhi Wasa) untuk menggalang pemuda-pemuda desa. Resminya, organisasi itu membantu Jepang menjaga kampung-kampung sebagai bagian sistem pertahanan negara. Dengan alasan tersebut mereka berlatih pencak silat dan perang-perangan. Ada pula organisasi ISSM (Ikatan Siswa Sekolah Menengah) yang membangun hubungan dengan kaum pejuang yang memiliki akses terhadap berita-berita internasional dari radio.<sup>42</sup> Mereka kemudian menyebarkan berita-berita tersebut lebih jauh terutama tentang kekalahan Jepang dalam peperangan melawan balatentara Sekutu, dan merencanakan untuk menumbangkan kekuasaan Jepang. Dengan hati-hati mereka juga menyusup ke Peta—Tentara Pembela Tanah Air yang dibentuk Jepang—untuk mendidik para prajuritnya tentang nasionalisme Indonesia. Bahkan ada yang berhasil menembus dinas polisi rahasia Jepang, yang terkenal amat kejam, Kempeitai, dan badan intelijen Yama Butai.<sup>43</sup>

Sejak awal 1944 posisi Jepang mulai terdesak di wilayah Pasifik karena gempuran tentara Amerika Serikat yang bertubi-tubi. Angkatan Laut Jepang mengalami kekalahan besar dalam pertempuran di Laut Filipina. Krisis yang paling serius adalah ketika basis AL Jepang di Saipan, Kepulauan Mariana, lepas. Amerika Serikat menggunakan kepulauan tersebut sebagai basis untuk menghujani

kota-kota penting di Jepang dengan bom. Perdana Menteri Tojo Hideki mundur setelah kekalahan itu dan digantikan oleh Jendral Kuniaki Koiso. Di Indonesia, pemerintah militer memutuskan untuk mengambil langkah-langkah lebih progresif untuk mengambil hati para pejuang dan rakyat Indonesia. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Koiso mengumumkan rencana memberi Indonesia kemerdekaan tetapi tidak ditentukan waktunya.

Akan tetapi, situasi makin mencemaskan pemerintah militer Jepang. Gerakan bawah terus berlangsung tanah terutama sejak terjadi pemberontakan tentara Peta di Blitar pada Februari 1945, yang diikuti pemberontakan lain yang berskala lebih kecil. Pemerintah berusaha membatasi kegiatan pemuda dengan represi atau kooptasi. Tetapi semakin jelas bahwa keinginan untuk merdeka mengalahkan ketakutan mereka akan pemerintah. Sukarno dengan kepiawaiannya berpidato juga terus membangkitkan semangat nasionalisme hingga ke desa-desa. Sementara itu, perkembangan perang Jepang melawan Sekutu di Samudra Pasifik tidak lebih baik. Pasukan AS dan Filipina terus mengepung pasukan AL Jepang di perairan Filipina. Desakan dari tokoh-tokoh nasionalis seperti Sukarno dan Hatta membuat Jepang sadar bahwa mereka tidak bisa menunda-nunda lagi kemerdekaan Indonesia.

### **MENDIRIKAN REPUBLIK (1945–46)**

Pemerintah militer Jepang yang diwakili komando AD Ke-16 dan Ke-25 akhirnya menyetujui pembentukan Badan Penyelidik Upaya-upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Junbii Chōsakai*) pada 1 Maret 1945.<sup>44</sup> Karena kedua komando itu berwenang atas daerah Jawa (termasuk Madura) dan Sumatera, BPUPKI dibentuk hanya untuk kedua wilayah tersebut, sedangkan di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai komando AL tidak dibentuk badan serupa. Lembaga sejenis BPUPKI juga didirikan di Sumatera dan dipimpin oleh Mohammad Sjafei tetapi hanya bertemu sekali dan tidak menghasilkan putusan yang penting.

Adalah BPUPKI di Jawa yang berperan penting dalam melahirkan dasar-dasar negara dan Undang-Undang Dasar, serta visi kebangsaan bagi negeri baru Indonesia. BPUPKI dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, dua orang wakil ketua, dan diikuti oleh 60 orang anggota yang seluruhnya datang dari Jawa dan Madura. Di antara anggota ada juga perwakilan orang Jepang dan golongan keturunan Tionghoa, Arab, dan Eropa. Pemerintah sengaja memilih tokoh-tokoh nasionalis tua untuk berperan besar dalam BPUPKI agar organisasi itu tidak dikendalikan oleh pemuda-pemuda radikal dari jaringan bawah tanah dan lebih mudah bagi pemerintah untuk bernegosiasi.<sup>45</sup>

Tokoh-tokoh nasionalis yang sudah bekerja sama dengan Jepang, seperti Sukarno dan Hatta, memang ingin Indonesia lekas merdeka. Mereka mengikuti berita tentang kekalahan demi kekalahan yang diderita Jepang akibat serangan gencar Sekutu. Seandainya Sekutu menang dan masuk Indonesia mereka tidak yakin tuntutan Indonesia untuk merdeka akan begitu saja dipenuhi. Dalam hitungan politik mereka jauh lebih mudah untuk menekan Jepang yang sedang dalam posisi tidak menguntungkan. Puncaknya, pada 6 dan 9 Agustus secara berturut-turut AS melepas bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Sekitar 120.000 orang tewas, sebagian besar rakyat sipil. Enam hari sesudahnya, pada 15 Agustus, Kaisar Hirohito menyatakan Jepang menyerah tanpa syarat.

Indonesia kembali terlempar ke pusaran sejarah yang tak terduga. Di antara dua pemboman yang mematikan itu Panglima AD Ekspedisi Selatan yang berkedudukan di Saigon (Vietnam), Marsekal Hisaichi Terauchi, memberi izin untuk pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI; *Dokuritsu Junbi Inkai*) pada 7 Agustus dengan ketua Sukarno dan wakil ketua Mohammad Hatta. Tugas panitia ini adalah melaksanakan kemerdekaan Indonesia, mempersiapkan peralihan kekuasaan dari pemerintah pendudukan Jepang kepada Indonesia, dan mengesahkan Rancangan UUD yang dibuat oleh BPUPKI sebelumnya. Pada 9 Agustus, Sukarno, Mohammad Hatta dan Radjiman Wedyodiningrat diundang Marsekal Terauchi ke tempat peristirahatannya di Dalat. Dalam sebuah

upacara sederhana Terauchi menyatakan bahwa pemerintah Kekaisaran Jepang memutuskan memberi kemerdekaan kepada Indonesia, dan PPKI yang menentukan sendiri kapan waktu yang tepat. Sukarno membayangkan 25 Agustus.

Sementara itu, Gunseikan (kepala pemerintahan militer) di Jakarta telah menunjuk 21 anggota PPKI, yang seluruhnya laki-laki dan separuh berasal dari Jawa. Tampaknya yang memilih para anggota itu adalah penguasa militer di tiga wilayah komando AD dan AL karena mereka yang terpilih rata-rata sudah berpengalaman bekerja dalam birokrasi pemerintahan kolonial dan Jepang. Tidak ada satu pun perwakilan dari organisasi pemuda. Jepang rupanya sudah membayangkan bahwa para anggota PPKI inilah yang nantinya akan menjalankan pemerintahan Indonesia merdeka dalam kerangka Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.<sup>46</sup> Pudja ditunjuk oleh pejabat Minseibu untuk mewakili Sunda Kecil dan diperintahkan berangkat ke Jakarta pada 14 Agustus. Kemungkinan ia diutus karena perannya yang penting sebagai penasihat pemerintah Jepang di *Syu Kaigi*.<sup>47</sup> Bahwa Pudja dan para anggota lainnya telah diperintahkan berangkat pada tanggal tertentu menunjukkan pemerintah Jepang sudah punya rencana tersendiri untuk segera mendorong kemerdekaan Indonesia setelah tanda-tanda kekalahan terhadap Sekutu semakin jelas.

Sekembali rombongan Soekarno dan Hatta dari Dalat pada 14 Agustus sejak dari lapangan terbang Kemayoran mereka telah disambut oleh pejabat Gunseikan, komandan AD Ke-16 Letnan Jendral Yūichirō Nagano, Laksamana Maeda, para anggota PPKI, dan rakyat yang meneriakkan "Indonesia Merdeka!" Sukarno sempat menyampaikan pernyataan pendek tentang hasil pertemuannya dengan Marsekal Terauchi, "Kalau dahulu saya berkata, sebelum jagung berbuah Indonesia akan merdeka, sekarang saya dapat memastikan Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga."<sup>48</sup>

Singkat cerita, setelah melalui perdebatan tentang waktu dan cara memproklamasikan kemerdekaan antara tokoh-tokoh senior dan kelompok pemuda, pada 17 Agustus 1945, pukul 10.00 pagi, bertempat di depan halaman rumahnya, Sukarno didampingi



Mohammad Hatta membacakan teks Proklamasi. Upacara sederhana tanpa protokoler itu dibuka dengan pembacaan Pembukaan UUD 1945, lalu Sukarno menyampaikan pidato pendek sebelum membacakan naskah Proklamasi yang ia tulis sendiri. Setelah itu Latief Hendraningrat, perwira Peta, mengerek bendera Merah Putih, yang dijahit Fatmawati Sukarno, dan hadirin menyanyikan *Indonesia Raya*.

Sesuai dengan janjinya, pemerintah Jepang tidak melakukan tindakan represif apa pun untuk mencegah kemerdekaan Indonesia walaupun secara resmi mereka menyatakan larangan. Sidang PPKI yang sudah lama direncanakan akhirnya berlangsung sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 18 Agustus. Panitia menambahkan enam orang anggota lagi tanpa sepengetahuan Jepang, yaitu Achmad Soebardjo, Iwa Kusumasumantri, Kasman Singodimedjo, Ki Hadjar Dewantara, R. A. A. Wiranatakusuma, dan Sajuti Melik.<sup>49</sup> Sukarno membuka sidang dengan pidato singkat, kemudian ia meminta Hatta menyampaikan beberapa perubahan mendasar dalam pembukaan dan batang tubuh UUD yang telah dirumuskan oleh BPUPKI dan Panitia Sembilan.<sup>50</sup> Sukarno membacakan Pembukaan UUD yang sudah diubah sesuai dengan usulan Hatta dan mengundang komentar dari para anggota. Di antara masukan baru yang dilontarkan ada usulan dari Ketut Pudja untuk mengganti kata 'Allah' dalam frasa awal paragraf ketiga, "atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa" dengan kata 'Tuhan' sehingga frasa itu berubah menjadi "atas berkat Rahmat Tuhan yang maha kuasa."<sup>51</sup> Rupanya Pudja sebagai penganut Hindu Bali mempertimbangkan aspirasi warga negara Indonesia yang tidak mengikuti tradisi agama-agama samawi untuk menyebut 'Tuhan' sebagai 'Allah'.<sup>52</sup>

Dalam sidang pertama tersebut Sukarno dan Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden. Mereka akan dibantu oleh sebuah komite nasional sementara belum dapat dibentuk dewan-dewan permusyawaratan dan perwakilan (MPR dan DPR) karena kondisi perang. Sukarno lalu membentuk Panitia Kecil yang diketuai Oto Iskandardinata dan beranggotakan sembilan orang, termasuk Pudja, untuk membicarakan program prioritas pemerintah, susunan

pemerintahan, serta kepolisian dan ketentaraan. Pada hari berikutnya, 19 Agustus, Oto Iskandardinata melaporkan hasil kerja mereka dan berdasarkan tanggapan dari anggota-anggota yang lain ditetapkan pembagian Indonesia menjadi delapan provinsi, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Pudja ditunjuk menjadi Gubernur Sunda Kecil dengan wilayah yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Walau Proklamasi telah diumumkan, proses pemindahan kekuasaan pada awal kemerdekaan mengandung kerumitan tersendiri. Intinya, pemerintahan baru masih rentan menghadapi kemungkinan ancaman sisa-sisa tentara Jepang dan Sekutu terhadap kedaulatan Republik sementara kekuatan bersenjata sendiri masih lemah. Suatu kenyataan pula bahwa belum semua pimpinan daerah menentukan sikap politik apakah mendukung Republik ataukah bekerja sama dengan pemerintah Belanda; kelompok politisi berbeda-beda aliran dan kepentingan berusaha mendesakkan gagasan masing-masing tentang bagaimana negara baru ini harus dijalankan, dan laskar-laskar pemuda, serta rakyat secara umum yang menafsirkan kemerdekaan sebagai kebebasan untuk melakukan apa saja terhadap pihak-pihak yang dianggap musuh.

Dalam pidato pertamanya sebagai presiden di stasiun Radio Suara Indonesia Merdeka<sup>53</sup> pada 23 Agustus 1945 Sukarno berulang kali menekankan pentingnya membangun negeri yang membawa semangat perdamaian bukan peperangan. Ia mengimbau agar rakyat bergabung dalam institusi-institusi yang baru didirikan, yaitu KNI, BKR, dan PNI, membangun persatuan antargolongan dan lapisan rakyat, dan bekerja sama “menyusun Indonesia Merdeka,” tanpa saling menuding dan menyalah-nyalahkan satu sama lain. Tampak dari pidato itu pemerintah mengajak rakyat untuk membangun kemampuan mengendalikan diri dan menjaga keamanan dan ketertiban umum demi pengakuan internasional atas keberadaan Republik Indonesia.<sup>54</sup>

## KEMBALI KE BALI

Di tengah situasi yang masih seragam, Pudja kembali ke Bali sebagai Gubernur Sunda Kecil dengan membawa mandat dari pemerintah pusat untuk menyebarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan RI dan membentuk pemerintahan Republik. Presiden Sukarno juga telah memberi mandat kepada Ida Bagus Putra Manuaba untuk menjadi Ketua KNI Sunda Kecil, yang akan membentuk komite-komite serupa sampai ke tingkat desa. Sejak awal dari sidang PPKI kepala-kepala daerah diberi kewenangan cukup besar untuk mengatur wilayah kekuasaannya tanpa bergantung pada petunjuk dari pusat karena jalur komunikasi yang terbatas.

Gubernur Pudja bergerak dengan sangat hati-hati karena ia menghadapi persoalan kurang-lebih serupa dengan yang dihadapi pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya yakni dualisme pemerintahan dan tak punya pasukan untuk menegakkan wewenang. Untungnya, kelompok-kelompok pemuda yang sudah mendengar berita tentang proklamasi kemerdekaan dan menunggu-nunggu kedatangannya langsung bersedia mendukung kepemimpinannya. Walaupun ia tidak pernah bergaul dengan para pimpinan organisasi-organisasi pemuda di Bali, tak ada yang mempersoalkan posisinya sebagai pegawai kolonial Belanda dan pejabat semasa pendudukan Jepang. Mungkin karena di kalangan pemuda cukup banyak yang bekerja untuk institusi-institusi buatan pemerintah Jepang dan pada saat yang sama bergerak di bawah tanah sehingga bagi mereka apapun jabatan Pudja sebelumnya, selama ia tidak merugikan masyarakat dan mewakili pemerintahan Republik, ia patut didukung sepenuhnya.<sup>55</sup>

Gubernur Pudja dan Manuaba segera membentuk KNI untuk Sunda Kecil yang beranggotakan 17 orang, masing-masing dua wakil dari 8 swapraja, dan seorang mewakili pulau-pulau Nusa Penida dan Jungul Batu. KNI membentuk badan pekerja yang terdiri dari Ida Bagus Putra Manuaba sendiri, I Gusti Bagus Oka, dan Dr. Mohamad Angsar Kartakusuma.<sup>56</sup> Mereka juga mengunjungi raja-raja penguasa

swapraja untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan, pembentukan pemerintahan provinsi Sunda Kecil, dan meminta dukungan dari para raja. Selain itu mereka mengadakan pembicaraan dengan kepala-kepala bagian yang bekerja di pemerintahan sejak sebelum proklamasi. Pada dasarnya mereka semua mendukung pemerintahan Sukarno-Hatta tetapi mereka ingin mendapat kejelasan tentang posisi penguasa militer Jepang di Bali. Pertanyaannya, seandainya kebijakan pemerintah provinsi dan penguasa militer bertentangan, mereka harus mengikuti perintah siapa. Sedangkan, persoalan pokok bagi para raja adalah status mereka sebagai penguasa swapraja yang sejak zaman pemerintahan Belanda memiliki otonomi untuk mengelola wilayah mereka masing-masing. Bagaimanakah status mereka pada masa kemerdekaan? Baik Pudja maupun Manuaba tidak dapat memberi jawaban yang pasti untuk dua pertanyaan pokok tersebut.

Maka, diutuslah Manuaba dan seorang anggota KNI ke Jakarta untuk berkonsultasi dengan pemerintah pusat pada 24 September 1945. Ternyata pihak pemerintah pusat pun tak punya jawaban atas soal-soal tersebut. Mereka tidak memberikan pedoman umum penataan administrasi pemerintah daerah di masa transisi, dan menyerahkan wewenang penuh kepada Gubernur untuk mencari jalan penyelesaian sendiri. Ketut Pudja dan Manuaba kembali membicarakan persoalan itu dengan para raja dan pejabat pemerintah daerah. Hasil dari pembicaraan adalah Gubernur Pudja harus mengajukan tuntutan resmi kepada penguasa militer Jepang, *Minseibu Chōkan*, hal-hal sebagai berikut.

1. Mengganti bendera Jepang Hinomaru yang masih dikibarkan di kantor-kantor pemerintah dengan bendera Indonesia Sang Merah Putih;
2. Mengganti pemakaian waktu Jepang yang disesuaikan dengan Tokyo dengan waktu Indonesia;
3. Menghapus jam malam dan perintah penggelapan yang menjadi ciri suasana peperangan dan menciptakan suasana kemerdekaan yang aman dan damai;

4. Mengganti para pimpinan dan pekerja berkebangsaan Jepang di jawatan-jawatan pemerintah dengan tenaga kerja bangsa Indonesia.<sup>57</sup>

Tuntutan pertama sesuai dengan Maklumat Pemerintah pada 31 Agustus tentang perintah pengibaran bendera nasional Sang Merah Putih mulai 1 September 1945, seperti halnya mengucapkan salam 'Merdeka!' dengan mengangkat tangan setiap kali bertemu dengan sesama bangsa Indonesia.<sup>58</sup> Pengibaran bendera Sang Merah Putih menjadi semacam pertanda apakah satu wilayah sudah mengakui keberadaan Republik Indonesia atau belum. Dari catatan seorang 'propagandis' pendukung Sukarno, Soekardani, didapat kesan umum tentang dukungan terhadap pemerintah Sukarno-Hatta di Bali. Ia menggambarkan bahwa sampai akhir September 1945 hanya satu swapraja yang dengan semangat mengibarkan Sang Merah Putih, yaitu Jembrana di ujung barat Bali, karena putra sang raja, Anak Agung Bagus Suteja, aktif dalam pergerakan pemuda. Di dua kota utama, Singaraja (Buleleng) dan Denpasar (Badung), Sang Merah Putih tidak banyak berkibar walaupun raja-rajanya mendukung Republik karena para pimpinan Dai Nippon berkantor di kedua kota tersebut. Sementara itu di swapraja Gianyar dan Klungkung tak ada sama sekali pengibaran Sang Merah Putih karena raja Gianyar saat itu mengatakan belum menerima instruksi dari *Minseibu Chōkan* ataupun Gubernur Pudja.<sup>59</sup>

Apa yang diamati Soekardani kurang lebih menggambarkan dengan tepat keadaan di Bali. Penguasa Dai Nippon menolak semua tuntutan Gubernur Pudja. Mereka memegang teguh perintah dari Tokyo agar menjaga *status quo* hingga utusan Sekutu tiba di Bali untuk menerima penyerahan Jepang secara resmi. Dengan penolakan itu beberapa raja di Bali memang menjadi ragu-ragu untuk mengambil sikap politik tertentu. Berbeda dengan para raja di Yogyakarta dan Surakarta yang langsung memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Sukarno-Hatta. Gubernur Pudja sendiri menyadari kepelikan soal yang ia hadapi. Ia mengatakan kepada Soekardani bahwa Bali diumpamakan sebuah dokar, kusirnya adalah

Tuan Pudja, kuda-kudanya adalah raja-raja, penumpangnya adalah rakyat. Rakyat sangat patuh kepada raja-rajanya.<sup>60</sup>

Melihat kenyataan bahwa tidak semua penguasa swapraja dengan suka rela mendukung pemerintah Republik, Pudja dan Manuaba memutuskan untuk berkeliling Bali dan menggalang dukungan dari masyarakat. Rupanya mereka mengikuti apa yang disampaikan Sukarno dalam pidatonya saat membuka konferensi pangreh praja se-Jawa dan Madura bahwa dalam kondisi *dubbel-regeering* (pemerintahan ganda), diplomasi internasional saja tidak cukup. Diplomasi harus dilandasi oleh “suatu tenaga kekuatan” yang dibangun dari kemauan kolektif rakyat, yaitu kemauan untuk merasa dirinya merdeka dan tuntutan agar mereka tetap merdeka. KNI menjadi kendaraan utama bagi pembangunan tenaga kekuatan rakyat serupa ini sampai ke tingkat desa.<sup>61</sup>

Kekuatan utama yang membantu jalannya roda pemerintahan Gubernur Pudja dalam situasi vakum kekuasaan itu adalah kelompok pemuda yang bermunculan di berbagai penjuru Bali. Organisasi pemuda terbesar saat itu, Angkatan Muda Indonesia (AMI), didirikan oleh I Gusti Ngurah Sindhu (Denpasar) dan Tjokorda Sudarsana (Singaraja) untuk menampung pelajar dan pemuda yang sebelumnya tergabung dalam ISSM dan ESSTI dan mantan prajurit Prayoda, Kaigun Heiho, dan Peta. Para pemuda menjadi juru penerangan untuk menjelaskan kepada rakyat yang masih kebingungan dengan apa itu arti kemerdekaan dan membangkitkan semangat mereka untuk membela Republik dengan pidato-pidato dan aksi corat-coret slogan kemerdekaan di tembok-tembok bangunan. Walaupun tidak memiliki senjata, mereka segera membentuk organisasi pertahanan untuk mengawasi jalan masuk Bali dari pantai-pantai di Sanur, Singaraja, dan Gilimanuk, mengawasi gerak-gerik prajurit Jepang yang masih berpatroli di jalan-jalan, atau berlatih perang-perangan dengan senjata tajam semisal belati, parang, atau kampak. Mereka juga sibuk mengadakan rapat dan diskusi tentang langkah-langkah persiapan untuk membangun pertahanan wilayah. Selain itu, di antara mereka ada yang diutus untuk ke Jawa dan mencari informasi

dari kelompok-kelompok pemuda tentang strategi pembelaan kemerdekaan negeri.<sup>62</sup>

Kerja sama antara pemerintah Pudja-Manuaba dan pemuda menghasilkan perluasan basis-basis Republik yang militan di sejumlah swapraja, terutama di Badung, Buleleng, Jembranan, dan Tabanan. Pada saat yang sama sudah terbentuk pula BKR di Singaraja yang dipimpin oleh Daidanco I Made Putu dan di Denpasar oleh I Nyoman Pegeg pada 31 Agustus.<sup>63</sup> Untuk wilayah yang oleh pemerintah Belanda demikian dijaga agar tak tersentuh politik cukup mengagumkan bahwa pemuda-pemuda Bali sedemikian bersemangat membela proklamasi kemerdekaan. Persoalannya senjata yang mereka miliki sangat terbatas dan mereka berusaha mencari cara untuk memperoleh senjata dari pihak penguasa Jepang, secara resmi ataupun secara paksa.

Seperti tergambarkan sedikit dalam catatan Soekardani, ganjalan utama dalam pendirian pemerintah Republik adalah kecilnya dukungan para raja dan bangsawan dari puri-puri yang berpengaruh di Bali. Bagaimanapun terbatasnya kekuasaan mereka pada zaman kolonial ataupun pendudukan, mereka tetap memiliki kemampuan menggalang kekuatan rakyat untuk bergerak. Dalam beberapa hal keragu-raguan penguasa-penguasa puri untuk mendukung pemerintah Sukarno-Hatta muncul karena mereka tidak tahu pasti apakah pemerintah Republik baru ini akan menguntungkan mereka secara politik dan ekonomi atau tidak. Sejak zaman prakolonial persaingan antarpuri untuk menguasai suatu wilayah memang sangat kuat dan mudah berujung pada peperangan. Adalah intervensi militer Belanda yang mengakhiri pertikaian tersebut. Pemerintah kolonial, demikian pula pemerintah Dai Nippon, menetapkan penguasa-penguasa puri yang mendukung mereka sebagai raja, dan menendang mereka yang menentang. Pada zaman revolusi kemerdekaan, puri-puri yang menjadi basis kekuatan Republik terbesar, kecuali di Jembrana, kebanyakan adalah puri-puri pesaing puri raja, seperti Puri Satria di Badung dan puri-puri di Tabanan. Puri Sukasada, rumah asal Ketut Pudja, termasuk pendukung kuat Republik dan gerakan pemuda. Keterbukaan kota-

kota pelabuhan utama, seperti Buleleng, Denpasar, dan Negara juga membuat puri-puri tertentu lebih mudah berhubungan dengan politisi dari Jawa dan belajar tentang ideologi baru.<sup>64</sup>

Keterbatasan alat komunikasi dan transportasi membuat Gubernur Pudja dan Manuaba kesulitan menjangkau tokoh-tokoh yang tinggal di pulau-pulau lain dalam lingkup Sunda Kecil untuk segera mengabarkan tentang proklamasi kemerdekaan, pembentukan provinsi baru, dan pendirian KNI. Kerumitan persoalan di Bali tampaknya juga menunda pelaksanaan kegiatan mereka di luar Bali. Pada awal pemerintahannya, Gubernur Pudja hanya sempat mengirim utusan dari Singaraja untuk menemui penguasa swapraja Bima-Dompu, Sultan Muhammad Salahuddin, guna memperoleh dukungan darinya.<sup>65</sup> Namun, kesigapan para pejuang muda di Jawa, Bali, Lombok, dan Sumbawa, menyebarkan berita proklamasi ke seantero Sunda Kecil menyulut semangat rakyat untuk bergerak. Di Bali para aktivis pelajar ISSM yang giat berkampanye ke seluruh Bali hingga Lombok. Di Sumbawa berita datang bersama dengan aktivis asal Sumbawa yang pergi ke Jawa, seperti Ishak Abdullah, Saleh Amin, dan M. Tayib.

Yang menarik, di Kupang (Timor) justru penguasa Jepang setempat yang berinisiatif mengakui pemerintah Republik dan menyerahkan kekuasaannya kepada pejuang-pejuang lokal, Dr. A. Gabeler, Tom Pello, dan I. H. Doko.<sup>66</sup> Komandan Kedua Jepang di Kupang juga memberitahu Raja Amarasi, H. A. Koroh, bahwa tentara Jepang telah “memberikan kemerdekaan kepada Indonesia.”<sup>67</sup> Sementara itu, di Mataram penguasa Jepang bersikap membingungkan. Di satu sisi mereka berusaha keras menyembunyikan berita tentang kekalahan Jepang dan proklamasi, di lain sisi mereka dengan suka rela mengganti bendera Hinomaru dengan Sang Merah Putih.<sup>68</sup>

Perkembangan di Lombok dan Sumbawa cukup pesat dan menggembirakan. Segera setelah para pejuang menyiarkan berita tentang proklamasi mereka mendirikan KNI di Bima dan di Sumbawa pada 17 September 1945. Ishak Abdullah, Saleh Amin, dan M. Tayib menjadi pimpinan KNI cabang Bima dan langsung merancang



rencana untuk merebut senjata dari Jepang dan menggerakkan mesin-mesin propaganda untuk mengobarkan semangat membela kemerdekaan di kalangan rakyat. Penguasa militer di Sumbawa tampaknya cemas dengan perkembangan ini dan mendorong perpecahan di kalangan pendukung Republik. Mereka membantu TKR yang dipimpin oleh putra Sultan Bima untuk menangkap ketiga pimpinan KNI tersebut dan membiarkan pimpinan baru KNI yang dipilih pihak kesultanan. Pihak Jepang di Lombok, sebaliknya, secara resmi menyatakan penyerahannya pada 27 September 1945 dan secara suka rela mengganti bendera Hinomaru dengan Sang Merah Putih. Mereka juga membebaskan 29 tahanan politik yang dikirim ke Surabaya setelah pernyataan kekalahan Jepang. Di antara para tahanan itu ada yang membawa berita tentang situasi politik di Jawa dan petunjuk pelaksanaan perjuangan.<sup>69</sup>

Upaya meraih dukungan dari swapraja dan pendirian KNI di Sumba, Timor dan Flores lebih sulit karena pasukan Australia yang mewakili Sekutu telah masuk ke wilayah tersebut sejak akhir Agustus. Tugas utama pasukan Australia di Indonesia Timur secara umum adalah menjaga keamanan dan ketertiban bersama dengan pasukan Jepang sampai badan administrasi pemerintah Belanda siap berfungsi secara normal kembali. Mereka harus bersikap imparial dan menghindari konflik dengan para pimpinan dan pendukung 'Gerakan Indonesia Merdeka'. Pada saat yang sama mereka harus mencegah agar tidak ada kegiatan politik yang memancing aksi massa, seperti pawai dan demonstrasi, untuk mendukung Republik.<sup>70</sup> Di Sumba, raja-raja di 16 swapraja berniat menyatakan dukungan mereka ke pemerintah Republik tetapi sudah didahului pendudukan pasukan Australia sejak 27 Agustus 1945. Ketika beberapa pemuda mantan Heiho berusaha mengibarkan Sang Merah Putih, mereka ditangkap dan dikirim ke Jawa.<sup>71</sup> Kegagalan menyatakan dukungan juga terjadi dengan para raja dari sembilan swapraja di Flores. Sedangkan di Timor para pejuang yang sudah membentuk Partai Demokrasi Indonesia untuk bekerja menguatkan Republik Indonesia tidak dapat melanjutkan perjuangannya dan dituduh sebagai kolaborator Jepang oleh pejabat-pejabat NICA yang datang dikawal

pasukan Australia pada 11 September 1945 untuk menjalankan kembali pemerintahan ala kolonial.<sup>72</sup>

Di tengah upaya Gubernur Pudja dan Manuaba mengonsolidasikan berbagai kekuatan di Bali untuk membentuk pemerintah Republik terjadi konflik antara kelompok pemuda dengan Raja Klungkung Dewa Agung Oka Geg. Sekelompok pemuda yang tidak sabar melihat kantor Kerajaan Klungkung masih mengibarkan bendera Hinomaru memutuskan untuk menurunkan bendera itu dan menggantinya dengan Sang Merah Putih. Raja Klungkung marah besar karena merasa dipermalukan. Ia menduga bahwa gerombolan pemuda itu adalah utusan Raja Badung yang berniat menaklukkan Klungkung. Ia juga menafsirkan pemaksaan pengibaran Sang Merah Putih sebagai niat pemerintah Sukarno-Hatta yang memimpin Jawa dan mewakili kekuatan Islam untuk menjajah Bali. Prasangka yang sebagian berasal dari sejarah konflik antar-kerajaan pada abad ke-18 itu kemudian meluas kepada raja-raja yang lain di Bangli, Gianyar, dan Karangasem, dan semakin menyulitkan pemerintahan Pudja. Pimpinan gerakan pemuda, seperti I Gusti Ngurah Rai dan I Made Wija Kusuma, membicarakan krisis itu dan memutuskan sowan kepada para raja untuk mengurangi ketegangan antara raja-raja dan kelompok pemuda revolusioner. Mereka menekankan kepada para pemuda bahwa yang penting dalam tahap revolusi saat itu adalah mencapai kesepakatan posisi promerdeka, bukan antiraja<sup>73</sup>.

Selain mendekati para raja di wilayah timur, pimpinan pemuda mencoba jalan lain untuk mengambil hati rakyat di wilayah swapraja yang cenderung anti-Republik. Wilayah timur Bali, terutama Karangasem dan Klungkung, adalah daerah minus karena kondisi tanahnya yang kurang subur. Masyarakatnya sering kali kekurangan beras sehingga harus makan nasi dicampur jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Para pemuda melihat kesempatan untuk membantu masyarakat di wilayah timur dengan mengirim beras dari Badung. Mereka merebut bercikar-cikar padi dan beras dari gudang balatentara Jepang dan mengirimkannya ke desa-desa di Gianyar, Klungkung, Karangasem untuk dibagi-bagikan

kepada rakyat. Kampanye parade beras ke timur itu seharusnya berhasil melunakkan hati para raja.<sup>74</sup> Apa lacur, pada 20 September 1945 sekelompok pemuda menculik Raja Gianyar Anak Agung Gde Agung, konon atas perintah petinggi Puri Peliatan dan Puri Ubud, yang notabene adalah puri-puri pesaing Puri Agung Gianyar sebagai pemegang tahta. I Gusti Ngurah Rai lalu memerintahkan para pemuda untuk membebaskan Gde Agung. Tak lama berselang, Gde Agung kembali menjadi sasaran penculikan para pemuda. Tetapi ia berhasil lolos. Perseteruan antara Gde Agung dan pemuda semakin menajam dan kelak berujung pada sikap anti-Republik yang terbuka dan menentukan perjalanan negeri baru ini<sup>75</sup>.

Pada 1 Oktober 1945, berita tentang pengakuan atas Republik Indonesia dari Uni Soviet, Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok tersiar di radio setempat. Kelompok pelajar dan pemuda menyambutnya dengan kegembiraan luar biasa dan mengadakan pawai keliling kota untuk merayakannya.<sup>76</sup> Mereka melihat perkembangan itu sebagai kesempatan bagi pemerintahan Gubernur Pudja untuk mendesak pejabat lokal Dai Nippon menyerahkan kekuasaannya. Saat itu Gubernur Pudja dan Manuaba baru kembali dari perjalanan keliling Bali untuk mengabarkan tentang proklamasi dan mendirikan KNI di daerah-daerah swapraja. Dengan diwakili Ketua BKR, I Made Putu, kelompok pemuda mendorong Gubernur untuk mendesak penguasa Jepang dengan ultimatum bahwa jika mereka tidak segera menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Republik akan terjadi pemogokan para pegawai pemerintah dan kerusuhan yang tak terkendali. Gubernur Pudja sepakat dengan usulan pemuda. Pada 6 Oktober, dengan dikawal massa pemuda dan didampingi semua kepala kantor jawatan pemerintahan, Gubernur Pudja mendatangi kediaman *Minseibu Chōkan* di Singaraja dan menyampaikan ultimatum yang sudah dibicarakan. Awalnya pihak Chōkan meminta waktu lima hari untuk mempertimbangkannya. Tetapi melihat besarnya semangat dan dukungan yang diperlihatkan massa di belakang Gubernur, mereka bersedia melakukan penyerahan kekuasaan dalam waktu dua hari.<sup>77</sup>

Dua hari kemudian Gubernur Pudja datang kembali ke kediaman *Minseibu Chōkan* dengan diiringi demonstrasi massa yang lebih besar. Kelompok pemuda bersama rakyat berbaris secara teratur, mengibarkan bendera Merah Putih, dan meneriakkan 'Merdeka!' berulang kali, diselingi dengan lagu-lagu perjuangan. Di antara pemuda ada yang membawa bambu runcing dan senjata tajam berbagai bentuk. Rupanya kepungan massa yang demikian besar dan riuh cukup mencemaskan para pembesar militer Jepang yang menerima Gubernur. *Chōkan* segera melaksanakan upacara penyerahan kekuasaan kepada Gubernur Pudja. Pada 10 Oktober, Gubernur dan para pejabat pemerintah lainnya mengadakan rapat dengan raja-raja di Bali untuk menyampaikan kabar tentang proses serah terima dari penguasa militer Jepang kepada pemerintah Republik. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa para raja akan bekerja sama dengan KNI di setiap daerah untuk mengelola administrasi pemerintahan di swapraja masing-masing, dan mereka bertanggung jawab kepada Gubernur Pudja.<sup>78</sup>

Setelah penegasan status kepemimpinan sipil menjadi lebih jelas, Gubernur Pudja mengirim utusan, Hilan Tedjokusumo, ke Lombok, Sumbawa, dan Bima-Dompu, untuk membentuk KNI di kedua daerah tersebut. Para pejuang di Lombok tampaknya sudah mempersiapkan segalanya karena dengan segera terbentuk KNI di daerah-daerah Lombok Tengah dan Lombok Timur, yang diikuti dengan pembentukan BKR, BBI (Barisan Buruh Indonesia), dan API (Angkatan Pemuda Indonesia). Organisasi-organisasi itu kemudian menuntut penguasa militer Jepang setempat untuk menyerahkan kekuasaan kepada tokoh-tokoh pejuang Lombok yang berkomitmen kepada Republik, seperti Raden Nuna Nuraksa dan Mamik Padelah. Penguasa Jepang melaksanakan tuntutan tersebut dalam sebuah upacara yang disertai dengan pengibaran Sang Merah Putih di Gedung Mardi Bekso Mataram pada 15 Oktober 1945. Di Sumbawa dan Bima-Dompu KNI sudah didirikan dan dikelola oleh sultan masing-masing daerah, Sultan M. Kaharuddin dan Sultan M. Salahuddin.

Antusiasme dan dukungan rakyat di wilayah tersebut terhadap RI luar biasa besar. Mereka berduyun-duyun menghadiri rapat umum dalam rangka proklamasi kemerdekaan, mengibarkan Sang Merah Putih di mana-mana, dan mempelajari lagu *Indonesia Raya* di sekolah-sekolah.<sup>79</sup> Selang tiga minggu kemudian Sultan Salahuddin secara terbuka mengeluarkan maklumat yang berisi dukungan penuh terhadap pemerintah RI dan menyatakan daerah Bima-Dompu sebagai bagian tak terpisahkan dari RI.<sup>80</sup>

Sekilas kedudukan Gubernur Pudja tampak menguat dengan dukungan yang meluas pada sebagian besar wilayah Sunda Kecil. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa pemerintahannya tetap tidak memiliki kekuasaan militer. Hingga akhir 1945 masih terdapat sekitar 3.000 tentara Jepang di Bali dan mereka menguasai gudang-gudang persenjataan. Untungnya, kebanyakan tentara Jepang bersikap siaga saja dan berusaha tidak terlibat dalam upaya pengamanan masyarakat, misalnya saat terjadi serangan balas dendam terhadap orang-orang yang dianggap menindas rakyat selama masa pendudukan Jepang. Mungkin mereka khawatir tindakannya justru akan memprovokasi kerusuhan yang lebih besar. Beberapa dari mereka yang bersimpati dengan kemerdekaan RI membiarkan sejumlah senjata dicuri oleh kelompok pemuda. Ancaman yang lebih besar tetap kehadiran balatentara Sekutu di sebagian wilayah Indonesia. Di Indonesia Timur hanya Bali, Lombok, dan Sumbawa yang belum dikuasai.

Baik pasukan Australia maupun pasukan Inggris berusaha menghindari konfrontasi dengan kekuatan Republik terutama yang bersenjata. Petinggi militer Inggris bahkan segera menyadari bahwa informasi intelijen yang mereka peroleh dari pihak militer Belanda tentang kemerdekaan Indonesia sebagai semata-mata ciptaan militer Jepang salah belaka. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana semangat rakyat Indonesia demikian bergelora mendukung proklamasi kemerdekaan.<sup>81</sup> Pernyataan Belanda bahwa Sukarno dan Hatta adalah boneka-boneka Jepang yang tidak dipercaya rakyat juga sama tidak benar. Pengaruh kedua pemimpin itu, Sukarno terutama, amatlah besar, dan dalam batas-batas tertentu ia memiliki

kewibawaan untuk menenangkan rakyat, seperti yang ia perlihatkan saat ratusan ribu rakyat memadati Lapangan Ikada pada 19 September 1945 untuk memperingati satu bulan Proklamasi Kemerdekaan. Komandan pasukan Inggris Christison secara khusus mengatakan bahwa pasukan Inggris tidak akan ikut campur dalam persoalan Indonesia dan Belanda dan meminta agar para pimpinan RI menyambut dirinya dan pasukannya sebagai tamu.<sup>82</sup> Presiden Sukarno sendiri meminta rakyat Indonesia agar tidak mengganggu pasukan Inggris yang sedang menjalankan tugasnya.<sup>83</sup>

Masalahnya, pasukan Inggris tidak datang sendirian melainkan membawa serta pasukan Belanda, sekaligus dengan perangkat administrasi sipilnya, NICA. Kehadiran personel militer dan sipil Belanda itu segera menimbulkan ketegangan di kota-kota di Indonesia. Pihak Belanda yang merasa berhak menguasai Indonesia kembali mulai melakukan provokasi dan menimbulkan konflik dengan kelompok-kelompok pemuda. Balatentara Jepang yang sejak proklamasi hanya berjaga-jaga dan menghindari konflik, begitu pasukan Sekutu mendarat, merasa harus menegakkan disiplin kembali dan menunjukkan kepada Sekutu bahwa mereka sudah melaksanakan tugas sesuai dengan syarat-syarat perjanjian penyerahan. Pernyataan Panglima Balatentara Jepang di Jawa bahwa pemerintahan akan diserahkan kepada Sekutu, bukan kepada Indonesia, semakin memperburuk keadaan.<sup>84</sup> Para pemuda yang bergabung dengan BKR atau laskar-laskar independen melihat kebutuhan akan persenjataan semakin mendesak untuk mempertahankan kemerdekaan dan mulai menyerang markas-markas militer Jepang untuk merebut senjata. Pernyataan wakil pemerintah Belanda, H. J. van Mook pada 15 Oktober 1945, bahwa tidak akan ada penjajahan kembali, tetapi penataan Indonesia sebagai bagian dari persemakmuran Kerajaan Belanda- Raya, seperti Suriname dan Curacao, hanya mendorong ketegangan hubungan Indonesia-Belanda.<sup>85</sup>

Bali bukanlah wilayah prioritas bagi pasukan Inggris yang datang dengan kekuatan terbatas. Konsentrasi pasukan Inggris adalah merepatriasi sekitar 73.000 tentara Jepang dan membebaskan

seratus ribuan tawanan perang berkebangsaan Eropa yang masih disekap di kamp-kamp interniran di kota-kota dekat Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Mereka berpikir tugas ini tidak akan berat dan dapat dilakukan dengan kerja sama dengan pemerintah Indonesia, seperti operasi mereka di Tanah Melayu dan Birma.<sup>86</sup> Namun, kaum republikan di Bali tidak dapat tinggal diam ketika pihak Belanda justru yang mulai mengganggu keamanan daerah mereka. Pada akhir Oktober sebuah kapal dagang Belanda, 'Abraham Crijnsen', merapat ke Pelabuhan Buleleng tanpa izin.<sup>87</sup> Sejumlah awak kapal bersenjata masuk kota, merampok bahan makanan, menurunkan dan merobek-robek bendera Merah Putih, dan menggantinya dengan bendera Belanda. Kelompok pemuda yang berjaga-jaga di pelabuhan tidak mampu melawan mereka karena tidak bersenjata, tetapi mereka dengan berani menurunkan bendera Belanda dan menaikkan kembali bendera Indonesia. Pertikaian berakhir dengan penembakan terhadap salah satu pemuda, I Ketut Merta, dari Banjar Liligundi, oleh awak kapal Belanda hingga tewas.<sup>88</sup>

Aksi provokasi Belanda ini membuat pimpinan BKR dan organisasi-organisasi pemuda memutuskan untuk mengonsolidasi kekuatan mereka di bawah satu komando militer, Tentara Keamanan Rakyat (TKR), seperti telah diamanatkan pemerintah pusat melalui Maklumat Pemerintah Republik Indonesia 5 Oktober 1945. Pada 1 November 1945 diadakan rapat bersama yang dipimpin Gubernur Pudja dan dihadiri Ketua KNI Manuaba, para raja, dan pimpinan badan-badan perjuangan di Kantor Gubernur Sunda Kecil di Singaraja untuk meresmikan TKR.<sup>89</sup> Sebagai pimpinan dipilih I Gusti Ngurah Rai, seorang bangsawan dari Puri Carangsari, Badung, yang berpengalaman sebagai anggota Prayoda dan berjuang di bawah tanah pada masa Jepang. Pembentukan TKR ini dilaporkan ke Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin, yang kemudian mengutus dua opsir penghubung untuk membantu penegakan unit-unit TKR Resimen Sunda Kecil hingga ke desa-desa. Untuk memperkuat TKR, pimpinan pemuda mereorganisasi AMI menjadi Pemuda Republik Indonesia di Denpasar di bawah pimpinan I Made Wija Kusuma, dan Pesindo di Singaraja di bawah pimpinan I Gde Puger.<sup>90</sup>

Reorganisasi pemuda tersebut sedikit-banyak mengikuti perkembangan pengorganisasian pemuda di Jawa setelah terjadi kongres pemuda di Yogyakarta pada 10–11 November 1945. Pejabat-pejabat republik yang dekat dengan pemuda, Amir Sjarifuddin dan Sutan Sjahrir, melihat kebutuhan mendesak untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih kohesif dan sentralistik setelah struktur pemerintahan militer Jepang runtuh. Puluhan ribu pemuda bergerak dalam ratusan laskar atau organisasi yang bertumbuhan di seluruh Indonesia. Mereka menyerbu markas-markas militer Jepang, berusaha merebut senjata, dan dengan gagah berani melawan tentara Sekutu. TKR tidak dapat menampung kelimpahan tenaga sebanyak itu karena kebutuhannya sendiri mengkonsolidasikan personel dan kesatuan-kesatuan dari badan-badan militer yang dibentuk Belanda sebelum Perang Dunia II, seperti KNIL dan Prayoda, dan Peta atau Heiho pada masa Jepang. Mereka khawatir kekuatan revolusioner itu justru akan mengganggu upaya pemerintah berunding dengan pemerintah Belanda untuk penyelesaian soal otoritas kenegaraan apabila tidak segera ditata dan dikendalikan dengan struktur komando yang jelas.<sup>91</sup>

Keputusan pemerintah untuk mengukuhkan badan militer negara dan laskar-laskar independen ternyata tepat waktu. Pada 10 November 1945, perlawanan pemuda dan rakyat terhadap kedatangan Sekutu mencapai puncaknya dalam pertempuran besar di Surabaya yang dipicu oleh tewasnya perwira tinggi Inggris, Brigjen. A. W. S. Mallaby. Pihak Sekutu melihat bahwa Indonesia tidak main-main dalam mempertahankan kemerdekaannya. Namun, setelah Perang Dunia II mereka tidak berminat mengerahkan pasukan lebih besar untuk menghancurkan perlawanan Indonesia. Mereka mendesak Belanda untuk melakukan perundingan damai.<sup>92</sup> Berbagai peristiwa selanjutnya memperlihatkan bahwa Belanda tidak bersedia begitu saja melepaskan Indonesia. Di Bali konsolidasi kekuatan militer pro-Republik malah menimbulkan kecemasan di kalangan raja-raja yang sejak awal ragu-ragu mendukung Republik. Masing-masing membentuk pasukan milisi bersenjata sendiri, dan dengan alasan menjaga keamanan wilayah swapraja di bawah



kekuasaannya, menghadang pergerakan laskar-laskar pemuda Republik di daerah mereka. Raja Klungkung pertama kali membentuk Badan Keamanan Negara (BKN), diikuti oleh raja Gianyar dengan Pemuda Pembela Negara (PPN), dan terakhir raja Karangasem dengan Anti Indonesia Merdeka (AIM).<sup>93</sup> Tampaknya raja-raja itu khawatir kekuatan pemuda pro-Republik akan menjadi semakin radikal dan melancarkan revolusi sosial seperti di Keresidenan Pekalongan dan Sumatra Timur.<sup>94</sup>

Salah satu langkah awal TKR untuk memperkokoh kekuatannya adalah meminta petinggi militer Jepang di Bali untuk menyerahkan persenjataan mereka. Permohonan itu ditolak.<sup>95</sup> Lebih dari itu, pihak Jepang berubah sikap dari sekadar berjaga-jaga menjadi siap menyerang. Mereka menagih kembali tangsi-tangsi Jepang yang oleh Gubernur Pudja diputuskan untuk digunakan sebagai markas BKR. Mereka juga mempertanyakan dana sebesar dua juta rupiah yang telah diserahkan ke pemerintah provinsi saat pemindahan kekuasaan dari *Minseibu Chōkan* kepada Gubernur Pudja. Hal itu membuat pimpinan TKR, PRI, dan Pesindo sadar bahwa sebagai kekuatan pengamanan rakyat mereka harus bertindak keras terhadap tentara Jepang yang sudah kalah perang itu. Mereka merencanakan akan melucuti pasukan Jepang secara paksa, tetapi mereka tahu bahwa aksi serupa ini tidak akan didukung oleh pemerintah Republik karena akan mengganggu strategi diplomasi internasional. Maka, diputuskan bahwa yang akan memimpin penyerbuan ke tangsi-tangsi Jepang secara serentak di seluruh Bali adalah laskar-laskar PRI dan Pesindo. Sedangkan, pasukan TKR akan melebur di dalamnya. Menjelang tengah malam pada 13 Desember 1945 laskar-laskar pemuda yang bergabung dengan rakyat bergerak mendekati tangsi-tangsi Jepang. Namun, sebelum berhasil mendekat, mereka disambut tembakan gencar ke udara dan sekitar markas-markas militer telah dijaga ketat oleh tentara-tentara dengan bayonet terhunus. Ternyata rencana itu bocor dan laskar-laskar pemuda tidak berhasil memperoleh sepucuk senjata pun.<sup>96</sup>

Kegagalan operasi militer pemuda tersebut menandai melemahnya pemerintahan Pudja dan terdesaknya kekuatan laskar-

laskar independen keluar dari wilayah perkotaan, terutama di Denpasar dan Singaraja. Penguasa militer Jepang menangkap Gubernur Pudja, Ketua KNI Manuaba, dan pimpinan unit-unit TKR di Singaraja, I Made Putu, dan kawan-kawan, dan menyekap mereka di Bali Hotel Denpasar. Setelah itu pasukan Jepang menggerebek basis-basis PRI dan Pesindo, tempat para pemuda biasa berkumpul. Mereka berhasil menangkap ketua Pesindo, I Gde Puger, dan ajudannya, I Gusti Bagus Widjaka, di Singaraja. Sedangkan para pemuda yang berlindung di Puri Kesiman, Denpasar, perlahan-lahan bergerak diam-diam menuju Desa Carangsari, tempat asal Komandan TKR I Gusti Ngurah Rai, sekitar 25 kilometer di sebelah utara Denpasar.<sup>97</sup>

Mengikuti operasi penyerbuan tangsi-tangsi Jepang di Bali, di Lombok dan Sumbawa para pemuda yang tergabung dalam API juga bergerak menyerbu markas-markas Jepang di berbagai lokasi di pulau-pulau tersebut untuk memperoleh logistik dan senjata. Laskar pemuda sempat berhasil memperoleh senjata, tetapi begitu pasukan Jepang berbalik menggempur mereka, senjata diambil kembali dan pemuda-pemuda yang dianggap bersalah dipenjarakan.<sup>98</sup> Di Lombok penguasa Jepang menggunakan taktik adu domba antara suku Sasak, penduduk asli Lombok, dengan suku Bali untuk menghadapi serangan bertubi-tubi dari laskar-laskar pemuda dan rakyat. Untungnya, pemimpin daerah setempat cukup bijaksana sehingga kerusuhan meluas yang diakibatkan adu domba ini dapat dihentikan. Pada 30 November 1945 pasukan Australia mendarat di Ampenan, Lombok dan menerima penyerahan dari pimpinan militer Jepang. Tapi mereka menyerahkan kembali tugas menjaga keamanan kepada militer Jepang dan meninggalkan Lombok.<sup>99</sup> Mungkin mereka mendapat kesan bahwa situasi di Lombok cukup aman di tangan serdadu Jepang.

Pemenjaraan terhadap Gubernur Pudja dan Manuaba membuat pemerintahan Sunda Kecil yang terpusat di Bali praktis lumpuh. Penguasa Jepang dengan kelengkapan persenjataan dan kecanggihan pengalaman bertempur tidak hanya kembali bertindak represif terhadap orang-orang yang dicurigai menjadi bagian dari

kekuatan perlawanan, tetapi juga memberi jalan kepada raja-raja untuk menegakkan otoritas anti-Republik. Para pemuda yang berpencar di desa-desa hingga ke hutan-hutan terus mempersiapkan diri bertarung dengan mengikuti komando TKR atau PRI dan Pesindo walaupun ancaman persekusi dari serdadu-serdadu Jepang demikian kejam seperti ditangkap, disiksa, bisa juga dibunuh. Mereka yang menjadi staf di markas-markas gerilya menjalankan tugas ganda yaitu harus merebut senjata dari serdadu Jepang dengan cara apapun, dan tetap membuat rakyat percaya kepada pemerintah RI dengan memberi mereka rasa aman. Singkatnya, para pemudalah yang melanjutkan pekerjaan pemerintahan Pudja untuk membuat rakyat paham apa arti kemerdekaan dan mengapa mereka tetap harus berjuang walaupun sudah merdeka.<sup>100</sup>

Penguasa Jepang bergerak cepat untuk memperlihatkan kepada Sekutu bahwa mereka dapat mengendalikan keamanan dan ketertiban di Bali. Pasukan Sekutu belum masuk Bali, tapi mereka telah menguasai sebagian besar Jawa. Sejak awal Januari 1946 ibu kota Republik terpaksa dipindahkan ke Yogyakarta karena NICA menguasai Jakarta dan menyulitkan pengelolaan administrasi pemerintahan di kota tersebut. Sementara Gubernur Pudja dan seluruh pengurus KNI ditahan, pihak Jepang mendorong para raja untuk membentuk Dewan Raja-Raja dan mengambil alih pemerintahan Republik. Untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat mereka membebaskan Gubernur Pudja dan Ketua KNI Manuaba, serta anggota lainnya pada 21 Januari 1946 dengan syarat mereka bersedia menghadiri rapat gabungan antara Dewan Raja-Raja dan KNI yang seluruh agendanya sudah ditentukan penguasa Jepang bersama para raja.<sup>101</sup> Salah satu keputusan utama rapat itu adalah menghidupkan kembali lembaga kuasi-legislatif yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda pada 1938, Paruman Agung, yang aslinya hanya beranggotakan para raja dan penasihat dari masing-masing swapraja yang dipilih oleh raja masing-masing. Jepang bersama para raja memperbarui keanggotaan Paruman Agung dan membuatnya seolah-olah lebih demokratis dengan menambahkan Paruman Negara dan Majelis Rakyat di dalam lembaga ini. Paruman

Negara adalah semacam DPRD untuk masing-masing swapraja yang anggota-anggotanya dipilih raja, sedangkan Majelis Rakyat terbuka bagi anggota masyarakat yang dipilih oleh Paruman Negara.<sup>102</sup> Gubernur Pudja dan Manuaba didesak untuk mengakui keberadaan Paruman Agung sebagai pemegang otoritas negara di Bali.

Gubernur Pudja dan Manuaba menghadapi persoalan yang pelik. Mereka harus mempertahankan Republik tetapi juga menyadari kelemahan pemerintahan mereka karena tidak memiliki kendali penuh atas kekuatan polisi dan militer, tidak pula atas organisasi-organisasi pemuda yang anggotanya jauh melampaui pasukan TKR. Dukungan dari pemerintah pusat juga tidak memadai karena pemerintah pusat menghadapi masalah yang tidak kalah sulitnya. Mereka terpaksa harus mengakui bahwa bagaimanapun raja-raja masih memiliki kekuasaan lebih besar di swapraja masing-masing. Pada 9 Februari, KNI mengeluarkan maklumat yang menyatakan penyerahan "hak dan kekuasaan yang dipegang Republik Indonesia" kepada Paruman Agung "dengan syarat apa pun yang diperbuat badan tersebut tidak boleh menyimpang dari konstitusi Republik Indonesia."<sup>103</sup> Gubernur Pudja secara konstitusional masih memimpin Provinsi Sunda Kecil tetapi dalam kenyataannya Dewan Raja-Raja dalam Paruman Agung yang berkuasa atas provinsi tersebut.

Pada 2 Maret 1946, pasukan KNIL di bawah komando Letnan Kolonel F. H. ter Meulen bersama aparat pemerintahan sipil, AMACAB (Allied Military Authority, Civil Affairs Branch) mendarat di Pantai Sanur. Dalam pasukan itu terdapat Brigade Bali/Lombok atau terkenal dengan nama Brigade Gajah Merah yang terdiri dari mantan tawanan perang Jepang yang membawa niat kuat membalas dendam terhadap serdadu Jepang dan pemuda pendukung Republik. Pada saat itu juga penguasa militer Jepang menyerahkan komando tanggung jawab keamanan dan ketertiban kepada komandan KNIL. Pasukan Belanda dengan penuh keyakinan membayangkan bahwa Bali akan dapat mereka kuasai kembali dalam waktu singkat karena kekuatan pendukung Republik di Bali tidak besar dan hanya dikendalikan oleh sejumlah "ekstremis" yang dipengaruhi politik

perlawanan di Jawa.<sup>104</sup> Pimpinan pasukan Belanda segera mengadakan rapat dengan para raja di Kerajaan Klungkung dan menyatakan bahwa mereka memegang otoritas tertinggi di Bali tetapi mereka mengakui Paruman Agung sebagai satu-satunya badan negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan di Bali. Para raja diberi otonomi untuk mengelola keamanan dan ketertiban di wilayah swapraja masing-masing, yang bertanggung jawab terhadap pimpinan AMACAB (setara dengan residen pada zaman kolonial) dan diharuskan mematuhi undang-undang militer yang dikeluarkan Panglima Tentara Sekutu di Jawa Timur.<sup>105</sup>

Empat hari kemudian Perwira Komando AMACAB, J. A. van Beuge, dan stafnya mengadakan pertemuan dengan Gubernur Pudja dan seluruh jajaran pemerintahannya di Singaraja. Mereka menyatakan bahwa tugas mereka di Bali adalah membebaskan tawanan Jepang, melucuti prajurit Jepang, dan memulangkan mereka ke negerinya. Mereka berharap pemerintah Pudja akan membantu tugas-tugas itu dan Gubernur segera menyanggupinya. Semua tampak berjalan lancar dan tidak disebut larangan mengibarkan bendera Merah Putih atau pengalihan kekuasaan kepada AMACAB. Yang aneh dari pertemuan ini adalah pernyataan bahwa AMACAB akan memakai Undang-Undang Militer yang memberlakukan jam malam dan melarang penggunaan semboyan yang mengganggu bangsa lain. Hal itu berarti pembatasan terhadap kegiatan perlawanan dari kelompok-kelompok pemuda pro-Republik. Gubernur Pudja keberatan dengan pemberlakuan UU itu karena ia menganggap tidak ada masalah keamanan di Bali, tetapi Beuge bersikukuh UU itu akan dilaksanakan sebagai bagian dari kewenangannya demi ketertiban umum.<sup>106</sup>

Sekilas urusan pembagian kewenangan antara Republik dan Sekutu berjalan lancar. Namun, pihak pendukung Republik sadar benar bahwa hanya soal waktu sebelum pihak Belanda memulai gebraknya. Gubernur Pudja sudah mendapat laporan bahwa pasukan KNIL mulai bergerak menurunkan bendera Merah Putih di mana-mana, dan menangkap salah satu anggota organisasi pemuda, Ketut Subrata, di Denpasar, untuk memancing kekacauan. Pada 11

Maret 1946, saat Gubernur Pudja sedang mengadakan rapat dengan Ketua KNI Manuaba dan kepala-kepala jawatan pemerintah di kediaman resminya, pasukan KNIL mengepung rumah tersebut dan menangkap Gubernur Pudja, Manuaba, dan seluruh kepala jawatan pemerintah yang hadir. Alasan yang dikemukakan komandan pasukan adalah kondisi keamanan di Sunda Kecil memburuk dan pemerintahan Pudja tidak mampu mengatasi keadaan yang kacau-balau. Mereka mengusir keluarga Gubernur, menduduki kediamannya, dan menaikkan bendera Belanda. Setelah itu jam malam dan larangan berkumpul diberlakukan, plakat-plakat yang menyuarakan dukungan terhadap RI diturunkan, dan terjadi penangkapan terhadap orang-orang pro-Republik.<sup>107</sup>

Penguasa Belanda tampaknya menduga bahwa dengan menangkap Gubernur Pudja dan Ketua KNI Manuaba beserta seluruh stafnya perlawanan terhadap upaya pemulihan kekuasaan Belanda di Bali akan menjadi lebih lancar. Pemerintahan Pudja dianggap sebagai organ cangkakan dari Jawa yang tidak ada akarnya dalam budaya politik Bali. Pihak Belanda berharap bahwa dengan memulihkan kekuasaan raja-raja rakyat Bali akan serta-merta mendukung pemerintah Kerajaan Belanda karena kesetiaan mereka terhadap para raja. Dugaan itu salah besar. Rakyat Bali, terutama kalangan pemudanya, yang sudah digembleng Jepang untuk mengembangkan rasa cinta Tanah Air, lalu lewat Proklamasi Kemerdekaan merasakan semangat pembebasan dan membangun keyakinan akan kemampuannya mendirikan pemerintahan sendiri, betapapun terbatasnya, tidak bersedia menyerah begitu saja.

Setelah kegagalan penyerbuan tangsi Jepang pada Desember 1945, I Gusti Ngurah Rai memimpin delegasi TKR ke Jawa untuk melaporkan situasi di Bali dan meminta bantuan dari pemerintah pusat. Lawatan selama tiga bulan itu (Januari-April 1946) membuahkan hasil yang berarti; pemerintah bersedia memberikan bantuan persenjataan, personel, dan keperluan lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan RI. Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Tentara Republik Indonesia (TRI) Resimen Sunda Kecil oleh staf Panglima Besar Sudirman di

Jawa.<sup>108</sup> Perang gerilya pun dimulai, dan para raja harus berhadapan dengan pemuda.

Tekanan negara-negara Sekutu terhadap pemerintah Belanda, terutama dari Inggris yang berkepentingan untuk menarik pasukannya dari Indonesia, untuk mengadakan perundingan dengan pemerintah Indonesia menghasilkan Perjanjian Linggarjati (1946) yang intinya berisi pengakuan Belanda terhadap otoritas pemerintah Republik di Jawa, Madura, dan Sumatera saja. Selebihnya, Belanda berusaha mendorong terbentuknya Republik Indonesia Serikat yang kelak akan menjadi bagian dari ikatan persemakmuran Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai pimpinan simboliknya. Indonesia Timur menjadi salah satu wilayah pokok yang diharapkan menjadi basis terkuat negara federal karena dukungan kuat dari kaum aristokrat yang tidak bersedia menjadi bagian dari RI. Dengan sponsor dari pemerintah Belanda diadakan dua konferensi yang membicarakan pembentukan negara-negara bagian dalam sebuah republik federal, yaitu Konferensi Malino di Sulawesi Selatan pada 15–25 Juli 1946 dan Konferensi Denpasar di Bali pada 24–28 Desember 1946. Adalah Konferensi Denpasar yang dengan sukses melahirkan Negara Indonesia Timur (NIT) dengan Cokorda Raka Sukawati dari Puri Ubud sebagai presiden dan Anak Agung Gde Agung, raja Gianyar sebagai perdana menteri sekaligus menteri dalam negeri, sedangkan Makassar ditetapkan sebagai ibukota NIT.

Gubernur Pudja ditahan dalam sel terpisah dari tahanan politik lainnya di penjara Denpasar di daerah Pekambingan. Selama di penjara, ia terus berusaha mengikuti perkembangan situasi politik di luar dengan secara sembunyi-sembunyi bertanya kepada tahanan lain yang baru masuk. Tidak jarang ia diintimidasi dan dibujuk agar mendukung pemerintah NIT dengan janji akan dibebaskan, tetapi ia menolak. Di luar Bali, kampanye untuk membebaskan Pudja cukup gencar dilakukan, bahkan oleh pejabat-pejabat NIT yang nasionalis dan pro-Republik. Di Yogyakarta, kelompok Gerakan Rakyat Indonesia Sunda Kecil memperingati satu tahun Pudja dipenjara. Ada pula ratusan pemuda yang mengadakan arak-arakan menuntut pembebasan Pudja di Banyuwangi. Rakyat Sunda Kecil yang tinggal

di Yogyakarta menyelenggarakan konferensi untuk membentuk Panitia Gabungan Perjuangan Sunda Kecil dan menelurkan sejumlah resolusi yang intinya menuntut penegakan kembali negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>109</sup>



---

Kembali ke pangkuan ibu pertiwi di Yogyakarta melalui Trowulan setelah menjalani hukuman penjara Pekambangan di Denpasar tahun 1946. (Sumber: Museum Prumusan Naskah Proklamasi)

---

Pudja dibebaskan pada 16 Maret 1948, tetapi ia tidak kembali ke Bali melainkan langsung membantu Presiden Sukarno untuk urusan pemerintahan di dalam negeri ketika pemerintah Republik dialihkan ke Yogyakarta. Sebagai pejabat yang disertai tanggung jawab mengawasi jalannya pemerintahan daerah ia sering berkeliling bersama Sukarno untuk melakukan negosiasi dengan penguasa 15 negara bagian agar mereka bersedia kembali membangun NKRI. Ia berulang kali mewartakan tentang perjuangan pemuda yang masih terus berlanjut di daerah pegunungan di Bali untuk melawan kekuasaan Belanda dan menegakkan Republik. Dengan penuh keyakinan ia mengatakan bahwa apabila diadakan plebisit di Bali



untuk menentukan ikut Republik atau ikut negara buatan Belanda maka 90 persen rakyat Bali akan memilih ikut Republik.<sup>110</sup>

Pudja tidak pernah lagi bekerja di Bali sejak ia diberhentikan paksa sebagai gubernur. Setelah penyerahan kedaulatan, ia diminta menjadi Menteri Kehakiman NIT dalam Kabinet Putuhena yang disebut 'kabinet likuidasi' karena tugasnya mempersiapkan peleburan NIT ke dalam NKRI. Pudja ikut dalam Tim Likuidasi NIT pada akhir 1950. Setelah itu ia terus aktif di berbagai kepanitian dan departemen untuk membantu Presiden Sukarno memantapkan Republik, antara lain sebagai anggota Dewan Pengawas Keuangan, anggota Panitia Negara Pembaharuan UU Perbendaharaan Negara, Panitia Nasional Sistem Perpajakan, dan Panitia Penyusun UU Pembaharuan Agraria. Jabatan terakhirnya sebelum ia pensiun pada 1968 adalah sebagai Ketua Badan Pengawas Keuangan. Ia meninggal dunia sembilan tahun kemudian pada 4 Mei 1977 dalam usia menjelang 69 tahun.

## PENUTUP

I Gusti Ketut Pudja sebenarnya adalah “hasil pelaksanaan” Politik Etis yang ideal dari kaca mata pemerintah kolonial. Ia pergi ke sekolah-sekolah terbaik, belajar dengan tekun, menjadi kutu buku, dan lulus tepat pada waktunya, lalu bekerja sebagai pegawai di kantor-kantor pemerintah kolonial. Di balik kemuliaan maksud Politik Etis untuk membalas budi baik dan meningkatkan harkat hidup kaum bumiputra, penyelenggaraan pendidikan modern secara meluas amat berkaitan dengan kepentingan pemerintah kolonial mencari pegawai baru untuk menjalankan mesin birokrasi negara yang semakin besar dan bercabang-cabang. Menariknya ia tidak kemudian sekadar menjadi pegawai pangreh praja yang patuh sepenuhnya kepada atasan dan sama sekali menghindari politik demi karirnya sebagai birokrat. Pada masa kritis ia memilih mempertahankan Republik daripada mengejar jabatan.

Ada kemungkinan bahwa sikap ksatria Pudja yang menunjukkan keteguhan dan tanggung jawab terhadap negara dan bangsanya dibangun sudah sejak dari lingkungan keluarganya. Penting diperhatikan bagaimana ayah Pudja yang tidak mengenyam pendidikan Belanda mengambil setiap kesempatan bagi putranya untuk belajar di tempat yang terbaik, mencapai apa yang disebut Benedict Anderson *the apex of educational colonial pyramid* atau “puncak piramida pendidikan kolonial,” padahal Bali termasuk wilayah yang paling akhir membangun sekolah berorientasi Barat. Siapa gerangan yang memberinya pandangan ke depan tentang manfaat pendidikan Barat bagi putranya? Apakah ada pengaruh dari nenek Pudja yang berasal dari Minangkabau, tanah yang pernah melahirkan begitu banyak kaum bumiputra terpelajar?

Pudja tidak pernah terlibat dalam kegiatan kultural maupun politik nasionalis kalangan inteligensia meskipun ia bagian dari generasi pelajar yang sangat aktif dan kemudian menjadi pemimpin gerakan nasionalis yang terkemuka dan pendiri-pendiri bangsa, seperti Sutan Sjahrir. Ia tidak pernah ikut membentuk organisasi nasionalis. Namun, begitu ia dipercayai ikut membangun republik,

tak tanggung-tanggung ia melaksanakan tugasnya dan membuktikan kesetiiaannya terhadap Republik. Ia tidak saja mudah menyerap pengetahuan baru dengan baik, tetapi juga mampu mengolahnya untuk tujuan kemajuan bangsanya. Ia seakan-akan paham benar bahwa untuk membangun negara baru diperlukan pasukan birokrat profesional yang menguasai bidangnya masing-masing dengan baik.

Pudja tercebur dalam tugas membangun Republik Indonesia karena kepatuhannya terhadap perintah atasan, *Minseibu Chōkan*. Ia mungkin tidak pernah menduga bahwa Indonesia yang ia siap tekuni akan berada di tengah pusaran pergolakan yang demikian dahsyat. Setelah Proklamasi untuk kali pertama Indonesia sebagai sebuah kesatuan entitas politik berhadapan dengan penjajah Belanda secara militer. Pada masa sebelum Perang Dunia II perjuangan kaum nasionalis tidak pernah menggunakan strategi perlawanan bersenjata. Adalah penguasa militer Jepang yang memperkenalkan strategi militer, lalu tradisi militeristik, kepada generasi nasionalis berikutnya. Tak mengherankan jika pemudalah yang menjadi ujung tombak Revolusi Kemerdekaan. Mereka yang dididik untuk mengangkat senjata memiliki semangat bertempur sampai titik darah penghabisan, dan mudah membentuk laskar-laskar berani mati, tanpa persenjataan mutakhir. Pimpinan RI dari generasi nasionalis sebelumnya tak punya pengetahuan militer yang memadai ataupun pengalaman bertempur.

Dalam kondisi RI dikepung secara militer, pasukan gerilya republik dengan keterbatasan pelatihan, senjata, dan logistik harus berhadapan dengan berbagai pasukan yang derajat semangat serta kepentingannya berbeda-beda. Sementara itu, pemimpin-pemimpin baru seperti Pudja dihadapkan pada kerumitan pemindahan kekuasaan karena adanya jeda dalam pergantian antar-penguasa. Sebagai kepala daerah, Pudja diharapkan memperbaiki atau membangun struktur pemerintahan baru tetapi kewenangan yang ia miliki demikian terbatas dan pemerintahannya tidak memiliki alat-alat pemaksa yang efektif untuk menerapkan keteraturan terhadap masyarakat. Bali sendiri tidak pernah diperintah oleh satu kekuatan tunggal yang menguasai seluruh wilayah sebelum Belanda dan

Jepang masuk. Sunda Kecil pun sebagai kesatuan wilayah administrasi baru dibentuk pada masa Republik. Pemerintahan Pudja adalah percobaan pertama mengelola administrasi wilayah yang demikian luas tanpa terlalu bergantung pada dukungan politik dan militer dari luar.<sup>111</sup>

Lepas dari keterbatasan pemerintahannya, Pudja berhasil menanamkan pengaruh tersendiri sebagai simbol Republik yang merdeka. Keberadaan pemerintahannya, walaupun sangat singkat, telah membuat rakyat percaya diri bahwa mereka dapat memiliki suatu pemerintahan yang tidak feodal dan nasionalis. Pudja mungkin tampak moderat dengan pilihan-pilihannya untuk taat aturan dan prosedur, dan bergerak dengan strategi non-kekerasan. Tetapi kesediaannya untuk berdialog dengan pemuda dan pembelaannya terhadap para pemuda yang terus bergerilya menunjukkan kekukuhannya memperjuangkan sifat-sifat progresif republik baru ini. Sebagai aristokrat terpelajar, Pudja telah melawan feodalisme dan kolonialisme sekaligus dengan caranya sendiri yaitu dengan membawa semangat perubahan melalui mesin birokrasi yang diciptakan oleh pemerintah kolonial untuk menguasai tanah jajahannya dan mengendalikan rakyatnya.

**Catatan Akhir:**

<sup>1</sup>Ungkapan ini muncul dalam artikel Van Deventer “Een Eeereschuld” (Hutang Kehormatan) dalam *De Gids* (1899). Insulinde adalah sebutan tidak resmi untuk wilayah Hindia Belanda yang diperkenalkan oleh Douwes Dekker alias Multatuli lewat novelnya yang termasyhur, *Max Havelaar atau Lelang Kopi Maskapai Dagang Belanda* (Jakarta: Djambatan, 1977).

<sup>2</sup>Adrian Vickers, *Bali: A Paradise Created*, Edisi II (Tokyo, Rutland, Singapura: Tuttle, 2012), hlm. 58.

<sup>3</sup>Tentang Perang Jagaraga lebih lanjut, lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bali* (Jakarta: 1983/1984), Bab III, hlm. 34–51.

<sup>4</sup>Anak Agung Gde Putra Agung, *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 180.

<sup>5</sup>Tentang hukum adat tawan karang secara ringkas dapat dilihat dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Tawan\\_Karang](https://id.wikipedia.org/wiki/Tawan_Karang). Penjelasan tentang perjanjian antara penguasa kolonial dan raja-raja Bali, lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Perlawanan*, hlm. 27.

<sup>6</sup>I Made Pageh, *Konteks Lambah Mr. I Gusti Ketut Pudja 1908–2010: Kepahlawanan dan Perjuangan Sejarah Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Denpasar: Pustaka Larasan, MSI Cabang Buleleng, Universitas Negeri Pendidikan Ganesha Singaraja, dan Pemerintah Daerah Buleleng, 2011), hlm. 45–6. Lihat juga penjelasan M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c.1300* (Stanford, California: Stanford University Press, 1993), hlm. 134.

<sup>7</sup>Butir-butir penjelasan ini dirangkum dari paparan Geoffrey Robinson, *The Dark Side: Political Violence in Bali* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1995), hlm. 25–6.

<sup>8</sup>Gambaran tentang perubahan struktur pemerintahan dan birokrasi di Jawa, lihat Heather Sutherland, *The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi* (Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura: Heinemann Educational Books [Asia], 1979).

<sup>9</sup>Sebagai pembanding dapat dibaca memoar putra-putra raja Karangasem dan Gianyar, A. A. M. Djelantik, *The Birthmark: Memoirs of a Balinese Prince* (Hong Kong: Periplus, 1997) dan Ide Anak Agung Gde Agung, *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali* (Jakarta: Yayasan

Obor Indonesia, 1993). Kerajaan-kerajaan di Jawa juga melalui pengalaman serupa pada masa yang lebih awal. Lihat Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya, Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 76-7.

<sup>10</sup>Vickers, *Bali*, hlm. 130.

<sup>11</sup>Robinson, *The Dark Side Side of Pradise*, hlm. 102.

<sup>12</sup>*Punggawa* adalah kerabat raja yang diberi kewenangan mengelola area administratif tertentu dalam satu wilayah kerajaan. Ia berhak memungut pajak dan menggalang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Dalam banyak kasus punggawa dapat lebih berkuasa dan berada dibandingkan raja. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang struktur kerajaan di Bali prakolonial, lihat A. A. G. N. Ari Dwipayana, *Kelas dan Kasta: Pergulatan Kelas Menengah Bali* (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001), terutama Bab II.

<sup>13</sup>Rika Umar, *Mr. I Gusti Ketut Pudja: Riwayat Hidup dan Pengabdiannya* (Jakarta: Departemen Pen-didikan dan Kebudayaan, 1986), hlm. 8.

<sup>14</sup>Wawancara dengan I Gusti Made Arinta Pudja (putra kedua I Gusti Ketut Pudja), Jakarta, 23 November 2017.

<sup>15</sup>Bagian ini dirangkum dari catatan Udayana P. Tisna (putra raja Buleleng terakhir Anak Agung Nyoman Panji Tisna), dalam *Pahlawan Nasional: Patih Jelantik, Seorang Ksatria Buleleng* (Jakarta: Grafiti, 1996), hlm. 109-10. Menurut catatan Tisna, Gempol dibuang ke Jawa; tetapi menurut putra Pudja, Made Arinta, Gempol dibuang ke Padang. Wawancara dengan I Gusti Made Arinta Pudja, Jakarta, 23 November 2017.

<sup>16</sup> Keterangan ini diperoleh dari laman Face Book Persatuan Setia Hati Winongo 1903 Madiun; lihat <https://www.facebook.com/283030768421994/photos/a.621134547944946.1073741825.283030768421994/987200781338319> dan "Riwayat Ki Ngabehi Suro Diwiryo" <http://taufiqna99.blogspot.ca/2012/12/sejarah-psht.html>, diakses 25 November 2017.

<sup>17</sup>Vickers, *Bali*, hlm. 211.

<sup>18</sup>Wawancara dengan I Gusti Made Arinta Pudja, Jakarta, 23 November 2017.

<sup>19</sup>Pandangan ini ditemukan dalam catatan Gde Agung, *Kenangan Masa Lampau* dan Jelantik, *The Birthmark*, tentang ayah-ayah mereka yang juga mendorong anak-anaknya bersekolah tinggi.

<sup>20</sup>Lihat memoar Gde Agung, *Kenangan Masa Lampau*, hlm. 31–57 dan Jelantik, *The Birthmark*, hlm. 65–75.

<sup>21</sup>Lihat Rudolf Mrázek, *Sjahir: Politics and Exile in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell Southeast Asia Program), hlm. 33–55.

<sup>22</sup>Gde Agung, *Kenangan Masa Lampau*, hlm. 96–7.

<sup>23</sup>Lihat catatan tentang pemikir di balik pembentukan Rechtshogeschool, Paul Scholten, dalam <http://www.paulscholten.eu/research/article/paul-scholten-and-the-founding-of-the-batavia-rechtshogeschool/>, diakses 10 Oktober 2017.

<sup>24</sup>Wawancara dengan I Gusti Made Arinta Pudja, Jakarta, 23 November 2017.

<sup>25</sup>Gde Agung, *Kenangan Masa Lampau*, hlm. 105.

<sup>26</sup>Putra Agung, *Peralihan Sistem Birokrasi*, hlm. 227.

<sup>27</sup>Robinson, *The Dark Side*, hlm. 48–9; Vickers, *Bali*, hlm. 206–7.

<sup>28</sup>Vickers, *Bali*, hlm. 206–10. Untuk perbincangan tentang hubungan antara kasta dan kerja bakti, lihat Robinson, *The Dark Side*, hlm. 59–64.

<sup>29</sup>Istilah ini dimunculkan oleh Sutherland, *The Making*, hlm. 56.

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bali* (Jakarta, 1977/ 1978), hlm. 32–36.

<sup>31</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Kebangkitan*, hlm. 32–6; 59.

<sup>32</sup>Rika Umar, *Mr. I Gusti Ketut Pudja*, hlm. 10.

<sup>33</sup>Mardia, *Tiga Negara*, hlm. 25–6.

<sup>34</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific\\_War](https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_War) dan [https://en.wikipedia.org/wiki/Battle\\_of\\_Tarakan\\_\(1942\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tarakan_(1942)), diakses 12 Desember 2017.

<sup>35</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Battle\\_of\\_Singapore](https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Singapore), diakses 12 Desember 2017.

<sup>36</sup>[https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch\\_East\\_Indies\\_campaign#cite\\_note-12](https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_Indies_campaign#cite_note-12) diakses pada 12 Desember 2017.

<sup>37</sup>Mardia, *Tiga Negara*, hlm. 26.

<sup>38</sup>I Nyoman Pendit, *Bali Berjuang* Cet. III (Denpasar: Sarad dan Pustaka Larasan, 2008), hlm. 22.

<sup>39</sup>Robinson, *The Dark Side*, hlm. 73, catatan kaki 16; Umar, *Mr. I Gusti Ketut Pudja*, hlm. 14.

<sup>40</sup>Gde Agung, *Kenangan Masa Lampau*, hlm. 174–5. Gde Agung tidak menyebut perihal *Syu Kaigi* tapi dari catatan Rika Umar dikatakan bahwa Pudja masuk dalam *Syu Kaigi* dan jika melihat waktu pengutusannya pada catatan Gde Agung, Agustus 1943, tampaknya memang badan itulah yang dimaksud. Lihat Umar, *Mr. I Gusti Ketut Pudja*, hlm. 15. Lihat juga I Ketut Ardhana, “Balinese Puri in Historical Perspective: The Role of Puri Satria and Puri Pamacutan in Social and Political Changes in Badung, South Bali 1906–1950,” Tesis M.A. Desember 1993, hlm. 125.

<sup>41</sup>I Nyoman Mantik yang awalnya berhubungan dengan pendiri sekolah Taman Siswa di Bali, Wiyono Suryokusumo di Yogyakarta. I Made Wija Kusuma berulang kali ke Jawa antara 1944–45 untuk berkomunikasi dengan pejuang-pejuang bawah tanah. Kelak keduanya berperan sangat penting dalam revolusi kemerdekaan. Robinson, *The Dark Side*, hlm. 90; Pendit, *Bali Berjuang*, hlm. 46–7.

<sup>42</sup>Para pelajar di Buleleng terutama berhubungan dengan I Gde Puger, pejuang asal Denpasar yang bekerja untuk radio pemerintah Jepang, *Hoso Kyoku*, yang kantornya berseberangan dengan sekolah *Cu Gakko* (setingkat SMP) di Singaraja. Pendit, *Bali Berjuang*, hlm. 50.

<sup>43</sup>Robinson, *The Dark Side*, hlm. 90–1.

<sup>44</sup>Komando AD Ke-16 Jepang berinisiatif membentuk BPUPKI karena perdebatan di kalangan pemerintah di Tokyo berlarut-larut dan tidak menghasilkan putusan apa-apa; lihat Inomata, “Persiapan Kemerdekaan.” Penjelasan editor *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, hlm. xxvii, tentang kaitan antara wilayah kekuasaan AD dan AL Jepang dengan keputusan tentang persiapan kemerdekaan juga baik diperiksa.

<sup>45</sup>Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*, hlm. 209.

<sup>46</sup>Lihat analisis yang cukup teliti tentang komposisi anggota PPKI dalam Benedict Anderson, *Java in a Time of Revolution* (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1972), hlm. 64–5.

<sup>47</sup>Wawancara dengan I Gusti Made Arinta Pudja, Jakarta, 23 November 2017.



<sup>48</sup>Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediati Kamil, *Kronik Revolusi Indonesia*, Jilid 1 (1945) (Jakarta: KPG, Ikapi, Ford Foundation, 1999), hlm. 21.

<sup>49</sup>Dari catatan Anderson, tiga tokoh pemuda, Chaerul Saleh, Sukarni, dan Wikana juga diusulkan masuk dalam PPKI tetapi mereka menolak karena menganggap PPKI 'bau' Jepang. Menurut mereka Indonesia sudah merdeka dan tidak perlu lagi mempertahankan hubungan dengan Jepang. Mereka mendesak Sukarno dan Hatta untuk mengalihkan sidang PPKI ke tempat yang lebih terbuka sehingga publik dapat terlibat dan mengubah nama PPKI menjadi Komite Nasional Indonesia. Lihat Anderson, *Java*, hlm. 86.

<sup>50</sup>Mengenai penjelasan tentang perubahan yang diusulkan Mohammad Hatta, lihat Sekretariat Negara RI, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI* (Jakarta, 1998), hlm. 533–4.

<sup>51</sup>Sekretariat Negara RI, *Risalah*, hlm. 537.

<sup>52</sup>Wawancara dengan I Gusti Made Arinta Pudja, Jakarta, 23 November 2017.

<sup>53</sup>Radio ini dibangun secara mandiri dengan barang-barang elektronik bekas oleh Jusuf Ronodipuro, penyiar yang pertama kali menyebarkan berita tentang Proklamasi Kemerdekaan ke seluruh dunia melalui radio Jepang *Hoso Kokyu*, tempat ia bekerja. Lihat [https://id.wikipedia.org/wiki/Ioesoef\\_Ronodipoero](https://id.wikipedia.org/wiki/Ioesoef_Ronodipoero), diakses 15 Desember 2017.

<sup>54</sup>Toer dkk., *Kronik*, hlm. 38–47.

<sup>55</sup>Pendit, *Bali Berjuang*, hlm. 46–51 untuk melihat nama-nama pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah; hlm. 76–8 untuk dukungan pemuda terhadap pemerintahan Gubernur Pudja.

<sup>56</sup>Robinson, *The Dark Side*, hlm. 116 catatan kaki 53.

<sup>57</sup>Pendit, *Bali Berjuang*, hlm. 84.

<sup>58</sup>Toer dkk., *Kronik*, hlm. 49–50.

<sup>59</sup>Anak Agung Bagus Wirawan, *Pusaran Revolusi Revolusi Indonesia di Sunda Kecil 1945–1950* (Denpasar: Udayana University Press, 2012), hlm. 97–9. Informasi tentang Soekardani diperoleh dari dokumen-dokumen Belanda yang diakses Wirawan. Tidak ada informasi lebih lanjut tentang apa latar belakang Soekardani selain sebagai “propagandis” Soekarno. Robinson juga menggunakan sumber yang sama.

<sup>60</sup>Wirawan, *Pusaran Revolusi*, hlm. 98.

<sup>61</sup>Pidato Sukarno dikutip dan diterjemahkan dari bahasa Indonesia oleh Benedict Anderson, *Java*, hlm. 113. Penulis tidak berhasil menemukan teks asli pidato ini. Kutipan di sini merupakan terjemahan bebas dari teks yang diterjemahkan Anderson.

<sup>62</sup>Pendit, *Bali Berjuang*. hal. 80-81

<sup>63</sup>Pendit, *Bali Berjuang*. hal. 82

<sup>64</sup>Paparan ini dirangkum dari analisis Robinson, *The Dark Side*, hlm. 99–107; Pendit, *Bali Berjuang*, hlm. 86–8.

<sup>65</sup>Wirawan, *Pusaran Revolusi*, hlm. 97.

<sup>66</sup>Wirawan, *Pusaran Revolusi*, hlm. 100.

<sup>67</sup>I. H. Doko dan A. H. Koroh adalah anggota semacam Dewan Perwakilan Rakyat (*Syoo Sunda Sukai In*) untuk wilayah Nusa Tenggara pada zaman pendudukan militer Jepang. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur* (Jakarta, 1978); Arief Ikhsanudin, 'Hendrick Arnold Koroh: Pejuang dari Timor' di <http://historia.id/persona/hendrick-arnold-koroh-pejuang-dari-timor>, Minggu, 16 Agustus 2015.

<sup>68</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat* (Jakarta, 1988), hlm. 181.

<sup>69</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah*, hlm. 181–2.

<sup>70</sup>Lachlan Grant, *Australian Soldiers in Asia-Pacific in World War II* (Sydney: New South Publishing, 2014), hlm. 176–8. Pemerintah Australia yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia menyebut pemimpin dan pendukung Republik Indonesia sebagai *Free Indonesia Movement*, 'Gerakan Indonesia Merdeka'.

<sup>71</sup>Wirawan, *Pusaran Revolusi*, hlm. 110.

<sup>72</sup>Anak Agung Gde Agung, *From the Formation of the State of East Indonesia towards the Establishment of the United States of Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. xliii, 1–2. Tentang Tom Pello, lihat <http://jemituati.blogspot.ca/2010/10/riwayat-hidup-singkat-dan-perjuangan.html>, diakses 20 Desember 2017.

<sup>73</sup> Robinson, *The Dark Side of Paradise*, hal. 120-21

<sup>74</sup> Pendit, *Bali Berjuang*. Hal. 89-91

<sup>75</sup> Tentang kisah di balik penculikan Gde Agung, lihat <https://dendemang.wordpress.com/2007/12/01/persaingan-puri-tahta-dan-perlawanan/>

Robinson, *The Dark Side of Paradise*, hal. 103 di catatan kaki tentang PPN juga menyinggung soal penculikan ini.

<sup>76</sup> Wirawan, *Pusaran Revolusi*, hlm. 98; Robinson, *The Dark Side*, hlm. 117.

<sup>77</sup> Pendit menggambarkan dengan cukup detil peristiwa penyerahan kekuasaan ini dalam bab tersendiri, "Demonstrasi dan Ultimatum terhadap Balatentara Jepang," *Bali Berjuang*, hlm. 92-6.

<sup>78</sup> Gde Agung, *From the Formation*, hlm. 5.

<sup>79</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah*, hlm. 182.

<sup>80</sup> Wirawan, *Pusaran Revolusi*, hlm. 104.

<sup>81</sup> Gde Agung, *From the Formation*, hlm. xvi.

<sup>82</sup> Anderson, *Java*, hlm. 135.

<sup>83</sup> Toer dkk., *Kronik*, 30 September 1945.

<sup>84</sup> Toer dkk., hlm. 57.

<sup>85</sup> Toer dkk., *Kronik Revolusi Indonesia*, hal. 83. Van Mook menyampaikan pernyataan politik ini atas desakan komandan pasukan Sekutu di Asia Tenggara, Laksamana Lord Louis Mountbatten. Pemerintah Inggris berharap Belanda segera melakukan negosiasi dengan pemerintah Sukarno-Hatta agar perang tidak berkepanjangan. Lihat catatan tentang ketegangan antara Belanda dan Inggris menjelang pendaratan pasukan Belanda di Indonesia yang ditulis Gde Agung di bagian pendahuluan, *From the Formation of the State of East Indonesia*, hal. vii-ix

<sup>85</sup> Anderson, *Java in a Time of Revolution*, hal. 134-8

<sup>86</sup> Anderson, *Java*, hlm. 134-8.

<sup>87</sup> Pendit mencatat 'Abraham Crijnsen' sebagai kapal dagang Belanda; tetapi kapal itu sebenarnya kapal penyapu ranjau yang sejak kekalahan Belanda pada 1942

berlabuh di Australia, kemudian dipakai lagi sebagai kapal patroli di perairan Indonesia Timur pada masa revolusi kemerdekaan. Lihat Pendit, *Bali Berjuang* [https://en.wikipedia.org/wiki/HNLMS\\_Abraham\\_Crijnsen\\_\(1936\)](https://en.wikipedia.org/wiki/HNLMS_Abraham_Crijnsen_(1936))

<sup>88</sup>Kejadian ini mirip dengan insiden bendera di Hotel Oranje, Surabaya.

<sup>89</sup><https://www.facebook.com/suarabalisayaindonesia/posts/273899822944239>

<sup>90</sup>Pendit, *Bali Berjuang*, hlm. 78–82. Tentang pembentukan PRI dan Pesindo lihat Anderson, *Java*, hlm. 129.

<sup>91</sup>Anderson, *Java*, hlm. 252–6.

<sup>92</sup>Kahin, *Nationalism and Revolution*, hlm. 141–2.

<sup>93</sup>Pendit, *Bali Berjuang*, catatan kaki hlm. 89–90 dan hlm. 183–4.

<sup>94</sup>Ricklefs, *A History of Modern Indonesia*, hlm. 218–21.

<sup>95</sup><https://www.facebook.com/suarabalisayaindonesia/posts/273899822944239>

<sup>96</sup>Pendit menulis bab tersendiri tentang operasi ini dalam “13 Desember 1945 Pemberontakan melawan Jepang” dalam *Bali Berjuang*, hlm. 112–8.

<sup>97</sup>Pendit, *Bali Berjuang*. hal. 119–24

<sup>98</sup>Wirawan, *Pusaran Revolusi Revolusi Indonesia di Sunda Kecil*, hlm. 106–7.

<sup>99</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah*, hlm. 182–3.

<sup>100</sup>Wirawan, *Pusaran Revolusi*, hlm. 109; catatan pemuda Jawa yang ke Bali dimuat dalam *Kedaulatan Rakyat* (Yogyakarta); Mardia, *Tiga Negara*, hlm. 58–59.

<sup>101</sup>Pendit, *Bali Berjuang*, hlm. 139–140.

<sup>102</sup>Gde Agung, *From the Formation*, hlm. 5–7.

<sup>103</sup>Robinson, *The Dark Side*, hlm. 120–21; Berdasarkan penelitian Robinson anggota TKR hanya berjumlah sekitar 500-1000 orang, sedangkan pemuda mencapai puluhan ribu.

<sup>104</sup>Pendit, *Bali Berjuang*, hlm. 158; Robinson, *The Dark Side*, hlm. 134.

<sup>105</sup>Wirawan, *Pusaran Revolusi*, hlm. 122; Pendit, *Bali Berjuang*, hlm. 400.

<sup>106</sup>Transkrip pembicaraan Van Beuge dan Pudja; lihat Pendit, *Bali Berjuang*, hlm. 400

<sup>107</sup>Pendit, *Bali Berjuang*, hlm. 159| Wirawan, *Pusaran Revolusi*, hlm. 124.

<sup>108</sup><https://www.facebook.com/suarabalisayaindonesia/posts/273899822944239>

<sup>109</sup>Wirawan, *Pusaran Revolusi*, hlm. 220–1.

<sup>110</sup>Wirawan, hlm. 242–3.

<sup>111</sup>Catatan Robinson, *The Dark Side*, hlm 183.

---

**G.S.S.J RATULANGI**

---





# **G. S. S. J. RATULANGI**

## **GUBERNUR DI PENGASINGAN**

ANDI LILI EVITA

Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi, lahir di Tondano, Sulawesi Utara, 5 November 1890. Setelah menamatkan Hoofden School (Sekolah Raja) di Tondano, ia melanjutkan pelajaran ke Sekolah Teknik di Jakarta. Pada 1915, ia memperoleh ijazah guru ilmu pasti untuk Sekolah Menengah di Negeri Belanda. Empat tahun kemudian, ia meraih gelar Doktor dalam Ilmu Pasti dan Ilmu Alam di Swiss. Sewaktu berada di Negeri Belanda, Ratulangi diangkat menjadi ketua Indische Vereniging—kemudian berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia —dan di Swiss menjadi ketua organisasi pelajar-pelajar Asia.

Kembali dari Eropa, Dr. Ratulangi mengajar ilmu pasti di AMS (setingkat Sekolah Menengah Umum) di Yogyakarta. Ketika bertugas di Bandung, ia mendirikan Maskapai Asuransi Indonesia. Ia menjadi Sekretaris Dewan Minahasa di Manado (1924–27), jabatan yang ia berdayakan untuk melakukan usaha yang bermanfaat bagi rakyat seperti pembukaan daerah baru pertanian, mendirikan yayasan dana belajar, dan lain-lain. Berkat perjuangannya, pemerintah kolonial Belanda menghapuskan kerja paksa di Minahasa.

Pada 1927, Ratulangi diangkat sebagai anggota Volksraad, mewakili Minahasa. Sejak itulah ia sering berpidato mengecam politik pemerintah kolonial. Lantaran sikap non-kooperatifnya, ia ditangkap pemerintah Hindia Belanda pada Januari 1941. Ia mengajukan tuntutan supaya Pemerintah Belanda menghapuskan segala perbedaan dalam bidang politik, ekonomi, dan pendidikan



antara orang-orang Belanda dan penduduk Indonesia. Kegiatannya yang lain adalah turut mendirikan Vereniging Indonesische Academici (Persatuan Kaum Sarjana Indonesia) dan menerbitkan mingguan *Peninjauan* bersama dr. Amir. Kegiatan tulis-menulisnya menghasilkan buku *Indonesia in de Pacifik*. Selanjutnya, ia menjadi redaksi mingguan politik *Nationale Commentaren* (1938–42).

Pada masa pendudukan Jepang, Ratulangi diangkat menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pendudukan di Jakarta, kesatuan Angkatan Laut Jepang (Kaigun) di Makassar merangkul Lanto Daeng Pasewang, Haji Sewang Daeng Muntu, M. A. Pelupessy, Tio Heng Sui dan Haji Nusu Daeng Mannangkasi sedangkan Nadjamuddin Daeng Malewa diangkat menjadi Walikota Makassar pada Mei 1945, melalui wadah *Syukai-Giin*, Badan Penasihat Penguasa *Minsei-Fu*. Sementara itu, pada akhir 1944, rombongan Ratulangi, Pondaag dan Tobing, kemudian menyusul Mr. Tadjuddin Noor dan Mr. A. Zainal Abidin, tiba dari Jakarta.

Kehadiran tokoh-tokoh tersebut memperkuat barisan pro-kemerdekaan di Makassar. Dibentuk organisasi Sumber Darah Rakyat (Sudara) atau *ken koku dosikai* dalam bahasa Jepang. Wadah itu dipimpin oleh Lanto Daeng Pasewang, A. Mappanyukki dan Tadjuddin Noor, sebagai akibat kekalahan demi kekalahan yang dialami Jepang dalam peperangan. Sudara berkembang pesat, meliputi seluruh potensi perjuangan di Sulawesi Selatan dan merupakan mantel organisasi binaan tokoh-tokoh pemuda seperti Andi Mattalatta, Saleh Lahode, Amiruddin Mukhlis, Manai Sophian Sunari, Sutan M. Yusuf SA, Man, Y. Siranamual, dan lain-lain. Kunjungan Ir. Sukarno dan rombongan ke Makassar (28 April–2 Mei 1945) makin membangkitkan semangat kemerdekaan di Makassar. Melalui pertemuan khusus dengan tokoh masyarakat atau rapat umum di lapangan Hasanuddin, ribuan pemuda menghadiri pengibaran bendera Merah Putih.

Sementara posisi Jepang dalam peperangan makin terjepit, struktur organisasi Sudara disempurnakan yang terdiri dari G. S. S. J. Ratulangi sebagai Ketua Umum; Mappanyuki sebagai Ketua

Kehormatan; dan Lanto Daeng Pasewang sebagai Ketua Pusat. Pengurus lainnya adalah M. A. Pelupessi (Kepala Bagian Umum), A. N. Hadjarati (Kepala Tata Usaha), Abdul Wahab Tarru (Kepala Bagian Pendidikan). Sementara, Komando Pusat organisasi dijabat G. R. Pantouw, H. M. Tahir, dan M. Suwang Daeng Muntu; sedangkan pada Majelis Pendidikan Pusat duduk Nadjamuddin Daeng Malewa, dan Mr. S. Binol Maddusila Daeng Paraga. Dalam struktur baru Sudara itu terlihat posisi penting Ratulangi dalam konfigurasi kepolitikan di Sulawesi.

## **INDONESIA MERDEKA**

Pada masa pendudukan militer Jepang, G. J. S. S. Ratulangi ditunjuk sebagai penasihat pada Angkatan Laut Jepang berkedudukan di Makassar. Pengangkatan itu merupakan upaya pemerintah pendudukan untuk memanfaatkan pengaruh Ratulangi di kalangan rakyat Indonesia Timur. Dalam menjalankan tugasnya, Ratulangi mengumpulkan pemimpin-pemimpin Indonesia yang berasal dari Indonesia Timur seperti Bali, Lombok, dan Palu yang menetap di Jawa. Kepada mereka, ia menitipkan nasib 2.500 orang Minahasa di Jawa. Sebaliknya, Ratulangi berjanji akan menjamin keselamatan orang Jawa yang berada di Sulawesi Selatan. Tindakannya itu menunjukkan bahwa ia menaruh perhatian besar terhadap nasib orang-orang Minahasa yang tinggal di rantau.

Menjelang kemerdekaan, pemerintah pendudukan Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pembentukan badan itu dapat dilihat sebagai upaya pemerintah militer Jepang mendapatkan sokongan yang maksimal dari bangsa Indonesia. Ratulangi yang pada saat itu berada di Sulawesi Selatan tidak ikut duduk dalam badan itu. Namun, ia aktif dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Ia memimpin misi Sulawesi bersama Andi Sultan Daeng Raja dan Andi Pangeran Daeng Parani.<sup>1</sup>



Indonesia di Pejambon, Jakarta (Sumber: <https://laniratulangi.wordpress.com>)

Pada saat Sukarno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan di Jakarta, G. S. S. J. Ratulangi dan wakil unsur masyarakat Sulawesi yang lain—Andi Pangerang Petta Rani, Sultan Daeng Raja, Lanto Daeng Pasewang, dan Andi Zainal Abidin—menghadiri peristiwa sangat penting itu. Setelah itu, seperti telah disebutkan, Ratulangi dan Andi Pangerang Petta Rani selaku anggota PPKI tetap di Jakarta untuk mengikuti rapat-rapat selanjutnya. Di antara hasil rapat PPKI hari pertama (18 Agustus) yang sangat penting adalah penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dan Wakil Presiden dibantu Komite Nasional Indonesia.

Pada sidang kedua PPKI (19 Agustus) dibahas prioritas program, tentang susunan pemerintahan daerah, dan pembentukan kementerian. Pembahasan sidang yang kemudian relevan dengan kedudukan dan peran Ratulangi dalam Indonesia merdeka adalah tentang pembagian wilayah dan pemerintahan daerah. Dalam rapat tersebut, Oto Iskandardinata sebagai salah satu ketua panita kecil dalam PPKI mengusulkan wilayah Indonesia dibagi menjadi delapan

daerah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Daerah bekas Rikugun dibagi menjadi empat gubernemen (pemerintahan daerah); demikian pula eks daerah Kaigun dibagi menjadi empat gubernemen.

Sementara itu, di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX pada 5 September mengeluarkan pernyataan bahwa Negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang merupakan kesultanan merupakan 'daerah Istimewa' dalam negara Republik Indonesia. Hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pemerintah Pusat bersifat langsung dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.



Sukarno dalam satu perbincangan dengan G. S. S. J. Ratulangi  
(Sumber: Perpustakaan Nasional RI)

Setelah wilayah provinsi ditetapkan, pada hari itu juga, 19 Agustus 1945, Presiden Sukarno melantik delapan gubernur masing-masing provinsi. Pada saat itulah, G. S. S. J. Ratulangi dilantik menjadi Gubernur Sulawesi. Tujuh gubernur lainnya adalah Soetardjo Kartohadikoesoemo (Jawa Barat), Raden Panji Soeroso (Jawa Tengah), Raden Tumenggung Adipati Aryo Soerjo (Jawa Timur), Mr. Teuku Mohammad Hasan (Sumatera), Ir. Pangeran Mohammad Noer

(Borneo/ Kalimantan), Mr. Johannes Latuharhary (Maluku), dan Mr. I Ktut Pudja (Sunda Kecil).

### **“MENDARAT” DI SULAWESI**

Setelah pelantikan, Gubernur G. S. S. J. Ratulangi bersama rombongan kembali ke Makassar. Mendarat di lapangan terbang Sapiria, Bulukumba, Gubernur dan sebagian rombongan menginap di Empress Hotel, Makassar, selama seminggu. Di hotel itu, Gubernur Ratulangi bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat di Sulawesi Selatan guna membahas penyusunan pemerintahan di Sulawesi. Di antara pemuka masyarakat yang dihimpun Gubernur adalah Lanto Daeng Pasewang, Saleh Daeng Tompo, Zainal Abidin (ketiganya dari Sulawesi Selatan), W. S. T. Pondaag (Sulawesi Utara), Josef Latumahina (Maluku), I. P. L. Tobing (Sumatera), dan Soewarno (Jawa).

Dari sejumlah tokoh masyarakat yang dihimpun tersebut tersirat bahwa Gubernur Ratulangi bertolak dari semangat ‘bineka tunggal ika’ dalam upaya membangun pemerintahan daerah di Sulawesi. Ia mengumpulkan pemuda untuk membulatkan perjuangan mempertahankan RI. Hal itu bertentangan dengan sisa-sisa tentara Jepang dan Sekutu yang bermaksud menjaga *status quo*; begitu pula tentara Belanda yang berniat menguasai kembali Sulawesi. Pemuda Sulawesi menuntut agar kekuasaan segera direbut dari militer Jepang. Gubernur Ratulangi berupaya melakukan diplomasi dengan panglima balatentara Jepang. Upaya itu menemui jalan buntu karena Jepang menolak menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah RI. Tentara Jepang justru mengancam akan melakukan kekerasan bersenjata jika terjadi perebutan kekuasaan dari pihak Indonesia.

Segera setelah ancaman tersebut, beredar pamflet yang disebar pesawat-pesawat tempur Sekutu. Isinya, Panglima Tertinggi Tentara Sekutu, Jenderal Blamey, bersedia menjamin dan bertanggung jawab dalam upaya “peace and order” kepada tentara Jepang.<sup>2</sup> Gubernur Ratulangi yang saat itu merasa bahwa pemuda Sulawesi tidak memiliki cukup senjata untuk melakukan

perlawanan terhadap tentara Jepang, menginstruksikan untuk mencegah pertumpahan darah di pihak sendiri. Apalagi kondisi saat itu Jepang masih memiliki cukup banyak perlengkapan dan secara rutin melakukan persiapan militer.

Keesokan harinya, 20 Agustus, Gubernur Ratulangi juga bertemu dengan utusan Raja Luwu yaitu Andi Makkulau Opu Daeng Parebba dan M. Sanusi Daeng Mattata. Sanusi mengumpulkan bahan-bahan, terutama mengenai susunan pemerintahan Gubernur Sulawesi. Beberapa hari kemudian, A. N. Hadjarati dan rombongan menuju Palopo meminta dukungan kepada Datu Luwu dan pemuda-pemuda bekas Heiho di Luwu.



---

Gubernur Sulawesi G. S. S. J. Ratulangi (Sumber: Poondag, *Pahlawan Kemerdekaan Nasional*).

---

Dalam situasi yang sulit, Gubernur Ratulangi berhasil membentuk struktur organisasi pemerintahan daerah Sulawesi. Sejak 5 September 1945, pemerintahan itu mulai bekerja. Adapun susunan pemerintahannya sebagai berikut

Gubernur	: Dr. G. S. S. J. Ratulangi
Sekretaris	: Mr. Andi Zainal Abidin
Wakil Sekretaris	: I. P. L. Tobing
Biro Umum	: Lanto Daeng Pasewang
Biro Ekonomi	: Mr. Tadjuddin Noor
Biro Penerangan	: Manai Sophian
Biro Pemuda	: Siranamual Daeng Saelan
Pembantu-pembantu lainnya:	A. N. Hadjarati, G. R. Pantouw, Sam Supardi, W. S. T. Pondaag, dr. Sjafri, Saleh Lahade.

Selanjutnya Gubernur Ratulangi membentuk Pemuda Nasional Indonesia yang dipusatkan di Kota Makassar yang bertujuan menghimpun berbagai organisasi pemuda lainnya. Untuk kali pertama, S. Sanusi ditunjuk menjadi Ketua Pemuda Nasional Indonesia—ia juga salah seorang pemrakarsa pembentukan organisasi itu. Setelah itu, Ratulangi bersama-sama Lanto Daeng Pasewang, Soewarno, Andi Zainal Abidin, Tadjuddin Noor, Siranamual Daeng Saelan mendirikan Sekolah Menengah Pertama Nasional dengan mengambil alih gedung bekas markas Tentara Dai Nippon di Gowaweg (sekarang Jalan Dr. Ratulangi). Sekolah tersebut didirikan pada 8 Oktober 1945 untuk menampung pelajar dari Futsu Cugukko (Sekolah Menengah Umum) dan Tokobetsu Cugukko (Sekolah Menengah Istimewa) yang putus sekolah akibat perang. Tenaga pengajar diambil dari kalangan pejuang sendiri, sedangkan Dr. Ratulangi ditunjuk menjadi Kepala Sekolah.

Dalam pada itu, Pemerintah Republik Indonesia pada 10 Oktober 1945 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945, yang isinya menyatakan bahwa segala aturan yang ada sampai berdirinya Republik Indonesia tetap berlaku selama belum diadakan yang baru, termasuk Badan-badan Negara dan peraturan-peraturan

yang lain. Peraturan Pemerintah tersebut berlaku surut sejak 17 Agustus 1945. Mengenai pembagian daerah, bentuk dan susunan pemerintahannya yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta penjelasannya, disebutkan bahwa pembagian wilayah Indonesia terdiri atas provinsi, dan daerah provinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil yang bersifat otonom dan atau bersifat daerah administrasi dengan bentuk dan susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan undang-undang.

Sebagai kelanjutan dari kekalahan tentara Jepang dalam Perang Dunia II, pada 1 September 1945 dilakukan penyerahan tak bersyarat Angkatan Perang Jepang kepada Sekutu. Tentara Inggris yang merupakan bagian dari Sekutu diberi tanggung jawab atas Indonesia untuk melaksanakan tiga tugas pokok. Pertama, membebaskan secepat mungkin tahanan perang. Kedua, melucuti tentara Jepang yang telah menyerah dan secepat mungkin memulangkan mereka ke Jepang. Ketiga, menciptakan ketertiban hukum dan keamanan sehingga dapat diwujudkan penyerahan kekuasaan dari militer Inggris kepada pemerintahan sipil di Indonesia yang sah secara tertib.

Untuk melaksanakan tugas Sekutu di Indonesia, Inggris merekrut dua divisi pasukan India yang dikenal sebagai pasukan Gurkha. Pada 16 September 1945, Laksamana Muda W. R. Patterson tiba di Tanjungpriok, Jakarta, disusul kedatangan kontingen pertama pasukan India (29 September) di bawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Philip Christison yang memegang komando Allied Forces Netherlands East Indies. Sementara itu, dari Negeri Belanda, H. J. Van Mook tiba di Jakarta pada 1 Oktober 1945 bersama NICA atau Pemerintah Sipil Hindia Belanda. Datang membonceng Sekutu, Van Mook mendapat mandat dari Ratu Belanda sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan tugas meletakkan dasar-dasar *nieuwe rechtsorde* atau "tertib hukum baru" untuk membentuk pemerintahan daerah yang disusun secara federatif. Seperti terjadi dalam sejarah, kedatangan Sekutu dan NICA menimbulkan reaksi perlawanan rakyat Indonesia sehingga mengobarkan perang kemerdekaan selama sekitar lima tahun setelah kemerdekaan.



Dalam menyelesaikan soal Angkatan Laut Jepang di wilayah Indonesia Timur—Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil—Panglima Angkatan Perang Sekutu menugasi Panglima Tentara Australia Brigadir Jenderal Hilter yang bemarkas di Morotai untuk membebaskan tawanan perang dari kamp-kamp Jepang dan melucuti tentara Jepang di Timur Besar dan Borneo. Namun, sebelum pasukan Australia tiba, para pemuda telah menyerang tangsi-tangsi Angkatan Laut Jepang, berusaha merampas atau melucuti senjatanya. Tentara Jepang tidak mau begitu saja melepaskan senjatanya sehingga pecah pertempuran antara pemuda-pemuda Makassar melawan tentara Jepang. Menyusul pada 21 September 1945 sekitar 250 personel tentara Australia mendarat di Makassar di bawah komando Brigadir Jenderal Iwan Dougherty.

Seperti tugas tentara Sekutu yang lain, pasukan Australia juga ditugasi menciptakan ketertiban hukum dan keamanan di wilayah Sulawesi Selatan khususnya Makassar. Rekapitulasi tentara Jepang dilakukan di Kamp Kampili dalam bulan itu juga. Tentara Australia yang bertugas di Sulawesi Selatan memperlakukan tahanan sipil dan militer Jepang secara baik dan bersahabat, berbeda dengan tentara KNIL yang berlaku kasar karena diliputi rasa dendam. Semua tahanan sipil direncanakan ditempatkan di Bone, yang telah disediakan oleh Raja Bone Andi Mappanyukki. Akan tetapi, tahanan sipil itu kemudian ditampung di Malimpung, Pinrang, termasuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hingga Mei 1946, sekitar 20.000 orang tahanan sipil, termasuk tahanan militer, ditempatkan di Malimpung. Tahanan sipil tersebut secara berangsur dikembalikan ke Jepang. Sebelum pasukan Australia tiba di Makassar, pegawai sipil perempuan asal Jepang disuruh berpakaian perawat sehingga bebas dari penangkapan sampai dipulangkan ke Jepang.

Bersamaan dengan kedatangan tentara Australia di Makassar, ikut pula aparat NICA yang terdiri dari bekas pegawai pamong praja dan polisi Belanda yang pernah bertugas di wilayah Indonesia Timur (atau *Groote Oost*, Timur Besar, menurut istilah Belanda) untuk menjalankan kembali pemerintahan di wilayah itu seperti pada masa Hindia Belanda. Markas Besar Tentara Australia menjelaskan bahwa

NICA adalah bagian dari tentara Australia yang bertugas membantu menjaga keamanan dan ketertiban dan mengembalikan pemerintahan sipil di wilayah kekuasaan tentara Australia. Rencana pembentukan pemerintahan sipil telah dipersiapkan sebelumnya di Brisbane, Australia, sebagai realisasi Anglo-Dutch Civil Affairs Agreement pada 15 Agustus 1945, yang menyatakan Inggris akan menyerahkan kekuasaan sipil di Indonesia kepada Belanda setelah tugas Sekutu selesai.

Untuk menjalankan pemerintahan NICA di Morotai ditempatkan Chief Commanding Officer NICA (Chief CoNICA) untuk mendampingi Panglima Tertinggi Tentara Australia di Morotai yang bertanggung jawab atas seluruh wilayah Timur Besar dan Kalimantan, kecuali Bali. Daerah-daerah yang sebelumnya dipimpin oleh residen digantikan pejabat CoNICA; jabatan asisten residen atau kontrolir digantikan opsir NICA.

NICA yang dikepalai oleh Mayor Wagner mulai melancarkan propaganda melalui selebaran. Setelah pendaratannya di Makassar, disusul pendaratan KNIL, NICA langsung mengambil alih tangsi tentara Jepang di Mariso, dan melepas semua bekas pegawai Hindia Belanda dan pasukan KNIL yang masih berada dalam penjara. Oleh Mayor Wagner, semua bekas KNIL, baik yang ditawan oleh Jepang maupun yang berada di tengah masyarakat, direkrut dan dipersenjatai kembali, sedangkan bekas pegawai Hindia Belanda dipekerjakan kembali dan ditempatkan pada kantor CoNICA (Commanding Officer NICA) yang sudah dibentuk. Di antara pasukan KNIL yang dipersenjatai terdapat orang-orang Ambon.

NICA mulai bertugas di Makassar pada 22 September 1945 setelah Brigadir Jenderal Iwan Dougherty membacakan pengumuman dalam suatu rapat umum di Makassar bahwa Mayor Wagner, Komandan NICA, diangkat sebagai wakil Pemerintah Hindia Belanda. Selanjutnya, Mayor Wagner berkantor di Jalan Karebosi (sekarang Jalan Ahmad Yani, Kantor Walikota Makassar). Namun, baru beberapa hari bertugas, Wagner digantikan oleh Letnan Kolonel Dr. C. Lion Cachet (Oktober 1945) yang pernah menjadi Sekretaris Timur Besar di Makassar, dan diangkat sebagai CoNICA yang

membawahkan semua opsir dan kesatuan NICA yang beroperasi di Sulawesi Selatan.

Melihat kedatangan kembali orang-orang Belanda, apalagi dengan meng-intimidasi penduduk dan membuat tindakan sewenang-wenang, maka pemuda-pemuda yang sudah terorganisasikan merasa tidak senang dan merencanakan melakukan perlawanan bersenjata. Atas prakarsa pemuda Abdul Rivai Paerai yang mengadakan pertemuan dengan Sjamsul Ma'arif dan La Ode Hadi di rumah Lanto Daeng Pasewang diputuskan untuk menyerang beberapa sasaran tepat pada Hari Sumpah Pemuda (28 Oktober 1945) pukul 05.00 pagi. Sebagian pemuda itu sudah terlatih pada masa pendudukan Jepang (bekas Heiho) dan terhimpun dalam organisasi pemuda. Di antara pemuda pejuang itu adalah Jancy Raib (bekas Walikota Kotamadya Ujung Pandang 1983–88), M. Kasim DM, Maulwy Saelan, Wolter Mongisidi, Emmy Saelan, Ranggong Daeng Romo, dan lain-lain.

Pada 21 September 1945, H. F. Brune dilantik sebagai *Burgermeester Stadsgemeente van Macassar* atau Wali Kotapraja Makassar yang pernah ia jabat sebelum pendudukan tentara Jepang. Pemerintahan Kota Makassar kembali dijalankan berdasarkan *Stadsgemeente-ordonnantie Buitengewesten (Staatsblad 1938, Nomor 131)*. Namun, baru dua bulan menjabat, Brune digantikan oleh D. M. van Zwieten. Pengangkatan pejabat daerah versi NICA tersebut telah mengabaikan kenyataan sistem pemerintahan Republik Indonesia di daerah sebagaimana diputuskan dalam sidang PPKI pada masa awal kemerdekaan. Hal itu juga mencerminkan bahwa NICA tidak pernah melakukan “koordinasi” dengan pemerintah Republik yang sah. Sejak kedatangannya di Indonesia, Van Mook memang telah menyatakan tidak akan melakukan pembicaraan dengan pemimpin Indonesia yang ditudingnya berkolaborasi dengan Jepang.

Kembalinya KNIL di Makassar menimbulkan ketegangan, terlebih ketika satu peleton tentara itu—yang ditengarai dari unsur Ambon—mengendarai empat buah truk keluar dari Fort Rotterdam menembaki pemuda dan rakyat sipil di tepi jalan Lajangiru, Maccini, dan Maricaya pada 2 Oktober 1945. Atas peristiwa itu, massa

pemuda dan rakyat secara spontan melakukan pembalasan terhadap orang-orang Ambon yang sudah lama menetap di Makassar. Ironisnya, orang-orang Ambon yang jadi sasaran pembalasan itu sebenarnya pro-RI yang dibina oleh Johannes Latuharhary, Gubernur Maluku. Sementara, sebelum peristiwa itu, pasukan KNIL sudah memindahkan orang-orang Ambon yang dianggap pro-NICA ke dalam Fort Rotterdam, rumah sakit militer, dan tangsi-tangsi. Tindakan pembalasan itu berlanjut selama beberapa hari. Komandan Australia setempat memerintahkan seluruh pasukan Ambon tinggal di asrama mereka. Sebagian dari prajurit itu kemudian dibawa dengan kapal ke Balikpapan. Pada saat C. P. Maria Romme, Anggota Tweede Kamer Belanda, berkunjung ke Makassar pada 24 Januari 1947, Benteng Rotterdam dihuni sekitar 1.500 kepala keluarga Ambon.

Dengan adanya peristiwa tersebut, pada 15 Oktober 1945, bertempat di rumah Raja Bone Arumpone Andi Mappanyukki di Jongaya diadakan pertemuan antara raja-raja di Sulawesi Selatan. Pertemuan itu dihadiri sekitar 40 orang antara lain Andi Mappanyukki Arung Pone, Andi Djemma Datu Luwu, I Depu Arung Gilirang, Maradia Tjampalagiang, Maradia Balanipa, Karaeng Polombangkeng, Sultan Daeng Raja Karaeng Gantarang, Andi Makkasau Parenrengi Datu Suppa Toa, Andi Abdullah Bau Masepe Datu Suppa Lolo (putra Andi Mappanyukki), dan lain-lain. Pertemuan itu berhasil merumuskan deklarasi yang pada intinya mendukung kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia di Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. G. S. S. J. Ratulangi, sebagaimana pernah disampaikan kepada Sukarno ketika berkunjung ke Makassar (April/Mei 1945).

Pada 1 Desember 1945, diadakan kembali Konferensi di Pare-Pare yang dihadiri bangsawan dan pejuang Sulawesi Selatan yang menolak kedatangan Belanda. Sebelum itu, di Palopo, pada akhir September, diadakan rapat raksasa yang dipimpin oleh Andi Kaso, Petor Besar Luwu, yang mengeluarkan pernyataan bahwa (a) Daerah Luwu adalah daerah Republik Indonesia; (b) Rakyat/pegawai daerah Luwu adalah rakyat dan pegawai Republik Indonesia; dan (c) Badan

Pemerintah akan mogok jika NICA datang dan akan menentang bersama rakyat. Selanjutnya pada 5 Oktober 1945 dibentuk satu badan perjuangan yaitu Pemuda Republik Indonesia yang kemudian menjelma menjadi Pasukan Keamanan Rakyat.

Pada 19 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Iwan Dougherty digantikan oleh Brigadir Jenderal F. O. Chilton sebagai Panglima Tentara Australia di Makassar. Menyusul serangan kembali para pejuang yang terdiri dari kelompok Barisan Berani Mati (*Bo-Ei Taishin*), bekas Kaigun Heiho, dan pelajar SMP terhadap beberapa lokasi strategis di Makassar. Serangan selama tiga hari (25–28 Oktober) itu antara lain menasar Markas CoNICA, KIS Kampement di Mariso, dan Stasiun Radio Mattoanging dan Maradekaya, Empress Hotel (sekarang Perguruan Athirah), Heze Kiyoku pantai Losari (Pasanggahan Makassar), dan Asrama Polisi Gowa, Kantor Polisi samping Balai Kota, dan Kantor Gubernur di Jalan Karebosi (Jalan Ahmad Yani) sehingga banyak menimbulkan korban.

Sebagai pembalasan dari pihak Belanda, pada 27 Oktober 1945 jam 11.00, markas besar perlawanan rakyat di Jongaya diserbu tentara NICA sehingga pemuda pejuang memindahkan markasnya keluar kota di Polombangkeng. Atas kejadian itu, pada 29 Oktober 1945 Chilton mengeluarkan maklumat yang menegaskan akan mengambil tindakan keras terhadap pelanggaran keamanan serta “kejahatan” yang dilakukan terhadap pemerintah militer Sekutu di Sulawesi Selatan, termasuk kepemilikan dan pemakaian senjata.

Sejauh itu, perkembangan situasi di Sulawesi Selatan tampak makin tidak menentu. Perubahan polarisasi politik makin tajam setelah beberapa tokoh politik dan pemuka masyarakat tradisional bersedia bekerja sama dengan NICA, antara lain Nadjamuddin Daeng Malewa, Baso Daeng Malewa, Abdoellah Daeng Mappudji, Husain Puang Limboro, Mr. S. Binol, M. K. W. Tambunan, dan J. H. Hattu. Situasi itu mendorong Gubernur Ratulangi membentuk Pusat Keselamatan Rakyat Sulawesi pada November 1945 yang diketuainya sendiri.

Sementara itu, perkembangan politik di tingkat nasional menunjukkan situasi yang merugikan bagi Indonesia. Pada 4 Januari

1946, ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta setelah sehari sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden meninggalkan Jakarta; sementara Perdana Menteri Sjahrir tetap di Jakarta. Perkembangan akseleratif terjadi dalam organisasi pertahanan/keamanan. Pada 1 Januari 1946, pemerintah mengubah Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, kemudian diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI) pada 25 Januari 1946. Selanjutnya melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia 7 Juni 1947, Tentara Rakyat Indonesia diubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhitung sejak 3 Juni 1947. Pada hari itu juga Presiden Sukarno melantik Jenderal Sudirman sebagai panglima TNI di Gedung Agung Yogyakarta. Perubahan organisasi pertahanan/keamanan itu menunjukkan kebijakan pemerintah menghadapi situasi aktual yang berkembang saat itu.

Di Sulawesi, sejalan dengan perubahan TKR menjadi TRI, dibentuk satuan tempur TRI Persiapan Sulawesi. Pasukannya berasal dari pemuda-pemuda Sulawesi yang sedang mengikuti pendidikan Sekolah Perwira Cadangan di Solo. Satuan tempur itu dinamai Resimen Hasanuddin bemarkas pusat di Yogyakarta. Resimen Tempur Hasanuddin dengan satuan-satuan ekspedisinya disiapkan untuk menghadapi KNIL di Sulawesi Selatan. Berdasarkan mandat Jenderal Sudirman kepada Andi Mattalatta, dibentuk TRI dari kelasykaran bersenjata di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Kesatuan itu pun diberi nama TRI Divisi Hasanuddin melalui konferensi yang diadakan oleh Andi Mattalatta pada 20 Januari 1947 di Desa Paccekke, Soppengriaja, Barru.

Pada akhir Januari 1946, seluruh wilayah Sulawesi Selatan praktis dikuasai NICA di bawah pengawasan Tentara Australia. Sebagai awal persiapan pembentukan Negara Timur Besar dan untuk menjalankan pemerintahan sipil NICA, ditetapkan "Ketentuan-ketentuan sementara yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan pada negeri-negeri swapraja di wilayah Borneo dan Timur Besar" (*Voorloopige voorzieningen met betrekking tot de bestuursvoering in de gewesten Borneo en de Groote Oost; Staatsblad* 1946, Nomor

17, 13 Februari 1946). Peraturan ini membuka kemungkinan pembentukan daerah-daerah otonom yang pada dasarnya tunduk kepada perundang-undangan sebelumnya yang berlaku bagi *zelfbesturende landschappen*, *groepsgemeenschap*, *stadsgemeente*, dan *locaal ressort*. Hal itu pernah dibicarakan oleh Lion Cachet dengan Ratulangi pada 18 dan 20 Desember 1945; dan dengan raja-raja seluruh Sulawesi Selatan serta pemuka masyarakat pada 29–30 Desember 1945 di Makassar.

Selain itu dalam *Staatsblad* 1946 Nomor 18 (13 Februari 1946) dinyatakan pemberian kekuasaan dan kebebasan yang lebih besar kepada daerah swapraja (*landschappen*), dengan pemerintahan yang dijalankan memperhatikan kontrak-kontrak politik serta aturan-aturan Swapraja 1938. Peraturan itu menjadi dasar pembentukan daerah-daerah otonom baru di Sulawesi Selatan dengan sebutan *neo-landschappen*, *neo-groepsgemeenschap*, dan *neo-stadsgemeente*. *Neo-landschap* adalah suatu daerah otonom yang dibentuk seperti daerah otonom lainnya, sedangkan *landschap* (sejati) merupakan kekuasaan asli yang dijalankan oleh raja-raja yang diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Daerah-daerah otonom yang dibentuk berdasarkan surat penetapan Gubernur 14 September 1938, Nomor 29 (*Staatsblad* Nomor 529), meliputi 30 *Zelfbesturende Landschappen* (Tanah-tanah Kerajaan), yaitu Bone, Luwu, Gowa, Buton, Wajo, Soppeng, Sidenreng, Sawitto, Rappang, Malusetasi, Suppa, Batulappa, Kassa, Barru, Tanette, Soppengriaja, Majene, Balanipa, Cenrana, Pembauang, Binuang, Tappalang, Mamuju, Tana Toraja, Enrekang, Maiwa, Alla, Bonto Batu, dan Konawe. Sedangkan daerah-daerah yang diperintah langsung oleh wakil-wakil Pemerintah Hindia Belanda adalah Bonthain, Pangkajene, Makassar dan sekitarnya di luar Kotapraja Makassar. Jumlah penduduk dari keseluruhan daerah itu adalah 3.850.000 jiwa.<sup>3</sup>

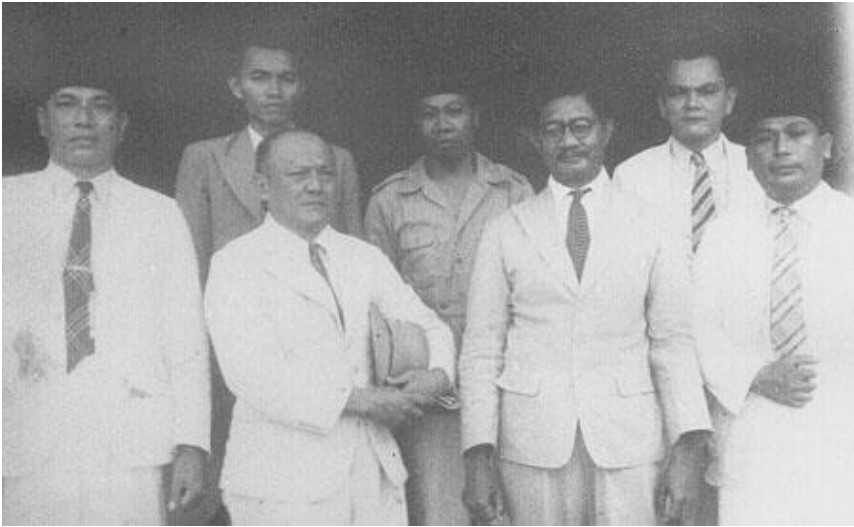
Berdasarkan *Staatsblad* 1946 Nomor 17, Makassar berubah status menjadi Neo-Stadsgemeente Makassar, semacam distrik federal (ibu kota tempat kedudukan Pemerintah Negara Indonesia Timur). Sebagai kelanjutan dari hasil pertemuan antara CoNICA

dengan Dr. G. S. S. J. Ratulangi, raja-raja, dan tokoh masyarakat Sulawesi Selatan, maka Pejabat Direktur Pemerintahan Dalam Negeri Dr. W. Hoven di Jakarta mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 2 tanggal 25 Februari 1950 tentang Peraturan Pembentukan Dewan Perwakilan Sementara untuk Sulawesi Selatan yang ditandatangani di Makassar. Dewan Sementara Sulawesi Selatan terdiri dari 42 orang anggota yang diketuai oleh CoNICA. Dalam susunan keanggotaan, empat anggota disediakan untuk warga negara Indonesia dipilih oleh Dewan Kotapraja Makassar.

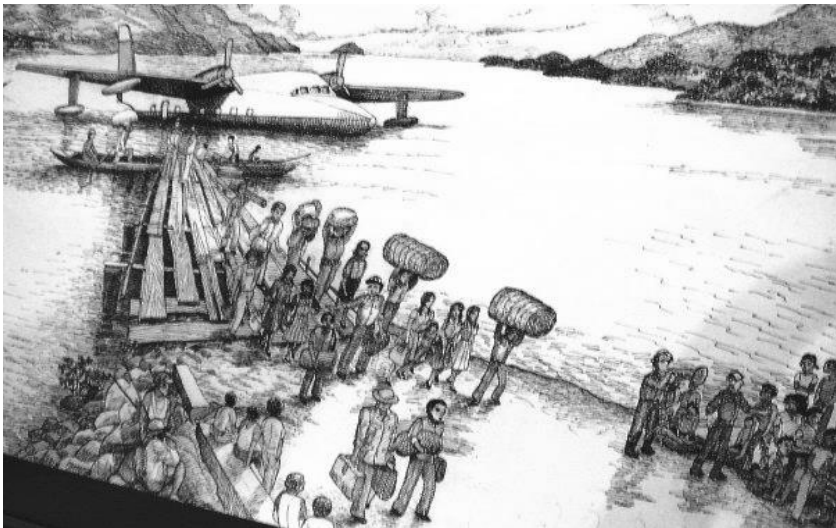
### **RATULANGI DI SERUI**

Gubernur G. S. S. J. Ratulangi yang menjalankan pemerintahannya di Sulawesi sejak 5 September 1945, yang mendapat dukungan dari raja-raja, bangsawan dan pemuka masyarakat di Sulawesi, hanya bertahan selama 7 bulan. Pada 5 April 1946, Ratulangi bersama anggota Pusat Keselamatan Rakyat dan stafnya yaitu Lanto Daeng Pasewang, Ince Saleh Daeng Tompo, Pondaag, Latumahina, dan Tobing ditangkap oleh CoNICA dan dijebloskan ke Penjara Hoogepad selama dua bulan. Setelah itu, Ratulangi dan kawan-kawan diangkut dalam rombongan ke tempat pengasingan yang mula-mula dirahasiakan.<sup>4</sup> Mereka ternyata dibawa ke Serui, Yapen, Irian Barat, pada 18 Juni 1946. Dalam laporan sebuah surat kabar di Negeri Belanda, Van Mook mengatakan bahwa Dr. Ratulangi dikirim ke Serui, sebuah pulau di utara New Guinea.<sup>5</sup> Rombongan pertama menumpang pesawat Catalina yang diterbangkan langsung ke Serui.<sup>6</sup> Rombongan kedua menaiki pesawat terbang biasa melalui Ambon, Morotai, dan mendarat di Biak.





Dari kiri ke kanan: Lanto Daeng Pasewang, I. P. L. Tobing, G. S. S. J. Ratulangi, Soewarno, Josef Latumahina, W. S. T. Pondaag, dan H. I. A. Saleh Daeng Tompo (Sumber: <https://laniratulangi.wordpress.com/2009/09/07/1946-exile-from-makassar-to-serui/>).



Sketsa kedatangan rombongan Ratulangi dan kawan-kawan dalam pengasingan di Serui (1946) (Sumber: <https://lanisphotoblog.wordpress.com/>).

Dari sisi kepentingan Belanda, tindakan pengasingan terhadap Gubernur Ratulangi dan anak buahnya itu dimaksudkan untuk mempercepat penyerahan kekuasaan dari pihak Sekutu kepada NICA yang berlangsung pada 10 Juli 1946. Selain itu, NICA berencana mengadakan konferensi di Malino (15–25 Juli 1946) sebagai upaya menyemai embrio pembentukan Negara Indonesia Timur. Pemerintahan NICA di Makasar beranggapan bahwa Ratulangi dan beberapa anggota Pusat Keselamatan Rakyat di Makasar akan menghambat upaya pemulihan keamanan dan pemerintahan di Makasar.<sup>7</sup> Sebulan kemudian istri Ratulangi dan para istri kawan-kawannya diberangkatkan ke Serui, diperkirakan jumlah keseluruhannya 40 orang.

Penangkapan terhadap tokoh-tokoh tersebut menimbulkan protes, baik di Makassar maupun pemuda asal Sulawesi di Yogyakarta. Pengasingan dilakukan dengan alasan sesuai Pasal 20 SOB (*Staat van Oorlog en Beleg*) atau Keadaan Perang untuk menjaga ketenangan dan ketertiban umum.

Setiba di pengasingan, penguasa mengeluarkan maklumat kepada seluruh penduduk bahwa mereka dilarang mengadakan hubungan dengan para tahanan tersebut. Pada awalnya mereka dijauhi penduduk asli karena dianggap berbahaya, namun lambat laun penduduk menyadari bahwa para tahanan itu sebenarnya orang-orang baik. Seiring waktu, kedekatan masyarakat dengan para tahanan mampu membangkitkan kesadaran dan pengertian tentang perjuangan menjadi satu negara dan bangsa yang merdeka. Penduduk asli kemudian menyebut para tahanan itu sebagai “tuan-tuan merdeka.”

Setelah dua tahun berlangsung, kehidupan para tahanan di pengasingan semakin baik. Jika pada tahun pertama para tahanan tidak diberi beras dan gula maka pada tahun berikutnya mereka memperoleh banyak sumber pangan dari hasil bercocok tanam di Serui. Tantangan bagi mereka ialah membuka lahan dari rimba yang penuh pohon besar dan hewan melata. Mereka bergotong royong melakukan banyak aktivitas bertani dan mengambil lauk ikan yang melimpah di Lautan Pasifik.<sup>8</sup>



Protes masyarakat atas penangkapan terhadap Ratulangi (Sumber: Repro Garda Maeswara, Sejarah Revolusi Indonesia 1945-1950)

Pada awalnya, Ratulangi dan kelompoknya dilarang mengadakan kontak dengan penduduk di sekitarnya karena pemerintah setempat menganggap mereka sebagai "kriminal" dan sangat berbahaya. Namun, pemerintah Belanda akhirnya memberi kebebasan kepada mereka untuk berhubungan dengan masyarakat setempat. Kontak Ratulangi dengan penduduk Serui diawali oleh kedatangan "rahasia" Yakop Thung Tjing Ek, seorang keturunan Tionghoa asal Makassar. Bersama penduduk lain, Benjamin Kajai dan Alwi Rahman, Yakop bergantian mengunjungi Ratulangi hingga ketiganya mengetahui latar belakang mengapa Ratulangi dan kawan-kawan diasingkan di Serui. Hubungan lebih "akrab" lagi ketika Martha Raweyai, istri Yakop, menjadi pengasuh anak-anak keluarga Ratulangi.

Kesempatan itu dimanfaatkan Ratulangi untuk mengadakan hubungan lebih luas dengan orang-orang Papua di Serui. Kontak juga dipermudah oleh kehadiran sejumlah orang Indonesia lainnya yang menetap di Serui sebelum kehadiran Ratulangi. Kepada orang-orang Serui yang ditemui, Ratulangi dan Latumahina menjelaskan tentang keadaan yang terjadi di Jakarta dan di berbagai wilayah di Indonesia.

Ratulangi juga meyakinkan para elite lokal bahwa Papua adalah bagian dari wilayah Indonesia yang sudah merdeka pada 17 Agustus 1945. Ratulangi berupaya memperoleh dukungan dari masyarakat di Serui untuk mempertahankan persatuan dari Sabang hingga Merauke. Mereka adalah guru-guru asal Ambon dan Ternate serta pedagang asal Sumatera dan Makassar. Dalam beberapa pertemuan akhirnya diambil kesepakatan membentuk partai.

Di antara orang Papua yang sering berhubungan dengan Ratulangi adalah Silas Papare, Stefanus Rumbewas, Benjamin Kajai, Yakop Thung Tjing Ek, dan Alwy Rahman yang berasal dari Sumatera. Mendapat kebebasan dari pemerintah setempat, Ratulangi dan Latumahina bersama sejumlah tokoh Papua di Serui membentuk PKII pada 29 November 1946. Ratulangi terpilih sebagai Pemimpin Umum, sedangkan Silas Papare sebagai Ketua, Baldus Dumatubun sebagai Wakil Ketua. Sekretaris dijabat Alwi Rahman; Bendahara adalah Achmad Djalali, dan para Komisaris terdiri dari A. Wanane, A. Waimuri, Benjamin Kajai, dan Paulus Pajawa. Dibentuk pula Dewan Penasihat yang terdiri dari Barnabas Aninam dan L. R. Tiwo

PKII bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Serui dan mempromosikan perjuangan Indonesia merdeka di Serui dan di Papua pada umumnya. Kehadiran Ratulangi di Serui memiliki arti penting bagi perkembangan masyarakat setempat. Ia mampu memotivasi elite Papua di Serui mengenal keindonesiaan. Tidak kalah penting adalah peran Silas Papare, seorang perawat senior dan mantan tentara Amerika yang pernah bergabung dalam tentara Sekutu setelah Perang Dunia. Ia pernah bekerja pada perusahaan minyak di Sorong dan dipandang memiliki andil besar dalam melayani pasien orang Indonesia yang bekerja di Sorong tanpa memandang asal-usul latar belakangnya. Kedudukannya sebagai tentara Sekutu, menempatkan Papare mula-mula sebagai "lawan" bangsa Indonesia. Namun, sikapnya berbalik simpati kepada Indonesia ketika ia bertemu Ratulangi, dan melihat kenyataan lambannya perkembangan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia di bawah pemerintahan Belanda/NICA. Pada Februari 1946, Silas Papare dikembalikan ke Serui dan bekerja di rumah sakit.<sup>9</sup>



Sketsa Ratulangi dan kawan-kawan di Serui  
(Sumber: <https://lanisphotoblog.wordpress.com/>)



Rumah pengasingan Ratulangi di Serui, Pulau Yapen, Papua  
(Sumber: <https://lanisphotoblog.wordpress.com/>).

Pada 23 Maret 1948, Ratulangi dibebaskan dari tahanan pengasingan dan langsung dibawa oleh Belanda ke Yogyakarta bergabung dengan pemerintahan Presiden Sukarno. Di Yogyakarta, Ratulangi mendapat tugas baru sebagai penasihat pemerintah pusat dan anggota delegasi Indonesia dalam perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Belanda pada tahun 1948–49. Sempat kembali ditangkap tentara Belanda pada 25 Desember 1948 ketika Belanda menyerbu dan menduduki Yogyakarta. Namun, karena kondisi kesehatannya yang menurun, Ratulangi dibebaskan pada Februari 1949 dan dibawa ke Jakarta.



Keluarga Ratulangi yang dibebaskan dari pengasingan di Serui, Papua, tiba di Pelabuhan Tanjungpriok, 14 Juni 1948 (Sumber: Koleksi Perpustakaan Nasional).

## **PENUTUP**

Menurut rencana, Belanda akan mengasingkan kembali Ratulangi ke Pulau Bangka bersama Sukarno dan tokoh nasional yang lain. Akan tetapi rencana pengasingan terhadap Ratulangi itu itu batal lantaran gangguan kesehatan pada mantan Gubernur Sulawesi itu. Maka, hari-hari Ratulangi di Jakarta praktis dihabiskan untuk istirahat dan berobat. Sesekali menjawab wawancara pers baik nasional maupun internasional. Aktivitas politik pun ditinggalkan meski semangat juangnya tetap menyala-nyala.

Namun, semangat yang menyala-nyala itu padam seiring berpulangnya Ratulangi pada 30 Juni 1949. Serangan jantung menyebabkan ia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Sesaat sebelumnya, ia masih sempat bersenda gurau dengan putri bungsunya, hingga setengah jam kemudian keadaan berubah menjadi duka. Makin terasa menyedihkan karena Ratulangi meninggal dunia dalam status sebagai tawanan musuh. Jenazahnya mula-mula dimakamkan di Jakarta, namun kemudian dipindahkan ke Tondano, tanah leluhurnya di Sulawesi Utara. Berdasar Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 590 Tahun 1961, tanggal 9 November 1961, Dr. G. S. S. J. Ratulangi ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional.

Sebagai gubernur, Ratulangi memang tidak memiliki banyak waktu untuk menjalankan roda pemerintahannya di Sulawesi, tempatnya bertugas. Namun, keterbatasan waktu itu tidaklah menghentikan langkahnya untuk memperjuangkan Indonesia dan menyatukan Papua sebagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selama hidupnya, Ratulangi senantiasa berjuang untuk kepentingan dan kemuliaan bangsa dan Tanah Air, tidak jarang ia harus mengenyampingkan kepentingan pribadi.

Ratulangi adalah sosok nasionalis sejati yang ikut mengantar Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Perjuangannya dalam ikut memerdekakan dan melepaskan Indonesia dari belenggu kolonialisme dan imperialisme Belanda tidak jarang membuatnya terasing dan mengalami kehidupan sebagai tawanan. Ia menjadi

sosok agitator politik dan nasionalis Indonesia. Pengasingannya di Serui, selama kurang lebih dua tahun, berhasil memerah-putihkan sebagian Tanah Papua tanpa pengorbanan darah. Kemampuannya dalam menyusun rencana melepaskan diri Papua dari kekuasaan Belanda itulah yang membuatnya berbeda dengan perjuangan kemerdekaan di daerah lainnya yang sarat akan perjuangan fisik.

Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi memulai perjuangannya tanpa harta duniawi. Ia hidup dalam kesederhanaan, dan mengisyaratkan bahwa politik bukanlah alat untuk memperkaya diri. Maka, ia pun meninggal dunia tanpa mewariskan harta kekayaan bagi keluarganya yang ditinggalkan. Satu-satunya yang ia tinggalkan hanyalah keharuman nama sebagai pahlawan nasional bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia.



**Catatan Akhir:**

<sup>1</sup>Maskury, *Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1973).

<sup>2</sup>W. S. T Pondaag, *Pahlawan Kemerdekaan Nasional Mahaputera Dr. G. S. S. J. Ratulangi* (Surabaya: Jajasan Penerbitan Dr. G. S. S. J. Ratulangi, 1966), hlm. 79.

<sup>3</sup>Lihat *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 97–8.

<sup>4</sup>Lihat *Het Dagblad*, 17 Juni 1946.

<sup>5</sup>Lihat *De Locomotief*, 24 April 1948.

<sup>6</sup>Kesaksian Lani Ratulangi, anak Ratulangi yang pada saat kejadian berumur 13 tahun <https://lanisphotoblog.wordpress.com/2010/05/23/serui-1946-dalam-kenangan/>

<sup>7</sup>Ide Anak Agung Gde Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*, Gajah Mada University Press: 1985., hlm 49.

<sup>8</sup>Suatu waktu pernah terjadi pemberian bantuan dari Palang Merah Indonesia di Jakarta berupa dua kantong gula putih yang dijatuhkan dari pesawat terbang. Bantuan itu disambut dengan penuh terima kasih dan rasa gembira sebab di Serui terjadi kelangkaan stok gula selama setahun. Lihat Pondaag, *Pahlawan Kemerdekaan*, hlm 88.

<sup>9</sup>Bernarda Materay, “Penyemaian Dua Nasionalisme Papua dan Indonesia di NNG selama Pemerintahan Belanda 1925–1962,” Disertasi, Universitas Indonesia, hlm 116–8.

---

# JOHANNES LATUHARHARY

---





# **JOHANNES LATUHARHARY**

## **HARI-HARI MEMBANGUN PROVINSI**

HELEN

Johannes Latuharhary merupakan salah seorang tokoh yang sangat berjasa selama masa perjuangan dan setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak hanya perjuangan fisik melainkan juga dalam ide dan pemikiran tentang kesatuan bangsa di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Selain itu, ia merupakan gubernur pertama, pelopor dan peletak dasar pemerintahan di Provinsi Maluku setelah Indonesia merdeka. Namanya diabadikan dalam pelbagai bentuk, antara lain sebagai nama kapal barang pada 1966.

Lahir di Desa Ullath, Kota Saparua, Maluku, pada 6 Juli 1900, Johannes Latuharhary adalah anak pertama pasangan Jan Latuharhary dan Josefin Hiariej. Berayahkan seorang guru membuat sulung dari empat bersaudara itu sadar akan arti penting pendidikan. Kesadaran itu membuat Latuharhary bersungguh-sungguh dalam bersekolah. Ia memperoleh pendidikan dasar di Saparuasche School, sekolah kelas satu (*eerste klasse school*) di Kota Saparua. Setiap hari, Latuharhary harus berjalan kaki dari Haria menuju sekolahnya di Saparua. Namun, keadaan itu tidak membuat lemah semangatnya dalam menuntut ilmu. Ayahnya berpikir jika Latuharhary kecil ingin maju dalam pendidikan, ia harus disekolahkan di Ambon. Pilihan ayahnya jatuh pada *Europesche Lagere School*, sekolah khusus bagi anak-anak Belanda. Berhubung Latuharhary merupakan anak guru, ia berkesempatan belajar di sekolah itu.

Pada 1909, Latuharhary kecil pindah ke Ambon untuk bersekolah di *Europesche Lagere School* (ELS), setingkat Sekolah Dasar pada masa sekarang. Di Ambon, Latuharhary tinggal bersama keluarga guru Leihitu Tisera dan dianggap sebagai *anak piara*<sup>1</sup> dalam keluarga tersebut. Sebagai anak piara, Latuharhary kecil dididik melakukan berbagai macam pekerjaan rumah tangga. Pengalaman itu membantu pembentukan kepribadian Latuharhary kecil menjadi manusia yang tangguh di kemudian hari.

Latuharhary dikenal sebagai murid yang cerdas. Menamatkan ELS dengan hasil yang memuaskan pada 1917, ia melanjutkan belajar di HBS (*Hogere Burger School*)<sup>2</sup> dan tinggal di rumah keluarga Piet Rugebrecht. Kerajinan, ketekunan, kepandaian dan kecerdasan membawa Latuharhary berhasil dengan baik dalam menempuh pelajaran dan naik kelas setiap tahun dengan menguasai bahasa Belanda, Inggris, Jerman dan Perancis.<sup>3</sup> Ia juga memiliki minat dan bakat pada bidang yang lain, seperti musik, sepak bola, dan membaca buku.

Pada 25 Mei 1923, Latuharhary lulus dari HBS yang ditempuhnya selama lima tahun dengan hasil yang memuaskan.<sup>4</sup> Kemudian, ia melanjutkan studi ke Fakultas Hukum Universitas Leiden di Negeri Belanda. Pada masa itu, calon mahasiswa Fakultas Hukum harus mengikuti ujian tambahan berupa bahasa klasik Yunani dan Latin agar bisa mempelajari hukum Romawi. Bagi Latuharhary yang tampak berbakat mempelajari bahasa asing tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam menempuh ujian tambahan tersebut. Maka dimulailah babak baru bagi Latuharhary sebagai mahasiswa hukum di Universitas Leiden dengan beasiswa dari *Ambonsch Studiefonds*.<sup>5</sup>

Sebelum Latuharhary berangkat ke Negeri Belanda, telah ada sejumlah pemuda Indonesia yang sedang belajar di berbagai universitas di sana, seperti Ahmad Subardjo, A. A. Maramis, Nasir Datuk Pamuntjak, Sutomo, J. B. Sitanala, Sukiman, Mohammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, dan lain-lain. Dalam masa studinya di Negeri Belanda, para pemuda tersebut menyadari bahwa kebebasan yang mereka rasakan di negeri orang sangat berbeda dengan yang mereka

rasakan di Tanah Air sendiri. Perasaan itu akhirnya membentuk dan menyatukan mereka dalam sebuah perkumpulan yang kemudian menumbuhkan kesadaran nasional. Perkumpulan ini kelak dikenal sebagai PI atau Perhimpunan Indonesia.

Awalnya, Latuharhary tidak banyak bergaul dengan mahasiswa yang bergabung dalam PI. Menurut Mr. Soenario, mahasiswa Fakultas Hukum kala itu, “. . . ia [Latuharhary] hidup menyendiri. Pada hari lebaran biasanya orang-orang Indonesia berkumpul. Tetapi saya tidak pernah melihat Latuharhary di antara kita. Pada waktu itu dia tidak menjadi anggota PI.”<sup>6</sup> Akan tetapi, pergaulannya dengan kawan-kawan satu fakultasnya seperti Ali Sastroamidjojo, Subardjo, Abdul Syukur, Budiardjo, Iwa Kusumasumantri, dan Hatta, yang merupakan eksponen PI, sedikit-banyak mempengaruhi dan memperkuat pandangan politik Latuharhary dalam melihat penjajahan dan kemerdekaan.

Latuharhary berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya dengan baik. Di bawah bimbingan Profesor Dr. Van Vollenhoven, ia meraih gelar *Meester in de Rechten* (Sarjana Hukum) dengan spesialisasi hukum adat dari Universitas Leiden pada Juni 1927. Prestasi itu mengantarkan Latuharhary sebagai putra Maluku pertama yang berhasil meraih gelar sarjana di luar negeri.<sup>7</sup> Pada tahun yang sama ia kembali ke Indonesia dengan menumpang kapal barang Jerman Derfflinger karena tidak mempunyai cukup uang untuk menaiki kapal penumpang.

## **BERJUANG DI TANAH AIR**

Johannes Latuharhary kembali ke Tanah Air dengan membawa rekomendasi dari Van Vollenhoven, guru besarnya semasa kuliah di Leiden. Dengan rekomendasi itu, ia diangkat sebagai *ambtenaar ter beschikking* (pegawai yang diperbantukan) pada President van de Raad van Justitie (Ketua Pengadilan Tinggi) di Surabaya sejak 22 Desember 1927. Oleh karena prestasi dan dedikasi yang penuh tanggung jawab, Latuharhary diangkat sebagai *landrechter* atau hakim di Surabaya dan menjadi *givier* di Raad van Justitie (semacam

Dewan Kehakiman yang bertugas dan berwenang menangani masalah pidana dan perdata di wilayah Hindia Belanda) dan bekerja selama dua tahun di kantor tersebut.<sup>8</sup>

---

Mr. Johannes Latuharhary  
(Sumber: Perpustakaan Nasional  
Republik Indonesia)

---



Karier Latuharhary di bidang kehakiman terus berjalan seiring dengan berkembangnya kesadarannya akan arti kemerdekaan dan lepas dari penjajahan. Ia meyakini bahwa suatu saat Indonesia harus merdeka. Keyakinan itu pula yang mendorong Latuharhary bergabung dalam Sarekat Ambon, organisasi yang pada masa itu menjadi wadah bagi masyarakat Ambon Maluku yang berada di Pulau Jawa. Di kemudian hari, ia terpilih menjadi ketua Sarekat Ambon setelah ketua sebelumnya, A. J. Patty, ditangkap Belanda.<sup>9</sup>

Restrukturisasi dan menentukan posisi organisasi dalam pergerakan nasional menjadi fokus utama Latuharhary ketika menjabat sebagai ketua Sarekat Ambon. Di bawah kepemimpinannya ide-ide dan perspektif baru dimasukkan ke dalam tubuh Sarekat Ambon. Ide persatuan dan kemerdekaan menjadi tujuan utama perjuangan Latuharhary.<sup>10</sup> Menurutnya, persatuan dan kesatuan di kalangan rakyat Maluku harus solid sehingga kemerdekaan bisa

dicapai. Mengubah dasar-dasar Sarekat Ambon merupakan bentuk restrukturisasi lain yang dilakukan Latuharhary. Ia mengatakan bahwa tujuan organisasi Sarekat Ambon adalah untuk kemerdekaan Indonesia dan memajukan daerah Maluku.



---

Alexander Jacob Patty,  
1920 Sumner: KITLV

---

Untuk mencapai tujuan itu, langkah-langkah yang ditempuh organisasi adalah sebagai berikut.

1. Memupuk rasa persatuan di antara penduduk Maluku
2. Perbaikan dalam bidang sosial-ekonomi penduduk Maluku
3. Peningkatan dan perluasan pendidikan bagi orang-orang Maluku
4. Memberi sokongan keuangan bagi pemuda-pemuda Maluku yang ingin melanjutkan pendidikan
5. Menentang sentimen-sentimen rasial
6. Turut mempertahankan negara dalam keadaan bahaya
7. Bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain yang setuju.<sup>11</sup>

Tindakan Latuharhary tersebut membawa suasana baru dalam Sarekat Ambon. Manuvernya dalam memperjuangkan isu politik yang diusung, membawa Sarekat Ambon ke dalam kancah



pertentangan politik dengan Moluksc Politiek Verbond.<sup>12</sup> Latuharhary menyadari bahwa penggalangan persatuan nasional dengan partai-partai politik dalam Ambon Raad<sup>13</sup> tidak akan berjalan seperti yang diharapkannya karena tidak ada wakil Sarekat Ambon dalam Volksraad.<sup>14</sup>

Melihat situasi tersebut, Wakil Ketua Sarekat Ambon, J. F. Tuwanakotta, mengusulkan agar Sarekat Ambon bergabung dalam PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) namun Latuharhary menolaknya. Latuharhary berpendapat bahwa Sarekat Ambon harus terhindar dari pertentangan agama dan tidak boleh melakukan kerja sama dengan organisasi yang berlandaskan agama. Ia mengumumkan pendiriannya itu bahwa Sarekat Ambon bersikap netral terhadap agama, menaruh simpati terhadap Indonesische Studieclub, dan tidak menyetujui Sarekat Islam yang membawa agama dalam pergerakan kebangsaan.

Sikap dasar Sarekat Ambon tersebut kembali ditegaskan dalam salah satu terbitan *Haloean* sebagai media dan alat komunikasi organisasi. Pengurus besar mengumumkan bahwa Sarekat Ambon tidak akan masuk PPPKI selama organisasi yang tergabung di dalamnya tidak bersikap netral terhadap agama. Latuharhary mempertahankan sikapnya secara tegas dengan jalan menutup pintu kerja sama bagi organisasi yang mempropagandakan agama di dalam pergerakan nasional.

Keputusan pengurus Sarekat Ambon menimbulkan gejolak di kalangan pergerakan nasional terutama Sarekat Islam. Organisasi yang disebut terakhir ini berpendapat bahwa emansipasi tanpa agama Islam sebagai dasar tidak dapat diterima. Situasi terus memanas sehingga salah seorang pendiri Sarekat Ambon cabang Surabaya, A. M. Sangaji, yang kebetulan salah seorang pimpinan Sarekat Islam, keluar dari Sarekat Ambon.<sup>15</sup>

Latuharhary justru menghadapi persoalan eksistensi Sarekat Ambon dan hakikat perjuangannya dalam pergerakan nasional ketika organisasi itu belum bergabung dalam PPPKI. Dalam pergerakan nasional, Sarekat Ambon berada di luar PPPKI sehingga perlu

merapatkan barisan dengan organisasi kebangsaan lainnya seperti Budi Utomo dan Indonesische Studieclub. Selain itu, sikap keras pemerintah kolonial yang tidak mengakui organisasi kemasyarakatan, termasuk Sarekat Ambon, membuat perjuangan Latuharhary lewat organisasi itu menjadi semakin sulit. Hal itu kemudian menyadarkan dirinya bahwa cara nonkooperatif saat itu akan menghambat pencapaian tujuan perjuangan. Sebaliknya, dengan jalan kooperatif perjuangan untuk lepas dari penjajahan dan memerdekakan diri akan tercapai. Atas dasar itulah, pada 1932 Sarekat Ambon bergabung dengan PPPKI. Dalam organisasi yang dipimpin Dr. Sutomo itu, Latuharhary ditunjuk sebagai sekretaris.<sup>16</sup>

Waktu terus berjalan, 8 Maret 1942 menjadi titik akhir kekuasaan kolonial Belanda dan awal pendudukan militer Jepang di Indonesia. Terjadi peralihan kekuasaan yang menimbulkan kekacauan di sana-sini. Tentara Jepang yang pada awal kedatangannya mempropagandakan diri sebagai “cahaya, pelindung, dan pemimpin Asia,” ternyata menjalankan kekuasaan yang fasistis. Partai politik dan organisasi pergerakan serta media massa yang terbit pada masa sebelumnya dibubarkan. Rakyat dipaksa tunduk menghormat kepada kaisar dan bendera Jepang. Bagi yang tidak tunduk pada kemauan pemerintah pendudukan, polisi dan tentara Jepang tidak segan-segan melakukan penyiksaan. Terjadi penangkapan terhadap orang-orang Belanda, Indo, Ambon, Manado, dan Timor.

Mr. Johannes Latuharhary termasuk orang yang mengalami penangkapan tentara Jepang, dan ditahan selama empat bulan. Dua bulan setelah dibebaskan dari tahanan, Latuharhary pindah ke Jakarta, aktif di bidang sosial, mengurus ibu-ibu dan anak-anak Maluku dan Timor yang ditinggalkan suaminya karena ditawan atau melarikan diri ke Australia. Pemerintah pendudukan Jepang kemudian menugasi Latuharhary sebagai kepala Kantor Urusan Penduduk Maluku yang berada di seluruh Jawa. Untuk melaksanakan tugasnya itu, ia ditempatkan pada bagian Urusan Dalam Negeri (*naimubu*) di bawah *Gunseikanbu*.<sup>17</sup>

Sentimen Jepang terhadap orang-orang Maluku, khususnya Ambon, yang dianggap sebagai mata-mata Sekutu semakin mempersulit keadaan masyarakat Maluku di mana pun berada. Akibatnya, banyak tokoh Ambon-Maluku ditahan dan dipenjara di Bogor tanpa mengetahui kesalahannya. Termasuk Latuharhary yang kembali ditahan Jepang. Namun, berkat usaha Yet Pattiradjawane, istrinya, Latuharhary dan sejumlah tokoh Maluku dibebaskan. Ia kembali dipekerjakan untuk mengurus sekitar 30.000 orang Maluku yang berada di Jawa.

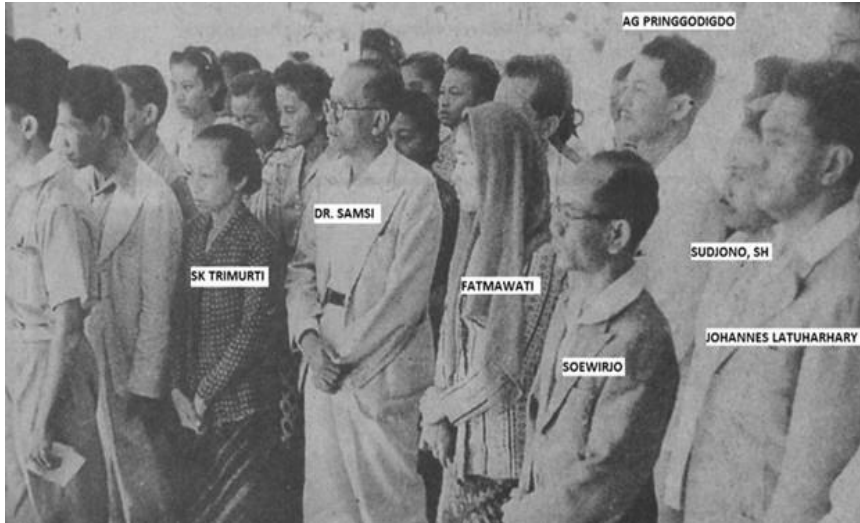


Johannes Latuharhary mendampingi Sukarno dan Hatta saat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia (Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia)

Menjelang kekalahan perangnya melawan Sekutu, pemerintah pendudukan Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan di kemudian hari. Sebagai langkah awal dibentuk *Dokuritsu Zjumbi Tjoosakai* atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 28 Maret 1945. BPUPKI beranggotakan 60 orang tokoh dari berbagai daerah di Indonesia,<sup>18</sup> salah satunya adalah Latuharhary yang mewakili Maluku. Selanjutnya, pada 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh

Sukarno. Latuharhary juga duduk dalam Panitia tersebut mewakili unsur masyarakat Maluku.<sup>19</sup>

Sebagai anggota PPKI, Latuharhary mengikuti rapat di rumah Laksamana Maeda—perwira Jepang yang memfasilitasi proses perumusan naskah proklamasi kemerdekaan yang disusun oleh Sukarno dan Hatta bersama para pemuda. Sejarah



Latuharhary saat menyaksikan pembacaan teks proklamasi dari posisi samping (Koleksi Perpustakaan Nasional)

mencatat bahwa pada akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamasikan sendiri oleh bangsa Indonesia, bukan atas janji Jepang. Ketika Sukarno didampingi Hatta membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 di rumah kediamannya, Latuharhary hadir di sana. Jadi, ia termasuk salah satu saksi peristiwa sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia.

## **RODA PEMERINTAHAN DARI JAUH**

Pada masa awal kemerdekaan, wilayah Indonesia dibagi menjadi delapan provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur. Maluku

merupakan salah satu provinsi yang dibentuk pada awal kemerdekaan tersebut. Johannes Latuharhary yang sebelumnya merupakan anggota BPUPKI dan PPKI ditunjuk oleh Presiden Sukarno sebagai gubernur Provinsi Maluku yang pertama. Penunjukan Latuharhary sebagai gubernur Maluku bukan tanpa alasan. Selain memiliki pengalaman organisasi yang panjang selama masa pergerakan nasional, ia sudah terbiasa dan berpengalaman dalam mengurus semua keperluan masyarakat Ambon Maluku, khususnya yang berada di Pulau Jawa sebelum kemerdekaan.

Tugas pertama Latuharhary sebagai gubernur adalah menyebarluaskan berita tentang proklamasi kemerdekaan sehingga didengar dan dipahami rakyat Maluku. Salah satu upayanya adalah menyiarkan berita itu melalui surat kabar seperti terbaca dalam harian *Merdeka* sebagai berikut.

Salah satoe berita radio jang disiarkan pada tanggal 5 boelan Oktober tahoen 1945 pada djam 18.20 menjatakan bahwa keratoes-ratoes serdadoe Indonesia (sisa Balatentara Belanda dahoeloe) memadjoekan permintaan kepada pemerintah Australie soepaja mereka diangkoetkan ke Indonesia oentuk berdjoeang bersama-sama saudara-saudara di Indonesia oentuk mempertahankan Indonesia merdeka.

Nah! Saudara-saudara ale Njong!  
Tjoba pikir sadiki tentang kabar diatas. Ale maoe dipake djadi alat-alat Belanda kembali.  
Balong tjokoep ditjoejoe idong lai?  
E, ingatan djangan sampe katoeng boenoe katoeng, tagal Nica poeng tahela.

KITA BANGSA MERDEKA!  
HIDOEP SAMA RATA SAMA RASA

Maski kasiang-kasiang katoeng oeroes sendiri!  
Angkatan Pemoeda Indonesia-Ambon.<sup>20</sup>

Pernyataan dalam surat kabar itu berdampak besar terhadap pemuda-pemuda Maluku. Serentak di setiap daerah di Maluku, para pemuda berinisiatif mengadakan berbagai pertemuan dan membentuk Angkatan Pemuda Indonesia Ambon dengan tujuan membela kemerdekaan dan keamanan Indonesia secara damai dalam persaudaraan.

Situasi perpolitikan nasional yang belum stabil setelah kemerdekaan turut mewarnai perkembangan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Maluku, mengalami pergolakan politik yang tidak biasa dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Jawa dan Sumatera. Selain menjadi daerah yang pertama kali didarati Sekutu, Indonesia bagian timur juga mengalami pergolakan lokal yang lebih masif dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya.

Pada Februari 1946, tentara Australia memasuki kawasan Indonesia bagian timur untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Kedatangan tentara Australia itu disusupi oleh satuan-satuan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) yang telah disiapkan oleh Van Mook<sup>21</sup> untuk menjalankan pemerintahan sipil di daerah-daerah yang diduduki tentara Australia. Dengan demikian tentara Australia yang setengah hati memasuki Indonesia Timur tidak perlu menangani urusan administrasi pemerintahan sipil.<sup>22</sup>

Situasi itu membuat Latuharhary yang ditunjuk untuk mengepalai wilayah Maluku di bawah naungan pemerintah Republik Indonesia tidak bisa memimpin Maluku secara langsung. Sebagai Gubernur Maluku, Latuharhary putus hubungan dengan provinsi dan masyarakat Maluku yang berada di Kepulauan Maluku secara langsung. Situasi politik dan transportasi yang sulit kala itu menyebabkan Latuharhary tidak bisa segera kembali ke Maluku sehingga ia menjalankan kepemimpinannya dari jauh, yakni dari Jakarta.<sup>23</sup>

Sementara itu, pendaratan tentara Sekutu dengan membawa serta tentara Belanda dan NICA yang di dalamnya terdapat unsur

tentara KNIL (Koninklijk Nederlandsch Indische Leger) asal Ambon membawa kesulitan tersendiri bagi masyarakat Ambon di Jawa. Kenyataan itu makin memperkuat stereotipe bahwa orang Ambon memang setia kepada Belanda seperti terdengar dalam ungkapan *door de eeuwen trouw* atau “tetap setia [kepada Belanda] sepanjang abad.”<sup>24</sup> Memanfaatkan situasi itu, NICA mulai menyebarkan isu orang-orang Ambon akan dibunuh oleh rakyat Indonesia sendiri. Akibatnya, pasukan KNIL melakukan perlawanan dan bentrokan dengan rakyat pun tidak bisa dihindari.

Situasi makin diperparah oleh respon ‘perang’ dari sejumlah tokoh Ambon di Jawa. Belanda berhasil menerapkan kembali politik *divide et impera*. Pamflet-pamflet yang menyatakan perang tersebar di mana-mana dan surat-surat kabar ikut memberitakannya sehingga situasi makin panas. Di Jakarta terjadi penyerangan dan pembunuhan terhadap orang-orang Ambon. Tentara KNIL membalas dengan melakukan teror dalam masyarakat. Menanggapi hal tersebut, pada 11 Oktober 1945 Gubernur Latuharhary mengeluarkan seruan kepada yang berisi pernyataan penekanan posisi Maluku yang berada di belakang Republik dan berjuang bersama-sama untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia.

Pernyataan Gubernur Latuharhary disusul dengan pengiriman sejumlah petugas ke beberapa kota besar di Jawa untuk mempersiapkan pembukaan Kantor Pembantu Gubernur Maluku. Keputusan tersebut diperkuat dengan Maklumat No.1 Pemerintah Provinsi Maluku pada 25 Oktober 1945 yang berisi:

Dengan persetujuan P.J.M. Presiden dan Menteri Urusan Dalam Negeri maka pada tanggal 1 November 1945 diadakan Kantor Gubernur Maluku pada sementara waktu di Jakarta, van heutzplei No. 7 dengan maksud seperti berikut:

- a. Menginsafkan penduduk bangsa Indonesia Maluku akan mempertahankan kemerdekaannya bangsa dan negara Indonesia
- b. Menjamin keselamatannya penduduk tersebut

c. Mengadakan persiapan berhubungan dengan pulangnya penduduk Maluku ke daerahnya, supaya bersama-sama membangunkannya menjadi daerah yang kuat dari Negara Republik Indonesia.

Untuk menjalankan maksud ini, maka di Surabaya, Jogjakarta, Bandung dan lain-lain tempat yang dianggap perlu diadakan perwakilan kantor tersebut.

Hendaknya supaya yang berkepentingan mencari perhubungan secepatnya.<sup>25</sup>

Selanjutnya, pada Desember 1945 Kantor Pembantu Gubernur Maluku dibuka di beberapa kota di Pulau Jawa sebagai berikut.

1. Bandung, dipimpin oleh L. Lopulisa dan Lambert Pelupessy
2. Sukabumi, dipimpin oleh E. D. Masihelo
3. Cirebon, dipimpin oleh Leimena, B. J. Tanahatu, Wim Silooy, Tupamahu, dan Lilipaly
4. Purwokerto, dipimpin oleh I. O. Nanulaitta
5. Magelang, dipimpin oleh M. Ruhupatty, Atus Kailola, Ely Lesilolo, Mias Nendisa
6. Semarang, dipimpin oleh J. Bakker, I. R. Lobo, dan J. A. Matahelumual
7. Yogyakarta, dipimpin oleh Alex W. Huwae, B. D. (Cois) Lilipaly, Alex Sahusilawane, dan Wim Tutuarima
8. Surakarta, dipimpin oleh Gijs Hahuly
9. Madiun, dipimpin oleh Karel Patticeilohy, dan S. Gaspersz
10. Kediri, dipimpin oleh Ferry Latumeten
11. Mojokerto, dipimpin oleh Arend Pattirajawane
12. Malang, dipimpin oleh Librek Nanlohy
13. Lawang, dipimpin oleh Tentua
14. Bondowoso, dipimpin oleh J. B. Suitella, I. A. Latuheru
15. Palembang, dipimpin oleh Dominggus Tomahu
16. Purworejo, dipimpin oleh J. Tahalele.<sup>26</sup>



Pembukaan Kantor Pembantu Gubernur tersebut membuat masyarakat Maluku di Jawa merasa diperhatikan dan dilindungi oleh pemerintah daerahnya sehingga mempermudah koordinasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat Maluku untuk tetap berada dan berjuang bersama-sama guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, pada Januari 1946, pusat pemerintahan nasional terpaksa dipindahkan ke Yogyakarta. Akibatnya, Kantor Pusat Gubernur Maluku itu pindah ke Yogyakarta, berkantor di Margokridongo. Di Jakarta, Kantor Pembantu Gubernur Maluku tetap dibuka, dipimpin oleh Wim Tutopoly.

Pada masa awal kepemimpinannya, Gubernur Latuharhary menghadapi masalah seputar prasangka yang telanjur berkembang dalam masyarakat umum yang meragukan loyalitas orang Ambon akibat pengalaman masa kolonial. Namun, Latuharhary berusaha meyakinkan bahwa masyarakat Ambon secara keseluruhan tetap berada di belakang Republik dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

### **DI TENGAH PUSARAN TIGA KEKUATAN**

Dalam upaya “mengembalikan” kekuasaan di Indonesia, Belanda yang datang membocong Sekutu menggunakan politik memecah belah. Di Maluku, langkah awal Belanda adalah mendirikan dewan penasihat yang beranggotakan delapan orang mewakili dua agama yaitu Nasrani dan Islam. Pembentukan dewan penasihat itu berhubungan dengan janji Ratu Belanda untuk memberi otonomi bagi Indonesia sama seperti yang sudah diberikan pada daerah jajahan Belanda yang lain. Untuk mewujudkan janji tersebut, dewan penasihat mengingatkan pemerintah tidak menunda reorganisasi internal di Ambon hingga situasi di Jawa memungkinkan.<sup>27</sup> Lantaran itu, masyarakat Maluku terpecah; ada kelompok yang menginginkan Ambon berstatus seperti Curaçao dan Suriname; kelompok lain menginginkan Ambon menjadi bagian dari Indonesia karena secara ekonomis masih tergantung dengan Indonesia.

Sementara itu, raja-raja Ambon Maluku terkesan dengan ide pembentukan persemakmuran Maluku. Persemakmuran yang dimaksud mencakup wilayah Maluku Utara, Irian Barat, dan Maluku Selatan. Ide pembentukan Persemakmuran Maluku ini didukung oleh kehadiran tiga pemimpin Perkumpulan Kebangsaan Maluku dari Jakarta pada pertengahan April 1946. Mereka berkeinginan Maluku menjadi bagian dari Indonesia daripada menjadi bagian kerajaan Belanda.

Dalam pada itu, Van Mook mulai mendirikan negara-negara bagian di berbagai wilayah di Indonesia sebagai bagian dari upaya pembentukan negara federal. Digelar Konferensi Malino yang dilanjutkan dengan Konferensi Denpasar yang memutuskan pembentukan Negara Indonesia Timur dan Negara Kalimantan. Negara Indonesia Timur (NIT) resmi berdiri sejak Konferensi Denpasar (1947), menggunakan sistem parlementer dengan Sukawati sebagai Presiden, Tadjudin Noor sebagai Ketua Parlementer Sementara dan Nadjamudin Daeng Malewa sebagai Perdana Menterinya.<sup>28</sup>

Akan halnya Sultan Ternate tidak tertarik dengan ide persemakmuran Maluku. Sultan beranggapan bahwa persemakmuran hanya akan memperlihatkan dominasi orang Ambon ataupun Indonesia lainnya. Ia justru menginginkan Maluku menjadi bagian dari NIT. Di sisi lain, sebagian orang Ambon khawatir apabila Maluku menjadi bagian dari NIT atau Republik Indonesia maka akan didominasi oleh kelompok lain yang bukan Maluku. Ide persemakmuran ini tidak mendapat dukungan dari kaum nasionalis.

Dalam sidang yang diadakan NIT pada April 1947, Presiden NIT Sukawati mengundang tokoh-tokoh Republik untuk menyaksikan persidangan itu. Latuharhary ikut dalam rombongan undangan tersebut namun tidak diizinkan masuk dan mengikuti persidangan karena, menurut NIT, ia adalah gubernur Maluku di bawah naungan Republik yang tidak boleh mencampuri daerah Maluku. Keikutsertaan Latuharhary pada waktu itu sebenarnya bukan sebagai gubernur Maluku melainkan tokoh yang berasal dari Maluku.<sup>29</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, Persetujuan Linggajati tidak berjalan lama setelah Belanda merobek hasil kesepakatan itu. Tindakan Belanda ini diikuti serbuan terhadap Republik melalui aksi militer. Selanjutnya dengan pengawasan Dewan Keamanan pada 17 Januari 1948 dicapai kesepakatan baru yang dikenal dengan Perjanjian Renville.<sup>30</sup> Upaya Belanda membentuk federasi dalam sistem pemerintahan melahirkan Aksi Militer II pada 19 Desember 1948. Selanjutnya, negara-negara bentukan Belanda yang bergabung dalam suatu badan musyawarah Bijeenkost voor Federal Overleg (BFO) melakukan konferensi dengan Republik Indonesia di Yogyakarta dan Jakarta yang dikenal dengan Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi menghasilkan keputusan untuk membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat.<sup>31</sup>



Johannes Latuharhary dalam Perundingan Renville

Perundingan dengan Belanda terus dilakukan. Melalui Konferensi Meja Bundar (KMB), Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat disusun. Pada 27 Desember 1949, RIS dibentuk; Sukarno diangkat sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai perdana menteri. Hasil KMB menunjukkan dengan jelas bahwa

Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Maluku dengan sendirinya menjadi bagian dari wilayah RIS.

Akan tetapi, dalam kenyataannya upaya untuk mempertahankan Maluku sebagai bagian dari wilayah RIS mendapat tantangan di Ambon dan juga Ternate. Aksi demi aksi perlawanan dilakukan dan mencapai puncaknya pada 25 April 1950 ketika J. H. Manuhutu memproklamasikan kemerdekaan bagi Maluku Selatan, lepas dari NIT ataupun RIS. Melihat perkembangan Ambon Maluku hingga pertengahan 1950, pemerintah NIT bekerja sama dengan RIS terus berusaha menyelesaikan persoalan dengan cara damai.



Johannes Latuharhary mewakili Pemerintah Republik Indonesia bersama Anak Agung Gede Agung dalam acara pengakuan Negara Indonesia Timur oleh Republik Indonesia pada 17 Januari 1948 (Sumber: ANP)

Perebutan kekuasaan dan pengaruh di Maluku sangat kompleks yang melibatkan tiga kekuatan yakni RI, NIT yang dibantu Belanda, dan kelompok Republik Maluku Selatan pada aras lokal. Pada 17 Agustus 1945, Republik Indonesia Serikat dihapuskan dan

bentuk negara kembali ke negara kesatuan. Presiden Sukarno mengangkat kembali Latuharhary sebagai Gubernur Provinsi Maluku dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

### **MEMBANGUN DI TENGAH PERGOLAKAN**

Proses pengangkatan kembali Latuharhary sebagai Gubernur Maluku bukan tanpa hambatan. Selain mendapat dukungan, pengangkatannya juga ditolak oleh sebagian pihak dalam masyarakat Maluku. Meski demikian, pada 12 Desember 1950 Latuharhary kembali ke Maluku. Berbekal penunjukan dirinya sebagai gubernur oleh Presiden, Latuharhary memimpin kembali negeri kelahirannya. Kali ini langsung di Tanah Maluku.



Gubernur Latuharhary bersama Presiden Sukarno saat berkunjung ke Maluku, 1954  
(Koleksi Perpustakaan Nasional)

Dalam situasi negara yang baru merdeka dan masih terdapat gangguan keamanan baik dari pihak luar (Belanda) maupun permasalahan sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat Maluku sendiri, maka sungguh berat tugas yang diemban Latuharhary. Maluku merupakan salah satu wilayah yang terkena dampak parah

oleh peperangan dan konflik politik. Kemiskinan, kelaparan, gedung-gedung yang roboh akibat perang merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh Gubernur Latuharhary.

Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur Latuharhary mengambil langkah-langkah sebagai berikut ini.

1. Dalam bidang pemerintahan dibentuk struktur yang terdiri dari Residen Koordinator Pemerintahan, Sekretaris Provinsi, Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi, Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Kepala Bagian Politik, Kepala Bagian Umum, Pembantu Umum Gubernur, dan Pembantu Khusus Gubernur. Untuk mengisi sebagian formasi pegawai, Gubernur mengangkat anggota bekas Sarekat Ambon. Penyusunan aparat pemerintahan ini memakan waktu kurang lebih tiga tahun. Untuk mengatasi masalah RMS, Latuharhary menginstruksikan Kepala Bagian Politik melakukan pendekatan terhadap sisa pengikut RMS sehingga lebih dari seratus orang anggota gerakan sparatis itu menyerah. Selanjutnya, Latuharhary membagi Maluku menjadi tiga wilayah kabupaten yaitu Maluku Utara, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara.<sup>32</sup>
2. Dalam bidang pendidikan, dihimpun guru-guru yang masih "tersisa" di Maluku. Walaupun dalam keadaan yang serba prihatin, guru-guru tersebut tetap semangat memperbaiki pendidikan di Maluku. Lewat rumah-rumah darurat pendidikan mulai digalakkan. Sekolah-sekolah yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya diubah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Kurikulum peninggalan kolonial diganti kurikulum yang bersifat nasional yang berlandaskan Pancasila. Untuk membantu usaha pemulihan bidang pendidikan tersebut dibentuk Badan Pekerja Pembangunan Pendidikan. Dalam waktu singkat, sekolah-sekolah mulai dibuka untuk rakyat.<sup>33</sup>
3. Pembangunan sosial terlihat dalam pembangunan kembali ibu kota Provinsi Maluku. Rencana ini terkendala oleh pembebasan lahan milik perorangan yang enggan menyerahkan tanahnya kepada pemerintah. Gubernur mengambil jalan lain yaitu

mendirikan bangunan pemerintah di atas tanah luas milik warga sekaligus mendirikan sebuah rumah bagi pemilik tanah yang digunakan oleh pemerintah tersebut. Tanah yang diambil oleh pemerintah itu dijanjikan akan dibayar di kemudian hari. Dengan menerapkan strategi ini, pembangunan kota Ambon dilaksanakan walaupun banyak menimbulkan aksi protes.<sup>34</sup> Masalah pengungsi akibat perang diatasi dengan mendirikan rumah-rumah darurat di beberapa lokasi di tepi sungai.

4. Pembangunan di bidang agama didasarkan pada kerukunan umat beragama yang telah berakar dalam kehidupan masyarakat Maluku.
5. Dalam pembangunan di bidang ekonomi dilakukan perubahan dari sistem perekonomian kolonial menjadi sistem perekonomian nasional. Situasi dan kondisi masyarakat Maluku yang luluh lantak akibat perang membuat rencana ini sulit untuk diwujudkan. Keadaan masyarakat pada masa itu masih sangat memprihatinkan. Hanya sekelompok masyarakat yang memegang kendali ekonomi yang terdiri dari pemilik modal besar dalam perdagangan, seperti orang Cina dan Arab.
6. Dalam pengembangan seni budaya diarahkan untuk menggali nilai-nilai kebudayaan asli rakyat Maluku. Untuk mencapai tujuan itu dibentuk Inspeksi Kebudayaan, Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
7. Di bidang pertanian diadakan usaha pembukaan sawah di Kairatu dan Seram untuk mencukupi kebutuhan beras di wilayah Maluku.
8. Dalam bidang perindustrian dimulai dengan pembukaan perusahaan batu bata dan kapur di Latulahat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan rakyat yang sedang giat membangun pada masa itu.
9. Untuk mengembangkan bidang perikanan dan kehutanan diusahakan menggali potensi untuk keperluan rakyat dan ekspor; selain penghijauan atas bukit-bukit yang gundul. Dengan kerja sama antarinstansi, yang melibatkan ratusan murid sekolah pada 1952, bukit-bukit gundul ditanami cengkih.

Selanjutnya, untuk melepaskan petani cengkih dari jerat tengkulak, dibentuk Yayasan Cengkih Maluku (Oktober 1952). Modal yayasan diperoleh dari pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia. Atas izin Departemen Perdagangan, yayasan diberi wewenang menetapkan harga pasaran dan hak monopoli penjualan ke luar daerah. Selain itu, Gubernur Latuharhary membentuk Yayasan Mutiara Maluku yang bertujuan mengentaskan penyelam mutiara dari kemiskinan.

### **PENOLAKAN DAN BAYANGAN PERGANTIAN**

Sejak pembentukan Yayasan Cengkih pada 1952, hubungan antara Gubernur dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Maluku Tengah mengalami ketegangan. Masalahnya, pembentukan yayasan itu tidak melibatkan DPRDS setempat. Demikian pula dalam penetapan harga cengkih, Gubernur Latuharhary dianggap “jalan” sendiri. Ketegangan bertambah dengan pernyataan anggota Dewan bahwa Gubernur memperlambat penyerahan hak-hak otonomi kepada daerah Maluku Tengah. Hingga akhirnya DPRDS memutuskan mengirim delegasi ke Jakarta—yang dipimpin Ketua Dewan itu sendiri—untuk mengurus langsung penyerahan hak otonomi tersebut.

Di Jakarta, seorang anggota delegasi DPRDS Maluku Tengah membuat pernyataan keras agar Gubernur Latuharhary diganti. Pernyataan itu mengguncang partai-partai politik di Ambon. Reaksi pro-kontra terhadap pernyataan itu bermunculan. Dalam sidang DPRDS pada Februari berikutnya, tanpa banyak perdebatan, lewat voting, mayoritas anggota menginginkan Latuharhary segera diganti dari jabatannya sebagai gubernur. “Dengan tidak mengurangi kecakapan dan jasa-jasa Mr. Latuharhary sebagai gubernur, dalam waktu yang terakhir ini timbul suara-suara yang ingin melihat seorang yang lain sebagai kepala provinsi Maluku,” tulis *Merdeka* (Maret 1953) mengutip suara-suara yang beredar dalam sidang Dewan.



Gubernur Latuharhary tampaknya tidak sedikit pun merasa terganggu oleh kegaduhan politik itu. Di tengah bayangan usul penggantian dirinya, ia tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai gubernur. Bahkan, ketika DPRDS menuduh keputusannya mendirikan Yayasan Cengkih sebagai sikap anasionalis, Latuharhary sedang berada di Ternate untuk melantik Sultan Tidore sebagai kepala daerah Maluku Utara. Begitu pula dalam salah satu foto pada majalah *Merdeka*, Gubernur terlihat santai menyapu sebuah lapangan bulu tangkis seakan tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk politik yang menyerang dirinya.

Akan tetapi, suasana politik di Ambon tetap memanas. Tuntutan sejumlah partai politik agar Gubernur mundur tidak surut. Situasi makin panas ketika sistem politik pemerintahan nasional beralih menjadi sistem parlementer pada 1953 yang berimplikasi terhadap kepolitikan di daerah. Dalam politik parlementer kekuasaan partai-partai besar sangat menentukan kedudukan politik dalam kabinet dan jabatan-jabatan strategis lainnya termasuk jabatan gubernur.

Tidak terkecuali jabatan gubernur Maluku. Dalam suasana tarik-menarik kekuatan politik tersebut, posisi Gubernur Maluku goyang karena kehilangan dukungan dari partai berkuasa. Partai Nasional Indonesia dan Partai Masyumi di Maluku minta Latuharhary diganti sebagai gubernur,<sup>35</sup> hingga akhirnya pada 1954 Kabinet Ali Sastroamidjojo memutuskan menarik kembali Latuharhary ke Jakarta dan memperbantukannya pada Menteri Dalam Negeri. Keputusan itu otomatis mengakhiri jabatan Latuharhary sebagai gubernur Maluku dan membawanya kembali ke Jakarta.

## REFLEKSI TENTANG LATUHARHARY PLURALIS DI TENGAH KEMAJEMUKAN

Latuharhary merupakan sosok yang selalu mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan. Ia selalu mengedepankan semangat nasionalisme di atas segalanya. Sangat tidak setuju dengan rasisme dan memandang semua manusia memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang yang berbeda. Dari awal perjuangannya dalam Sarekat Ambon, Latuharhary selalu mengedepankan gagasan persatuan dan kesatuan. Menurut pendapatnya, kemerdekaan baru bisa dicapai apabila persatuan dan kesatuan didalam masyarakat bisa terwujud.



Pertemuan Gubernur Latuharhary dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama R. Moh. Kajrawi di Manggadua, Ambon, membahas masalah pemerintahan (*Mimbar Agama*, April 1953)

Semangat Latuharhary yang tidak pernah padam dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa dapat dilihat dalam setiap jejak langkahnya. Dimulai dari Sarekat Ambon perjuangan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan terus dipikulnya tanpa mempedulikan keadaan pribadi. Dalam setiap tugas yang diemban, entah sebagai anggota pada setiap organisasi yang dibentuk pada

masa pergerakan nasional ataupun setelah merdeka, Latuharhary selalu berperan di dalamnya. Ide-ide dan gagasan yang ia lontarkan menunjukkan semangat untuk mencapai negara kesatuan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

### SOSOK SEDERHANA DAN JUJUR

Berasal dari keluarga terpelajar yang sederhana membentuk pribadi Latuharhary menjadi sosok bersahaja. Kesederhanaannya tidak hanya terpancar dalam sikap namun juga dalam kesehariannya. Sedemikian sederhananya sehingga ia dikenal sebagai “gubernur miskin” yang tak mampu membayar biaya perawatan di rumah sakit.<sup>36</sup> Pada saat dirawat, Latuharhary ditempatkan di barak rakyat dalam keadaan koma. Menurut kesaksian Mohammad Padang, Gubernur Maluku (1959–66), “Seorang tokoh nasional, pejuang yang jujur, pengabdian pada negara dan bangsa, pada saat-saat terakhir ditempatkan di barak rakyat, seolah-olah tidak ada tempat yang lebih baik dan lebih layak, sungguh sedih.”<sup>37</sup>



Gubernur Latuharhary sedang menyapu sebuah lapangan di tengah isu penggantian dirinya (*Merdeka*, 1 Maret 1953)

Sikapnya yang jujur dan selalu dapat dipercaya merupakan kekayaan jiwa yang lain pada Latuharhary. Seperti kesaksian Subardjo Djojoadisurjo, salah seorang pengurus Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda, berikut ini.

Kami segera menjadi kawan dan saya sudah kenal Mr. Latuharhary di Negeri Belanda. Meskipun pada waktu itu ia bukan anggota Perhimpunan Indonesia, saya mengenalnya sebagai seorang yang dapat dipercaya dan mempunyai pendapat yang lurus serta tabiat yang terus terang yang sangat saya hormati.<sup>38</sup>

### **RELA BERKORBAN, MEMBELA KEBENARAN DAN KEADILAN**

Keluar-masuk penjara dan menjadi orang yang harus bertanggung jawab jika ada orang Maluku berbuat sesuatu merupakan contoh dari keberanian, semangat rela berkorban untuk membela kebenaran dan keadilan bagi rakyatnya.



Nama Latuharhary diabadikan pada sebuah kapal barang pada 1966.

Rasa cintanya terhadap Tanah Air tidak perlu diragukan lagi. Perasaan ini juga yang menjadi penggerak dasar setiap langkah dan kebijakan yang diambil dalam memperjuangkan kemerdekaan dan membangun Maluku. Pada masa-masa awal pemerintahannya sebagai gubernur Maluku, Latuharhary menghadapi permasalahan seputar meyakinkan rakyat Maluku untuk tetap berdiri di belakang Republik dan mendukung penuh setiap langkah kebijakan pemerintahan nasional dalam usaha mempertahankan kemerdekaan.

Jiwa besar Latuharhary tampak ketika kehadirannya sebagai tokoh Maluku ditolak dalam sidang NIT karena ia dipandang sebagai gubernur Maluku yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Tanpa melakukan perlawanan, Latuharhary menerima perlakuan itu. Demikian pula saat ia “dilengserkan” dari jabatannya sebagai Gubernur Maluku, ia mengikhlaskannya, dan memutuskan menerima tawaran bekerja di Kementrian Dalam Negeri di Jakarta.

### **KERJA SAMA DAN PENUH TANGGUNG JAWAB**

Dalam setiap gerakan politik, Latuharhary selalu mengedepankan semangat kerja sama dengan organisasi yang lain. Hal ini terbukti ketika Sarekat Ambon membuka diri dan bergabung dengan organisasi kebangsaan lainnya dalam usaha mencapai kemerdekaan.

## Catatan Akhir:

<sup>1</sup>Dalam masyarakat Ambon, anak-anak yang bersekolah di kota yang jauh dari kampung halamannya, biasanya menumpang pada keluarga lain yang bersedia menampung dan menganggap layaknya anggota keluarga itu sendiri. Kebiasaan itu disebut *anak piara*. Lihat I. O. Nanulalitta, *Johannes Latuharhary, S.H.: Hasil Karya dan Pengabdianya* (Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982/1983), hlm. 5.

<sup>2</sup>HBS adalah pendidikan menengah umum pada zaman Hindia Belanda khusus untuk orang Belanda, Eropa dan elite pribumi yang menggunakan bahasa Belanda sebagai pengantar. Masa studi HBS berlangsung lima tahun.

<sup>3</sup>Nanulalitta, *Johannes Latuharhary*, hlm. 10.

<sup>4</sup>Nanulalitta, hlm. 12.

<sup>5</sup>Nanulalitta, hlm. 18.

<sup>6</sup>Nanulalitta, hlm. 20.

<sup>7</sup>Lihat "Riwayat Hidup Gubernur Maluku," *Merdeka*, 1 Maret 1953, hlm. 19.

<sup>8</sup>"Riwayat Hidup Gubernur Maluku," hlm. 19.

<sup>9</sup>Salah satu syarat untuk memperoleh beasiswa Ambonsch Studiefonds adalah kesediaan para penerima beasiswa untuk bekerja demi kepentingan masyarakat Maluku. Selain itu, penerima beasiswa diwajibkan memberikan sejumlah kecil gaji mereka untuk mendanai beasiswa tersebut setelah mereka menyelesaikan studinya. Kepada Latuharhary, pengurus Ambonsch Studiefonds menanyakan tentang apa yang akan dilakukannya untuk masyarakat Maluku selain pekerjaan pada gubernemen; Latuharhary menjawabnya bahwa ia akan membantu Sarekat Ambon. Jawaban itu disetujui pengurus, dan sejak itu Latuharhary duduk sebagai pengurus

Sarekat Ambon. Lihat R. Z. Leirissa, *Maluku dalam Perjuangan Nasional Indonesia* (Jakarta: Lembaga Sejarah Universitas Indonesia, 1975), hlm. 74.

<sup>10</sup>Wawancara dengan Johan Saimima, sejarawan Maluku (Jakarta, 10 Maret 2017).

<sup>11</sup>*Haloean*, 1930.

<sup>12</sup>Molukse Politiek Verbond adalah perhimpunan politik Maluku sebelum Sarekat Ambon.

<sup>13</sup>Ambon Raad semacam Dewan pada masa kolonial yang terdiri dari wakil masyarakat Ambon yang mengurus keperluan rakyat Ambon.

<sup>14</sup>*Haloean*, September 1929.

<sup>15</sup>*Haloean*, September 1929.

<sup>16</sup>*Sinar Maloekoe*, 1932.

<sup>17</sup>Nanulalitta, *Johannes Latuharhary*, hlm. 97.

<sup>18</sup>Lihat dalam *Himpunan Risalah Sidang-Sidang* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1999).

<sup>19</sup>Seperti halnya BPUPKI, anggota PPKI diambil dari tokoh-tokoh yang berasal dari seluruh Indonesia. Sebagai wakil dari Jawa terpilih K. R. T. Radjiman Wediodiningrat, R. Oto Iskandar Dinata, Ki Abdul Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, B. K. P. A. Surjohamidjojo, B. P. H. Purbojo, M. Sutardjo Kartohardikusumo, R. P. Suroso, Prof. Mr. Dr. Supomo, dan Abdul Kadir; sedangkan Dr. Moh. Amir, Mr. Teuku Moh. Hasan, dan Mr. Abdul Abas sebagai wakil dari Sumatera; Dr. G. S. S. J. Ratulangi dan Andi Pangerang mewakili Sulawesi; A. A. Hamidan mewakili Kalimantan; Mr. I Gusti Ktut Pudja mewakili Sunda Kecil; Mr. Johannes Latuharhary mewakili Maluku, dan Drs. Yap Tjuan Bing sebagai wakil dari golongan China.

<sup>20</sup>Lihat *Merdeka*, 9 Oktober 1945; kutipan langsung dalam ejaan aslinya.

<sup>21</sup>Hubertus Johannes van Mook adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat pada 14 September 1944–1 November 1948.

<sup>22</sup>Setelah menyelesaikan tugasnya, tentara Australia meninggalkan Indonesia pada 15 Juni 1946 dan menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Van Mook dalam sebuah upacara resmi di Makassar.

<sup>23</sup>Maklumat No. 1 Pemerintah Provinsi Maluku, 25 November 1945.

<sup>24</sup>Leirissa, *Maluku*, hlm. 129.

<sup>25</sup>*Berita Indonesia*, 22 Oktober 1945.

<sup>26</sup>*Berita Indonesia*, 9 September 1946.

<sup>27</sup>Intinya, rencana ini merupakan taktik untuk membentuk negara federal yang akan menggantikan Republik. Dalam wacana, negara federal tersebut dikatakan merdeka namun pada kenyataannya tetap merupakan jajahan Belanda.

<sup>28</sup>Mengenai NIT selengkapnya baca dalam Anak Agung Gede Agung, *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia*.

<sup>29</sup>*Berita Indonesia*, 24–28 April 1947.

<sup>31</sup>Leirissa, *Maluku*, hlm. 127.

<sup>32</sup>*Merdeka*, 1 Maret 1953.

<sup>33</sup>*Merdeka*, 1 Maret 1953, hlm. 196.

<sup>34</sup>Mengenai status Kota Ambon dapat dilihat dalam *Staatsblad* No. 524 tahun 1921 yang berstatus *gemeente* kemudian menjadi *neostadegemeente* berdasarkan Peraturan Presiden NIT (*Staatsblad* NIT No. 15 tahun 1948). Kemudian melalui Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1952, pada masa Republik, status Kota Ambon tidak lagi menjadi suatu daerah (*Merdeka*, 1 Maret 1953).



<sup>35</sup>*Merdeka*, Maret 1953, hlm. 18.

<sup>36</sup>Dalam [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) diunduh 4 September 2017.

<sup>37</sup>Dalam Nanulalitta, *Johannes Latuharhary*.

<sup>38</sup>Subardjo Djojoadisurjo, *Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi* (Jakarta; Gunung Agung, 1978), hlm. 188.

## PENUTUP

Delapan gubernur provinsi pertama yang dilantik sehari setelah proklamasi kemerdekaan (18 Agustus 1945) dapat dikatakan tidak hanya sebagai putra-putra terbaik dari kedelapan daerah tersebut. Lebih dari itu, mereka adalah tokoh-tokoh andal yang dimiliki Indonesia ketika itu.

Peranan mereka sangat besar dalam mewujudkan sebuah teritorial yang berdaulat dari apa yang disebut penataan wilayah Republik Indonesia yang ketika itu masih sangat muda usia. Berbagai tantangan dan permasalahan daerah mereka hadapi dalam menjalankan tugasnya sebagai gubernur provinsi. Walau demikian tampak bahwa penunjukan mereka bukan tanpa pertimbangan dan perhitungan yang matang. Dari kiprah dan riwayat pribadi mereka tampak bahwa masing-masing gubernur baru tersebut memiliki kualitas pribadi yang tidak diragukan. Perlu diketahui bahwa jika penunjukan gubernur pertama itu gagal dalam pemilihan orang, maka masalah penataan wilayah Republik Indonesia dan penguasaan wilayahnya menghadapi kendala yang sangat besar, mengingat betapa luas wilayah Republik Indonesia yang memerlukan perhatian dan penanganan dari tokoh yang andal.

1. Gubernur R. T. A. A. Soerjo (Provinsi Jawa Timur) adalah seorang priayi Jawa, lulusan OSVIA, yang memulai kariernya sebagai ambtenar; pada 1938 menjabat sebagai Bupati di Magetan, Jawa Timur. Pengalaman yang panjang itu menjadi modal utama Soerjo untuk dipercaya sebagai Gubernur Jawa Timur. Selain itu, kiprahnya yang sangat nasionalistis menjadikan Soerjo didukung

oleh masyarakat Jawa Timur, termasuk oleh kelompok Kesatuan Kelaskaran Perjuangan di Jawa Timur.

2. Gubernur Raden Panji Soeroso (Provinsi Jawa Tengah) adalah seorang keturunan menak, priayi Jawa terkemuka. Ia seorang nasionalis murni yang sejak usia 15 tahun sudah bergabung dalam pergerakan nasional Boedi Oetomo dan Sarekat Islam. Ia kemudian menjadi anggota Volksraad sejak kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda hingga kedatangan Jepang. Memasuki masa selanjutnya, Soeroso menduduki berbagai jabatan penting hingga akhirnya ia menjadi anggota/wakil ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada jabatan-jabatan itulah Soeroso sangat dekat dengan Sukarno dan Hatta, dan atas pengalamannya yang luas dan sifatnya yang nasionalistis kuat itu, Soeroso ditunjuk menjabat gubernur pertama untuk Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur Soetardjo Kartohadikoesoemo (Provinsi Jawa Barat) adalah seorang priayi Jawa. Ia lulusan OSVIA yang merintis karier sebagai aparatur birokrasi kolonial, namun yang penting adalah bahwa Soetardjo ketua organisasi Boedi Oetomo di Magelang (1909–11), ia kemudian menjadi anggota Volksraad, tidak hanya sebagai anggota biasa melainkan sebagai anggota Badan Pekerja Dewan Rakyat (College van Gelegerde Volksraad). Pada era kekuasaan Jepang Soetardjo tetap menduduki berbagai jabatan strategis, yang kemudian membuatnya dekat dengan Sukarno dan Hatta sehingga tidak mengherankan jika ia dipercaya menjadi gubernur Jawa Barat yang pertama. Penunjukan Soetardjo terutama karena pengalamannya yang luas di bidang kepomongprajaan.
4. Gubernur Pangeran Mohammad Noor (Provinsi Kalimantan) adalah seorang bangsawan Banjar, kelahiran Martapura pada 1901, dan memiliki riwayat pendidikan yang baik. Lulusan Technische Hoogeschool di Bandung, Pangeran Mohammad Noor bertemu dengan pemuda-pemuda pergerakan dan terutama berteman dengan Ir. Sukarno, teman sekolahnya di THS. Dialog

tentang nasionalisme dan wujud negara yang diinginkan, sebagai negara merdeka, sudah dirintisnya sejak 1917 di Bandung. Atas bekal dan kualitas pribadinya sebagai orang Kalimantan pertama yang bergelar Sarjana ia ditunjuk sebagai gubernur pertama Provinsi Kalimantan.

5. Gubernur Mr. I Gusti Ketut Pudja (Provinsi Bali) adalah bangsawan Bali dari Buleleng. Puri Sukasada, tempat asalnya, merupakan salah satu puri tempat asal intelektual modern dan antifeodal di Bali. I Gusti Ketut Pudja adalah orang Bali pertama yang bergelar Meester in de Rechten atau Sarjana Hukum. Atas dasar itu ia ditunjuk mewakili Bali di BPUPKI dan PPKI, kemudian sebagai gubernur Bali yang pertama.
6. Gubernur Mr. J. Latuharhary (Provinsi Maluku), seorang Meester in de Rechten, lulusan Universitas Leiden, Negeri Belanda, ini menguasai banyak bahasa asing—Belanda, Inggris, Jerman, dan Perancis. Ketika kuliah di Leiden pada 1920-an, ia berteman baik dengan Soebardjo, A. A. Maramis, Nasir Datuk Pamuntjak, Soetomo, J. B. Sitanala Sukiman, Mohammad Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, dan lain-lain. Pertemanan itulah yang membentuk kepribadiannya dan kesadaran nasionalnya. Sekembali di Tanah Air (1927), ia nyaris tidak pernah berhenti berjuang dalam berbagai cara untuk mencapai Indonesia merdeka hingga akhirnya ia ditunjuk sebagai gubernur Maluku pertama.
7. Gubernur Dr. G. S. S. J. Ratulangi (Provinsi Sulawesi), lahir di Tomohon pada 1890, Doktor dalam bidang ilmu pasti dan alam dari Swiss. Sejak di Eropa ia terkenal sangat berpandangan nonkooperatif; pada 1927 menjadi anggota Volksraad, dan pada masa kekuasaan Jepang ia tidak termasuk sebagai anggota BPUPKI namun sangat aktif mengikuti sidang-sidang PPPKI, hingga kemudian ia ditunjuk menjadi gubernur pertama di Sulawesi.
8. Gubernur Mr. Teuku Mohammad Hasan (Provinsi Sumatera), lahir di Pidie pada 1906; ayahnya seorang hulubalang yang sangat berkuasa di wilayah Pineung, sedangkan ibunya, Cut Manyak,

adalah putri hulubalang di wilayah Keumangan, Pidie. Karena lahir dari keluarga hulubalang, Hasan diterima di berbagai sekolah bagi kalangan bangsawan, dan semua di lalukannya dengan sangat baik. Hasan dilantik sebagai Gubernur Sumatera yang pertama pada 29 September 1945.

Kisah perjalanan sejarah delapan gubernur pertama Republik Indonesia dapat menjadi pelajaran yang sangat berguna setidaknya dalam tiga hal. Pertama, kualitas pribadi seseorang sangat menentukan dalam pengangkatan pejabat dalam birokrasi pemerintahan. Kedua, ketokohan seseorang yang berpredikat pemimpin seperti yang ditunjukkan oleh delapan orang gubernur pertama tersebut tidak mengalami degradasi karena mereka bekerja dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai gubernur dilandasi oleh sebuah tanggung jawab moral yang tinggi tanpa pamrih. Ketiga, delapan gubernur tersebut adalah gubernur Republik Indonesia, milik masyarakat wilayahnya, bukan gubernur milik partai dan golongan.

Semoga kisah perjuangan dan pengabdian mereka menjadi contoh bagi para gubernur dan aparatur negara masa kini dan masa yang akan datang.

**Mukhlis PaEni**

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

Maklumat No. 1 Pemerintah Provinsi Maluku, 25 November 1945.

Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1952.

*Staatsblad* NIT No. 15 tahun 1948.

*Staatsblad* No. 524 tahun 1921.

Tulisan Soeripno di dalam Rumah Penjara Solo sebelum dia dihukum mati pada 1948, tulisan ini disadur oleh Djamal Marsudi dari tulisan tangan Soeripno, Arsip Nasional Republik Indonesia.

### Buku

A. A. G. N. Ari Dwipayana, *Kelas dan Kasta: Pergulatan Kelas Menengah Bali*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2001.

A. A. M. Djelantik. *The Birthmark: Memoirs of a Balinese Prince*. Hong Kong: Periplus, 1997.

A. B. Lopian dan P. J. Droglever. *Menelusuri Jalur Linggarjati*. Jakarta: PT Temprint, 1992.

A. H. Nasution. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Bandung: Penerbit Angkasa, 1978.

Ahmad Gafuri. *Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan 1945-1949*. Kandangan: Departemen Penerangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 1984.

Anak Agung Bagus Wirawan. *Pusaran Revolusi Revolusi Indonesia di Sunda Kecil 1945-1950*. Denpasar: Udayana University Press, 2012.

- Anak Agung Gde Agung. *From the Formation of the State of East Indonesia towards the Establishment of the United States of Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995).
- Anak Agung Gde Putra Agung. *Peralihan Sistem Birokrasi dari Tradisional ke Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Anderson, Benedict. *Java in a Time of Revolution*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1972.
- Azyumardi Azra. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad Ke-17 dan 18*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Bernarda Materay. *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: KPG, 2014.
- Des Alwi. *Pertempuran Surabaya November 1945*. Jakarta, PT. Buana Ilmu Populer, 2012.
- Edy Burhan Arifin. "Pemberontakan Tentara Peta di Blitar: Sebuah Kesaksian Sejarah." dalam Purbo S. Suwondo (ed.), *PETA: Tentara Sukarela Pembela Tanah Air*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1996.
- Grant, Lachlan. *Australian Soldiers in Asia-Pacific in World War II*. Sydney: New South Publishing, 2014.
- H.N., Irna dan Hadi Soewito. *Rakyat Jawa Timur Mempertahankan Kemerdekaan (Bagian I)*. Jakarta: Grasindo, 1994.
- Hassan Basry. *Kisah Gerilya di Kalimantan Periode Tahun 1945–1949*, Jilid I. Banjarmasin: Yayasan Bhakti Banua, 2003.
- Hendi Jo. *Zaman Perang: Orang-orang Biasa dalam Sejarah Luar Biasa*. Yogyakarta: Mata Padi, 2015.
- Himpunan Risalah Sidang-Sidang*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1999.
- I Ketut Ardhana. "Balinese Puri in Historical Perspective: The Role of Puri Satria and Puri Pamacutan in Social and Political

Changes in Badung, South Bali 1906–1950,” Tesis M.A. Desember 1993.

I Made Pageh. *Konteks Lampah Mr. I Gusti Ketut Pudja 1908–2010: Kepahlawanan dan Perjuangan Sejarah Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan, MSI Cabang Buleleng, Universitas Negeri Pendidikan Ganesha Singaraja, dan Pemerintah Daerah Buleleng, 2011.

I Nyoman Pendet. *Bali Berjuang* Cet. III. Denpasar: Sarad dan Pustaka Larasan, 2008.

I. O. Nanulalitta. *Johannes Latuharhary, S.H.: Hasil Karya dan Pengabdianannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982/1983.

Ida Anak Agung Gde Agung. *Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.

\_\_\_\_\_. *Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman Pendudukan Jepang di Bali*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Kementerian Penerangan RI. *Republik Indonesia: Propinsi Jawa Timur*. Malang: Kementerian Penerangan, 1953.

Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan*. Jakarta: Kementerian Penerangan, 1952.

Kolonel H. Hassan Basry. *Kisah Gerilya Kalimantan*. Banjarmasin: Yayasan Lembu Mangkurat, 1961.

Lihat Rudolf Mrázek. *Sjahirir: Politics and Exile in Indonesia*. New York: Cornell Southeast Asia Program.

Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya, Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.



- M. P. B. Manus, dkk. *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.
- Maskury, Dr. *Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1973.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto (ed.). *Sejarah Nasional Indonesia* Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Mc Millan, Richard. *The British Occupation of Indonesia 1945-1946*. London and New York: Routledge, 2005.
- Multatuli. *Max Havelaar*. Jakarta: Djambatan, 1977.
- Noor. *Teruskan . . . Gawi Kita Balum Tuntung*. Banjarmasin: Badan Penggerak Pembina Potensi Angkatan 45 dan Dewan Harian Daerah Angkatan 45 Kalimantan Selatan, 1981.
- Nugroho Notosusanto. *Pertempuran Surabaya*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 1985.
- Onghokham. *Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Palmos, Frank., *Surabaya 1945, Sakral Tanahku*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2016.
- Pramoedya Ananta Toer dkk. *Kronik Revolusi Indonesia*, Jilid 1. Jakarta: KPG, Ikapi, Ford Foundation, 1999.
- Purbo S Suwondo. (ed), *PETA, Tentara Sukarela Pembela Tanah Air*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1996.
- R. Z. Leirissa. *Maluku dalam Perjuangan Nasional Indonesia*. Jakarta: Lembaga Sejarah Universitas Indonesia, 1975.
- Raliby, Osman. *Documenta Historica: Sejarah Dokumenter dari Pertumbuhan dan Perjuangan Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bulang Bintang, 1953.

- Ricklefs, M. C. *A History of Modern Indonesia Since c.1300*., California: Stanford University Press, 1993.
- Ricklefs, M. C. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: UGM Press, 2011.
- Rika Umar, Mr. *I Gusti Ketut Pudja: Riwayat Hidup dan Pengabdiannya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1986.
- Robinson, Geoffrey. *The Dark Side: Political Violence in Bali*. Ithaca and London: Cornell University Press, 1995.
- Saafroedin Bahar, dkk. (ed.). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945–19 Agustus 1945*, Edisi II, Cetakan 4. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1993.
- Sartono Kartodirdjo dkk. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976.
- Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.
- Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Bali*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/ 1978.
- Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.
- Sejarah Perlawanan terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bali*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983/1984.
- Sekretariat Negara RI. *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*. Jakarta, 1998.
- Subardjo Djojoadisurjo. *Kesadaran Nasional: Sebuah Otobiografi*. Jakarta; Gunung Agung, 1978.

- Suhario Padmowirio. *Memoar Hario Kecil*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Suhario Padmowirio. *Pemikiran Militer I Sepanjang Masa Bangsa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Suriani. *Pasukan MN 1001/MTKI*. Banjarbaru: PT Grafika Wangi Kalimantan, 2015.
- Sutherland, Heather. *The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi*. Singapura: Heinemann Educational Books 1979.
- Sutjiatiningsih. *Pahlawan Nasional Gubernur Suryo*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.
- Suwarti Kartiwa. *Sekilas Budaya Kalimantan*. Jakarta: t.p., 1977.
- T. M. Hasan. *Gubernur Sumatera, Dari Aceh ke Pemersatu Bangsa: Memoir Mr. Teuku Moehammad Hasan*. Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 1999.
- Udayana P. Tisna. *Pahlawan Nasional: Patih Jelantik, Seorang Ksatria Buleleng*. Jakarta: Grafiti, 1996).
- Vickers, Adrian. *Bali: A Paradise Created* Edisi II. Singapura: Tuttle, 2012.
- W. S. T Pondaag. *Pahlawan Kemerdekaan Nasional Mahaputera Dr. G. S. S. J. Ratulangi*. Surabaya: Jajasan Penerbitan Dr. G. S. S. J. Ratulangi, 1966.
- Wajidi. *Revolusi Kemerdekaan di Kalimantan Selatan 1945–1949*. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Wehl, Davis. *The Birth of Indonesia*. London, Allen and Unwins, 1948.

**Surat Kabar dan Jurnal:**

*Berita Indonesia*, 22 Oktober 1945.

*De Express*, 13 Juni 1913.

*De Express*, 13 Juni 1913.

*Het Dagblad*, 17 Juni 1946.

*Merdeka*, 1 Maret 1953.

*Merdeka*, 1 Maret 1953.

*Merdeka*, 9 Oktober 1945

*Merdeka*, Maret 1953.

*Sinar Maloekoe*, 1932.

*Soeara Kalimantan*, 26 Mei 1948.

*Surabaya Post*, 30 Oktober 1973.

*Surabaya Post*, 30 Oktober 1973.

*Indonesia* Volume 20, Oktober 1975.

J. G. A. Parrots, "Who Killed Brigadier Mallaby?" *Indonesia*, Vol. 20, Oktober 1975

*Haloean*, September 1929.

*Berita Indonesia*, 9 September 1946.

*Berita Indonesia*, 24–28 April 1947.

*De Locomotief*, 24 April 1948.

## **Wawancara**

Donny Ariotejo (Cucu R.M.T.A. Soerjo), Jakarta, 1 Februari 2017.

Johan Saimima, (Sejarawan Maluku), Jakarta, 10 Maret 2017.

Kasmijo, (Penduduk Magetan), Magetan, 21 Oktober 2017.

Kasmijo, Magetan, 21 Oktober 2017.

Trisno (Penduduk Bangunrejo Lor), Ngawi, 20 Oktober 2017.

Witjaksono (Cucu R.M.T.A. Soerjo), Yogyakarta, 20 Oktober 2017.

Witjaksono, Yogyakarta, 20 Oktober 2017.

I Gusti Made Arinta Pudja (putra kedua I Gusti Ketut Pudja), Jakarta, 23 November 2017.

## **Internet**

<http://historia.id/persona/hendrick-arnold-koroh-pejuang-dari-timor>, Minggu, 16 Agustus 2015.

<http://jemituati.blogspot.ca/2010/10/riwayat-hidup-singkat-dan-perjuangan.html>, diakses 20 Desember 2017.

<http://taufiqna99.blogspot.ca/2012/12/sejarah-psht.html>, diakses 25 November 2017.

<http://www.paulscholten.eu/research/article/paul-scholten-and-the-founding-of-the-batavia-rechtshogeschool/> diakses 10 Oktober 2017.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Battle\\_of\\_Singapore](https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Singapore), diakses 12 Desember 2017.

[https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch\\_East\\_Indies\\_campaign#cite\\_note-12](https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_Indies_campaign#cite_note-12) diakses pada 12 Desember 2017.

[https://en.wikipedia.org/wiki/HNLMS\\_Abraham\\_Crijnsen\\_\(1936\)](https://en.wikipedia.org/wiki/HNLMS_Abraham_Crijnsen_(1936))

[https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific War](https://en.wikipedia.org/wiki/Pacific_War) dan  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Battle of Tarakan \(1942\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Tarakan_(1942)),  
diakses 12 Desember 2017.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Joesoef Ronodipoero](https://id.wikipedia.org/wiki/Joesoef_Ronodipoero), diakses 15  
Desember 2017.

<https://www.facebook.com/283030768421994/photos/a.621134547944946.1073741825.283030768421994/987200781338319>

<https://www.facebook.com/suarabalisayaindonesia/posts/273899822944239>

<https://www.facebook.com/suarabalisayaindonesia/posts/273899822944239>

<https://www.facebook.com/suarabalisayaindonesia/posts/273899822944239>

Kesaksian Lani Ratulangi, anak Ratulangi yang pada saat kejadian  
berumur 13 tahun  
<https://lanisphotoblog.wordpress.com/2010/05/23/serui-1946-dalam-kenangan/>

Waliji, "Pasukan MN 1001/MTKI,"  
<https://bubuhanbanjar.wordpress.com> (akses: 15 Desember  
2009).



## **BIODATA PENULIS**

### **Andi Lili Evita**

Lahir di Sinjai, 11 Januari 1990. Menyelesaikan gelar sarjananya pada Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Hasanudin. Melanjutkan program magister pada Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia. Pernah menjabat sebagai asisten dosen pada Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Hasanuddin. Pernah tergabung dalam Anggota Tim Peneliti Sejarah Boeven Digoel LP2M Unhas.

### **Helen**

Lahir di Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, pada 12 Juni 1986. Menamatkan pendidikan formalnya (SD, SMP, dan SMA) di kota kelahirannya. Semenjak sekolah dasar, ia tertarik pada seni menggambar dan bercita - cita menjadi desainer. Namun, orangtuanya tidak merestunya. Akhirnya ia memilih menjadi guru. Setelah tamat SMA (2004), ia melanjutkan sekolah ke FKIP - Sejarah Universitas Riau. Dari sinilah perkenalannya pada sejarah sebagai ilmu menjadi cinta pada sejarah. Pada 2008, ia menyelesaikan sarjana pendidikannya dan mulai mengajar di SMP. Kemudian pada 2009, ia melanjutkan studinya pada Program Pasca Sarjana dengan spesialisasi Ilmu Sejarah di Universitas Gadjah Mada. Ia banyak terlibat dalam penelitian sejarah, khususnya sejarah lokal. Mulai aktif mengajar di salah satu kampus negeri yang ada di Riau setelah menyelesaikan studi S2-nya.

### **Hendi Johari**

Sejak 1999, Hendi Jo sudah aktif sebagai jurnalis pada sejumlah media di Jakarta. Tahun 2005, ia memutuskan untuk mendalami dunia sejarah kontemporer Indonesia (terutama fase revolusi kemerdekaan 1945-1949) hingga kini. Selain dalam bukunya, *Zaman Perang* (2015) dan *Orang-Orang di Garis Depan* (sedang dalam proses



cetak) tulisan lelaki kelahiran Cianjur 42 tahun lalu itu juga tersebar di *Intisari*, *Pikiran Rakyat*, *Reader Digest Indonesia*, *Koran Sindo*, *Historia*, *Kompas* dan beberapa media online. Di samping menulis, Hendi Jo juga aktif sebagai narasumber serta host di beberapa acara bertajuk sejarah seperti *Melawan Lupa* (Metro TV) dan *Indonesia Mengingat* (TV One). Dunia film pun ia masuki dengan keterlibatannya sebagai penulis skenario untuk film dokumenter *Bocah Perang* (berkisah tentang para kombatan cilik dalam era Perang Kemerdekaan) dan konsultan sejarah untuk film layar lebar *Moonrise Over Egypt* (kisah perjuangan diplomatik Haji Agus Salim dan kawan-kawan di Mesir) Saat ini keseharian Hendi Jo adalah sebagai redaktur di *Historia*, majalah sejarah pertama di Indonesia dan peneliti di *Historika Indonesia*. Untuk korespondensi, ia dapat dihubungi via surel: [hazkalah@gmail.com](mailto:hazkalah@gmail.com)

### **I Gusti Agung Ayu Ratih**

Lahir di Denpasar, Bali. Ia menyelesaikan program sarjananya di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang) pada 1989. Ia sempat menjadi dosen di jurusan Bahasa Inggris FKIP Unika Widya Mandala Surabaya sebelum melanjutkan studi S2-nya ke University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat. Pada 1997 ia mendapatkan gelar Master of Arts untuk Studi Asia Tenggara dengan tekanan pada bidang sejarah dan sastra perbandingan. Bersama dengan sejumlah sejarawan seperti Hilmar Farid, John Roosa, dan Razif, ia mendirikan lembaga riset, perpustakaan, dan dokumentasi sejarah lisan Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) di Jakarta pada 2003. Ia menulis sejumlah esai dan artikel tentang masalah sejarah, perempuan, dan kebudayaan di berbagai jurnal, media massa, dan bab buku. Sejak 2014 ia kembali menjadi mahasiswa pascasarjana di bidang sejarah, memori, dan geografi dalam Program Studi Interdisipliner di University of British Columbia, Vancouver, Kanada. Ia sedang menulis disertasi tentang perempuan dan ruang sosial di masa dekolonisasi dan pematangan Republik Indonesia.

### **Linda Sunarti**

Lahir di Bekasi, 7 Januari 1970. Dosen Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia yang mempunyai perhatian terhadap sejarah Asia Tenggara (khususnya Malaysia) dan sejarah diplomasi. Mulai mengajar di Jurusan Sejarah sejak tahun 1995. Untuk korespondensi, dapat menghubungi via surel:

### **Martin Sitompul**

Lahir di Medan, 30 Maret 1991. Jurnalis majalah Historia. Alumnus Universitas Indonesia, program studi Ilmu Sejarah. Korespondensi melalui [surel:martinoztompul@gmail.com](mailto:surel:martinoztompul@gmail.com).

### **Raisa Kamila**

lahir di Banda Aceh pada tanggal 15 Mei 1991. Ia menyelesaikan pendidikan tinggi di Fakultas Filsafat UGM lalu melanjutkan studi ke disiplin sejarah melalui skema Encompass-COSMOPOLIS pada tahun 2015. Raisa memperoleh gelar MA in Colonial and Global History pada tahun 2017 dan saat ini berdomisili di Aceh.

### **Taufik Ahmad**

Lahir di Cenrana, Bone, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan pendidikan dasar di tanah kelahirannya. Melanjutkan pendidikan menengah selama enam tahun di Pondok Pesantren As'adiyah Sengkang, Wajo. Pada tahun 2000 menyelesaikan studi pada Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, dan tahun 2009 menyelesaikan studi program Magister ilmu Sejarah Universitas Hasanuddin. Pada *congloe* (2009), *South Sulawesi: The Military, Prison Camps and Forced* tahun 2011 terangkat sebagai staf peneliti Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. Sekarang sedang menempuh Studi Program Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Beberapa karya yang telah diterbitkan dalam bentuk buku dan jurnal, antara lain; *Kamp Pengasingan MonLabour* (2012), *Genealogi Konflik Agraria di Polongbengkeng, Takalar, Sulawesi Selatan* (2014). Dapat dihubungi melalui emali [taufik\\_mukarrama@yahoo.com](mailto:taufik_mukarrama@yahoo.com)

# GUBERNUR PERTAMA DI INDONESIA

Buku ini membahas peranan delapan gubernur pertama Republik Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Mereka adalah Teuku Mohammad Hasan (Sumatra), Soetardjo Kartohadikoesoemo (Jawa Barat), Raden Pandji Soeroso (Jawa Tengah), Raden Mas Soerjo (Jawa Timur), Pangeran M. Noor (Kalimantan), I Gusti Ketut Pudja (Sunda Kecil), G.S.S.J Ratulangi (Sulawesi) dan Johannes Latuharhary (Maluku).

Buku ini beranjak dari suatu gagasan untuk melihat kiprah para Gubernur sebagai pemimpin daerah di tengah kecamuk revolusi yang hendak meletakkan dasar yang sehat bagi negara Indonesia merdeka. Para Gubernur ini menghadapi beragam persoalan dengan segala kompleksitas daerah masing-masing. Mereka tidak hanya dituntut untuk melawan kepentingan Belanda yang ingin menancapkan kembali kekuasaannya dan memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia mempertahankan proklamasi kemerdekaan. Mereka juga mesti berhadapan dengan otoritas regional yang saling berkontestasi dan berebut pengaruh. Para Gubernur pertama ini secara nyata menghadapi penetrasi NICA di berbagai tempat di seluruh Nusantara. Bahkan, tidak jarang juga mereka menghadapi penolakan-penolakan dari kelompok sosial tertentu yang masih menginginkan kehadiran Belanda.

Membaca kiprah gubernur-gubernur pertama dengan segala persoalan yang dihadapinya, dan sejumlah gagasan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut, menyadarkan kita betapa periode ini dipenuhi tantangan dan rintangan. Menjadi Gubernur pada periode revolusi berarti siap-sedia merelakan kehidupan pribadi, mengorbankan jiwa dan raga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan permenungan bagi kita semua serta generasi muda bahwa dalam sejarah Indonesia, pemimpin yang berkarakter dapat lahir dari situasi yang sulit, penuh tantangan dan rintangan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

ISBN 978-602-1289-72-3



TIDAK UNTUK DIJUAL